SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP3K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
14. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat WP3K adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut dan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
15. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

18. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
19. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
20. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
21. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
22. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya WKOPP adalah wilayah untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan.
25. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
26. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

27. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
29. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
30. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
31. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
32. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
33. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

34. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
35. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
36. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
37. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
38. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
39. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut dan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

40. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
41. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
42. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
43. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
44. Daya Dukung WP3K adalah kemampuan WP3K untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
45. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
46. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela.

47. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
48. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
49. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
50. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
52. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

53. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
54. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
55. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
56. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
57. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
58. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang PWP3K dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
60. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.

61. Polisi Khusus PWP3K, yang selanjutnya disebut Polsus, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 2

(1) Jangka waktu RZWP3K adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali RZWP3K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
    c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
(4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

RZWP3K berfungsi:

a. sebagai instrumen kebijakan penataan ruang WP3K yang serasi, selaras, dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan rencana aksi WP3K;
d. sebagai instrumen penataan ruang di wilayah perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil;
e. memberikan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di WP3K;
f. sebagai dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. sebagai acuan dalam penyelesaian konflik di perairan WP3K;
h. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan WP3K; dan
i. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Wilayah Perencanaan;
b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi;
c. Rencana Alokasi Ruang;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
e. Indikasi Program;
f. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil;
g. Pengawasan dan Pengendalian;
h. Mitigasi Bencana;
i. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat;
j. Pemberdayaan Masyarakat;
k. Penyelesaian Sengketa;
l. Gugatan Perwakilan;
m. Koordinasi Pelaksanaan;

n. Ketentuan Penyidikan;
o. Ketentuan Peralihan;
p. Ketentuan Lain-lain;
q. Kelembagaan; dan
r. Ketentuan Penutup.

BAB II
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan RZWP3K meliputi:
    a. wilayah pesisir ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
    b. wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.
(3) Struktur dan pola ruang daratan WP3K mengacu dan mengikat pada ketentuan dalam RTRW Provinsi.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Tujuan PWP3K Provinsi Sumatera Utara meliputi:

a. tujuan pembangunan lingkungan : merehabilitasi, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

b. tujuan pembangunan sosial : meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. tujuan pembangunan ekonomi : mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan serta berkeadilan untuk membangun industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan yang berwawasan lingkungan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.
d. tujuan pembangunan administratif : tersusunnya panduan rencana pengelolaan sumberdaya WP3K secara terpadu untuk meminimalkan benturan antar sektor.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Paragraf 1
Kebijakan

Pasal 7

(1) Kebijakan PWP3K Provinsi Sumatera Utara meliputi:
    a. Kebijakan umum; dan
    b. Kebijakan khusus.
(2) Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. mengintegrasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan yang terpadu dan berkelanjutan; dan
    b. pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi, dan saling berkaitan antar wilayah kabupaten/kota.

(3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pembangunan ekonomi secara optimal dan efisien yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
c. mendorong kegiatan konservasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan kawasan pesisir yang aman dan terkendali;
e. pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat;
f. pengembangan teknologi industri perikanan, pariwisata, dan industri non perikanan yang ramah lingkungan; dan
g. mendorong konektivitas antar pulau-pulau kecil.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 8

(1) Strategi pengelolaan WP3K Provinsi Sumatera Utara, meliputi:

a. strategi dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat;
b. strategi dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. strategi dalam pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA);
d. strategi dalam peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan;

e. strategi dalam peningkatan efektivitas fungsi dan kelembagaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan;
f. strategi dalam pentaatan dan penegakan hukum;
g. strategi dalam penyusunan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
h. strategi dalam melindungi sumberdaya ikan dan terumbu karang;
i. strategi dalam konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove;
j. strategi dalam pengendalian limbah domestik dan limbah industri;
k. strategi dalam pengendalian sedimentasi perairan pantai;
l. strategi dalam pengembangan obyek wisata bahari yang ramah lingkungan dan berciri lokal;
m. strategi dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi antar pulau kecil;
n. strategi dalam reboisasi WP3K;
o. strategi dalam modernisasi usaha perikanan tangkap dan peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan; dan
p. strategi dalam pengembangan Minapolitan.

(2) Strategi dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
a. pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar sesuai rasio standar pendidikan;
b. pengembangan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi ekosistem pesisir dan laut dan dampak pola hidup ekstraktif;

d. pengintegrasian pengetahuan ekosistem pesisir dan laut dalam kurikulum Sekolah Dasar;
e. pengembangan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan; dan
f. peningkatan kualitas dan kuantitas staf yang berkompeten pada lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan.

(3) Strategi dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas);
b. pengembangan sarana informasi Desa;
c. pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; dan
d. implementasi rencana pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat secara terpadu.

(4) Strategi dalam pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
a. pengembangan MPA berbasis sumberdaya alam lokal;
b. program pelatihan teknologi penangkapan ikan, teknologi budidaya laut, budidaya air payau dan teknologi pengolahan produk perikanan (pasca panen) bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga riset perikanan, dan Perguruan Tinggi;
c. pembentukan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran hasil produksi;
d. pengembangan koperasi nelayan; dan
e. bantuan kredit bagi usaha mikro dan kecil.

(5) Strategi dalam peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
   a. pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan;
   b. pengembangan sistem perkreditan usaha perikanan yang sederhana; dan
   c. pengembangan lembaga pemasaran produk perikanan.

(6) Strategi dalam peningkatan efektivitas fungsi dan kelembagaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
   a. penguatan sistem Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan dan pendukung melalui pengadaan sarana dan prasarana pengawasan;
   b. peningkatan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan; dan
   c. meningkatkan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pokmas Pengawas.

(7) Strategi dalam pentaatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui:
   a. sosialisasi dan penyuluhan tentang zona pemanfaatan, zona perlindungan dan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan;
   b. pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat; dan
   c. peningkatan program penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan maupun non pemerintahan.

(8) Strategi dalam penyusunan tata ruang pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana zonasi WP3K;

b. sosialisasi rencana zonasi WP3K; dan
c. penerbitan Peraturan Daerah tentang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara.

(9) Strategi dalam melindungi sumberdaya ikan dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan melalui:
a. pengembangan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat;
b. penyusunan kebijakan dalam rangka mencegah illegal fishing;
c. pengembangan kawasan untuk perlindungan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
d. pengembangan program penyuluhan kesadaran hukum masyarakat.

(10) Strategi dalam konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilaksanakan melalui:
a. pengembangan program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove di wilayah pesisir;
b. penguatan kelembagaan konservasi di desa pantai dengan prinsip konservasi berbasis masyarakat; dan
c. pengaturan periode penangkapan ikan di lokasi rehabilitasi mangrove melalui kegiatan penyuluhan.

(11) Strategi dalam pengendalian limbah domestik dan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan melalui:
a. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di WP3K;
b. pengembangan kegiatan Jum'at Bersih di wilayah pantai;
c. pengembangan pusat pengolahan sampah organik dan non organik;
d. penetapan peraturan kewajiban membuat Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) bagi setiap industri;

e. penetapan peraturan kewajiban membuat dokumen paya pemantauan dan pengelolaan lingkungan; dan
f. pengembangan peraturan *zero waste* melalui sistem daur ulang.

(12) Strategi dalam pengendalian sedimentasi perairan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilaksanakan melalui:
a. peningkatan pengawasan penebangan hutan secara ilegal;
b. peningkatan pengawasan penggalian pasir dari badan sungai dan pantai;
c. pengembangan program penghijauan di sepanjang Daerah Aliran Sungai; dan
d. pengembangan pola pertanian berwawasan lingkungan (konservasi tanah dan air) di kawasan Daerah Aliran Sungai.

(13) Strategi dalam pengembangan obyek wisata bahari yang ramah lingkungan dan berciri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilaksanakan melalui:
a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari;
b. promosi dan pemberian insentif bagi investor wisata bahari;
c. pengembangan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat;
d. pengembangan pusat informasi dan promosi wisata bahari;
e. penyusunan dan pengembangan basis data dan jaringan informasi wisata bahari; dan
f. penyusunan master plan pengembangan wisata bahari dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di setiap Kabupaten/Kota.

(14) Strategi dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi antar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilaksanakan melalui:
   a. pengadaan kapal penyeberangan antara pulau dan prasarana dermaga secara bertahap yang dikelola Pemerintah Provinsi; dan
   b. pengembangan fasilitas wisata bahari di pulau-pulau kecil.

(15) Strategi dalam reboisasi WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilaksanakan melalui:
   a. pelaksanaan kegiatan penghijauan pantai secara berkala oleh Pemerintah Provinsi;
   b. peningkatan kegiatan penyuluhan sadar lingkungan bagi masyarakat pesisir; dan
   c. pengendalian pembangunan di sepanjang sabuk hijau dan pelarangan penambangan pasir pantai.

(16) Strategi dalam modernisasi usaha perikanan tangkap dan peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilaksanakan melalui:
   a. motorisasi kapal ikan tradisional dan pengadaan kapal motor tempel;
   b. penyediaan permodalan melalui lembaga keuangan pemerintah; dan
   c. pengembangan program pelatihan teknologi penangkapan ikan.

(17) Strategi dalam pengembangan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, dilaksanakan melalui:
   a. kebijakan pemberian izin usaha budidaya air payau dan budidaya laut sesuai dengan program Minapolitan;
   b. pengembangan program kredit usaha budidaya air payau dan laut dengan suku bunga rendah;

c. pengembangan komoditi budidaya air payau dan laut bernilai ekspor melalui penerapan teknologi pembenihan, proses produksi dan teknologi pasca panen yang ramah lingkungan; dan
d. pengembangan program di bidang perikanan tangkap.

BAB IV

RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Rencana alokasi ruang WP3K meliputi:
a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi;
c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
d. Alur Laut.
(2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. zona pariwisata;
b. zona pelabuhan;
c. zona pertambangan;
d. zona perikanan tangkap;
e. zona perikanan budidaya;
f. zona pergaraman; dan
g. zona industri.
(3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dikategorikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
(4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara dan pengendalian lingkungan hidup.
(5) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemanfaatan untuk:
a. alur pelayaran; dan
b. pipa/kabel bawah laut.

(6) Rencana alokasi ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Rencana alokasi ruang yang digambarkan dalam peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjukkan dengan kode kawasan ruang.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Zona Pariwisata

Pasal 10

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabarkan dalam sub zona:

a. wisata alam bentang laut; dan
b. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

Sub zona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, tersebar di:

a. Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terletak di perairan Kecamatan Pinang Sori, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-12/KPU-W-BL-01.
b. Kabupaten Mandailing Natal, yang terletak di perairan Kecamatan Natal, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-15/KPU-W-BL-02.
c. Kabupaten Nias Utara, yang terletak di perairan:
    1. Kecamatan Lahewa, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-16/KPU-W-BL-03; dan
    2. Kecamatan Afulu, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-17/KPU-W-BL-04.

d. Kabupaten Nias, yang terletak di perairan Kecamatan Bawolato, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-29/KPU-W-BL-05.
e. Kabupaten Nias Barat, yang terletak di Kecamatan Sirombu dan Kecamatan Mandrehe Barat, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-32/KPU-W-BL-06.
f. Kabupaten Nias Selatan, yang terletak di perairan:
    1. Kecamatan Lolowau, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-34/KPU-W-BL-07;
    2. Kecamatan Hibala, dengan kode zona/sub zona:
        a) KPU-W-38/KPU-W-BL-08; dan
        b) KPU-W-39/KPU-W-BL-09.

Pasal 12

Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, tersebar di:

a. Kabupaten Langkat, terletak di perairan Kecamatan Pangkalan Susu, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-01/KPU-W-P3K-01.
b. Kabupaten Deli Serdang, meliputi:
    1. Perairan Kecamatan Pantai Labu, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-02/KPU-W-P3K-02; dan
    2. Perairan Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-03/KPU-W/P3K-03.
c. Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi:
    1. Perairan Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Perbaungan, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-04/KPU-W-P3K-04;
    2. Perairan Kecamatan Pantai Cermin, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-05/KPU-W-P3K-05.
    3. Perairan Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Pantai Cermin, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-06/KPU-W-P3K-06.
    4. Perairan Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Tanjung Beringin, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-07/KPU-W-P3K-07.

d. Kabupaten Batubara, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Medang Deras, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-08/KPU-W-P3K-08;
   2. Perairan Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-09/KPU-W-P3K-09; dan
   3. Perairan Tanjung Tiram, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-10/KPU-W-P3K-10.
e. Kabupaten Labuhanbatu, yang terletak di perairan Kecamatan Panai Hilir, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-11/KPU-W-P3K-11.
f. Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi:
   1. perairan Kecamatan Barus, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-13/KPU-W-P3K-12; dan
   2. perairan Kecamatan Sorkam dan Kecamatan Kolang, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-14/KPU-W-P3K-13.
g. Kabupaten Nias Utara, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Afulu, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-18/KPU-W-P3K-14.
   2. Perairan Kecamatan Lahewa, dengan kode zona/sub zona:
      a) KPU-W-19/KPU-W-P3K-15;
      b) KPU-W-22/KPU-W-P3K-18;
      c) KPU-W-25/KPU-W-P3K-21; dan
      d) KPU-W-26/KPU-W-P3K-22.
   3. Perairan Kecamatan Tuhemberua, dengan kode zona/sub zona:
      a) KPU-W-20/KPU-W-P3K-16;
      b) KPU-W-24/KPU-W-P3K-20; dan
      c) KPU-W-27/KPU-W-P3K-23.
   4. Perairan Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Afulu, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-21/KPU-W-P3K-17.
   5. Perairan Kecamatan Sawo, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-23/KPU-W-P3K-19.

h. Kota Gunungsitoli, terletak di perairan Kecamatan Gunungsitoli Utara, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-28/KPU-W-P3K-24.
i. Kabupaten Nias, terletak di perairan Kecamatan Idanogawo, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-30/KPU-W-P3K-25.
j. Kabupaten Nias Barat, terletak di perairan Kecamatan Sirombu, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-31/KPU-W-P3K-26.
k. Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
    1. Perairan Kecamatan Fanayama, dengan kode zona/sub zona: KPU-W-33/KPU-W-P3K-27.
    2. Perairan Kecamatan Hibala, dengan kode zona/sub zona:
        a) KPU-W-35/KPU-W-P3K-28;
        b) KPU-W-36/KPU-W-P3K-29; dan
        c) KPU-W-37/KPU-W-P3K-30.

Pasal 13

Zona dan sub zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Zona Pelabuhan

Pasal 14

(1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dijabarkan dalam sub zona DLKr, DLKp dan WKOPP.
(2) Sub zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:
    a. Kabupaten Langkat, terletak di Kecamatan Pangkalan Susu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-01/KPU-PL-DLK-01.

b. Kabupaten Deli Serdang yang meliputi Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hamparan Perak, serta Kota Medan meliputi Kecamatan Medan Belawan, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-02/KPU-PL-DLK-02.

c. Kabupaten Batubara, terletak di Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Lima Puluh, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-04/KPU-PL-DLK-03.

d. Kabupaten Labuhanbatu Utara, terletak di Kecamatan Kualuh Leidong, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-07/KPU-PL-DLK-04.

e. Kota Sibolga, terletak di Kecamatan Sibolga, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-08/KPU-PL-DLK-05.

f. Kabupaten Mandailing Natal, terletak di Kecamatan Batahan, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-09/KPU-PL-DLK-06.

g. Kota Gunungsitoli, meliputi Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-10/KPU-PL-DLK-07.

h. Kabupaten Nias, terletak di Kecamatan Gido, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-11/KPU-PL-DLK-08.

i. Kabupaten Nias Selatan, meliputi:

1. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-15/KPU-PL-DLK-09; dan
2. Kecamatan Pulau-Pulau Batu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-17/KPU-PL-DLK-10.

(3) Sub zona WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:

a. Kabupaten Serdang Bedagai, terletak di Kecamatan Teluk Mengkudu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-03/KPU-PL-WKO-01.

b. Kabupaten Batubara, terletak Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-05/KPU-PL-WKO-02.

c. Kabupaten Asahan, terletak di Kecamatan Tanjung Balai, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-06/KPU-PL-WKO-03.
d. Kota Medan, terletak di Kecamatan Medan Belawan, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-12/KPU-PL-WKO-04.
e. Kabupaten Nias Barat, terletak di Kecamatan Sirombu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-13/KPU-PL-WKO-05.
f. Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
   1. Kecamatan Teluk Dalam, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-14/KPU-PL-WKO-06; dan
   2. Kecamatan Toma, dengan kode zona/sub zona: KPU-PL-16/KPU-PL-WKO-07.

(4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sub zona DLKr, DLKp dan WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Pertambangan

Pasal 15

(1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan penetapan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Pada sub zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Wilayah Pertahanan berupa RAHLAT.

(3) Dalam sub zona Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan ruang untuk Terminal Khusus (Tersus) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

(4) Sub zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 16

(1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dijabarkan dalam sub zona:
   a. ikan pelagis;
   b. ikan demersal; dan
   c. ikan pelagis dan demersal.

(2) Sub zona ikan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
   a. Kabupaten Langkat, meliputi perairan Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Tanjung Pura, dan Kecamatan Secanggang, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-01/KPU-PT-P-01.
   b. Kabupaten Deli Serdang, meliputi:
      1. Perairan Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Kecamatan Pantai Labu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-05/KPU-PT-P-02; dan
      2. Perairan Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hamparan Perak, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-06/KPU-PT-P-03.

c. Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi :
   1. Perairan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, dan Kecamatan Bandar Khalipah, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-09/KPU-PT-P-04; dan
   2. Perairan Pulau Berhala, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-41/KPU-PT-P-21.
d. Kabupaten Batubara, meliputi perairan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-11/KPU-PT-P-05.
e. Kabupaten Asahan, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Sei Kepayang Timur, dan Kecamatan Kepayang, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-14/KPU-PT-P-06; dan
   2. Perairan Kecamatan Tanjung Balai, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-15/KPU-PT-P-07.
f. Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi perairan Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-19/KPU-PT-P-08.
g. Kabupaten Labuhanbatu, terletak di Kecamatan Panai Hilir, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-21/KPU-PT-P-09.
h. Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi perairan Kecamatan Manduamas, Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Barus, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Kolang, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Pinang Sori, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-24/KPU-PT-P-10.

i. Kabupaten Tapanuli Selatan, terletak di perairan Kecamatan Muara Batang Toru, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-28/KPU-PT-P-11.

j. Kabupaten Mandailing Natal, meliputi perairan Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Natal, dan Kecamatan Batahan, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-29/KPU-PT-P-12.

k. Kabupaten Nias Utara, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, Kecamatan Sawo, Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Sitolu Ori, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-31/KPU-PT-P-13; dan
   2. Perairan Kecamatan Alasa, Kecamatan Afulu dan Kecamatan Tugala Oyo, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-32/KPU-PT-P-14; dan
   3. Perairan Pulau Wunga, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-42/KPU-PT-P-22.

l. Kota Gunungsitoli, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-33/KPU-PT-P-15; dan
   2. Perairan Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-34/KPU-PT-P-16.

m. Kabupaten Nias, meliputi perairan Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo, dan Kecamatan Bawolato, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-35/KPU-PT-P-17.

n. Kabupaten Nias Barat, meliputi perairan Kecamatan Sirombu, Kecamatan Mandrehe Barat, dan Kecamatan Moro'o, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-36/KPU-PT-P-18.

o. Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Lahusa, Kecamatan Toma, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Manimolo, Kecamatan Amandraya, Kecamatan Lalowau, dan Kecamatan Sirombu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-37/KPU-PT-P-19;
   2. Perairan Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dan Kecamatan Hibala, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-38/KPU-PT-P-20; dan
   3. Perairan Kecamatan Pulau Simuk, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-43/KPU-PT-P-23.

(3) Pada sub zona ikan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat RAHLAT yang terletak pada sub zona dengan kode sub zona sebagai berikut:
   a. KPU-PT-15/KPU-PT-P-07;
   b. KPU-PT-21/KPU-PT-P-09; dan
   c. KPU-PT-31/KPU-PT-P-13.

(4) Sub zona ikan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di:
   a. Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi:
      1. Perairan Kecamatan Manduamas, Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Barus Utara, dan Kecamatan Barus, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-25/KPU-PT-D-01;
      2. Perairan Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Sirandorung, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-26/KPU-PT-D-02; dan
      3. Perairan Kecamatan Barus, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-27/KPU-PT-D-03.
   b. Kabupaten Mandailing Natal, terletak di Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, dan Kecamatan Muara Batang Gadis, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-30/KPU-PT-D-04.

c. Kabupaten Nias Barat, terletak di Kecamatan Sirombu dan Kecamatan Mandrehe Barat, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-39/KPU-PT-D-05.

d. Kabupaten Nias Selatan, meliputi perairan Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dan Kecamatan Hibala, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-40/KPU-PT-D-06.

(5) Sub zona ikan pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:

a. Kabupaten Langkat, meliputi:

1. Perairan Kecamatan Babalan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Tanjung Pura, dan Kecamatan Secanggang, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-02/KPU-PT-PD-01;
2. Perairan Kecamatan Brandan Barat dan Kecamatan Babalan, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-03/KPU-PT-PD-02; dan
3. Perairan Kecamatan Pangkalan Susu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-04/KPU-PT-PD-03.

b. Kabupaten Deli Serdang, meliputi:

1. Perairan Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hamparan Perak, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-07/KPU-PT-PD-04; dan
2. Perairan Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Kecamatan Pantai Labu, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-08/KPU-PT-PD-05.

c. Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi perairan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, dan Kecamatan Bandar Khalipah, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-10/KPU-PT-PD-06.

d. Kabupaten Batubara, meliputi:

1. Perairan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, dan Kecamatan Lima Puluh, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-12/KPU-PT-PD-07; dan

2. Perairan Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Talawi dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-13/KPU-PT-PD-08.

e. Kabupaten Asahan, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Silau Laut dan Kecamatan Sei Kepayang, dengan kode zona/sub zona:
      a. KPU-PT-16/KPU-PT-PD-09; dan
      b. KPU-PT-17/KPU-PT-PD-10.
   2. Perairan Kecamatan Tanjung Balai, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-18/KPU-PT-PD-11.

f. Kabupaten Labuhanbatu Utara, terletak di perairan Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-20/KPU-PT-PD-12; dan

g. Kabupaten Labuhanbatu, terletak di perairan Kecamatan Panai Hilir, dengan kode zona/sub zona:
   1. KPU-PT-22/KPU-PT-PD-13; dan
   2. KPU-PT-23/KPU-PT-PD-14.

(6) Pada sub zona ikan pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat Wilayah Pertahanan berupa RAHLAT yang terletak pada sub zona dengan kode sub zona sebagai berikut:
   a. KPU-PT-08/KPU-PT-PD-05;
   b. KPU-PT-13/KPU-PT-PD-08;
   c. KPU-PT-18/KPU-PT-PD-10;
   d. KPU-PT-22/KPU-PT-PD-12; dan
   e. KPU-PT-23/KPU-PT-PD-13.

(7) Kebijakan dan strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Zona dan sub zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 17

(1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dijabarkan menjadi sub zona budidaya laut.

(2) Sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebar di:

a. Kabupaten Langkat, terletak di perairan Kecamatan Pangkalan Susu, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-01/KPU-BD-BL-01.

b. Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi:

1. Perairan Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Bandar Khalipah, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-02/KPU-BD-BL-02;
2. Perairan Kecamatan Pantai Cermin, dengan kode zona/sub zona:
   a) KPU-BD-03/KPU-BD-BL-03; dan
   b) KPU-BD-04/KPU-BD-BL-04.

c. Kabupaten Batubara, terletak di perairan Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-05/KPU-BD-BL-05.

d. Kabupaten Asahan, meliputi:

1. Perairan Kecamatan Silau Laut, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-06/KPU-BD-BL-06; dan
2. Perairan Kecamatan Tanjung Balai, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-07/KPU-BD-BL-07.

e. Kabupaten Labuhanbatu Utara, terletak di perairan Kecamatan Kualuh Leidong, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-08/KPU-BD-BL-08.

f. Kabupaten Labuhanbatu, terletak di perairan Kecamatan Panai Hilir, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-09/KPU-BD-BL-09.

g. Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Manduamas, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-10/KPU-BD-BL-10; dan
   2. Perairan Kecamatan Badiri dan Kecamatan Pinang Sori, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-11/KPU-BD-BL-11.

h. Kabupaten Mandailing Natal, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Batahan, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-12/KPU-BD-BL-12; dan
   2. Perairan Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Natal, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-13/KPU-BD-BL-13.

i. Kabupaten Nias Utara, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Afulu, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-14/KPU-BD-BL-14;
   2. Perairan Kecamatan Tugala Oyo, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-15/KPU-BD-BL-15;
   3. Perairan Kecamatan Lahewa Timur dan Kecamatan Lotu, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-16/KPU-BD-BL-16;
   4. Perairan Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Sitolu Ori, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-17/KPU-BD-BL-17;
   5. Perairan Kecamatan Sawo, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-18/KPU-BD-BL-18;
   6. Perairan Kecamatan Afulu dan Kecamatan Lahewa, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-19/KPU-BD-BL-19; dan
   7. Perairan Kecamatan Lahewa, dengan kode zona/sub zona: KPU-BD-20/KPU-BD-BL-20.

j. Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Hibala, dengan kode zona/sub zona:
      a) KPU-BD-21/KPU-BD-BL-21;
      b) KPU-BD-22/KPU-BD-BL-22;

c) KPU-BD-29/KPU-BD-BL-29;
d) KPU-BD-30/KPU-BD-BL-30;
e) KPU-BD-31/KPU-BD-BL-31; dan
f) KPU-BD-32/KPU-BD-BL-32.

2. Perairan Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dan Kecamatan Hibala, dengan kode zona/sub zona:
a) KPU-BD-23/KPU-BD-BL-23;
b) KPU-BD-25/KPU-BD-BL-25;
c) KPU-BD-27/KPU-BD-BL-27; dan
d) KPU-BD-28/KPU-BD-BL-28.

3. Perairan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dengan kode zona/sub zona:
a) KPU-BD-24/KPU-BD-BL-24; dan
b) KPU-BD-26/KPU-BD-BL-26.

(3) Pada sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Wilayah Pertahanan berupa RAHLAT yang terletak pada sub zona dengan kode sub zona sebagai berikut:
a. KPU-BD-07/KPU-BD-BL-07;
b. KPU-BD-08/KPU-BD-BL-08; dan
c. KPU-BD-09/KPU-BD-BL-09.

(4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana zona dan sub zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Zona Pergaraman

Pasal 18

(1) Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dijabarkan menjadi sub zona garam rakyat.
(2) Sub zona garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan kode zona/sub zona: KPU-GR/KPU-GR-R.
(3) Pada sub zona garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Wilayah Pertahanan berupa RAHLAT.
(4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sub zona garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Zona Industri

Pasal 19

(1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dijabarkan menjadi sub zona:
    a. industri maritim; dan
    b. industri manufaktur.
(2) Sub zona industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di:
    a. Kabupaten Batubara, terletak di Kecamatan Lima Puluh, dengan kode zona/sub zona: KPU-ID-01/KPU-ID-MR-01; dan
    b. Kota Gunungsitoli, terletak di Kecamatan Gunungsitoli Utara, dengan kode zona/sub zona: KPU-ID-03/KPU-ID-MR-02.

(3) Sub zona industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan kode zona/sub zona: KPU-ID-02/KPU-ID-MF.

(4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona dan sub zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sub zona industri maritim dan sub zona industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Pasal 20

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikategorikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dijabarkan ke dalam:

a. zona inti;
b. zona perikanan berkelanjutan;
c. zona pemanfaatan; dan
d. zona lainnya.

Pasal 21

(1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam bentuk perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.

(2) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
    a. Kabupaten Langkat, terletak di perairan Kecamatan Secanggang, dengan kode kawasan: KKP-01.
    b. Kabupaten Serdang Bedagai, terletak di Perairan Pulau Berhala, dengan kode kawasan: KKP-02.

c. Kabupaten Batubara, terletak di perairan Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kode kawasan: KKP-03.

d. Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Sorkam dan Kecamatan Sorkam Barat, dengan kode kawasan: KKP-04
   2. Perairan Kecamatan Kolang, dengan kode kawasan/zona:
      a) KKP-05/KKP-ZI-01;
      b) KKP-05/KKP-ZPB-01; dan
      c) KKP-05/KKP-ZPB-02.
   3. Perairan Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Kolang, dengan kode kawasan/zona: KKP-05/KKP-ZP-05.

e. Kabupaten Tapanuli Selatan, terletak di perairan Kecamatan Muara Batang Toru, dengan kode kawasan: KKP-06.

f. Kabupaten Mandailing Natal, terletak di perairan Kecamatan Natal, dengan kode kawasan: KKP-07.

g. Kabupaten Nias Utara, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Alasa, dengan kode kawasan: KKP-08;
   2. Perairan Pulau Wunga, dengan kode kawasan: KKP-09;
   3. Perairan Kecamatan Lahewa, dengan kode kawasan: KKP-10;
   4. Perairan Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Lahewa Timur, dengan kode kawasan: KKP-11;
   5. Perairan Kecamatan Sawo, dengan kode kawasan:
      a. KKP-12;
      b. KKP-13; dan
      c. KKP-14.

h. Kabupaten Nias, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Gido dan Kecamatan Idanogawo, dengan kode kawasan: KKP-15;
   2. Perairan Kecamatan Bawolato, dengan kode kawasan : KKP-16.

i. Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
   1. Perairan Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Toma, dengan kode kawasan: KKP-17;
   2. Perairan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dengan kode kawasan: KKP-18;
   3. Perairan Kecamatan Pulau-Pulau Batu, dengan kode kawasan/zona:
      a) KKP-19/KKP-ZI-02;
      b) KKP-19/KKP-ZPB-03; dan
      c) KKP-20.
   4. Perairan Pulau Simuk, dengan kode kawasan: KKP-21.

j. Kabupaten Nias Barat, terletak di perairan Kecamatan Sirombu, dengan kode kawasan: KKP-22.

(3) Pada kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat RAHLAT di kawasan konservasi perairan dengan kode kawasan: KKP-05/KKP-ZP-05.

(4) Rencana Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 22

(1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berupa PPKT yang ditetapkan sebagai KSNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPKT yang ditetapkan sebagai KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pulau Berhala, terletak di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan kode kawasan: KSNT-01;

b. Pulau Simuk, terletak di Kecamatan Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan, dengan kode kawasan: KSNT-02.
c. Pulau Wunga, terletak di Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, dengan kode kawasan: KSNT-03; dan

(3) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Alur Laut
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk alur pelayaran dan perlintasan dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan pemasangan pipa/kabel bawah laut.
(2) Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara:
a. pengembangan alur pelayaran dan perlintasan; dan
b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut.
(3) Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara:
a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk alur pelayaran di seluruh WP3K; dan
b. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di wilayah pesisir.

Paragraf 2

Alur Pelayaran

Pasal 24

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, berupa alur pelayaran dan perlintasan, terdiri atas:

a. Alur Pelayaran Internasional: Belawan-Penang (Malaysia) dengan kode: AL-AP-PI.
b. Alur pelayaran dan perlintasan Nasional, terdiri atas:
    1. Belawan - Tanjung Priok - Tanjung Perak – Makassar – Bitung, dengan kode: AL-AP-PN-01;
    2. Medangderas – Kota Medan – Jakarta, dengan kode : AL-AP-PN-02;
    3. Jakarta – Belawan, dengan kode : AL-AP-PN-03;
    4. Batam – Tanjung Balai, dengan kode : AL-AP-PN-04; dan
    5. Teluk Dalam – Hibala – Padang dengan kode : AL-AP-PN-05.
c. Alur pelayaran Regional, terdiri atas:
    1. Lhokseumawe – Belawan dengan kode : AL-AP-PR-01;
    2. Pangkalan Susu dengan kode : AL-AP-PR-02;
    3. Belawan - Tanjung Balai dengan kode : AL-AP-PR-03;
    4. Kuala Tanjung dengan kode : AL-AP-PR-04;
    5. Aceh – Padang dengan kode :
        a) AL-AP-PR-05;dan
        b) AL-AP-PR-06.
    6. Aceh – Sibolga dengan kode : AL-AP-PR-07;
    7. Aceh – Nias – Padang dengan kode : AL-AP-PR-08;
    8. Gunungsitoli - Teluk Dalam - P. Tello dengan kode : AL-AP-PR-09;
    9. Sibolga – Gunungsitoli dengan kode : AL-AP-PR-10; dan
d. Teluk Dalam – Sibolga dengan kode : AL-AP-PR-11.

e. Alur pelayaran Lokal, terdiri atas:
   1. Talawi – Pulau Pandan dengan kode : AL-AP-PL-01;
   2. Tanjung Tiram – Pulau Pandan dengan kode : AL-AP-PL-02; dan
   3. Lahewa – Teluk Dalam dengan kode : AL-AP-PL-03;

Paragraf 3

Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 25

(1) Pipa Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b berupa Pipa Gas dan Minyak Bumi, tersebar di:
   a. Kabupaten Langkat, meliputi:
      1. Perairan Kecamatan Pangkalan Susu, dengan kode alur: AL-APK-01/AL-APK-GM-01; dan
      2. Perairan Kecamatan Tangkahan, dengan kode alur: AL-APK-02/AL-APK-GM-02.
   b. Kota Medan, terletak di perairan Kecamatan Medan Belawan, dengan kode alur: AL-APK-03/AL-APK-GM-03; dan
   c. Kabupaten Deli Serdang, terletak di perairan Kecamatan Hamparan Perak, dengan kode alur: AL-APK-04/AL-APK-GM-04.

(2) Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b berupa Kabel Telekomunikasi, tersebar di:
   a. Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi perairan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, dan Kecamatan Bandar Khalipah, serta Kabupaten Deli Serdang meliputi perairan Kecamatan Labuhan Deli, dengan kode alur:
      1. AL-APK-05/AL-APK-KT-01;
      2. AL-APK-06/AL-APK-KT-02; dan
      3. AL-APK-07/AL-APK-KT-03.

b. Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi perairan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, dan Kecamatan Bandar Khalipah, serta Kabupaten Batubara meliputi perairan Kecamatan Medang Beras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Talawi, Tanjung Tiram, dengan kode alur: AL-APK-08/AL-APK-KT-04; dan
c. Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi perairan Kecamatan Pandan, serta Kabupaten Gunungsitoli meliputi perairan Kecamatan Gunungsitoli, dengan kode alur: AL-APK-09/AL-APK-KT-05.

Pasal 26

Alur pelayaran dan pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dituangkan dalam peta alokasi ruang sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Peraturan pemanfaatan ruang WP3K merupakan upaya perwujudan RZWP3K, yang terdiri atas:
a. kegiatan yang boleh dilakukan;
b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan; dan
c. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin.

(2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.

(3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.

(4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Pasal 28

Peraturan pemanfaatan ruang WP3K terdiri atas:

a. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif;
d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
e. sanksi.

Pasal 29

Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K berfungsi:

a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K dengan RTRW;
c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP3K yang telah sesuai dengan RTRW;
d. meminimalkan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP3K; dan
e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

(1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

(2) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP3K;
   b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan boleh dilakukan setelah mendapatkan izin;
   c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K; dan
   d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP3K, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu.

(3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
   a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP3K di setiap zona/sub zona;
   b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP3K; dan
   c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP3K.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.

Pasal 32

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona wisata alam bentang laut meliputi:
   a. wisata alam bentang laut;
   b. wisata selam;
   c. wisata snorkling;
   d. wisata olahraga air;
   e. mitigasi bencana dan kondisi darurat di laut;
   f. perikanan tangkap tradisional/lokal;
   g. pengembangan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
   h. budidaya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata; dan
   i. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona wisata alam bentang laut meliputi:
   a. perikanan budidaya intensif;
   b. *dumping area*;
   c. pertambangan;
   d. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;

e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
f. pemasangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);
g. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata; dan
h. pembuangan sampah dan/atau limbah, baik padat dan/atau cair.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona wisata alam bentang laut meliputi:
a. pelabuhan umum;
b. pelabuhan perikanan;
c. perikanan tangkap;
d. perikanan budidaya laut;
e. industri biofarmakologi;
f. industri bioteknologi;
g. energi;
h. pendidikan dan penelitian; dan
i. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di sub zona wisata alam bentang laut meliputi:
a. transportasi;
b. air bersih;
c. akomodasi;
d. tanda batas zona;
e. peralatan;
f. pemandu wisata
g. tambat kapal/perahu;dan
h. kemudahan akses.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di sub zona wisata alam bentang laut meliputi:
   a. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik;
   b. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
   c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan; dan
   d. kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

(6) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
   a. wisata alam pantai;
   b. wisata sejarah;
   c. wisata budaya;
   d. wisata olahraga air;
   e. mitigasi bencana dan kondisi darurat di laut;
   f. perikanan tangkap tradisional/lokal;
   g. pengembangan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
   h. budidaya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata; dan
   i. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

(7) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
   a. perikanan budidaya intensif;
   b. *dumping area*;
   c. pertambangan;

d. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata; dan
e. pembuangan sampah dan/atau limbah, baik padat dan/atau cair.

(8) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
a. pelabuhan umum;
b. pelabuhan perikanan;
c. perikanan tangkap;
d. perikanan budidaya laut;
e. industri biofarmakologi;
f. industri bioteknologi;
g. energi;
h. pendidikan dan penelitian; dan
i. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.

(9) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
a. transportasi;
b. air bersih;
c. akomodasi;
d. tanda batas zona;
e. tambat kapal/perahu;
f. penjaga pantai;
g. pemandu wisata;
h. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
i. kemudahan akses.

(10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
   a. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik;
   b. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
   c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan; dan
   d. kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 33

Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah zona berupa tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pasal 34

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona DLKr dan DLKp, meliputi:
   a. alur-pelayaran;
   b. tempat uji coba kapal/percobaan berlayar;
   c. keperluan keadaan darurat;
   d. penempatan kapal mati;

e. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
f. rehabilitasi;
g. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan;
h. pembanguan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
i. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
j. Kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan;
k. kegiatan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal; dan
l. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona DLKr dan DLKp, meliputi:
a. wisata olahraga air;
b. wisata bawah laut;
c. pertambangan;
d. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
e. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
f. semua jenis kegiatan perikanan budidaya dengan konstruksi yang permanen di wilayah perairan;
g. pembuangan sampah dan/atau limbah;
h. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak sesuai dengan rencana induk pelabuhan; dan/atau
i. kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona DLKr dan DLKp, meliputi:
   a. permukiman;
   b. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
   c. *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
   d. pertambangan;
   e. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
   f. industri pengolahan ikan;
   g. industri maritim;
   h. industri manufaktur;
   i. industri biofarmakologi;
   j. industri bioteknologi;
   k. energi;
   l. fasilitas umum;
   m. *dumping area*;
   n. perdagangan dan jasa;
   o. penelitian dan pendidikan;
   p. wisata bahari; dan
   q. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung pelabuhan lainnya.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di sub zona DLKr dan DLKp, meliputi:
   a. Fasilitas Pokok:
      1. tanda batas;
      2. alur-pelayaran;
      3. perairan tempat labuh;
      4. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
      5. perairan tempat alih muat kapal;

6. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
7. perairan untuk kegiatan karantina;
8. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
9. perairan pandu; dan
10. perairan untuk kapal pemerintah.

b. Fasilitas Penunjang:
1. Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
2. Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
3. Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
4. Perairan tempat kapal mati;
5. Perairan untuk keperluan darurat; dan
6. Perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di sub zona DLKr dan DLKp, meliputi:
a. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan;
b. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
c. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
d. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-pelayaran;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan;
f. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan;
g. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
h. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi bencana.

Pasal 35

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona WKOPP, meliputi:
   a. pendaratan hasil tangkapan perikanan;
   b. pelaksanaan operasional kapal perikanan;
   c. tambat dan labuh kapal;
   d. membangun pelindung pantai;
   e. perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
   f. bongkar muat;
   g. industri pengolahan ikan;
   h. uji coba kapal;
   i. penempatan kapal mati;
   j. pemasaran dan distribusi ikan; dan
   k. kegiatan operasional kapal perikanan.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona WKOPP, meliputi:
   a. wisata bahari;
   b. pertambangan;
   c. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
   d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan/atau
   e. perikanan budidaya laut.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di sub zona WKOPP, meliputi:
   a. wisata alam bentang laut;
   b. wisata alam pantai/pesisir;
   c. wisata sejarah;
   d. wisata budaya;
   e. permukiman;
   f. *salvage* dan pekerjaan bawah air;

g. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
h. industri pengolahan ikan;
i. industri maritim;
j. industri manufaktur;
k. inustri biofarmakologi;
l. industri bioteknologi;
m. energi;
n. fasilitas umum;
o. *dumping area*; dan
p. perdagangan dan jasa.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di sub zona WKOPP, meliputi:
a. Fasilitas pokok dapat terdiri atas:
1. penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
2. dermaga;
3. jetty;
4. kolam pelabuhan;
5. alur pelayaran;
6. jalan komplek dan drainase; dan
7. lahan.
b. Fasilitas fungsional dapat terdiri atas:
1. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);
2. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet dan radio komunikasi;
3. rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
4. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
5. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring;

6. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit shed* dan laboratorium pembinaan mutu;
7. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
8. transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
9. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
10. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

c. Fasilitas penunjang dapat terdiri atas:
1. balai pertemuan nelayan;
2. mess operator;
3. wisma nelayan;
4. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
5. pertokoan; dan
6. pos jaga.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di sub zona WKOPP, meliputi:
a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertambangan

Pasal 36

(1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan ruang yang penggunaan dan pemanfaatannya untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan minyak serta gas bumi dan merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan yang tidak boleh dilakukan, kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin, persyaratan minimum, dan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam sub zona pertambangan minyak dan gas bumi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemanfaatan RAHLAT yang berada pada zona pertambangan dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang dinamis, sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
(3) Selama berlangsung pemanfaatan RAHLAT, seluruh kegiatan lain dihentikan sementara.
(4) Pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi RAHLAT yang bersangkutan.
(5) Pemanfaatan RAHLAT dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pertahanan negara.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 38

(1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.

(2) Zona perikanan tangkap dengan jarak lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) mil laut dari garis pantai surut terendah diprioritaskan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.

Pasal 39

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan pelagis, meliputi:
   a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 (sepuluh) gross ton dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); dan
   c. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan pelagis meliputi:
   a. penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan/atau bahan beracun;
   b. menempatkan alat tangkap yang bersifat statis pada alur-pelayaran;
   c. menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
   d. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
   e. kegiatan pertambangan.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan pelagis meliputi:
   a. pendidikan dan penelitian;
   b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) gross ton;
   c. memasang Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) berupa rumpon;

d. pariwisata; dan
e. penenggelaman kapal.

(4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c pada zona perikanan tangkap/sub zona ikan pelagis, berupa tempat tambat kapal dan/atau perahu.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d pada zona perikanan tangkap/sub zona ikan pelagis meliputi:
a. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. melakukan penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) pada jalur penangkapan ikan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan demersal meliputi:
a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 (sepuluh) gross ton dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); dan
c. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan demersal meliputi:
a. menempatkan alat tangkap yang sifatnya statis;
b. menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;

c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
d. kegiatan pertambangan.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b di Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan demersal adalah:
a. pendidikan dan penelitian;
b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) gross ton;
c. memasang Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) berupa rumpon; dan
d. memasang rumah ikan dan terumbu karang buatan;
e. pariwisata; dan
f. penenggelaman kapal.

(4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c pada zona perikanan tangkap/sub zona ikan demersal, berupa tempat tambat kapal dan/atau perahu.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d pada zona perikanan tangkap/sub zona ikan demersal meliputi:
a. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. melakukan penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) pada jalur penangkapan ikan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan tidak boleh dilakukan, dan kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin, prasarana minimum, dan ketentuan khusus pada Zona Perikanan Tangkap/sub zona ikan pelagis demersal, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.
(2) Pemanfaatan RAHLAT yang berada pada zona perikanan tangkap dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang dinamis, sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
(3) Selama berlangsung pemanfaatan RAHLAT, seluruh kegiatan lain dihentikan sementara.
(4) Pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi RAHLAT yang bersangkutan.
(5) Pemanfaatan RAHLAT dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pertahanan negara.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

Pasal 42

Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.

Pasal 43

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya meliputi:
    a. memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol;
    b. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP3K;

c. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
d. kegiatan masyarakat non nelayan yang mengembangkan budidaya laut;
e. menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan;
f. keramba jaring lepas pantai (*offshore*);
g. kegiatan budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
h. kegiatan budidaya dengan menggunakan keramba jaring apung.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya meliputi:
a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
b. pemasangan rumah ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, apotas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
e. pembuangan sampah dan limbah.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya meliputi:
a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
b. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
c. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di zona perikanan budidaya meliputi:
   a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut sebesar 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya, dan alur-pelayaran nelayan tradisional/nelayan kecil; dan
   b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di zona perikanan budidaya meliputi:
   a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
   b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit;
   c. untuk sub zona budidaya yang terdapat RAHLAT berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang dinamis, sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
      2. selama berlangsung pemanfaatan RAHLAT, seluruh kegiatan budidaya dihentikan sementara;
      3. pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi RAHLAT yang bersangkutan; dan
      4. pemanfaatan RAHLAT dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pertahanan negara.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pergaraman

Pasal 44

Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f adalah ruang pesisir yang dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran garam.

Pasal 45

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona pergaraman meliputi:
    a. usaha pergaraman yang dilakukan pada lahan tambak garam oleh petambak garam kecil, baik sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (mantong) dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri;
    b. kegiatan penangkapan ikan secara terbatas dan penangkapan ikan secara tradisional; dan
    c. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem.
(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona pergaraman meliputi:
    a. membuang sampah dan limbah;
    b. kegiatan pertambangan; dan
    c. menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona pergaraman meliputi:
    a. kegiatan wisata bahari; dan
    b. pendidikan dan penelitian.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di zona pergaraman meliputi:
   a. saluran pengairan;
   b. jalan produksi;
   c. tempat penyimpanan garam; dan
   d. kolam penampung air.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di zona pergaraman meliputi:
   a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
   b. mitigasi bencana di WP3K;
   c. untuk RAHLAT yang berada pada sub zona garam rakyat berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang dinamis, sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
      2. selama berlangsung pemanfaatan RAHLAT, seluruh kegiatan lain dihentikan sementara;
      3. pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi RAHLAT yang bersangkutan; dan
      4. pemanfaatan RAHLAT dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pertahanan negara.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Industri

Pasal 46

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 47

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona industri meliputi semua kegiatan industri yang sesuai dengan karakteristik dan sifat industri maritim serta industri manufaktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona industri meliputi:
   a. perikanan budidaya; dan
   b. perikanan tangkap.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di zona industri meliputi:
   a. pariwisata;
   b. permukiman;
   c. pelabuhan;
   d. energi;
   e. perdagangan dan jasa; dan
   f. fasilitas umum.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di zona industri meliputi:
   a. Infrastruktur Industri:
      1. jaringan energi dan kelistrikan;
      2. jaringan telekomunikasi;
      3. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
      4. sanitasi; dan
      5. jaringan transportasi.
   b. Infrastruktur penunjang:
      1. perumahan;
      2. pendidikan dan pelatihan;
      3. penelitian dan pengembangan;
      4. kesehatan;
      5. pemadam kebakaran; dan

6. tempat pembuangan sampah.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di zona industri meliputi:
   a. Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. perusahaan kawasan industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri;
   c. perusahaan industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki:
      1. Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan
      2. Upaya Pemantauan Lingkungan.
   d. perusahaan industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapat pengesahan oleh instansi yang berwenang;
   e. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan; dan
   f. pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 48

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Pasal 49

(1) Seluruh kegiatan pemanfaatan KKP dikategorikan sebagai kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin.
(2) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur untuk Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

(3) Jenis izin dan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kegiatan pemanfaatan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. penangkapan ikan;
   b. pembudidayaan ikan;
   c. pariwisata alam perairan; atau
   d. penelitian dan pendidikan.

(5) Zona Inti dalam KKP diperuntukkan bagi:
   a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
   b. penelitian; dan
   c. pendidikan.

(6) Zona Perikanan Berkelanjutan dalam KKP diperuntukkan bagi:
   a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
   b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
   c. budidaya ramah lingkungan;
   d. pariwisata dan rekreasi;
   e. penelitian dan pengembangan; dan
   f. pendidikan.

(7) Zona Pemanfaatan dalam KKP diperuntukkan bagi:
   a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
   b. pariwisata dan rekreasi;
   c. penelitian dan pengembangan; dan
   d. pendidikan.

Pasal 50

(1) Pemanfaatan KKP untuk kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan.

(2) Kegiatan pemanfaatan KKP untuk kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton.

(3) Kegiatan pemanfaatan KKP untuk kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
   a. daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan;
   b. metode Penangkapan Ikan; dan
   c. jenis Alat Penangkapan Ikan.

(4) Daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk menentukan potensi sumber daya ikan.

(5) Pemanfaatan potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas zona perikanan berkelanjutan.

(6) Metode Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan:
   a. tidak membahayakan pengguna dan orang sekitarnya;
   b. tidak menimbulkan bahaya kesehatan manusia;
   c. tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; dan
   d. tidak menimbulkan konflik sosial.

(7) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan, meliputi:
   a. jaring angkat;
   b. jaring insang;
   c. perangkap;
   d. pancing; dan
   e. alat penjepit.

(8) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak boleh menggunakan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) berupa rumpon.

(9) Penggunaan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang alat penangkapan ikan.

Pasal 51

(1) Pemanfaatan KKP untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan.

(2) Kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
   a. jenis ikan yang dibudidayakan;
   b. jenis pakan;
   c. teknologi;
   d. jumlah unit usaha budidaya; dan
   e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

(3) Jenis ikan yang dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jenis ikan yang tidak termasuk dalam kategori berpotensi mengubah dan/atau merusak keseimbangan ekosistem.

(4) Jenis pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis pakan alami dan/atau pakan buatan yang terdaftar.

(5) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan:
   a. teknologi sederhana, yaitu teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah; atau
   b. teknologi Semi Intensif, yaitu teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir.

(6) Jumlah unit usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

(7) Daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas Zona Perikanan Berkelanjutan.

Pasal 52

(1) Pemanfaatan KKP untuk kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan dan/atau Zona Perikanan Berkelanjutan.
(2) Pemanfaatan KKP untuk pariwisata alam perairan dilakukan melalui:
    a. kegiatan pariwisata alam perairan; dan
    b. pengusahaan pariwisata alam perairan.
(3) Kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. wisata selam;
    b. wisata pancing;
    c. wisata perahu layar;
    d. wisata selancar;
    e. wisata *snorkling*;
    f. wisata tontonan;
    g. pembuatan foto, video, dan film komersial;
    h. wisata olahraga air; dan/atau
    i. wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya.
(4) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam Perairan di dalam KKP;
    b. penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam KKP;
    c. penyediaan jasa transportasi di dalam KKP; dan/atau
    d. jasa pramuwisata.

Pasal 53

(1) Kegiatan Penelitian dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d dapat dilakukan di Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan.

(2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang mendukung upaya pengelolaan KKP yang efektif.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum berakhirnya izin penelitian kepada Dinas; dan
   b. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Dinas.

(4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi.

(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 54

(1) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b pada KKP meliputi seluruh kegiatan selain dari kegiatan pemanfaatan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan latihan militer yang bersifat temporer pada RAHLAT yang berada pada Kawasan Konservasi Perairan.

(3) Ketentuan tentang prasarana minimum di KKP merupakan pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
   a. pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi; dan
   b. dibentuknya jejaring KKP.

(5) Untuk RAHLAT yang berada pada kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang dinamis, sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
   b. selama berlangsung pemanfaatan RAHLAT, seluruh kegiatan lain dihentikan sementara;
   c. pemanfaatan RAHLAT dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi RAHLAT yang bersangkutan; dan
   d. pemanfaatan RAHLAT dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pertahanan negara.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 55

(1) Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur-pelayaran dan perlintasan serta alur pipa/kabel bawah laut secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
(2) Alur-pelayaran dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan aman untuk keselamatan pelayaran.
(3) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang perairan yang diperuntukkan bagi kepentingan jaringan listrik dan telekomunikasi, pipa air minum, serta jaringan pipa minyak dan gas.

Pasal 56

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Alur Pelayaran meliputi:
   a. kegiatan pelayaran;
   b. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
   c. penetapan rute kapal tertentu (*ship routeing system*);
   d. penangkapan ikan pelagis dan demersal yang menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
   e. wisata bahari atraktif.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Alur Pelayaran meliputi:
   a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
   b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
   c. pemasangan rumah ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
   d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, apotas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
   e. kegiatan pertambangan;
   f. penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
   g. pariwisata dan rekreasi; dan
   h. pembuangan sampah dan/atau limbah.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di Alur Pelayaran meliputi:
   a. penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun demersal dengan skala besar; dan
   b. kegiatannya lainnya yang sifatnya tidak permanen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c di Alur-Pelayaran merupakan pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d di Alur-Pelayaran meliputi:

a. zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

b. memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan daerah lainnya yang diatur oleh ketentuan internasional atau instansi terkait;

c. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan); dan

d. pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan sistem rute kapal *(ship routing system)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 57

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b pada Alur Pipa/kabel Bawah Laut meliputi:

a. transportasi dengan perahu kecil berupa sandeq dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya;

b. penangkapan ikan pelagis; dan

c. kegiatan pariwisata bahari.

(2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b pada Alur Pipa/kabel Bawah laut meliputi:
   a. kegiatan pertambangan;
   b. lego jangkar;
   c. kegiatan penangkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik;
   d. pemasangan rumah ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
   e. pembuangan sampah dan/atau limbah; dan
   f. *dumping area*.

(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b pada Alur Pipa/Kabel Bawah laut meliputi:
   a. kegiatan penangkapan ikan demersal yang tidak menetap;
   b. kegiatan budidaya laut;
   c. kegiatan penyelaman komersil; dan
   d. kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut disekitar pipa/kabel bawah laut.

(4) Ketentuan tentang prasarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c pada Alur Pipa/Kabel Bawah Laut meliputi:
   a. terdapat penandaan yang mudah dilihat dan dikenali;
   b. pemilik instalasi wajib memasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d pada Alur Pipa/Kabel Bawah Laut meliputi:
   a. mengikuti koridor yang sudah ada (eksisting);
   b. instalasi pipa/kabel bawah laut paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
      1. penempatan, pemendaman dan penandaan;

2. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
3. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/atau jembatan; dan
4. berada di luar perairan wajib pandu.

c. pemilik instalasi pipa/kabel bawah laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan pemendaman terhadap instalasi pipa/kabel bawah laut dengan ketentuan:
   1. instalasi pipa bawah laut:
      a) dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 20 (dua puluh) meter, instalasi pipa harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
      b) pada perairan mulai dari kedalaman 20 (dua puluh) meter atau lebih, intalasi pipa dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (*natural seabed*) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan
      c) pemendaman harus tunduk stabil pada posisinya.
   2. instalasi kabel bawah laut:
      a) dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 10 (sepuluh) meter, instalasi pipa harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
      b) pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai 15 (lima belas) meter, instalasi harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar perairan;

c) pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, instalasi kabel kabel harus dipendam 0,5 (nol koma lima) meter sedangkan pada perairan yang kedalamannya lebih dari 28 (dua puluh delapan) meter kabel kabel dapat digelar di atas permukaan dasar perairan dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan

d) pemendaman harus tunduk stabil pada posisinya.

e. pada lokasi tertentu pembangunan instalasi pipa/kabel bawah laut dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pemendaman setelah dilakukan kajian penilaian analisa resiko.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP3K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya WP3K harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. izin lokasi; dan
   b. izin pengelolaan

Paragraf 2
Izin Lokasi

Pasal 59

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
   b. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
(4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP3K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
(5) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 60

(1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan;
   b. pembekuan sementara; dan/atau
   c. pencabutan Izin Lokasi.

Pasal 61

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP3K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
    a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
    b. Masyarakat;
    c. Nelayan Tradisional;
    d. kepentingan nasional; dan
    e. hak lintas damai bagi kapal asing.
(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada Zona Inti di Kawasan Konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 62

(1) Jangka waktu pemberian Izin lokasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pemegang Izin Lokasi tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan

Pasal 63

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
    a. produksi garam;
    b. biofarmakologi laut;
    c. bioteknologi laut;
    d. pemanfaatan air laut selain energi;

e. wisata bahari;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,

(2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 64

(1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;
d. pencabutan izin;
e. pembatalan izin; dan/atau
f. denda administratif.

Paragraf 4

Fasilitas Perizinan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 66

(1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.

(2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Subjek Izin

Pasal 68

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diberikan kepada:

a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 69

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Gubernur wajib mempertimbangkan:

a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
d. kepentingan nasional; dan
e. hak lintas damai bagi kapal asing

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 72

(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam RZWP3K.

(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
   b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
   c. kriteria pemberian akreditasi; dan
   d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. relevansi isu prioritas;
   b. proses konsultasi publik;
   c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
   d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
   f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai bentuk, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 73

(1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP3K.

(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
   b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona; dan
   c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
INDIKASI PROGRAM

Pasal 74

(1) Indikasi program pemanfaatan WP3K berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.

(2) Indikasi program pemanfaatan WP3K dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

(3) Indikasi program memuat:
   a. usulan program utama;
   b. lokasi program;
   c. perkiraan pendanaan dan alternatif sumber pendanaan;
   d. institusi pelaksana program; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(4) Indikasi program utama disusun untuk waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci dalam program 5 (lima) tahunan.

(5) Pendanaan Indikasi Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.

(6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 75

(1) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil terintegrasi dengan perairan pesisir di sekitarnya yang dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

(2) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
   a. konservasi;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. penelitian dan pengembangan;
   d. budi daya laut;
   e. pariwisata;
   f. usaha perikanan dan kelautan;
   g. pertanian organik;
   h. peternakan; dan/atau
   i. pertahanan dan keamanan negara.

(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
   a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
   b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
   c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

(4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 76

Strategi pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:

a. penataan peran masyarakat dan swasta;
b. penyusunan basis data;
c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 77

(1) Arahan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:
    a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil;
    b. mengembangkan budi daya laut; dan
    c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata.
(2) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

(1) Untuk menjamin terselenggaranya RZWP3K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan RZWP3K oleh Gubernur.
(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3) Pengawasan dan/atau Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
   a. mengadakan patroli dan/atau perondaan di WP3K sesuai dengan wilayah hukumnya;
   b. menerima laporan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

(7) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 79

(1) Pengawasan RZWP3K dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
   b. pertukaran data dan informasi;
   c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
   d. pemeriksaan sampel; dan
   e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP3K.

(3) Pengawasan terhadap pemanfaatan WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(4) Pengawasan terhadap RZWP3K memperhatikan kearifan lokal.
(5) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Paragraf 1
Program Akreditasi

Pasal 80

(1) Dalam melaksanakan pengendalian Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan WP3K.
(2) Penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah.
(3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. relevansi isu prioritas;
    b. proses konsultasi publik;
    c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
    d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
    e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
    f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan insentif kepada pengelola program Pengelolaan WP3K yang telah mendapat akreditasi berupa:
   a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
   b. bantuan teknis.

(5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan WP3K yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan WP3K kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Penyelenggaraan dan mekanisme program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 81

(1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan WP3K melalui kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah, dibentuk Mitra Bahari Provinsi.

(2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum kerja sama antara Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha.

(3) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau dunia usaha.

(4) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
   a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. penelitian terapan; dan
   d. rekomendasi kebijakan.

Pasal 82

(1) Pembentukan Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil perguruan tinggi setempat selaku ketua dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau wakil dunia usaha.

(3) Susunan keanggotaan Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fokus kegiatannya.

(4) Mitra Bahari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyiapkan dan menyusun rencana induk Mitra Bahari Provinsi;
   b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Provinsi;
   c. melakukan kaji lapang dalam rangka menetapkan kegiatan Mitra Bahari Provinsi;
   d. melaksanakan ketentuan/petunjuk pelaksanaan, pedoman pelaksanaan kegiatan Mitra Bahari Pusat, dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Mitra Bahari Provinsi;

e. menyampaikan laporan secara berkala perkembangan Mitra Bahari Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Mitra Bahari Pusat;
f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan informasi mengenai WP3K;
g. membantu pengembangan jejaring kemitraan Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 83

(1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP3K.
(2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP3K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
(3) Rehabilitasi dilakukan terhadap:
    a. ekosistem terumbu karang;
    b. mangrove;
    c. lamun;
    d. estuaria
    e. laguna;
    f. teluk;
    g. delta;
    h. pantai; dan/atau
    i. populasi ikan.
(4) Rehabilitasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Larangan

Pasal 84

Dalam pemanfaatan WP3K, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang di WP3K yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
b. kegiatan budidaya perikanan dengan menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP3K;
c. kegiatan budidaya perikanan pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur-pelayaran;
d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun;
e. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
f. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut; dan/atau
g. kegiatan reklamasi di WP3K tanpa izin.

Paragraf 2
Sanksi

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikenakan sanksi berupa:
    a. Sanksi Administratif; dan
    b. Sanksi Pidana.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penutupan lokasi;
    d. pencabutan izin;
    e. pembataan izin; dan/atu
    f. denda administratif.
(3) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MITIGASI BENCANA

Pasal 86

(1) Mitigasi Bencana WP3K dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(2) Penyelenggaraan mitigasi bencana WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
    a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
    b. kelestarian lingkungan hidup;
    c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
    d. lingkup luas wilayah.
(3) Setiap Orang yang berada di WP3K wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan WP3K.
(4) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
    a. struktur/fisik; dan/atau
    b. nonstruktur/nonfisik.
(5) Penyelenggaraan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 87

(1) Dalam pengelolaan WP3K, masyarakat berhak untuk:
    a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
    b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3K;
    c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP3K;

d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan PWP3K;
f. memperoleh informasi berkenaan dengan PWP3K;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan PWP3K;
h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
j. mengajukan gugatan kepada Pengadilan terhadap berbagai masalah WP3K yang merugikan kehidupannya;
k. memperoleh ganti rugi; dan
l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan WP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam PWP3K, masyarakat wajib:
a. memberikan informasi berkenaan dengan PWP3K;
b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian WP3K;
c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di WP3K;
d. memantau pelaksanaan rencana PWP3K; dan/atau
e. melaksanakan program PWP3K yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 88

(1) Penyelenggaraan zonasi WP3K dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan zonasi WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahap:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pengawasan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam PWP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui:
    a. peningkatan kapasitas;
    b. pemberian akses teknologi dan informasi;
    c. permodalan;
    d. infrastruktur;
    e. jaminan pasar; dan
    f. aset ekonomi produktif lainnya.
(3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
    a. pengambilan keputusan;
    b. pelaksanaan pengelolaan;

c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah;
d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung WP3K;
f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang PWP3K.

(4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisis kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Pasal 90

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilakukan dengan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemberian beasiswa bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan; dan/atau
b. pemberian materi tentang PWP3K antara lain perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi, kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pelatihan kewirausahaan;
   b. pelatihan penyusunan perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi dan reklamasi; dan/atau
   c. pelatihan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pembentukan kelompok usaha;
   b. pendampingan proses produksi sampai pemasaran;
   c. pendampingan analisis kelayakan usaha;
   d. pendampingan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
   e. pemberian materi penyuluhan konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi dan materi lain yang terkait dengan pemberdayaan.

Pasal 91

(1) Pemberian akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
   a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan;
   b. penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan; dan
   c. pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi.

(2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. sarana produksi;
   b. harga komoditas;
   c. prakiraan iklim;
   d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
   e. akses pasar; dan
   f. peluang kemitraan.

(3) Pemberian informasi dapat dilakukan melalui media cetak, dan/atau media elektronik.

Pasal 92

Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

a. penyediaan skim kredit dengan bunga ringan;
b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan
c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Pasal 93

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyediaan prasarana usaha.

Pasal 94

Jaminan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

a. fasilitasi akses pemasaran;
b. fasilitasi sarana pemasaran;
c. mengembangkan kerjasama/kemitraan;
d. mengembangkan sistem pemasaran; dan
e. menyediakan Informasi pasar.

Pasal 95

Aset ekonomi produktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f dilakukan dengan fasilitasi dan/atau penyediaan sarana usaha.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

(1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan zonasi WP3K ditempuh melalui Pengadilan dan/atau di luar Pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan WP3K sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

(1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan WP3K.
(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
(4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
(5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola WP3K bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.

(2) Pengelola WP3K dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan WP3K disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
   a. bencana alam;
   b. peperangan;
   c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
   d. tindakan pihak ketiga.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIII
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 99

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab PWP3K, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
   b. berbentuk badan hukum;

c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.

BAB XIV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 101

(1) PWP3K dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas.
(2) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
b. rekomendasi izin kegiatan di WP3K berdasarkan RZWP3K;
c. pengkajian terhadap kondisi lingkungan WP3K, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan WP3K; dan/atau
d. upaya menumbuhkan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan WP3K.
(3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota dan/atau unit kerja terkait.
(4) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan WP3K.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang WP3K diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

(1) izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

(2) izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

   a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

   b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

   c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

(4) pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

(1) Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian WP3K yang belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan/pencadangan kawasan konservasi berdasarkan hasil penetapan Menteri.

(2) Dalam hal penetapan zona pelabuhan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidangnya, yang belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana zona pelabuhan disesuaikan dengan hasil penetapan zona pelabuhan berdasarkan hasil penetapan Menteri.

(3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.

(4) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
(5) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105

(1) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan/atau materi teknis RZWP3K Provinsi dan album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub zona peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(2) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum zona dan/atau sub zona dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tidak menunjukkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.

BAB XVIII
KELEMBAGAAN

Pasal 106

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP3K Provinsi maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP3K terintegrasi oleh TKPRD Provinsi dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan.
(2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Maret 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-52/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Provinsi Sumatera Utara memiliki pantai seluas 110.000 km^2, dengan wilayah pesisir yang terletak di sebelah barat dengan menghadap langsung ke Samudera Hindia dengan panjang garis pantai lebih dari 755 km dan di sebelah timur, menghadap ke Selat Malaka dengan panjang garis pantai 545 km. Terdapat 232 pulau yang terdiri dari 230 pulau kecil dan 2 pulau besar. Terdapat 3 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala, Pulau Simuk, dan Pulau Wunga, sedangkan 7 pulau kecil berada di wilayah barat Provinsi Sumatera Utara. Di wilayah Pantai Timur ada Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka sedangkan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. Dengan potensi geografis tersebut, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya, baik sumber daya hayati, non hayati maupun sumber daya buatan yang sangat besar.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka pengelolaan WP3K, yang didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun semua dokumen perencanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K.

Salah satu perencanaan yang wajib disusun adalah perencanaan spasial yang berupa Rencana Zonasi WP3K (RZWP3K), yang berfungsi sebagai arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasiskan pada sumberdaya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (RSWP3K) pada tahun 2013, dan Rencana Zonasi WP3K (RZWP3K) pada tahun 2014. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dimana semula 4-12 mil menjadi 0-12 mil. Berkaitan dengan hal tersebut Dokumen RZWP3K yang telah disusun harus menyesuaikan dengan kewenangan tersebut.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka RZWP3K perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaturan” pada ayat ini mencakup pengaturan struktur ruang dan pola ruang yang mengacu kepada RTRW dan/atau RDTR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (*Monitoring, Control and Surveillance/*MCS)” adalah sistem *Monitoring*, *Control*, and *Surveillance* (MCS) Perikanan. Penyelenggaraan MCS tersebut utamanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun didukung pula oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Perairan (POLAIR), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Perhubungan Laut (Hubla), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Untuk memudahkan dalam penunjukkan letak alokasi ruang dalam peta, setiap alokasi ruang ditunjukkan dengan kode alokasi ruang.

Kode alokasi ruang dibuat dengan pola sebagai berikut:

kode alokasi - kode zona (jika ada) - nomor urut zona / kode sub zona, (jika ada) - nomor urut sub zona (jika lebih dari satu).

Kode untuk setiap alokasi ruang sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

ALOKASI RUANG			KODE		
Alokasi Ruang	**Zona**	**Sub Zona**	**Kode Alokasi Ruang**	**Kode Zona**	**Kode Sub Zona**
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	Alam Bentang Laut	KPU	W	BL
		Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			P3K
	Pelabuhan	Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)		PL	DLK
		Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			WKO
	Pertambangan	Minyak dan Gas Bumi		TB	MG
	Perikanan Tangkap	Pelagis		PT	P
		Demersal			D
		Pelagis Demersal			PD
	Perikanan Budidaya	Budidaya Laut		BD	BL
	Pergaraman	Garam Rakyat		GR	R
	Industri	Industri Maritim		ID	MR
		Industri Manufaktur			MF
Kawasan Konservasi Perairan	Zona Inti	-	KKP	ZI	-
	Zona Perikanan Berkelanjutan	-		ZPB	-
	Zona Pemanfaatan	-		ZP	-
	Zona Lainnya	-		ZL	-
Kawasan Strategis Nasional Tertentu	-	-	KSNT	-	-
Alur Laut	Alur Pelayaran	-	AL	AP	-
	Pipa/Kabel Bawah Laut	Pipa Gas dan Minyak Bumi		APK	GM
		Kabel Telekomunikasi			KT

Contoh kode:

KPU-W-01/KPU-W-BL-01

Kode Zona Kode Sub Zona

Keterangan:

KPU = alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum

W = Zona Pariwisata

BL = Sub Zona Wisata Alam Bentang Laut

01 = nomor urut

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona penangkapan ikan pelagis” adalah zona ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Umumnya ikan ini menempati kedalaman pada zona neritik (0-200 m) terutama ikan pelagis kecil. Ikan pelagis juga sebagian berada di zona batial (lebih 200 m) seperti ikan tuna dan cakalang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penangkapan ikan demersal” adalah zona dengan jenis ikan yang habitatnya (hidup dan makan) berada di bagian dasar perairan, dan lingkungan hidupnya umumnya lumpur, pasir dan bebatuan atau karang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona penagkapan ikan pelagis demersal” adalah zona yang pada umumnya berada pada lokasi 0 hingga 4 mil laut. Wilayah penangkapan ikan pelagis diarahkan pada zona II yaitu 4 hingga 12 mil laut, kecuali untuk daerah penangkapan bagan dan pancing diperbolehkan bersamaan dengan (beririsan) dengan zona demersal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud " budidaya laut" adalah kegiatan pemeliharaan ikan di laut untuk a). memperbanyak (reproduksi); b). menumbuhkan (*growth*) dan; c). meningkatkan mutu biota akuatik sehingga memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona perikanan berkelanjutan” adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan” adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan Pariwisata Alam Perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan Penelitian dan Pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona lainnya” adalah bagian dari kawasan konservasi perairan di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *dumping area* adalah area pembuangan benda-benda di perairan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *salvage* adalah tindakan penyelamatan benda-benda seperti yang berasal dari kapal yang tenggelam.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Point 1, *groin* adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai.

Huruf b

Point 5, *dock* adalah dermaga, *slipway* adalah tempat peluncuran kapal.

Point 6, *transit sheed* adalah gudang tertutup dipelabuhan yang terletak didekat dermaga untuk menyimpan barang yang akan di distribusikan di darat atau yang sedang mengalami penundaan pengapalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jejaring KKP” adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain:

a. dasar perairan yang keras;
b. persilangan (*crossing*) dengan instalasi eksisting;
c. pengaruh terhadap daya hantar;
d. daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Nelayan Tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di WP3K yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalah pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, di luar tugas penyidikan.

Pengawas merupakan pegawai negeri sipil di instansi yang membidangi Pengelolaan WP3K.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ayat ini adalah masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kelompok masyarakat berbentuk Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS) yang merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “laporan” adalah informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat seperti:

- Koordinator PPNS;
- Kepala Pelabuhan Perikanan;
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat);
- TNI-AL terdekat;
- Petugas Karantina di Pelabuhan; atau
- PPNS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Mitigasi nonstruktur/nonfisik adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya struktur contoh pengembangan kapasitas masyarakat dan pembuatan tata ruang kota.

Mitigasi struktur/fisik adalah upaya untuk mengurangi dan meminimalkan bencana melalui pembangunan prasarana fisik dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

DAFTAR LAMPIRAN PETA / KETERANGAN PETA

No.	Uraian	Hal
1.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Sumatera Utara Skala 1:1.000.000	I-1
2.	Peta Alokasi Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum Rencana Zonasi WP3K Sumatera Utara Skala 1 : 1.000.000	I-2
3.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1201	I-3
4.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kepulauan Nias Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1202.....	I-4
5.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kecamatan Pulau-pulau Batu Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1203.....	I-5
6.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kab. Nias Selatan dan Kab. Madina Skala 1:250.000 Lembar Peta : 1204.....	I-6
7.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kab. Tapanuli Tengah Skala 1:250.000 Lembar Peta : 1205.....	I-7
8.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Pemanfaatan Umum Pantai Timur Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1206.....	I-8
9.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Pemanfaatan Umum Pantai Timur Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1207.....	I-9
10.	Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi WP3K Kawasan Pemanfaatan Umum Pantai Timur Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1208.....	I-10
11.	Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000 Lembar Peta 0619 – 01 Kabupaten Langkat	I-11
12.	Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000 Lembar Peta 0619 – 02 Kabupaten Langkat	I-12
13.	Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000 Lembar Peta 0619 – 03 Kabupaten Langkat	I-13

14. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0619 – 04 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang I-14
15. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0719 – 01 Kabupaten Serdang Bedagai I-15
16. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0719 – 02 Kabupaten Batubara I-16
17. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0719 – 04 Kabupaten Batubara I-17
18. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0718 – 01 Kabupaten Asahan I-18
19. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0718 – 02 Kabupaten Labuhanbatu Utara I-19
20. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0718 – 03 Kabupaten Labuhanbatu I-20
21. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0516 – 01 Kabupaten Nias Barat I-21
22. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0517 – 01 Kabupaten Nias Utara I-22
23. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0517 – 02 Kabupaten Nias Utara I-23
24. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0517 – 03 Kabupaten Nias Utara I-24
25. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 01 Kabupaten Nias Selatan I-25
26. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 03 Kabupaten Nias Selatan I-26
27. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 07 Kabupaten Mandailing Natal I-27
28. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 01 Kota Gunungsitoli I-28
29. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 02 Kabupaten Tapanuli Tengah I-29
30. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 03 Kabupaten Tapanuli Tengah I-30
31. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 04 Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah I-31

32. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 05 Kabupaten Tapanuli Selatan I-32
33. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 06 Kabupaten Mandailing Natal I-33
34. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 07 Kabupaten Nias I-34
35. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 08 Kabupaten Tapanuli Tengah I-35
36. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0617 – 09 Kabupaten Tapanuli Tengah I-36
37. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0816 – 04 Kabupaten Tapanuli Tengah I-37
38. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0615 – 01 Kabupaten Nias Selatan I-38
39. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0615 – 02 Kabupaten Nias Selatan I-39
40. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0615 – 03 Kabupaten Nias Selatan I-40
41. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0615 – 04 Kabupaten Nias Selatan I-41
42. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0615 – 05 Kabupaten Nias Selatan I-42
43. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0615 – 06 Kabupaten Nias Selatan I-43
44. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 02 Kabupaten Nias Selatan I-44
45. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 04 Kabupaten Nias Selatan I-45
46. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 05 Kabupaten Nias Selatan I-46
47. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 06 Kabupaten Nias Selatan I-47
48. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 08 Kabupaten Mandailing Natal I-48
49. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0616 – 09 Kabupaten Nias Selatan I-49

50. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumatera Utara Skala 1:50.000
Lembar Peta 0716 – 01 Kabupaten Mandailing Natal I-50

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 18 MARET 2019

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sumatera Utara Skala 1:1.000.000

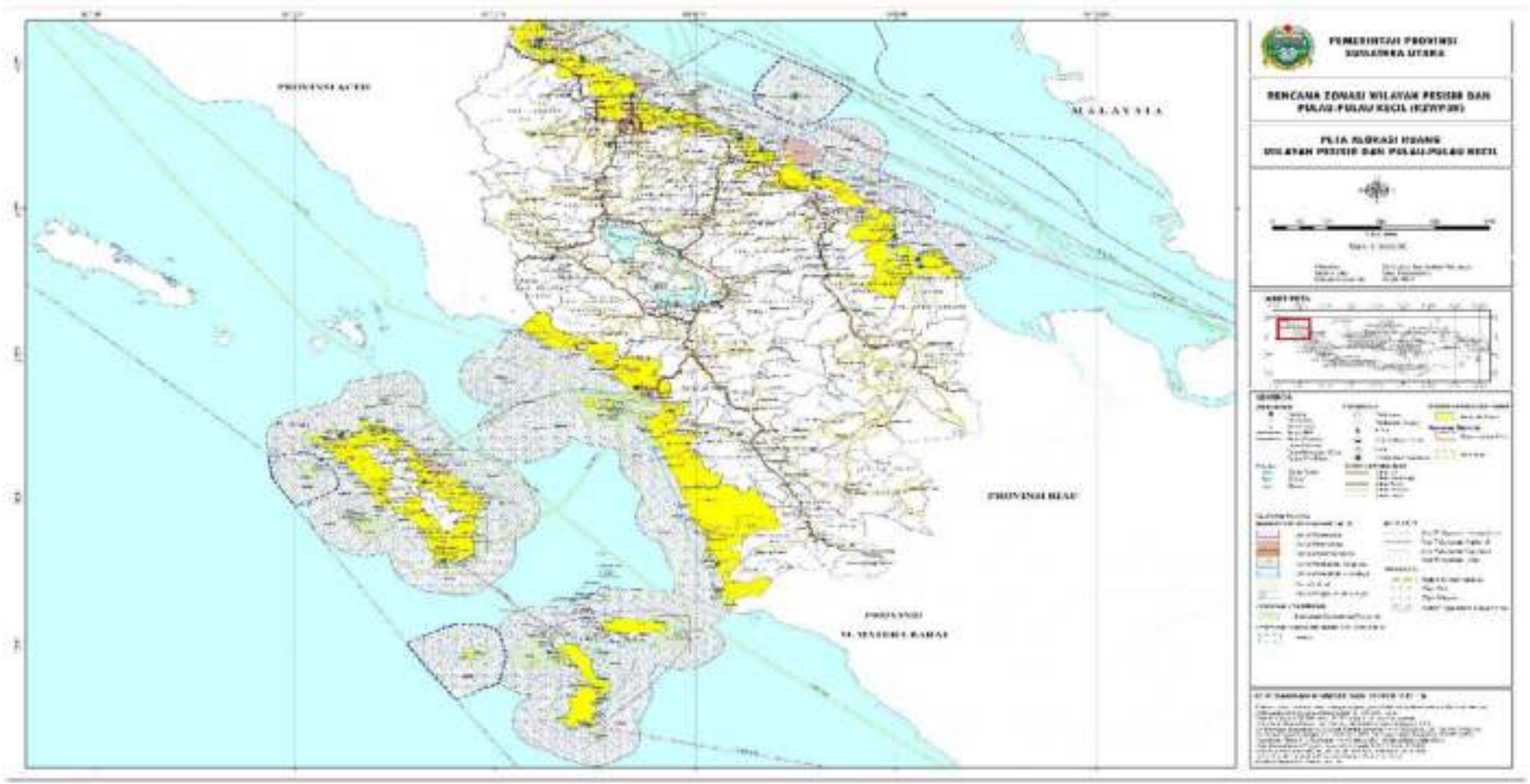

Peta Alokasi Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sumatera Utara Skala 1 : 1.000.000

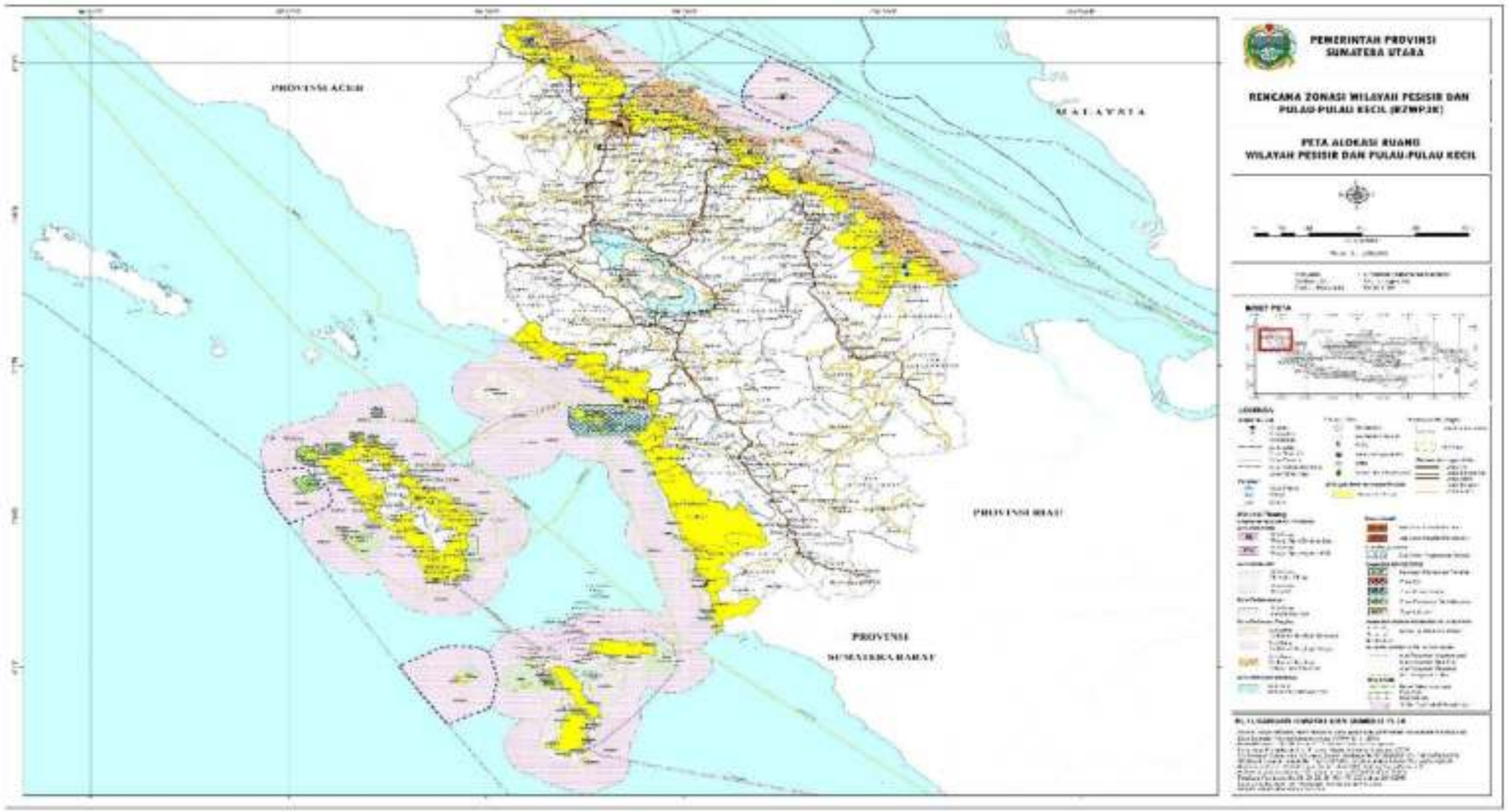

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat
Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1201

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kepulauan Nias Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1202

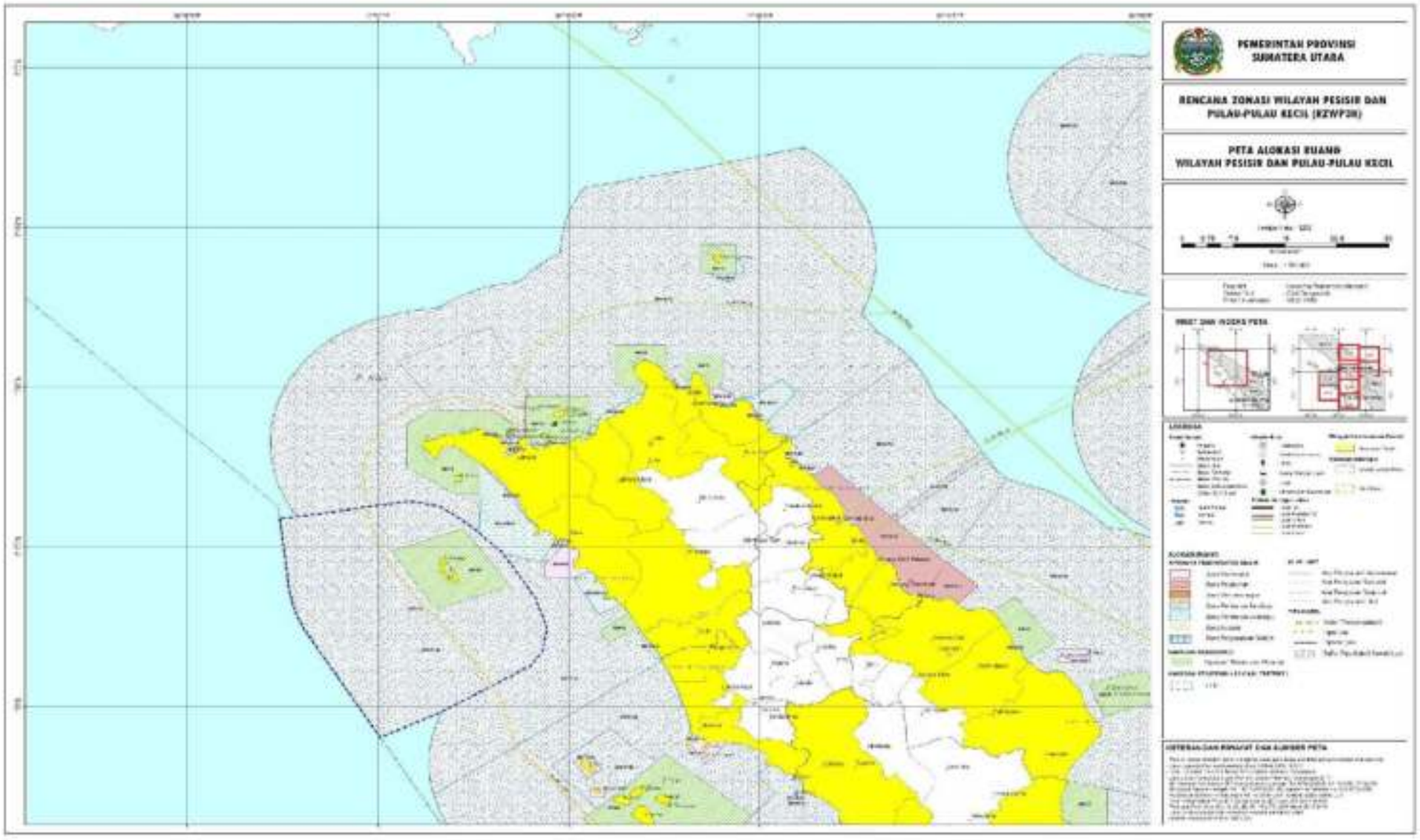

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kecamatan Pulau-pulau Batu Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1203

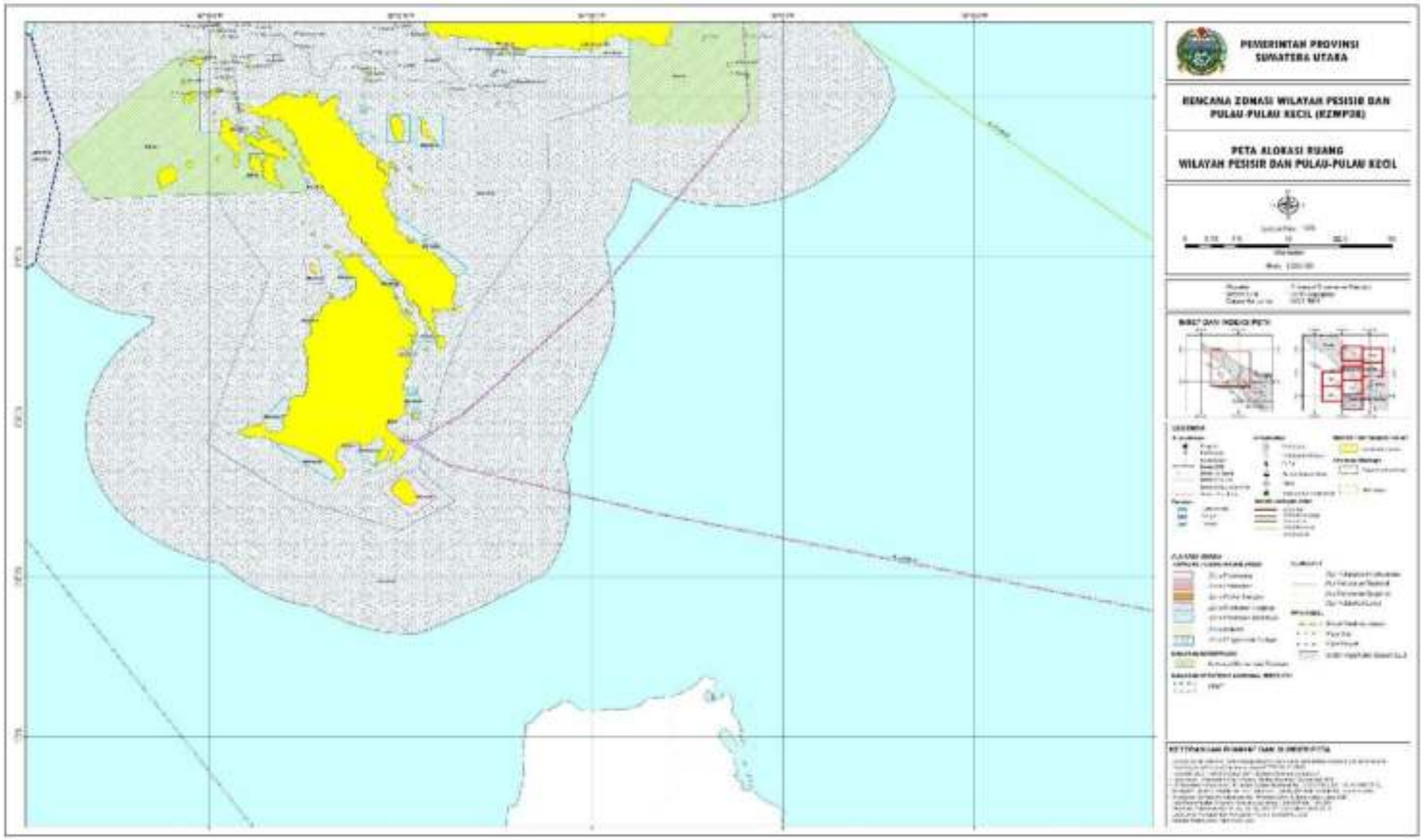

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kab. Nias Selatan dan Kab. Madina Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1204

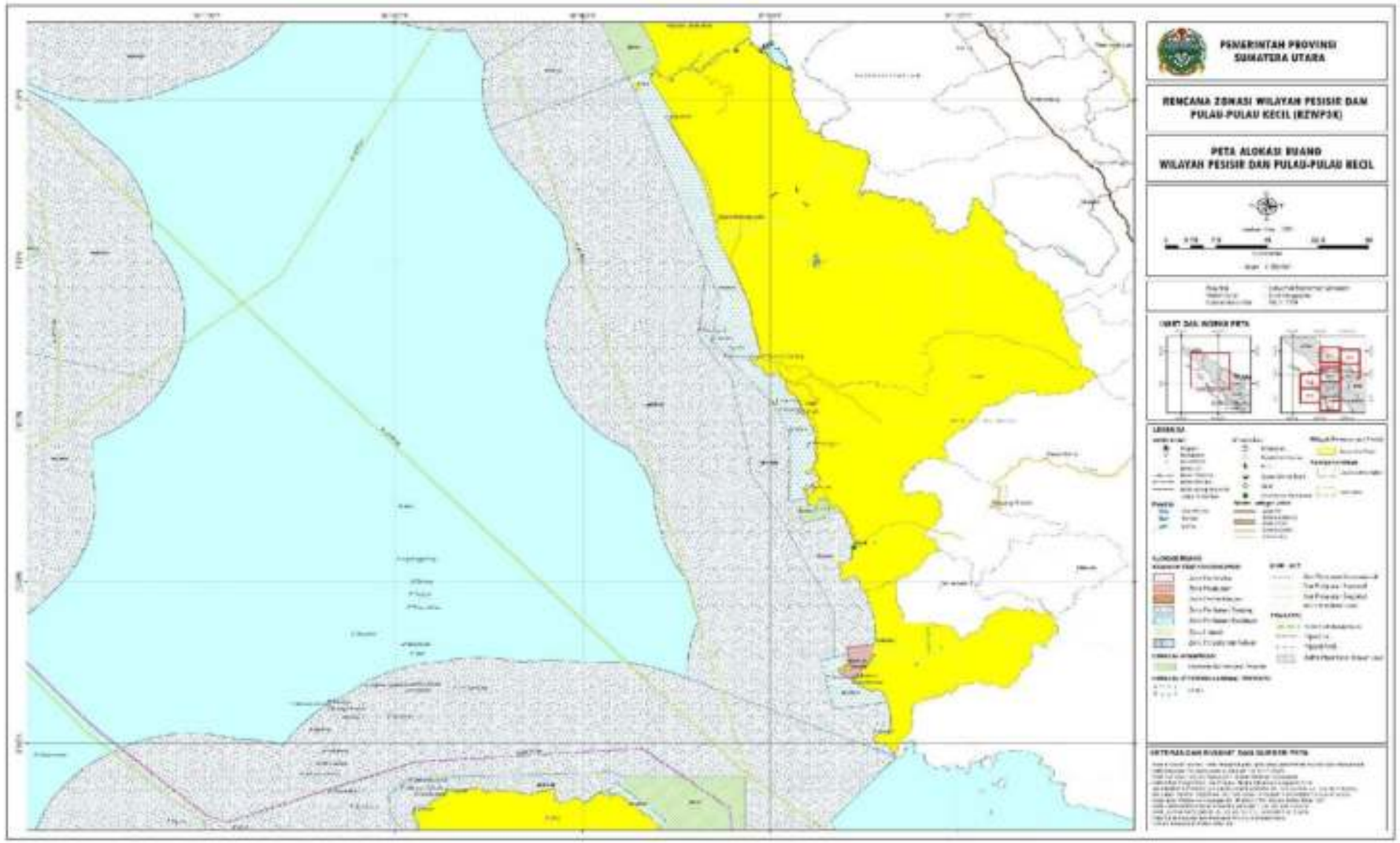

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Konservasi Perairan Pantai Barat Kab. Tapanuli Tengah Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1205

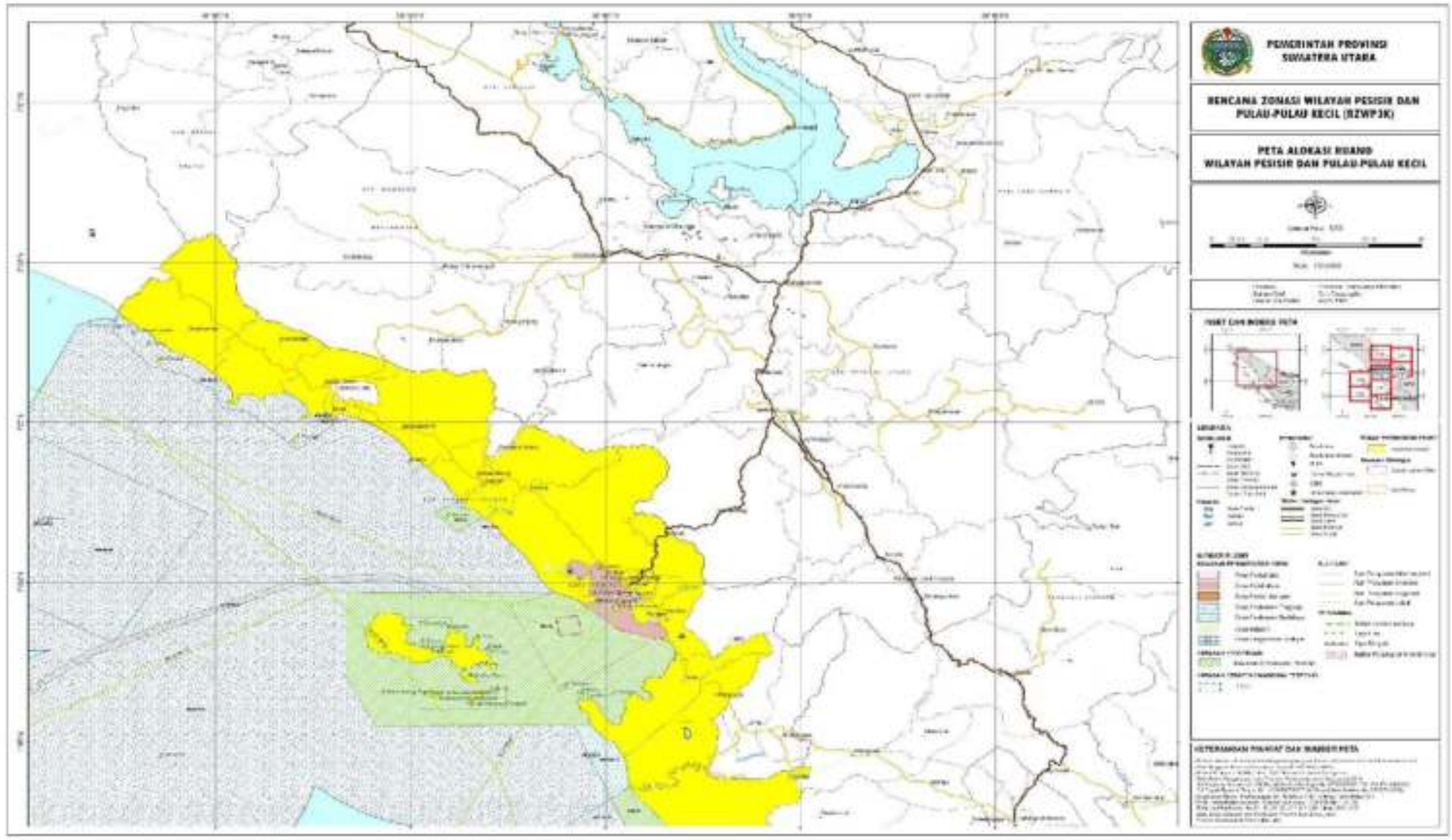

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Pemanfaatan Umum Pantai Timur
Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1206

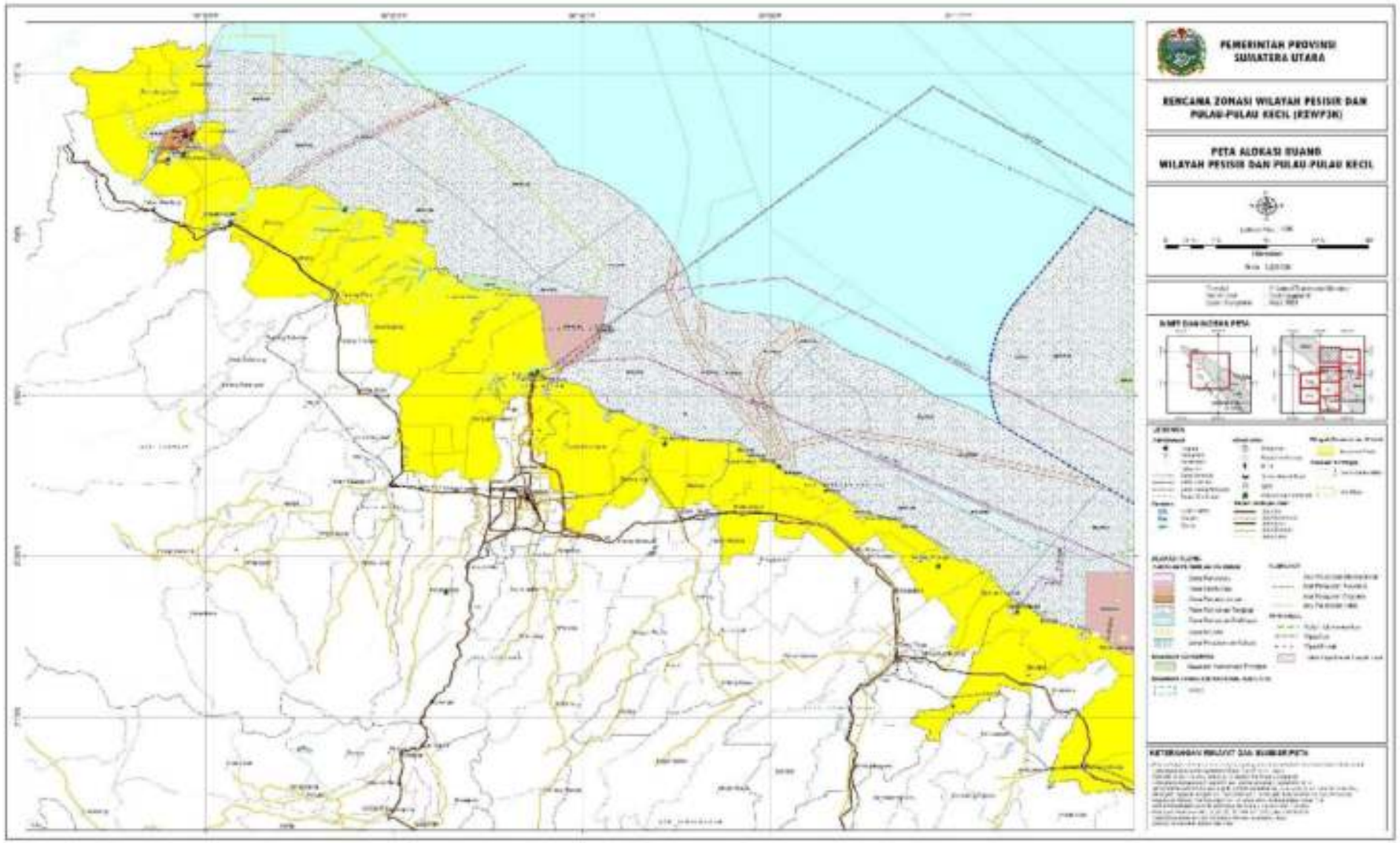

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Pemanfaatan Umum Pantai Timur
Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1207

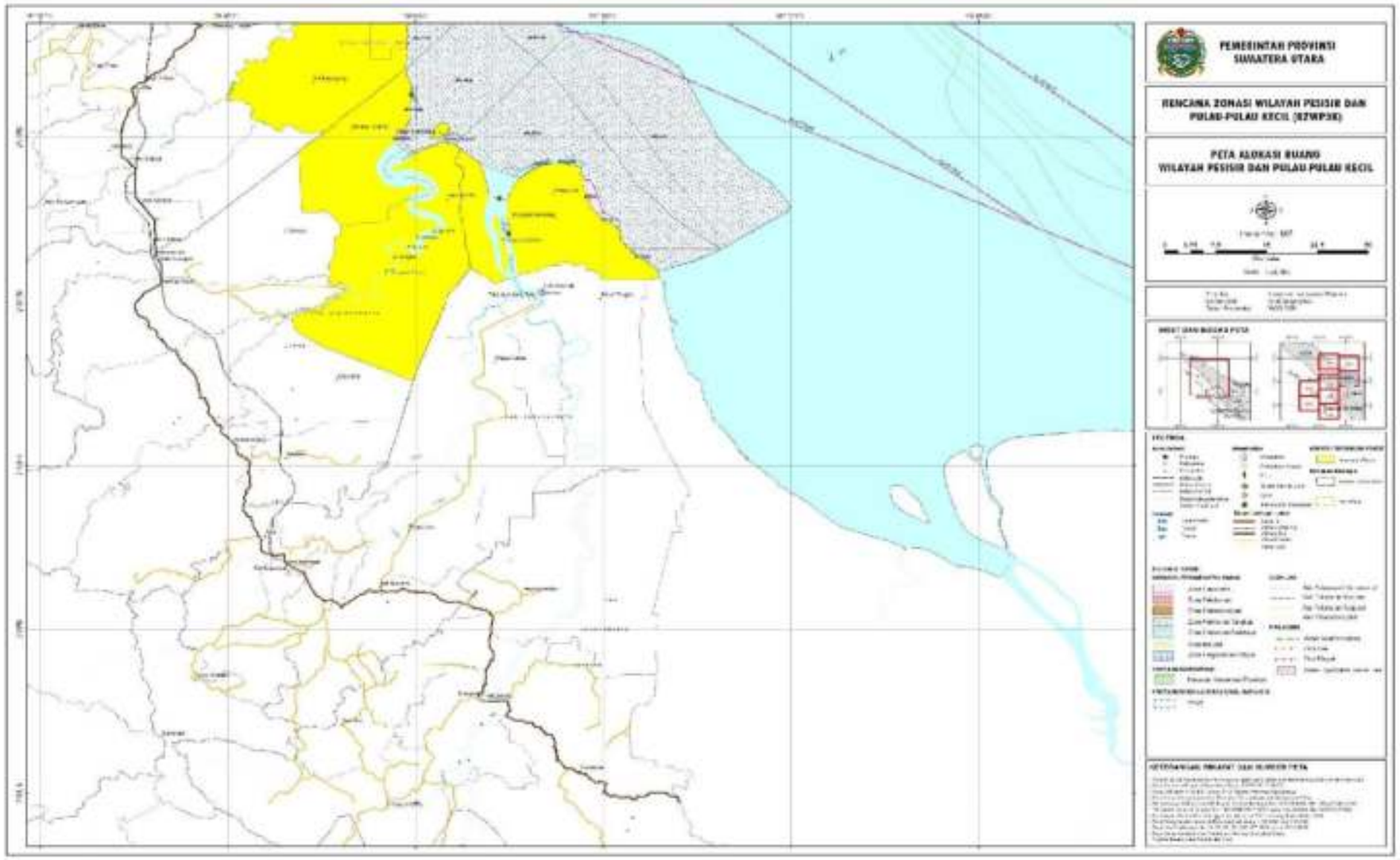

Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kawasan Pemanfaatan Umum Pantai Timur
Skala 1 : 250.000 Lembar Peta : 1208

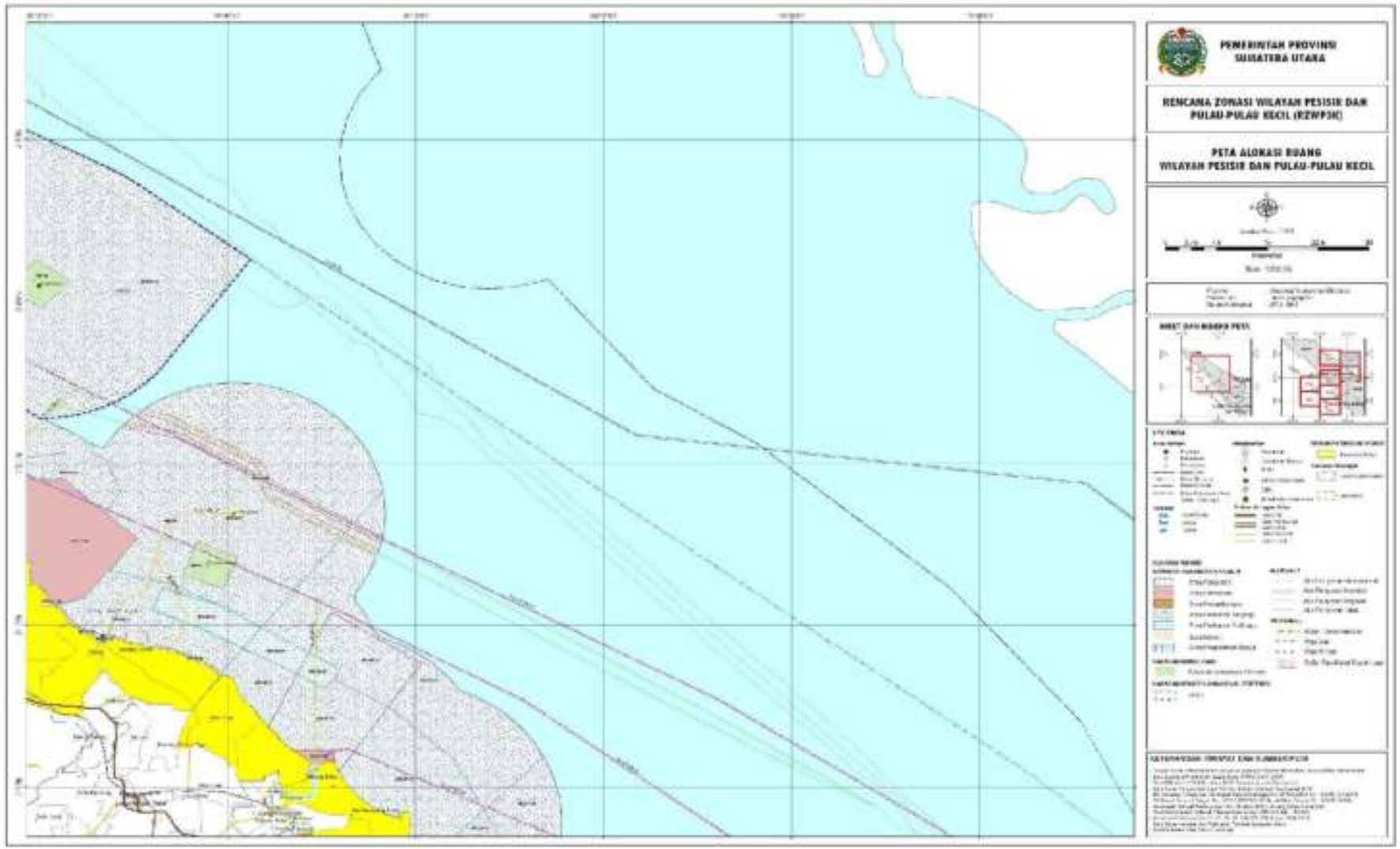

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0619-01 KABUPATEN LANGKAT

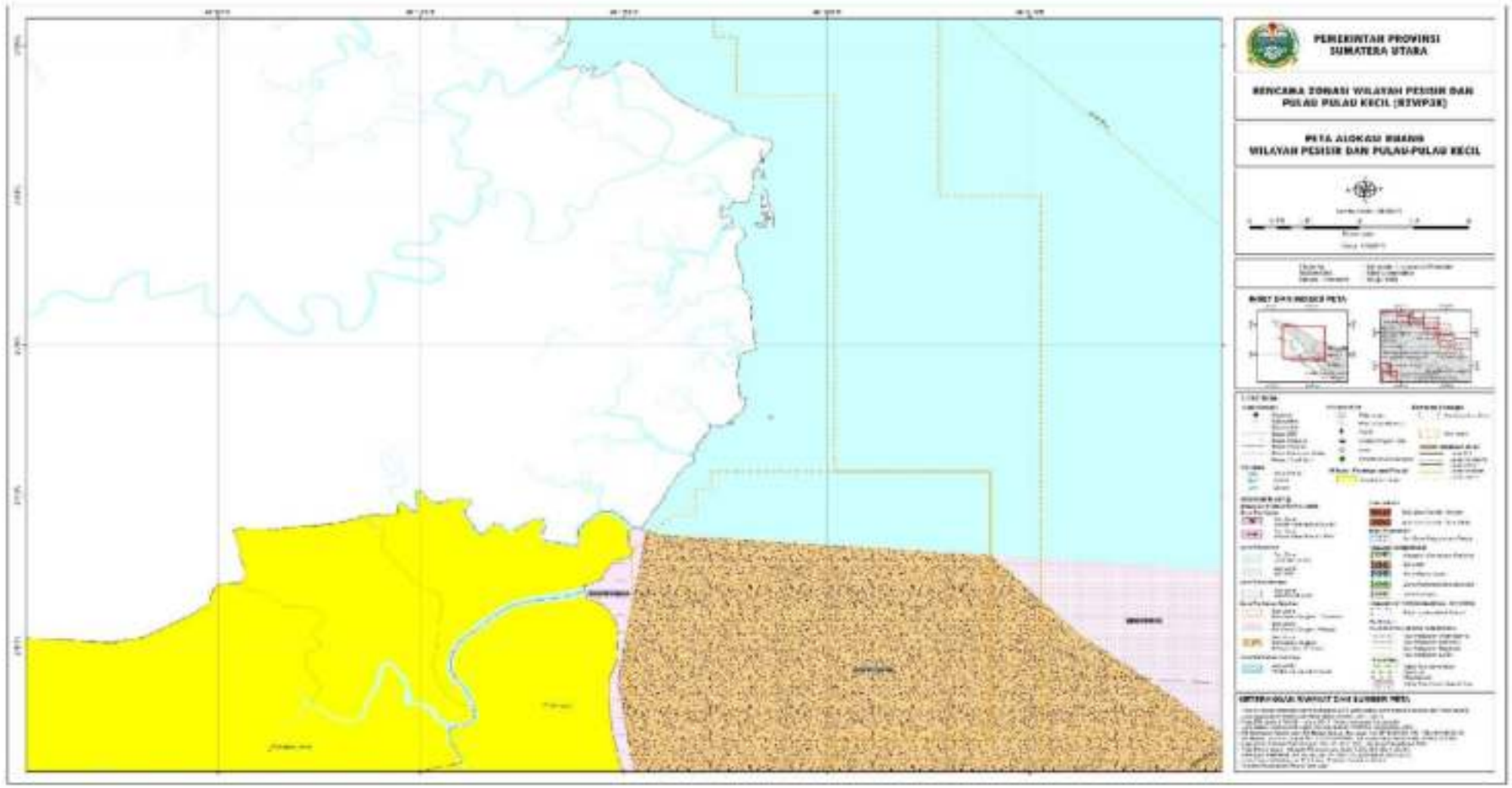

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0619-02 KABUPATEN LANGKAT

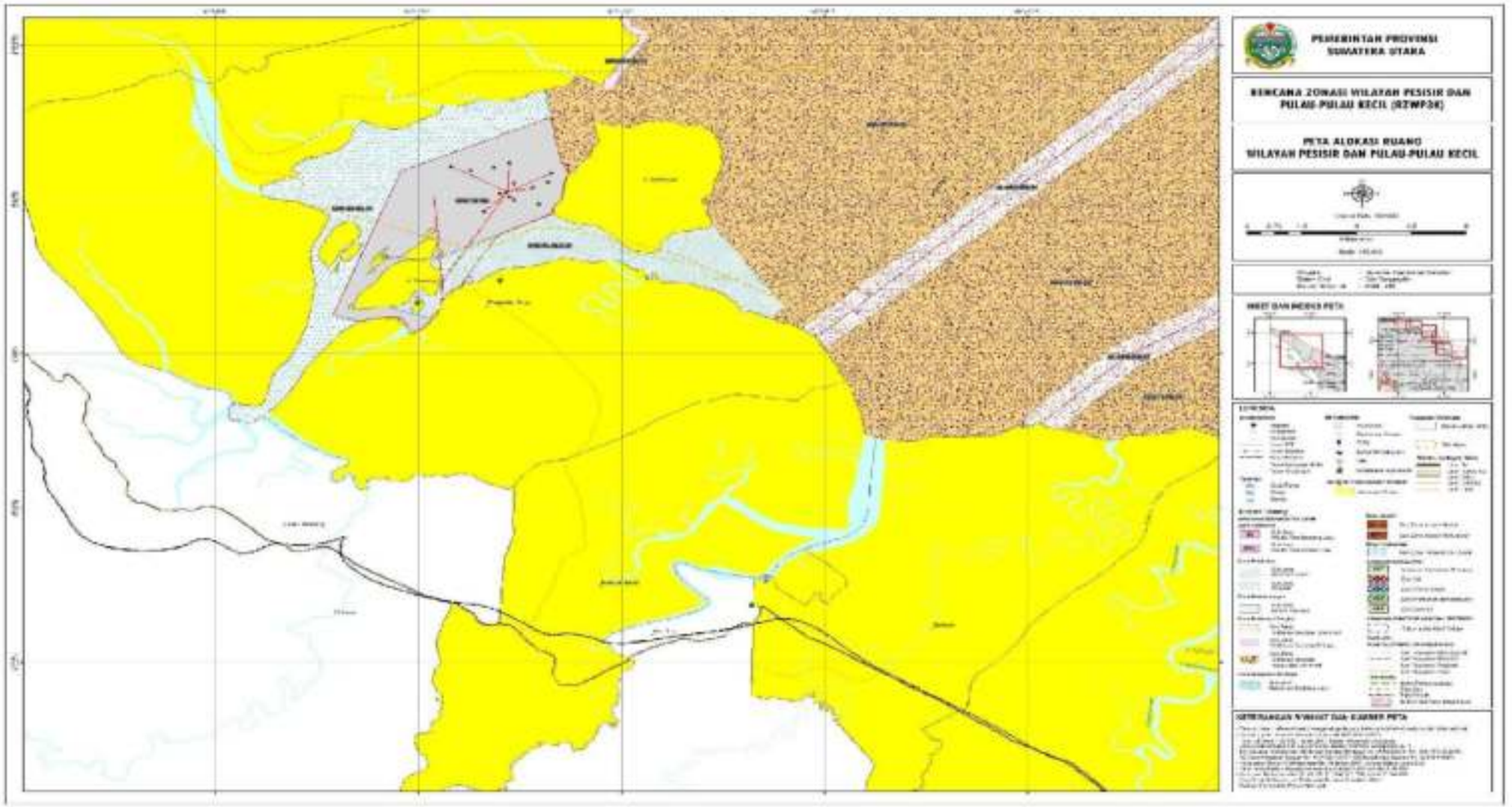

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0619-03 KABUPATEN LANGKAT

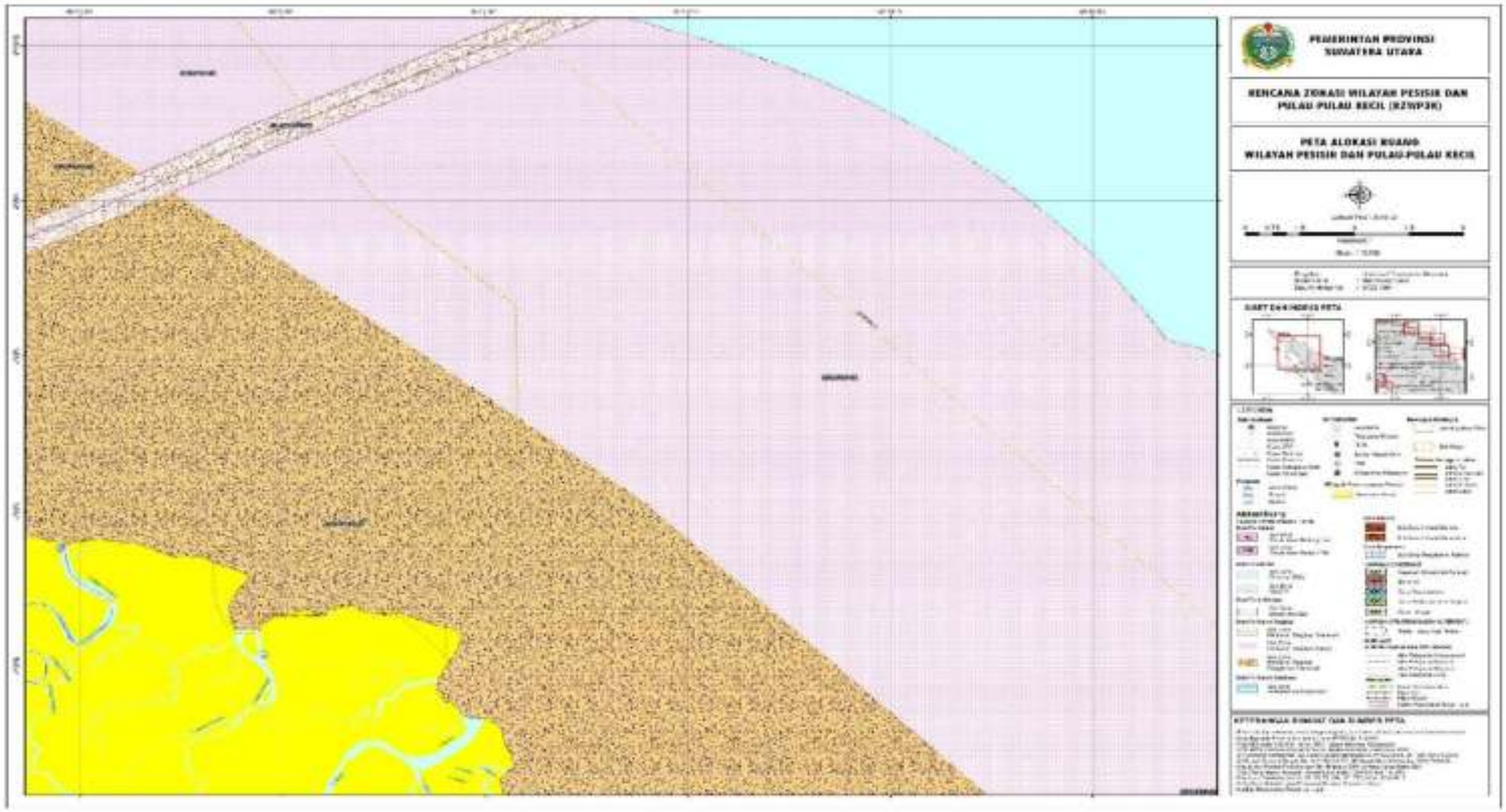

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0619-04 KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG

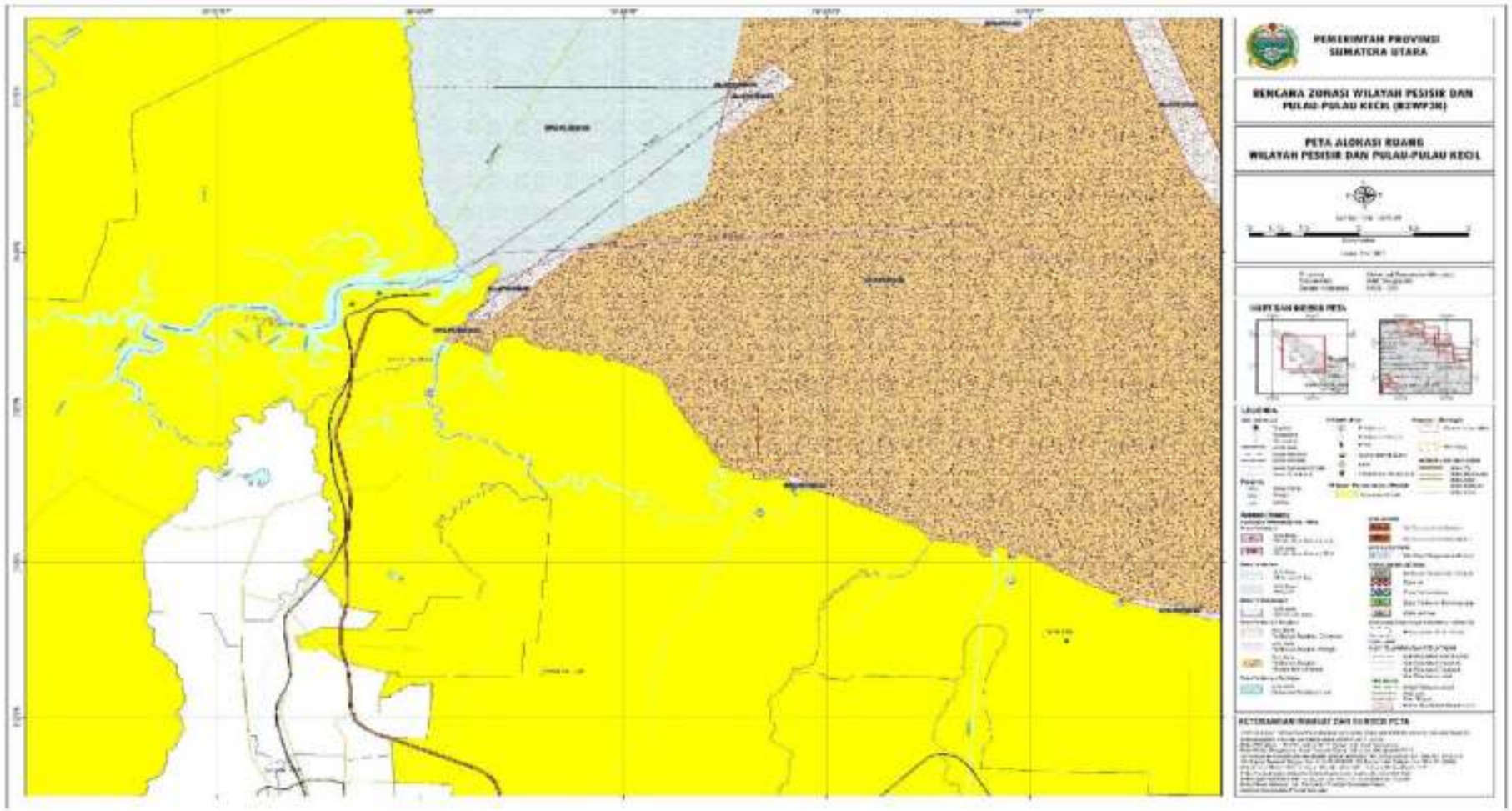

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0719-01 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0719-02 KABUPATEN BATUBARA

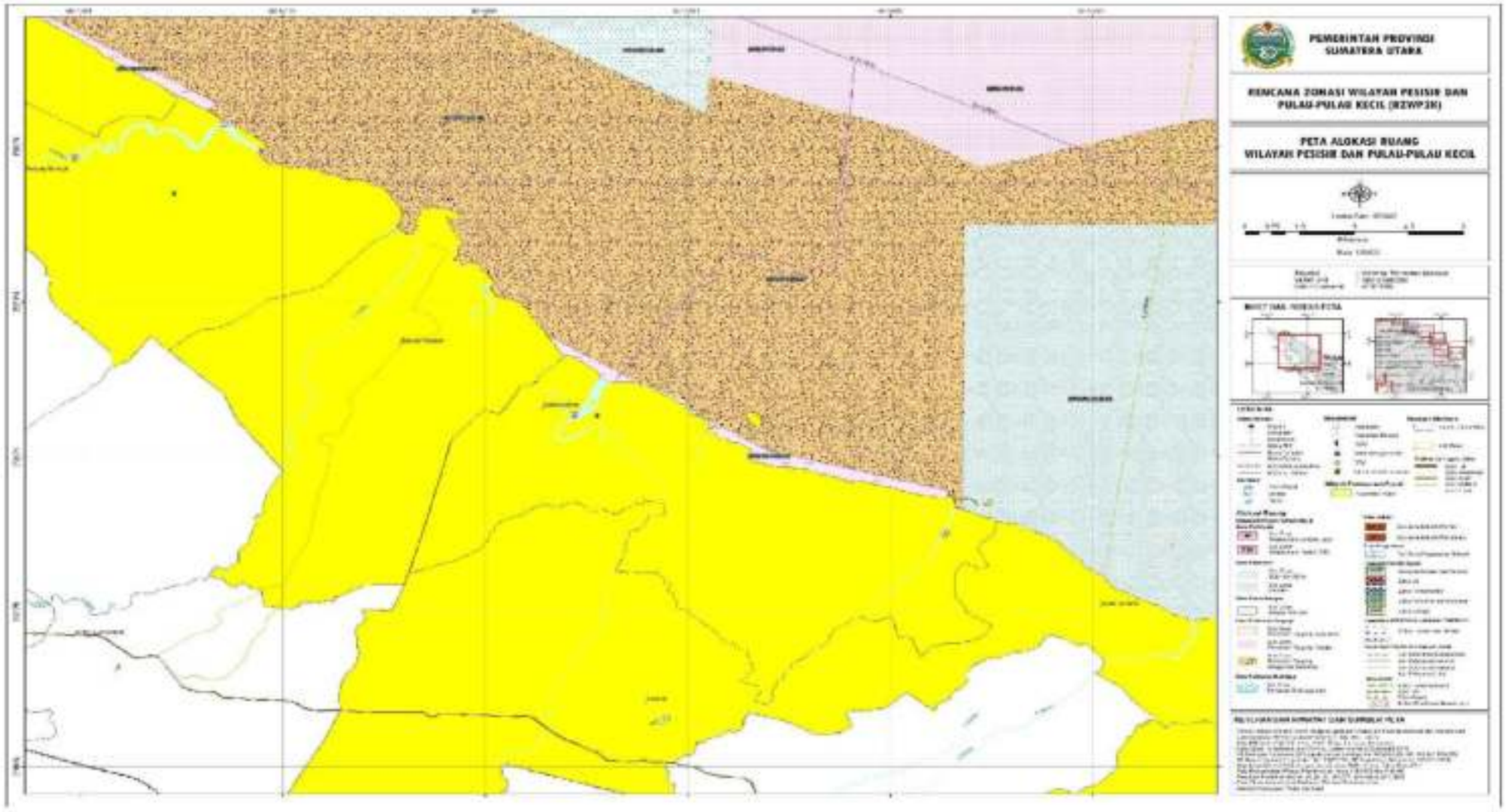

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0719-04 KABUPATEN BATUBARA

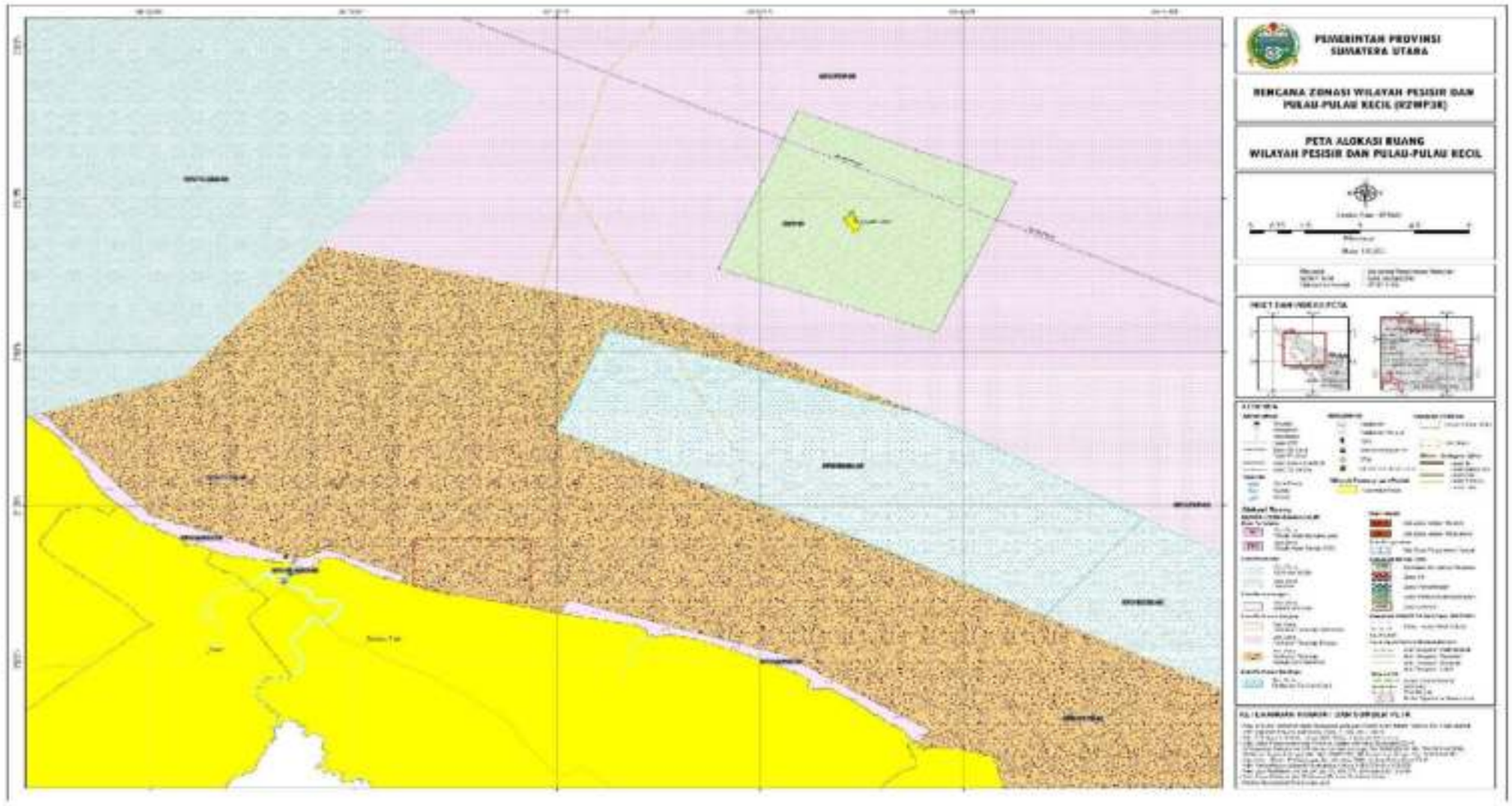

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0718-01 KABUPATEN ASAHAN

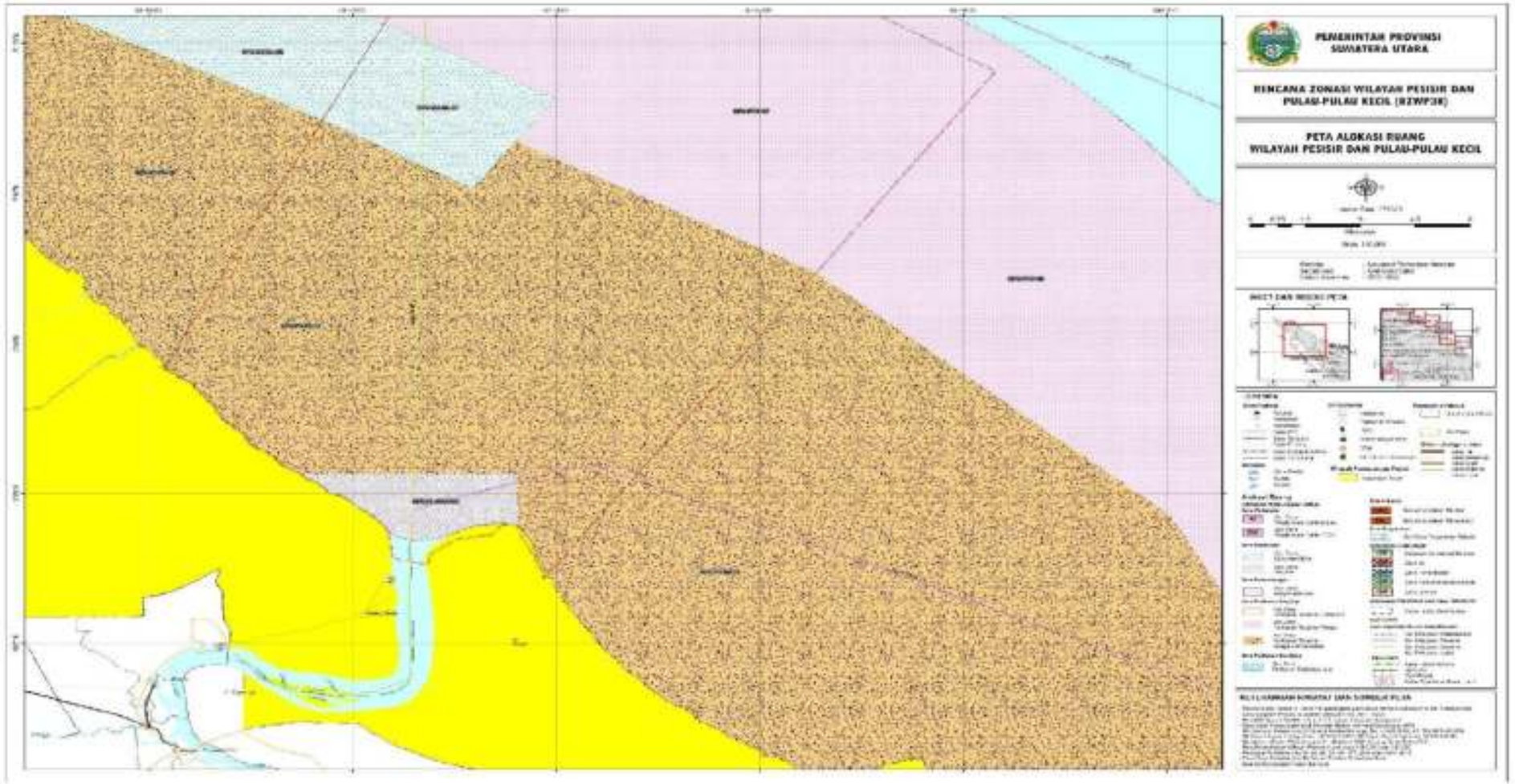

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0718-02 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

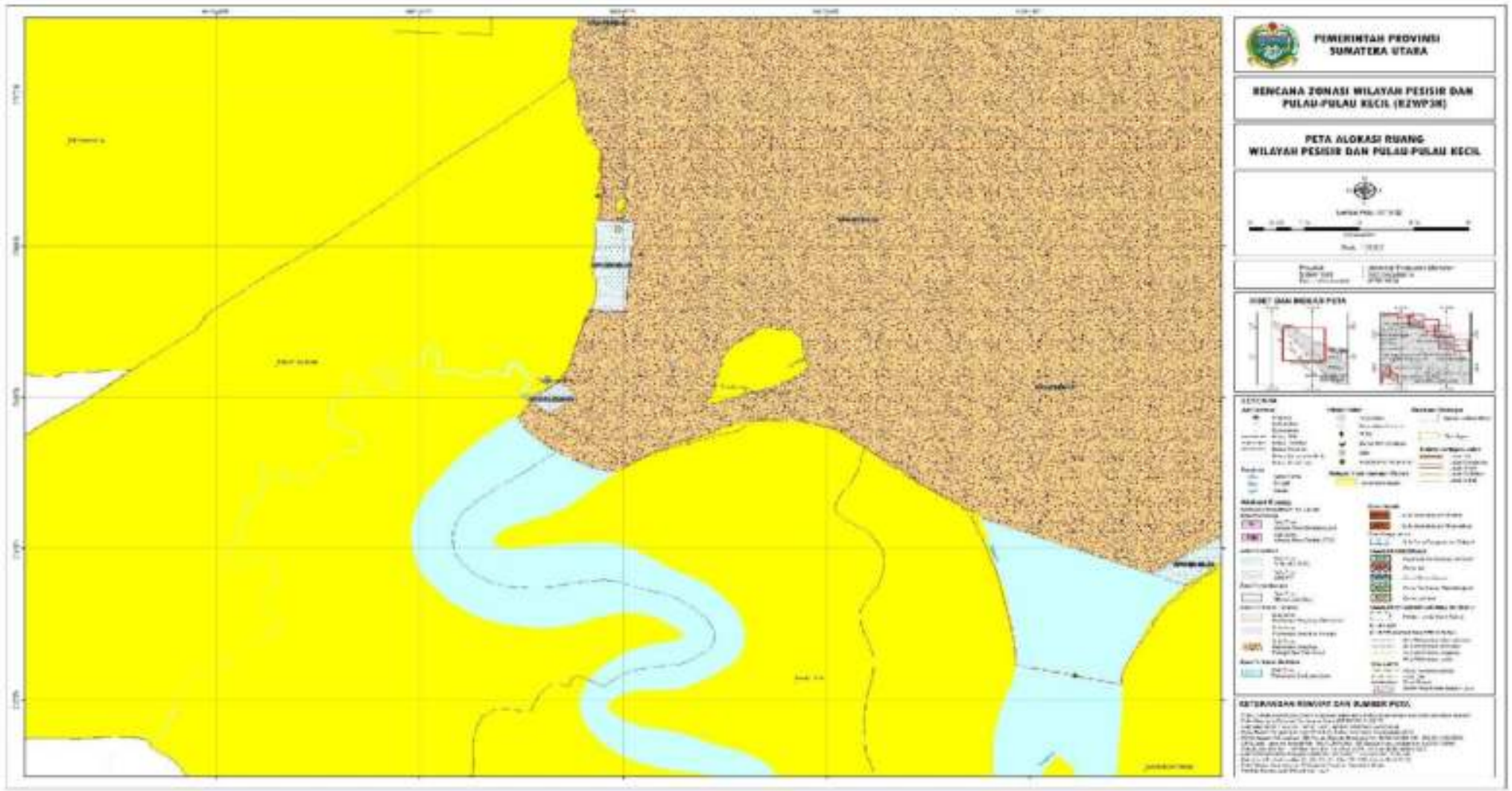

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0718-03 KABUPATEN LABUHANBATU

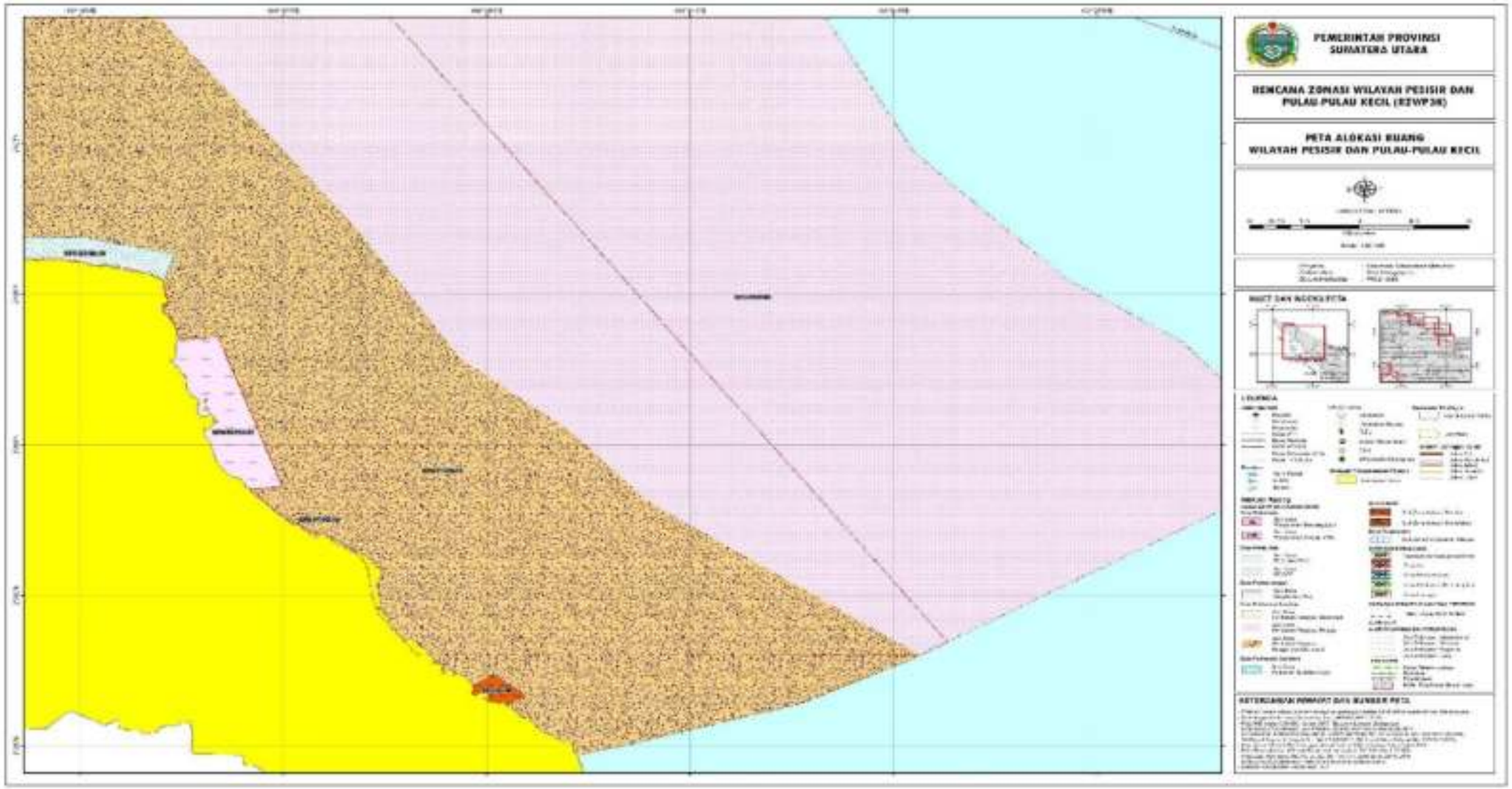

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0516-01 KABUPATEN NIAS BARAT

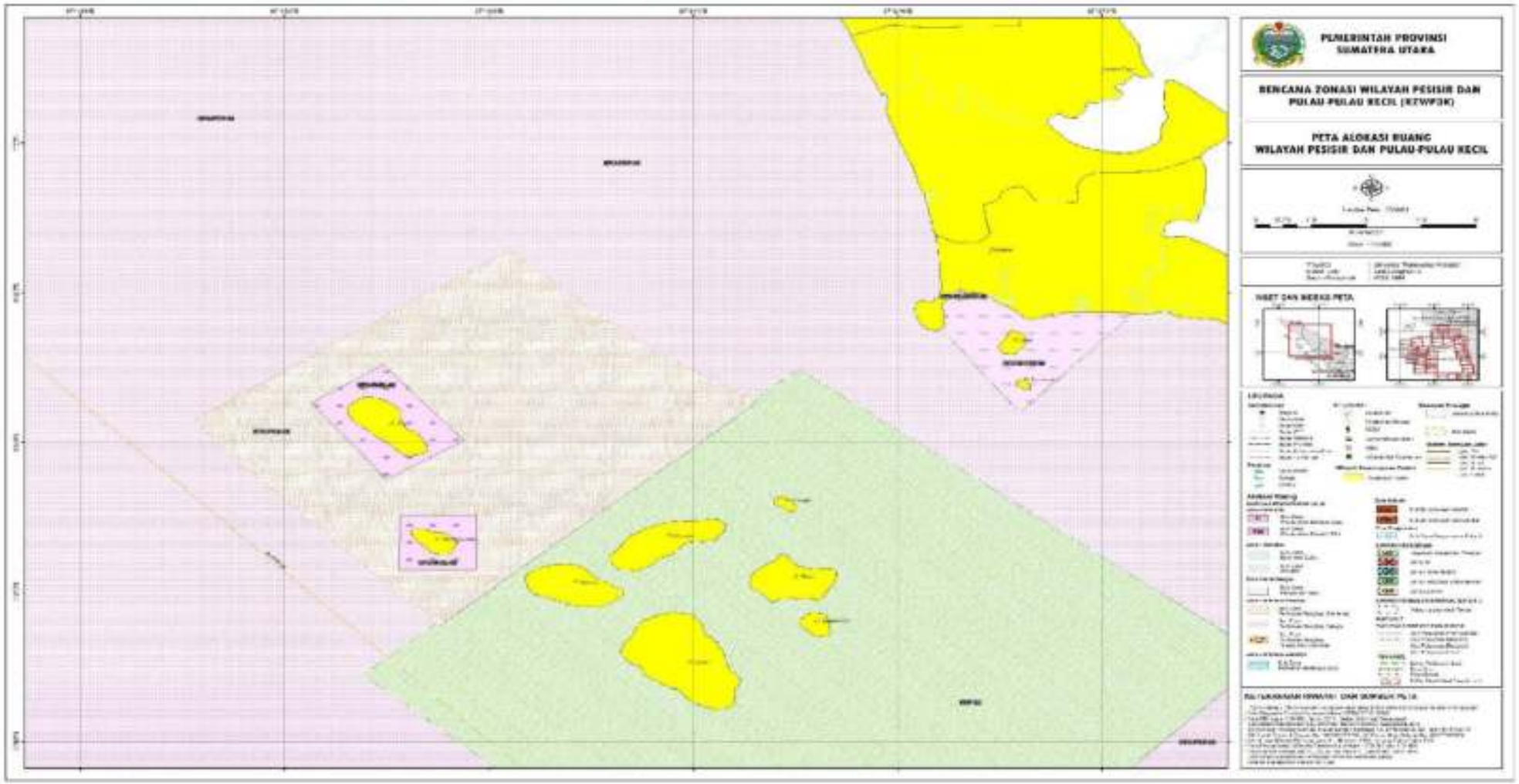

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0517-01 KABUPATEN NIAS UTARA

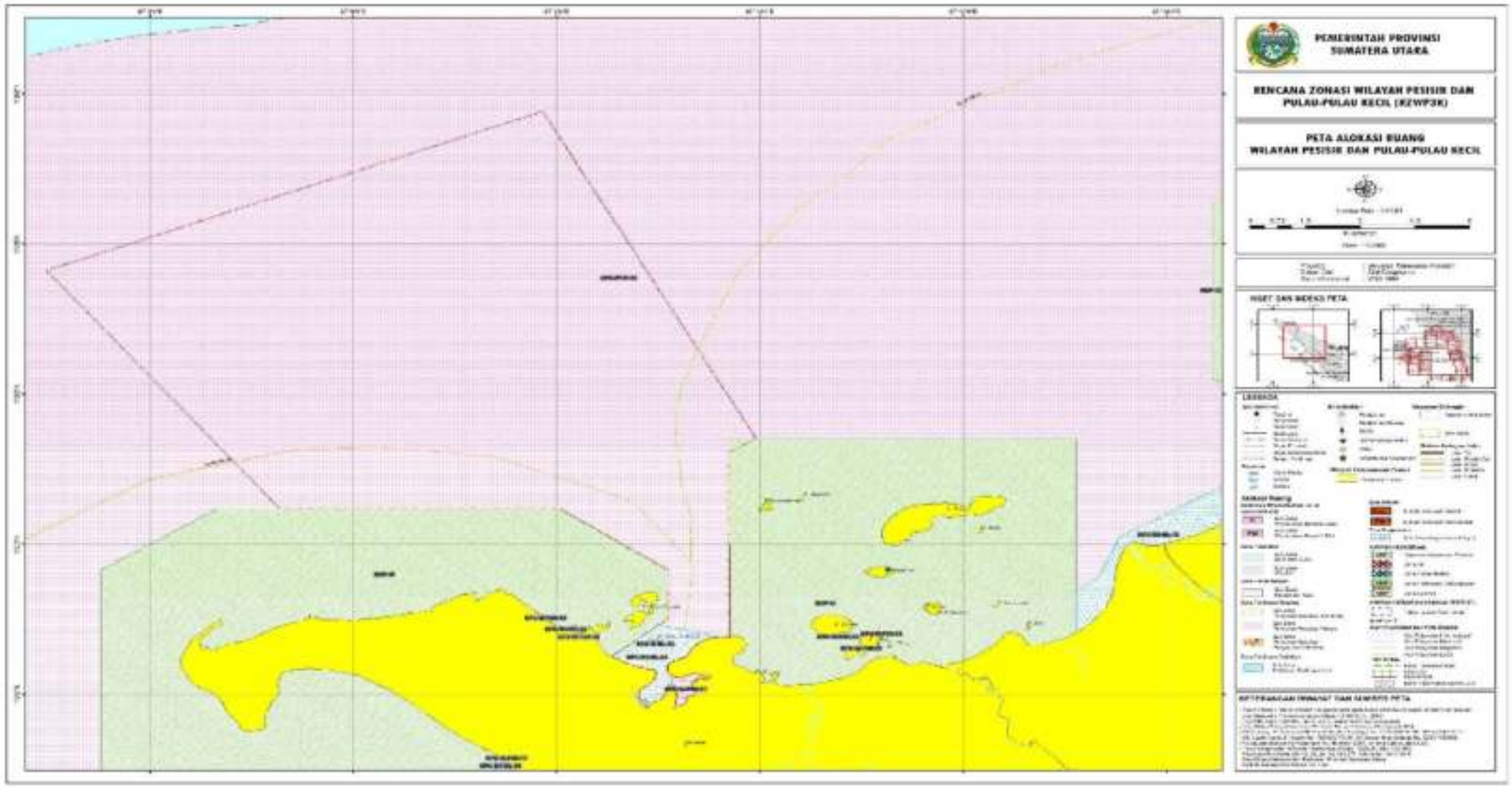

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0517-02 KABUPATEN NIAS UTARA

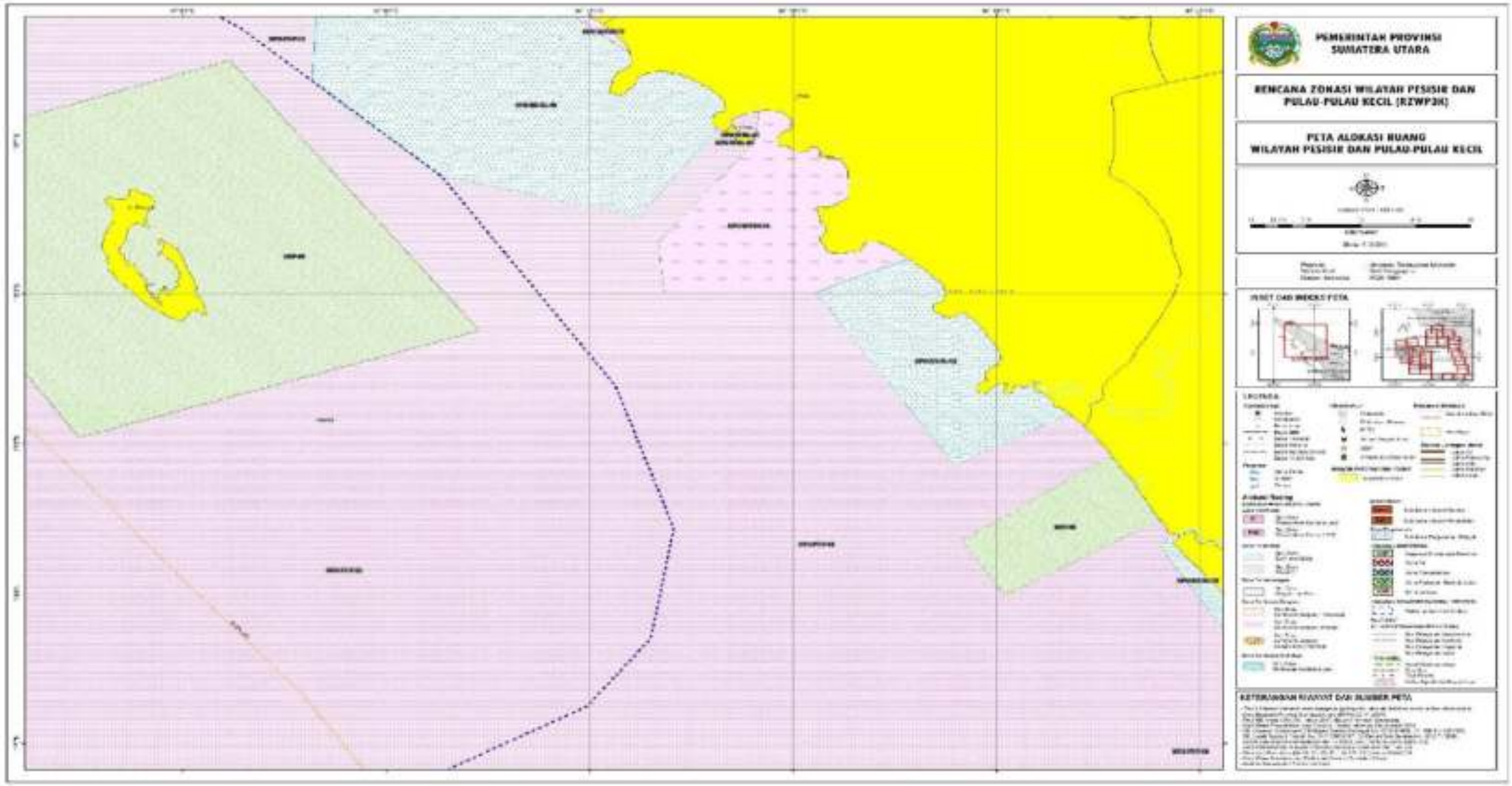

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0517-03 KABUPATEN NIAS UTARA

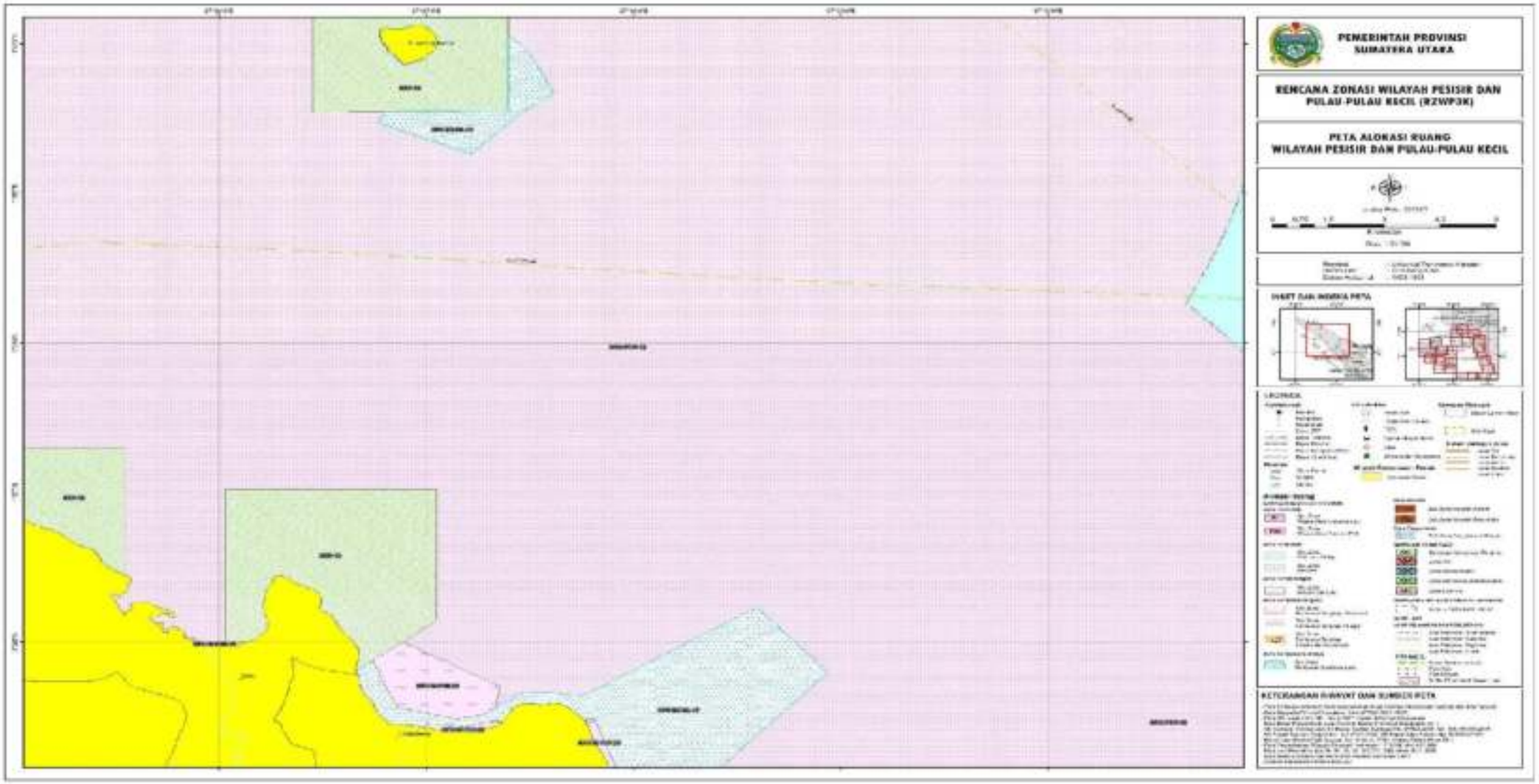

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-01 KABUPATEN NIAS SELATAN

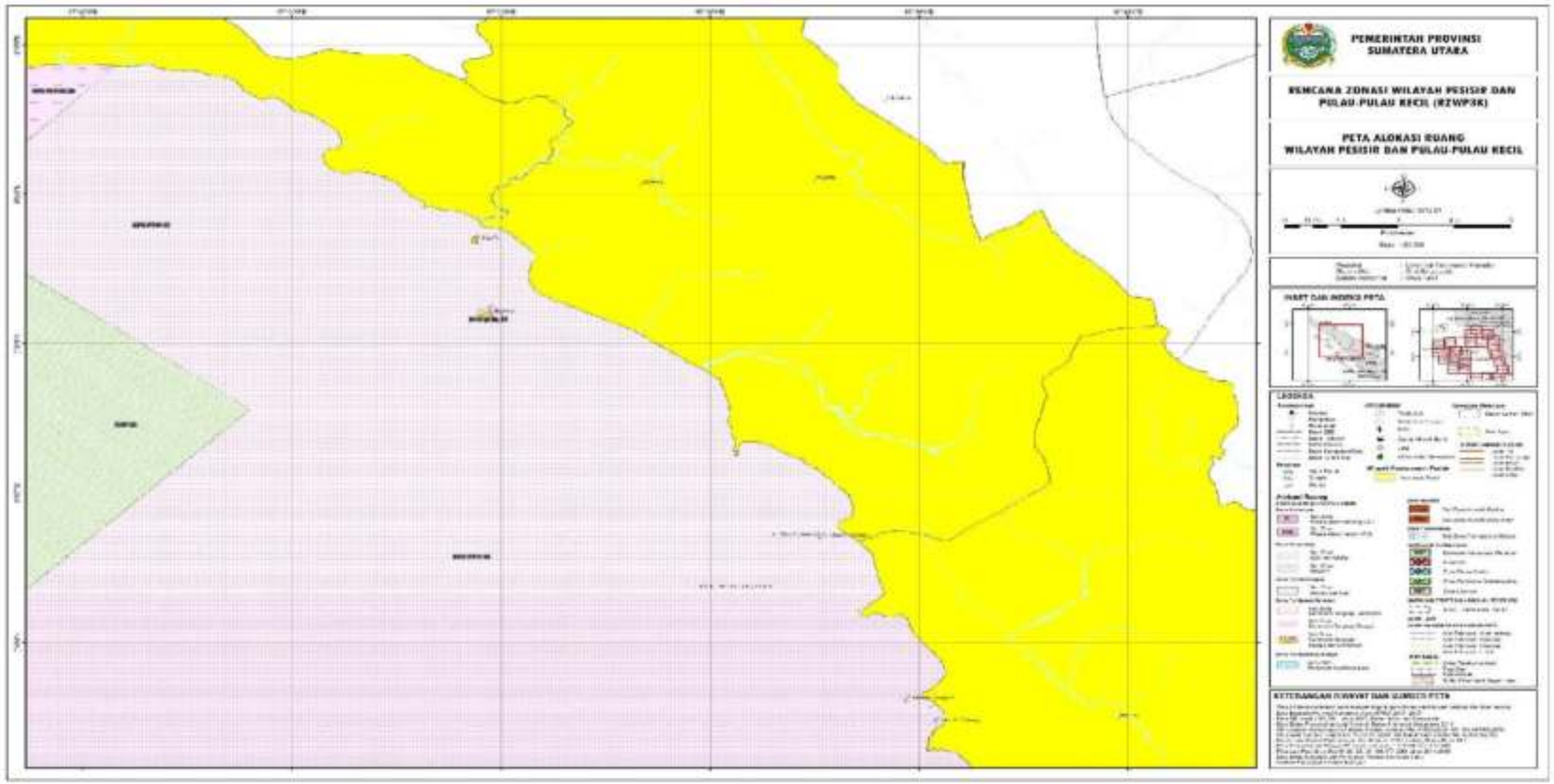

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-03 KABUPATEN NIAS SELATAN

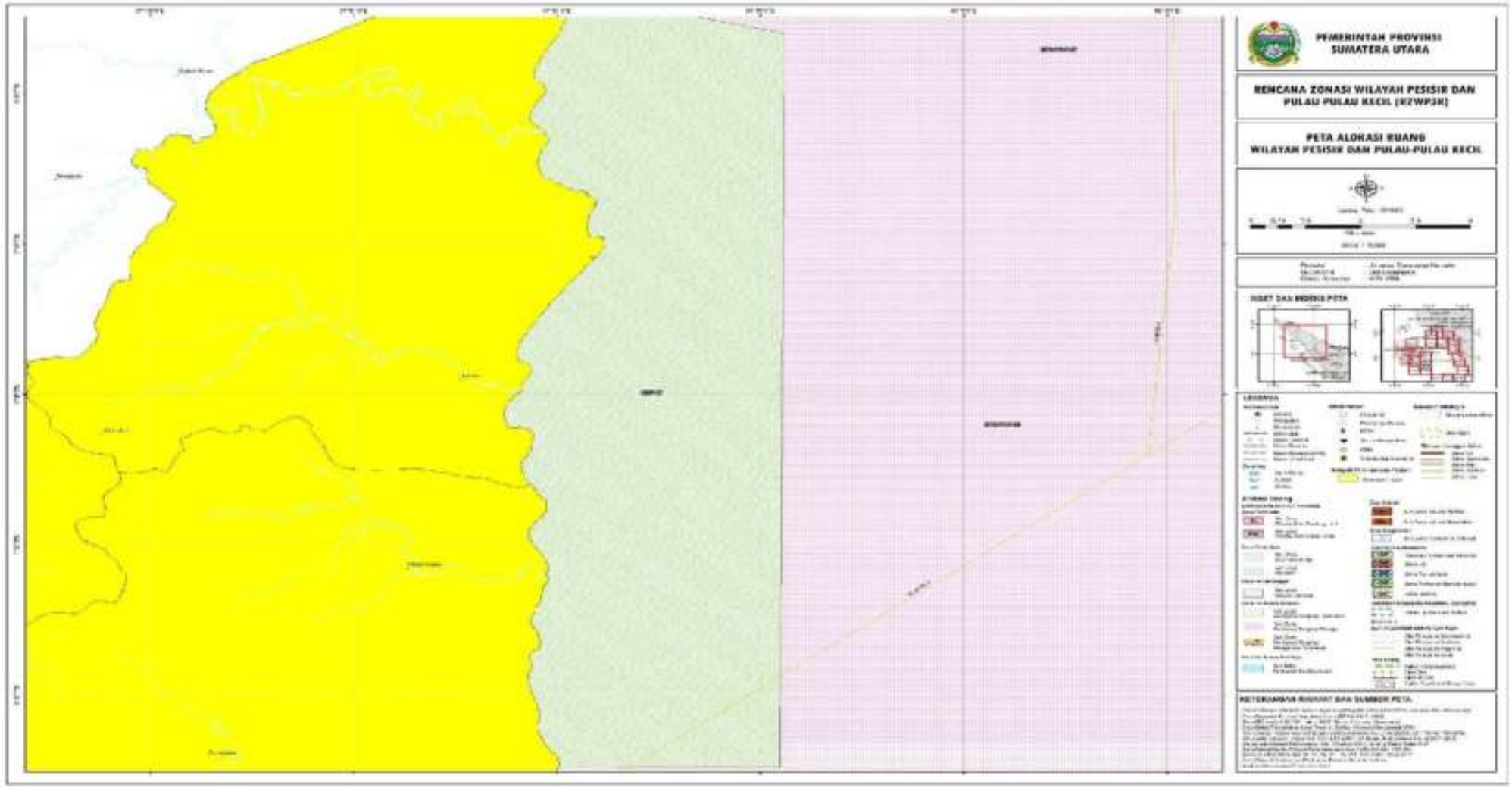

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-07 KABUPATEN MANDAILING NATAL

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-01 KOTA GUNUNGSITOLI

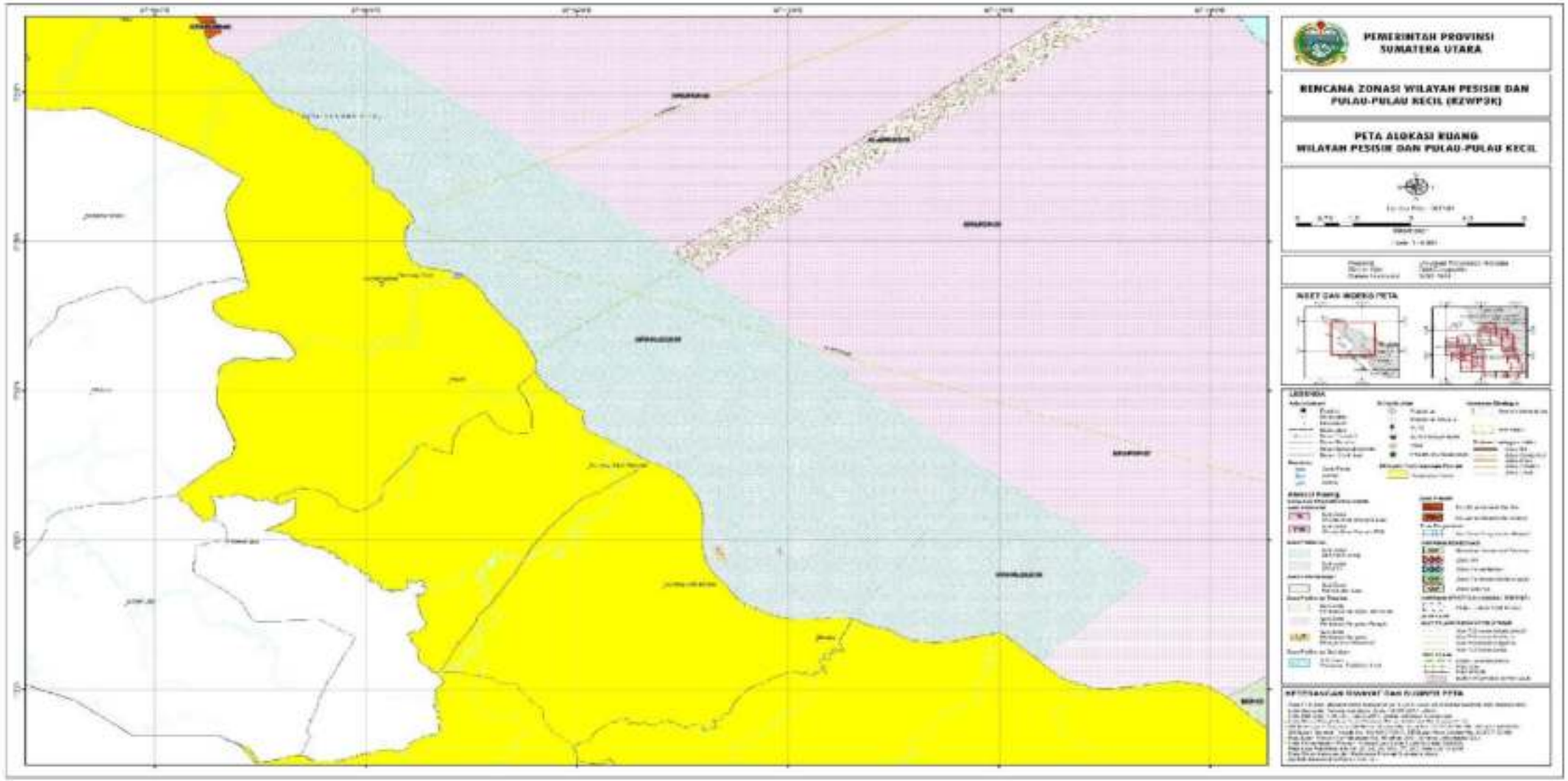

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-02 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

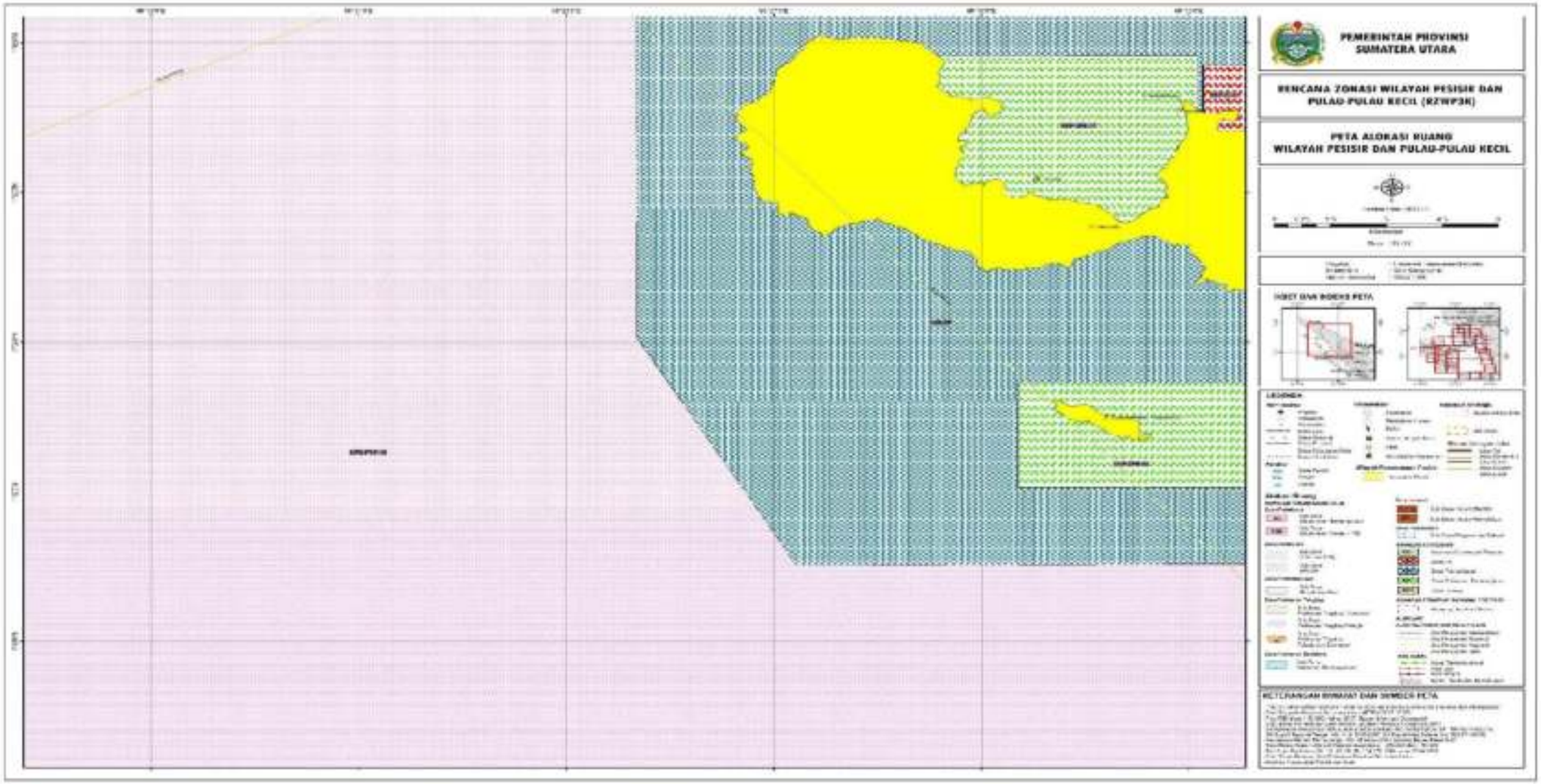

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-03 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

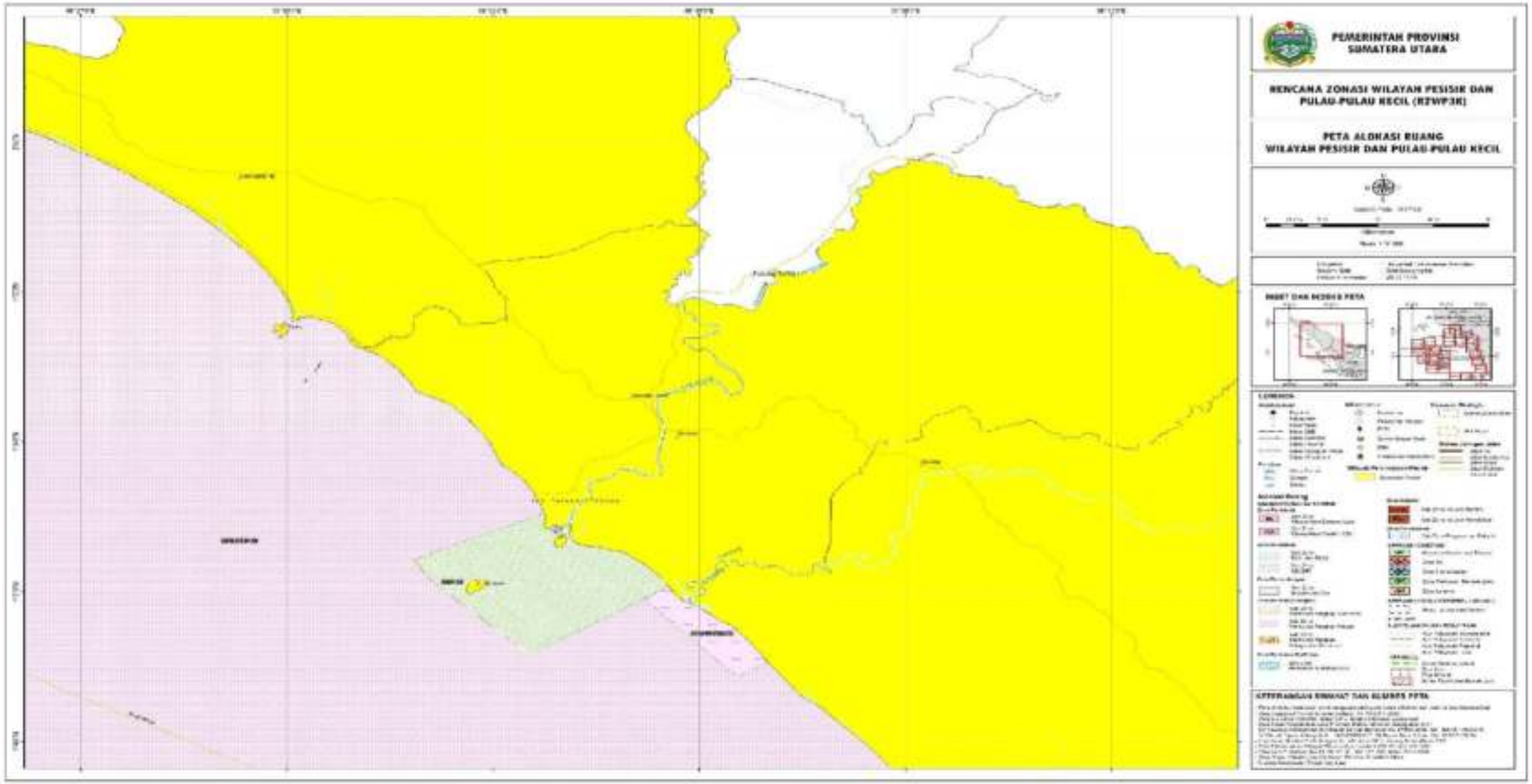

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-04 KOTA SIBOLGA DAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

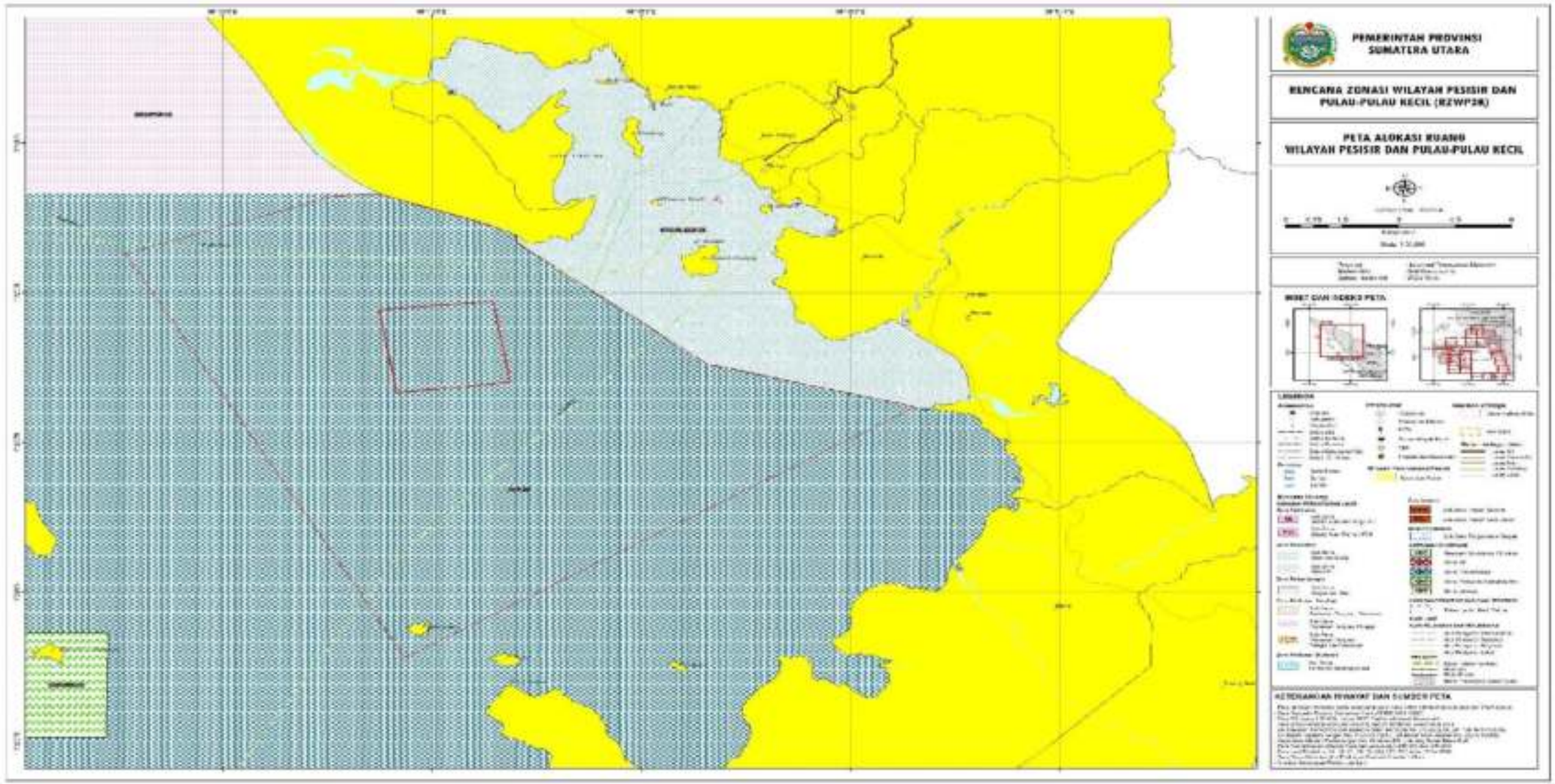

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-05 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

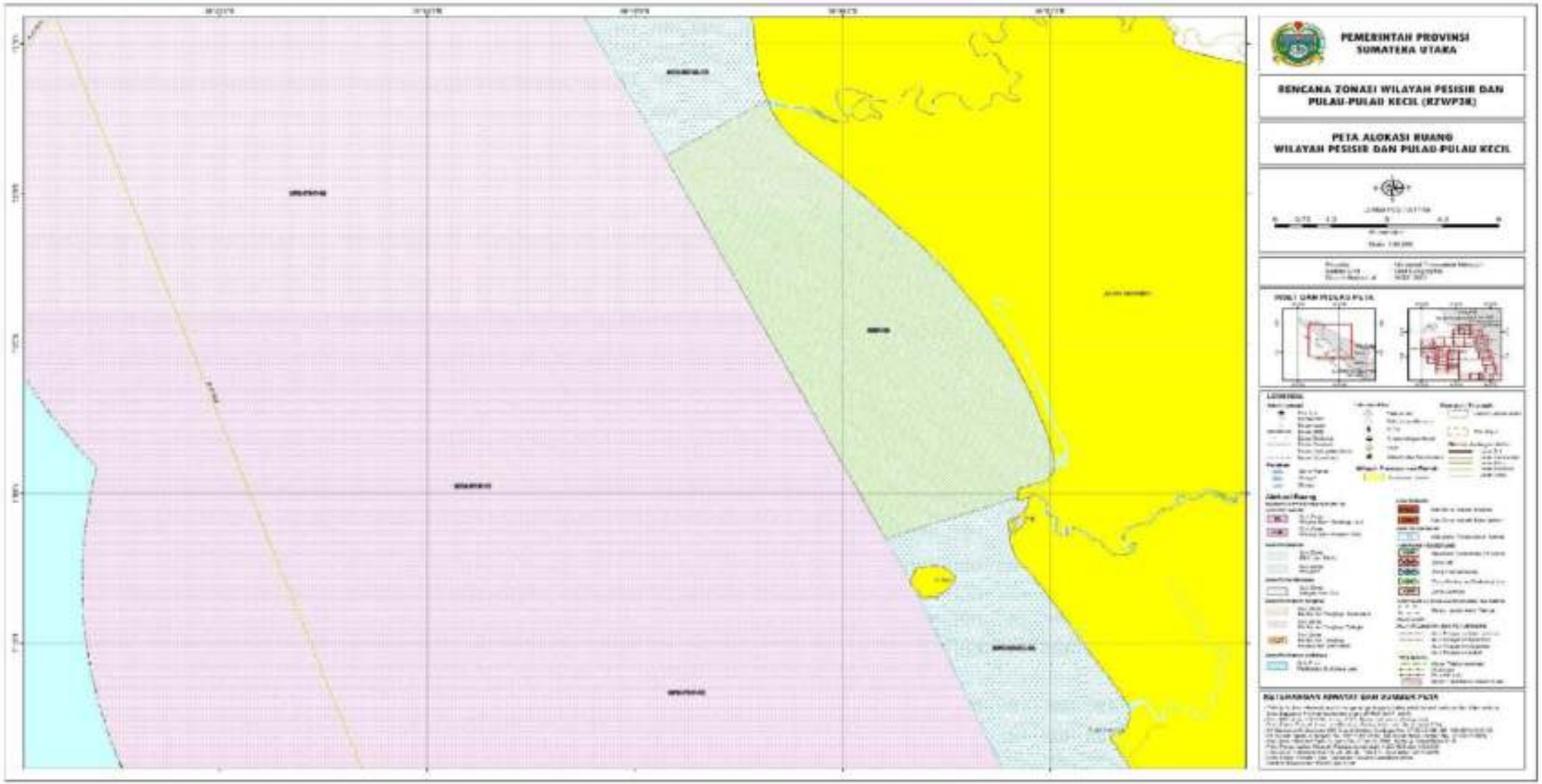

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-06 KABUPATEN MANDAILING NATAL

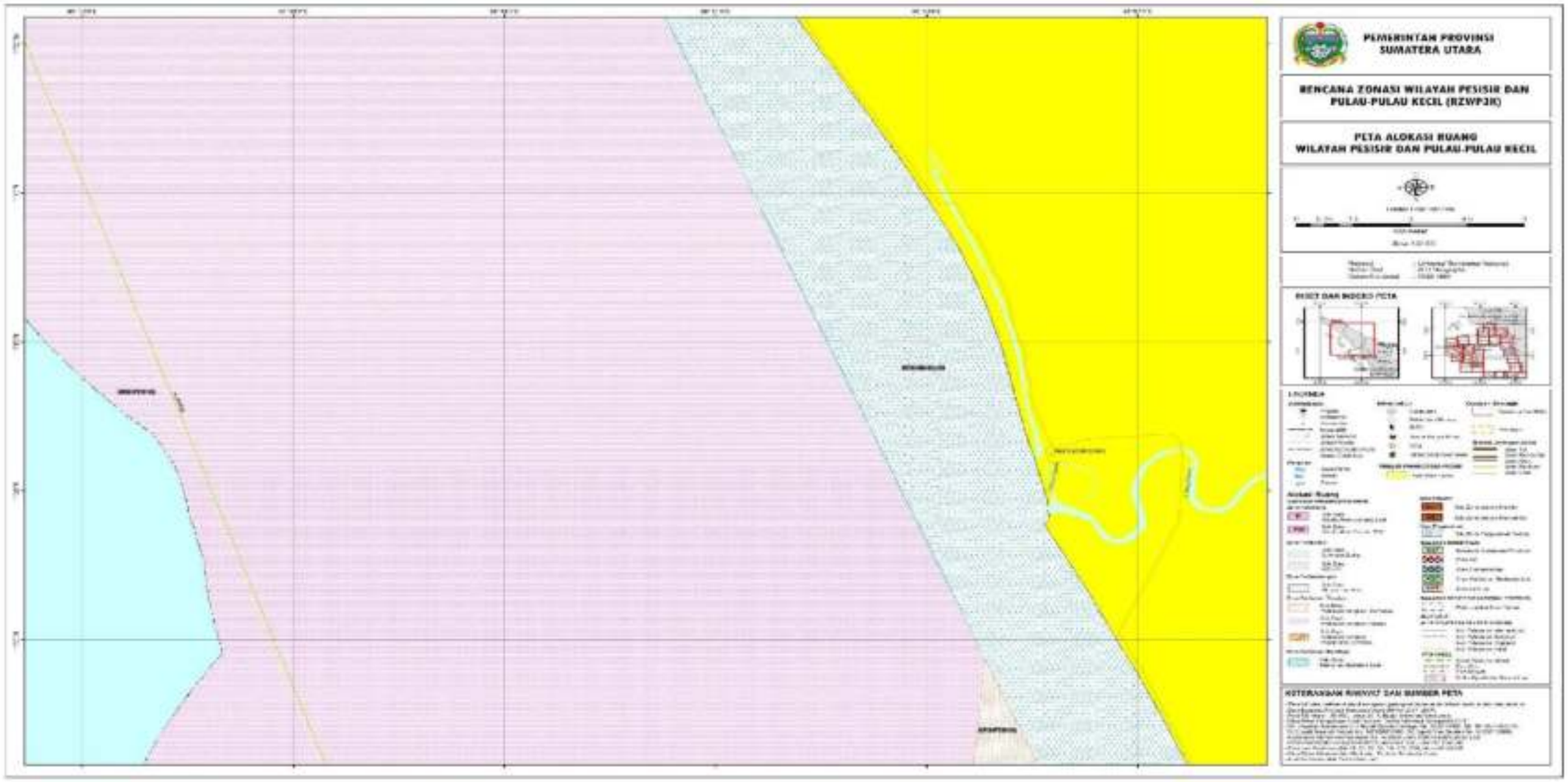

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-07 KABUPATEN NIAS

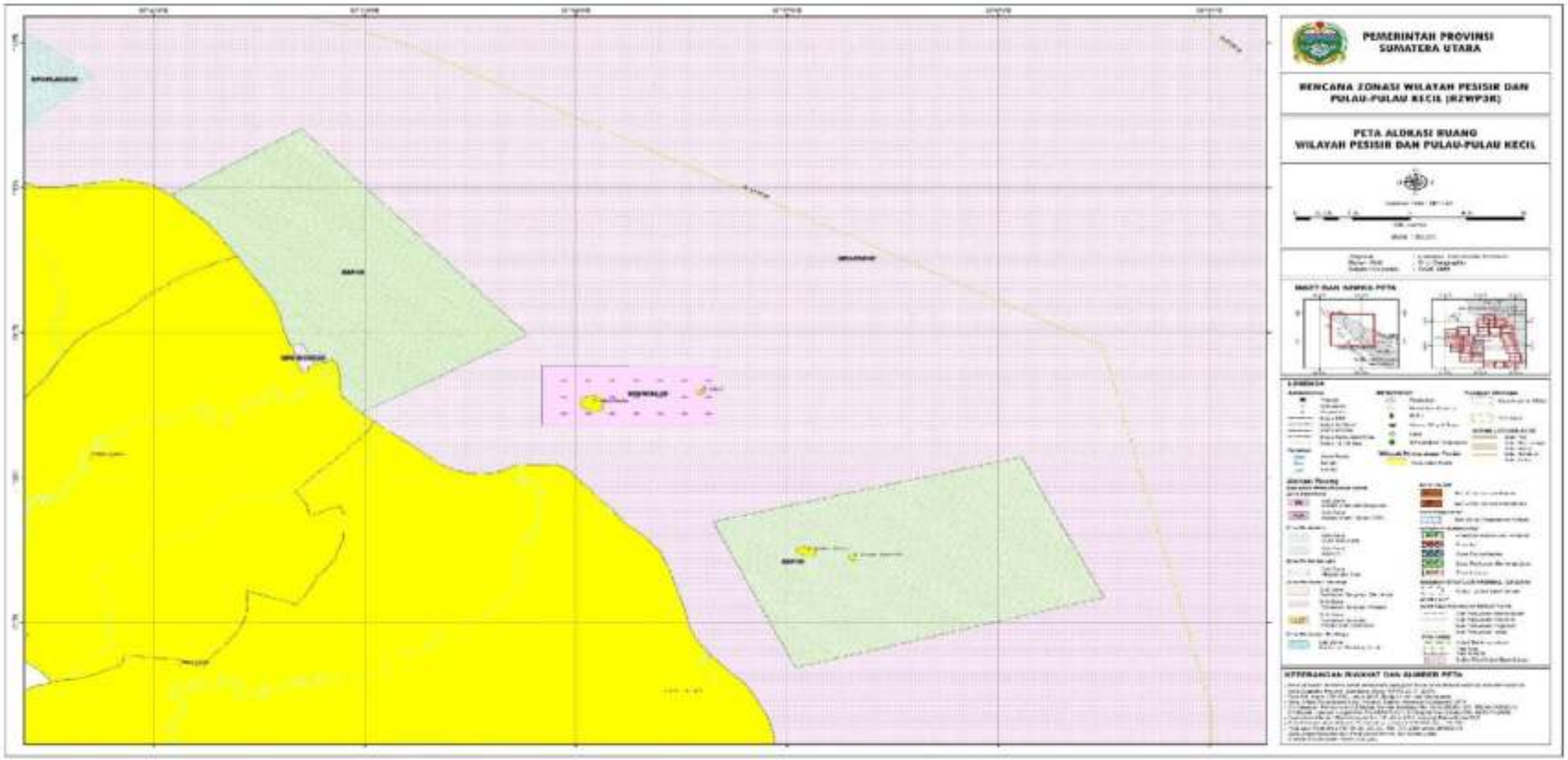

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-08 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

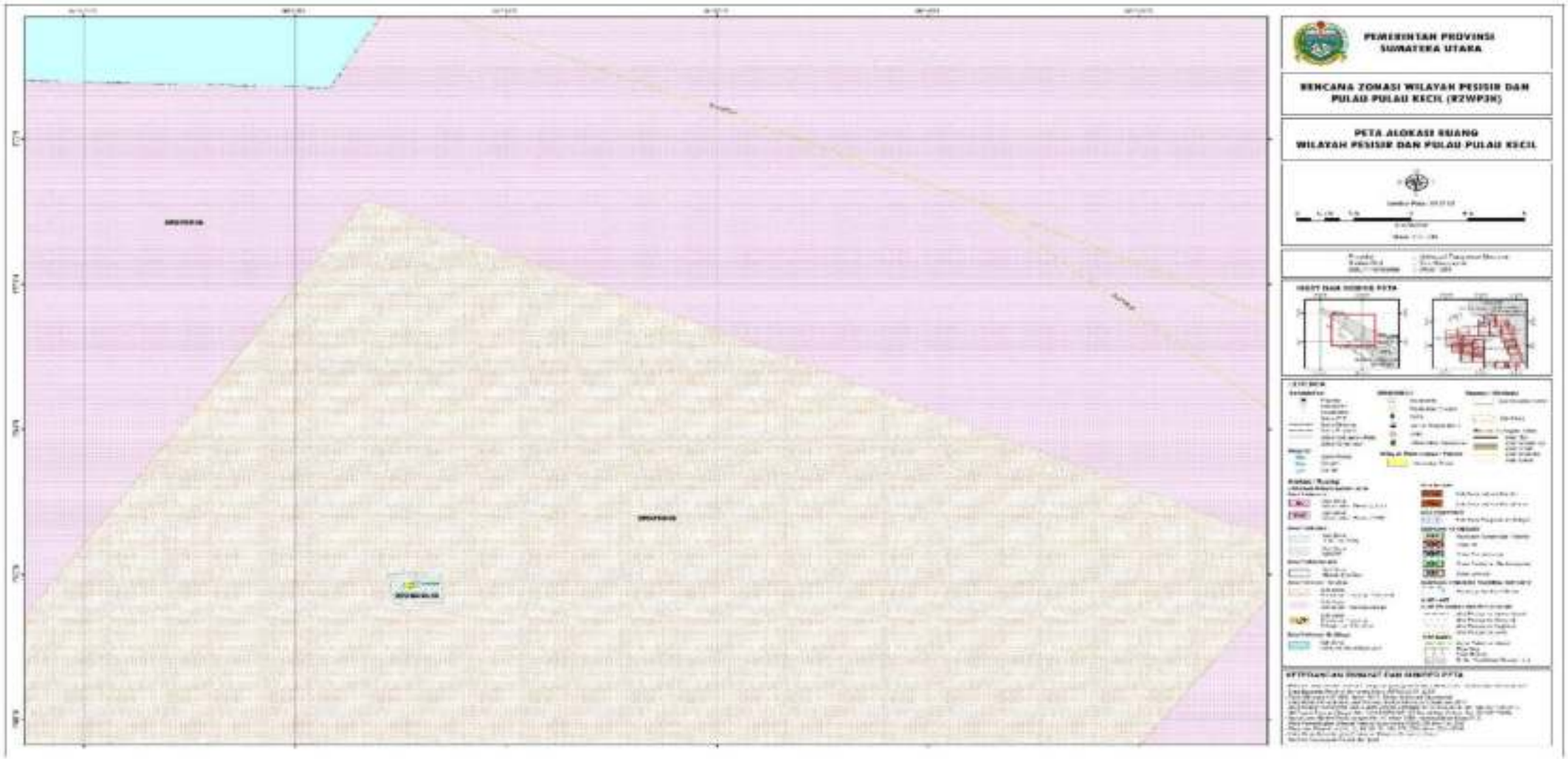

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0617-09 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

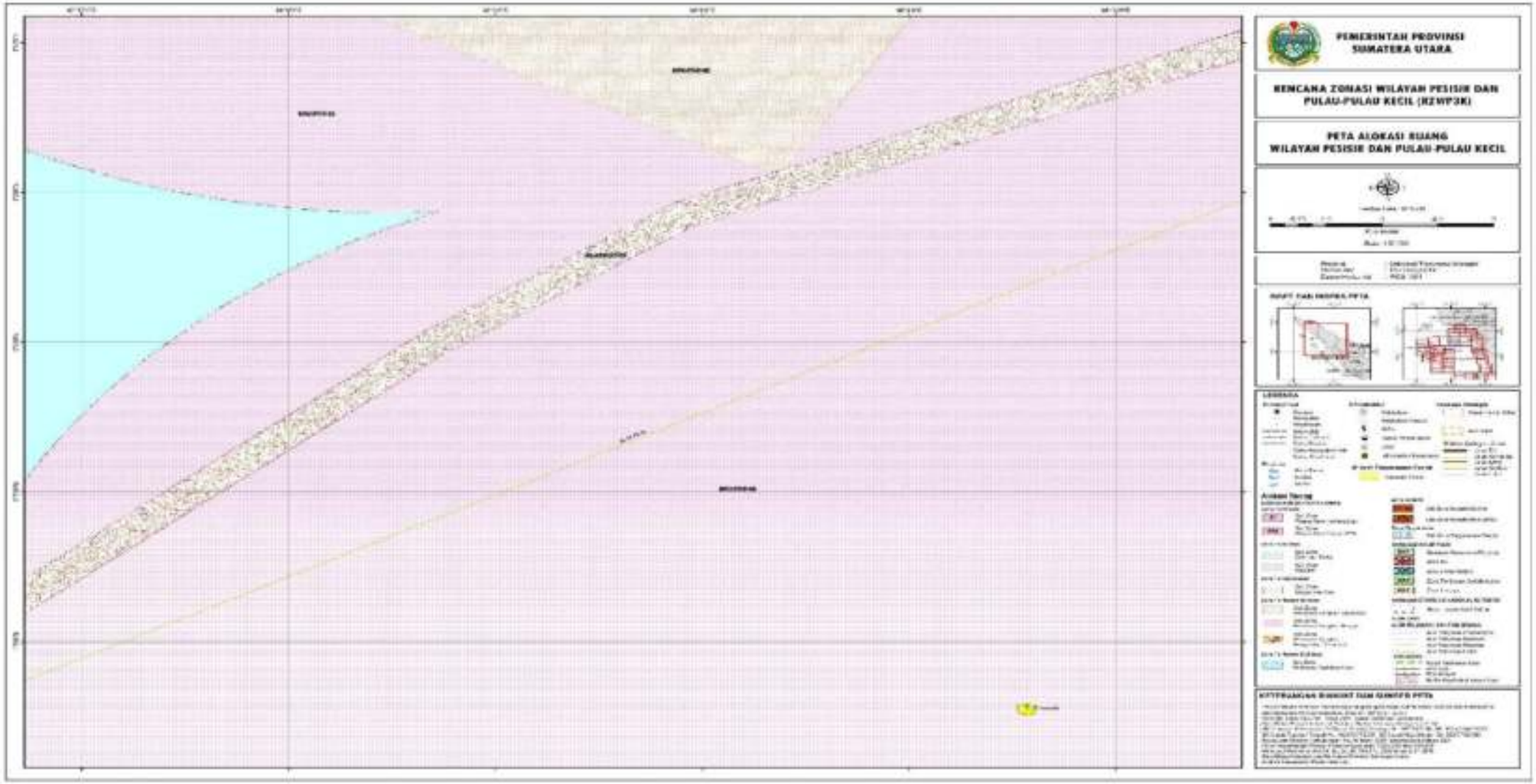

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0816-04 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

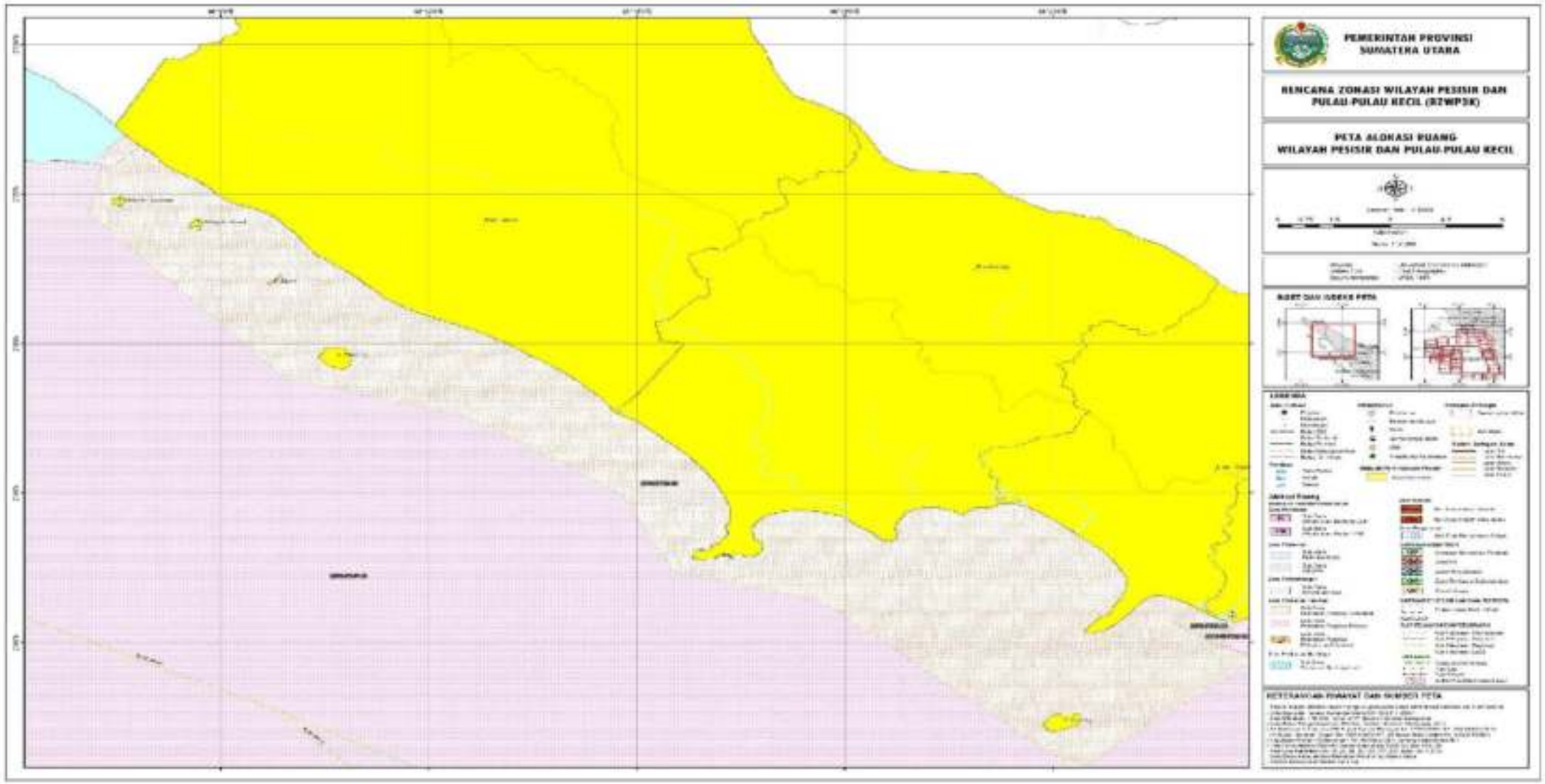

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0615-01 KABUPATEN NIAS SELATAN

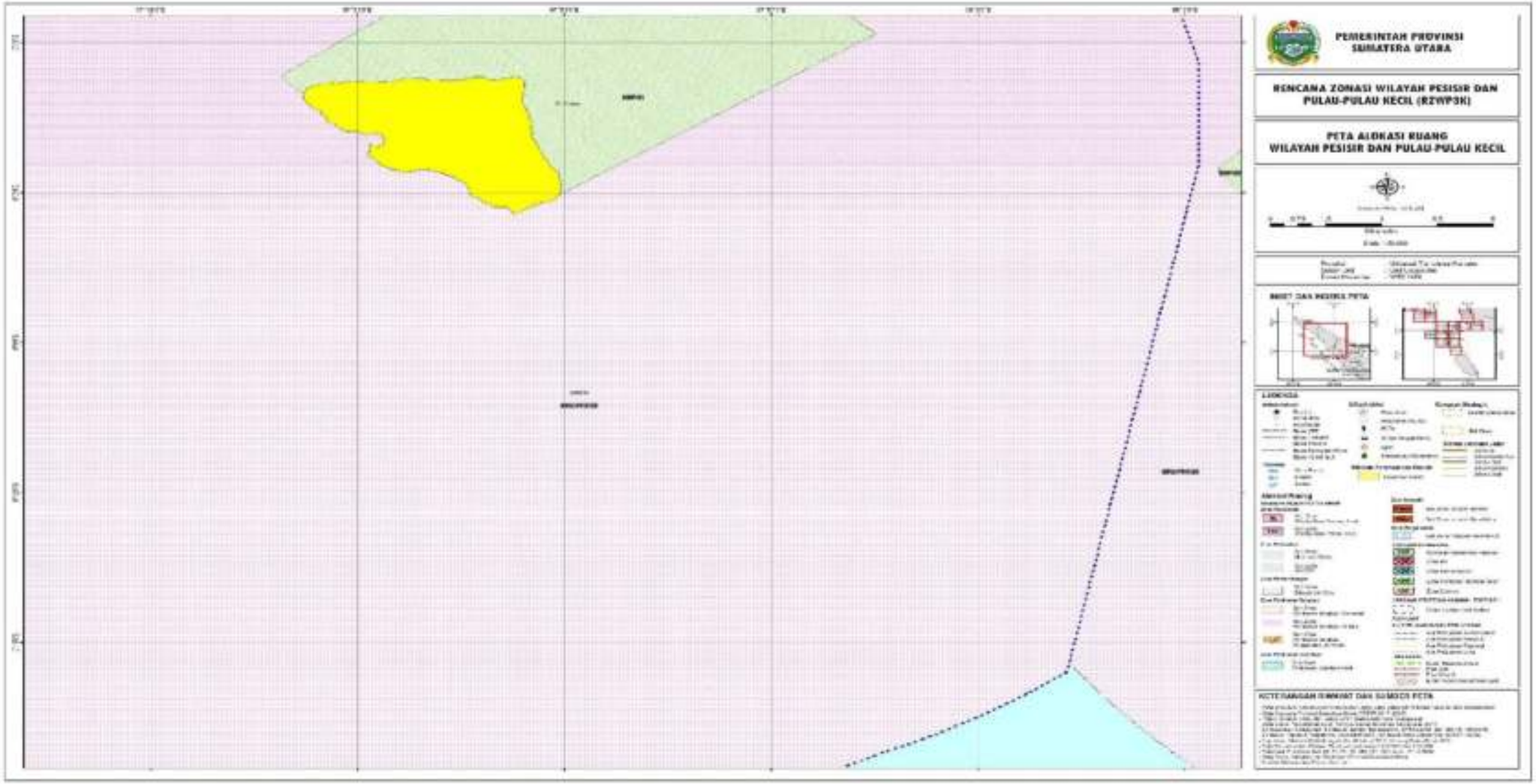

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0615-02 KABUPATEN NIAS SELATAN

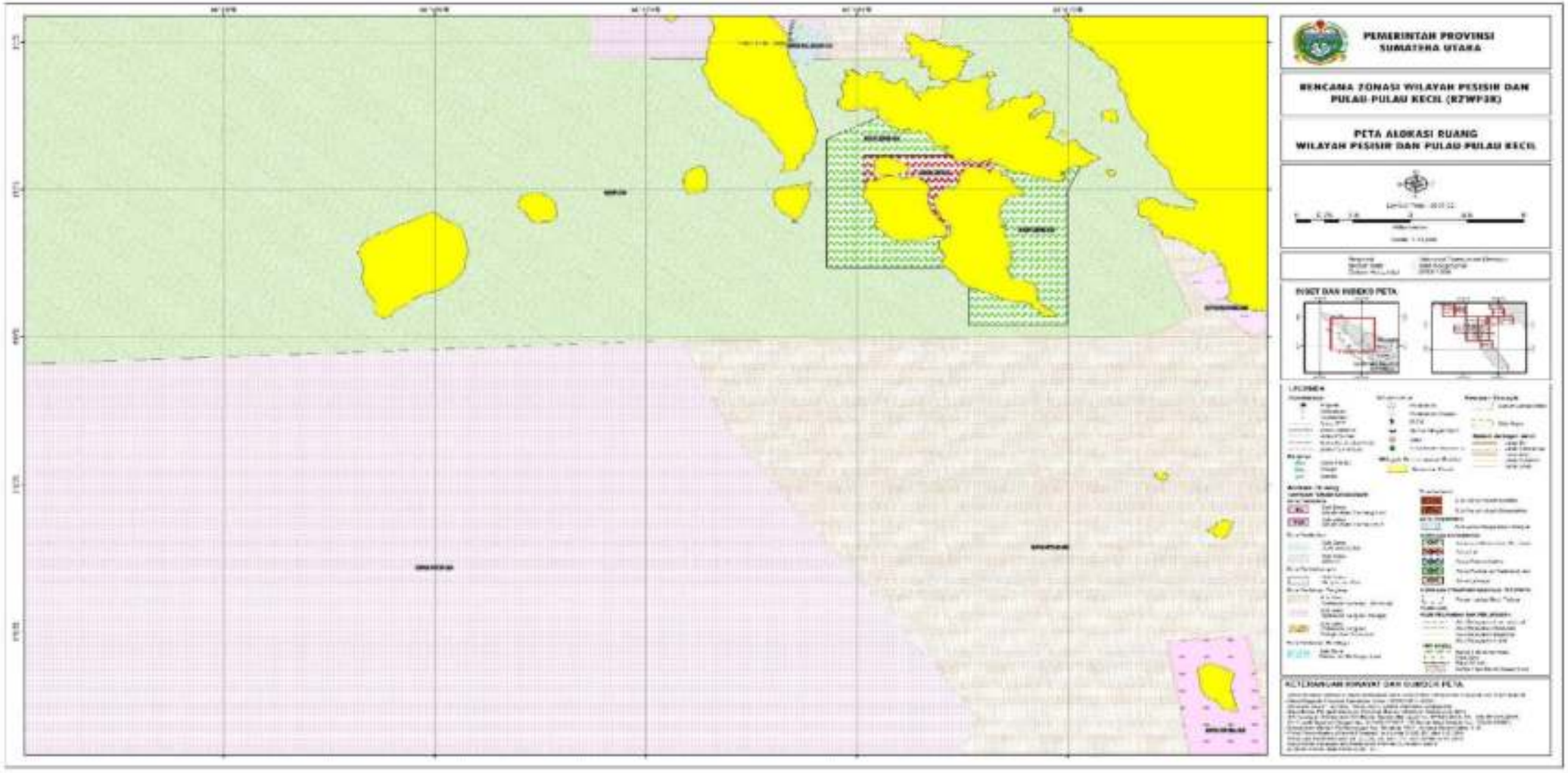

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0615-03 KABUPATEN NIAS SELATAN

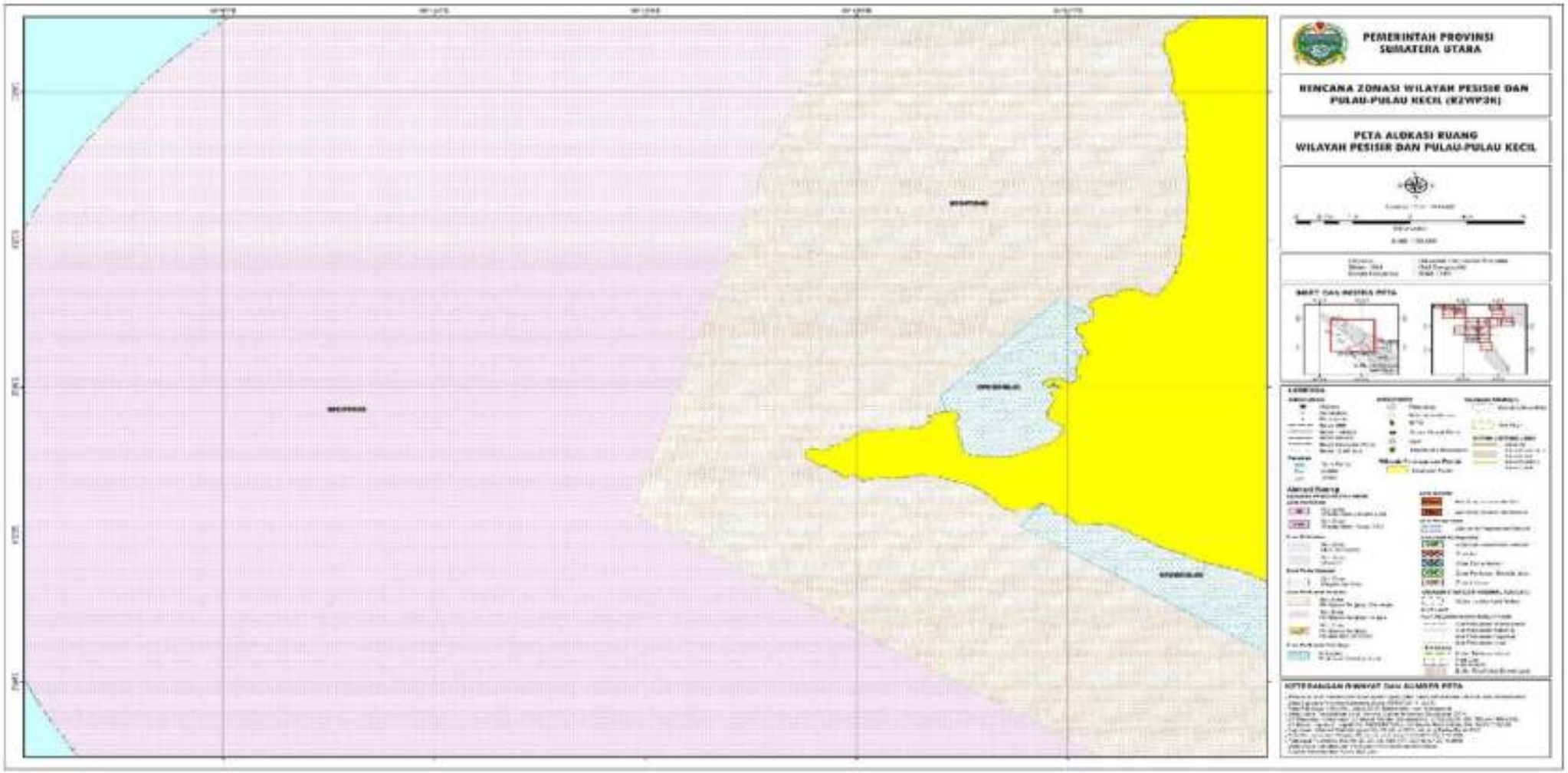

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0615-04 KABUPATEN NIAS SELATAN

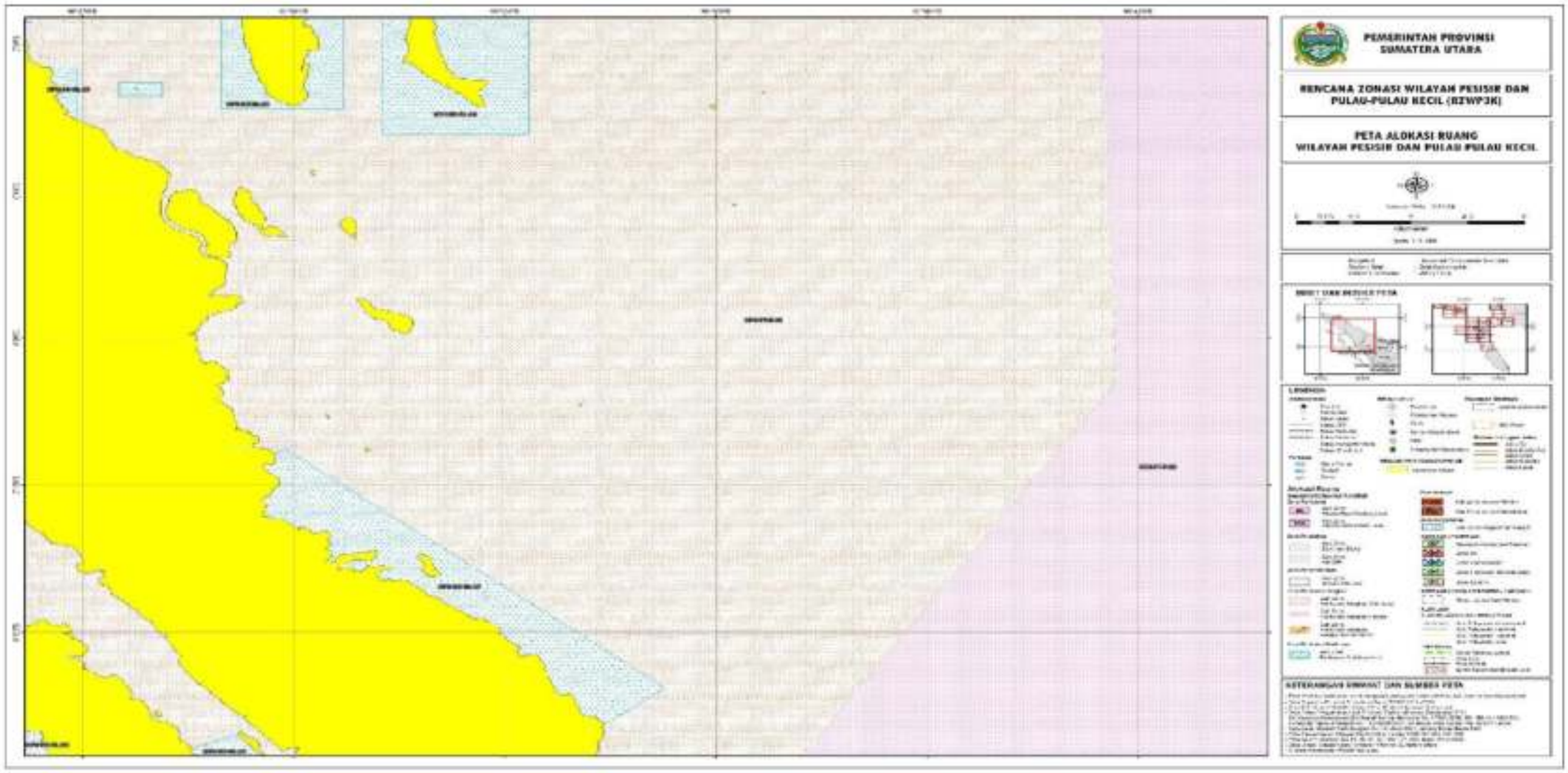

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0615-05 KABUPATEN NIAS SELATAN

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0615-06 KABUPATEN NIAS SELATAN

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-02 KABUPATEN NIAS SELATAN

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-04 KABUPATEN NIAS SELATAN

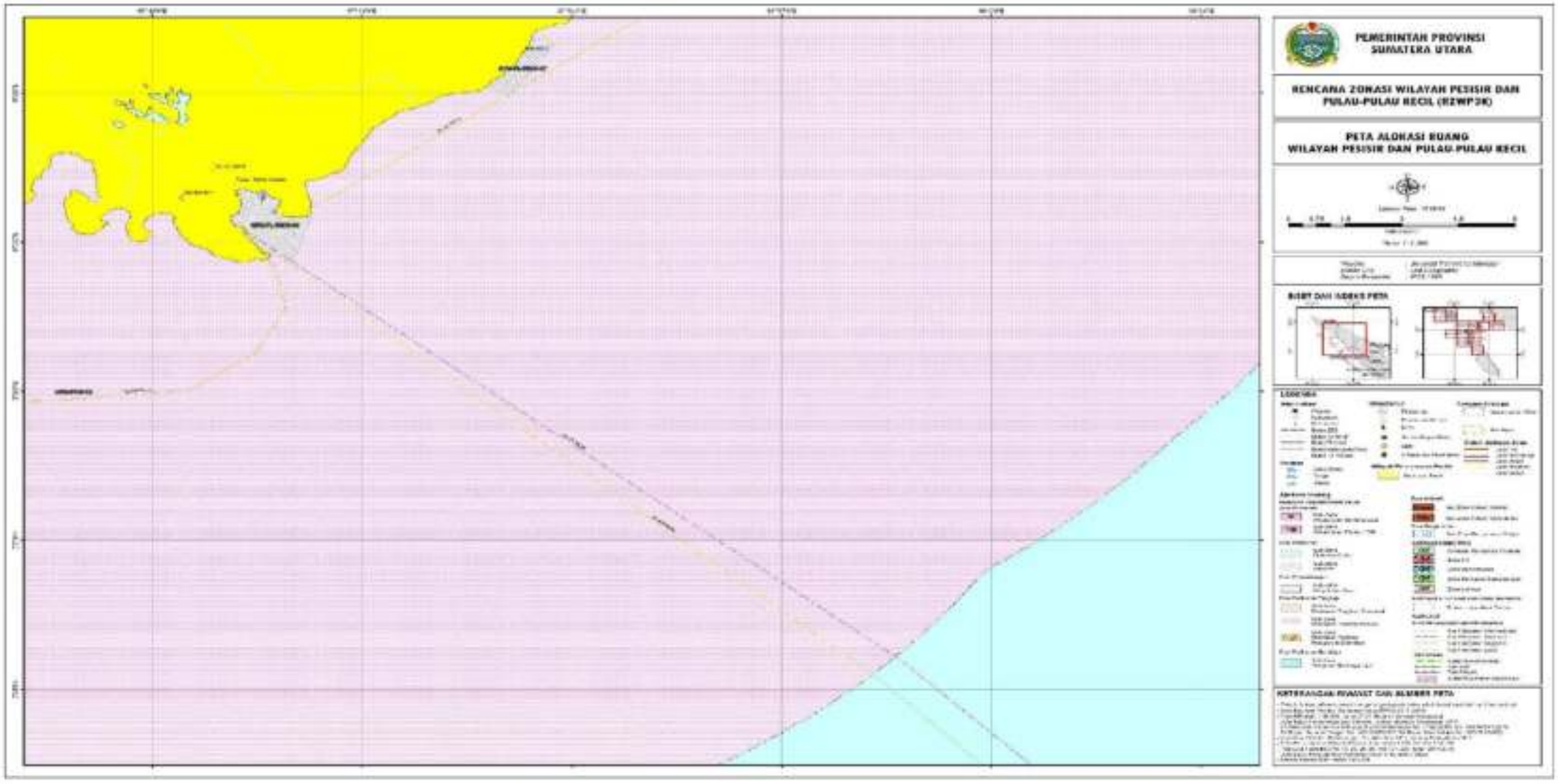

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-05 KABUPATEN NIAS SELATAN

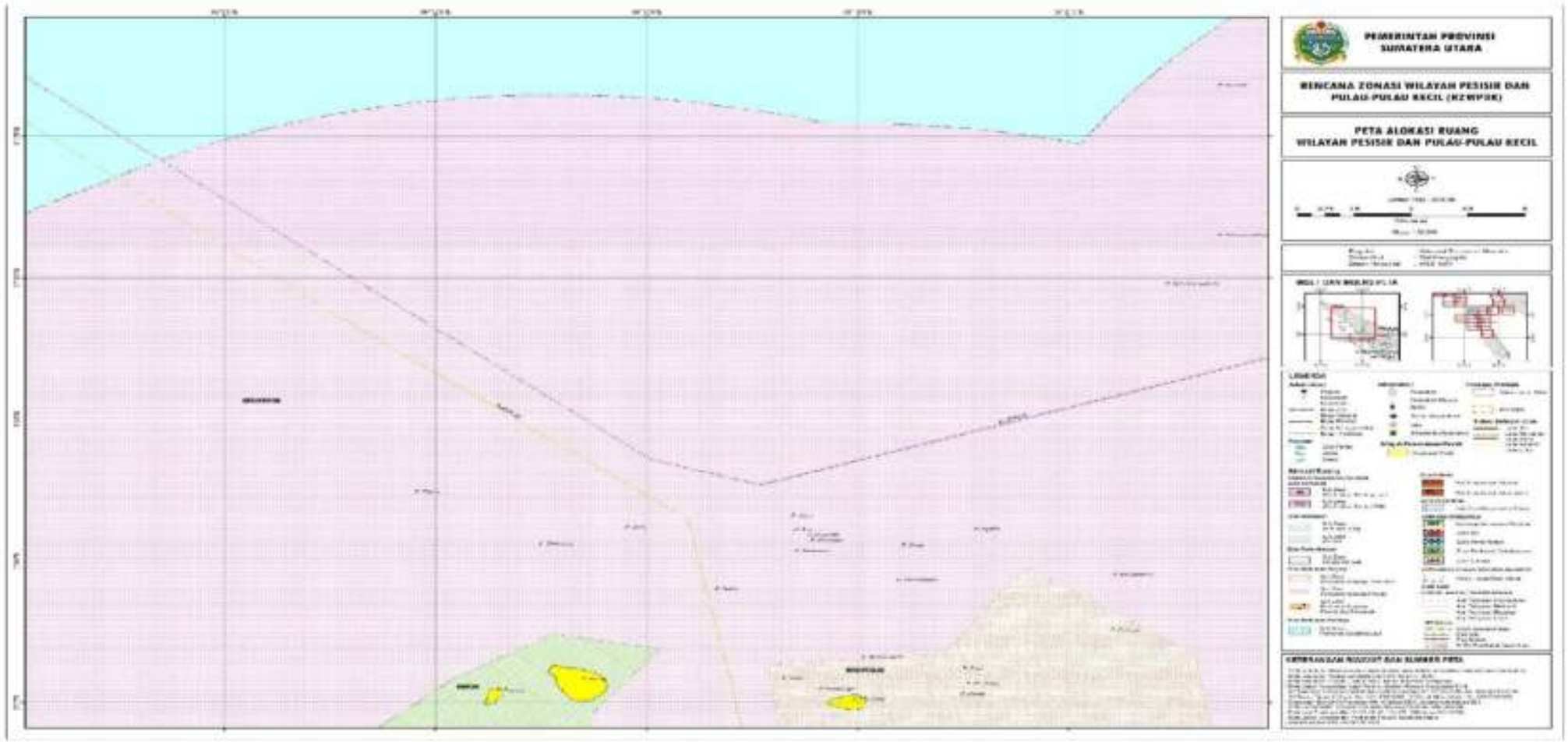

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-06 KABUPATEN NIAS SELATAN

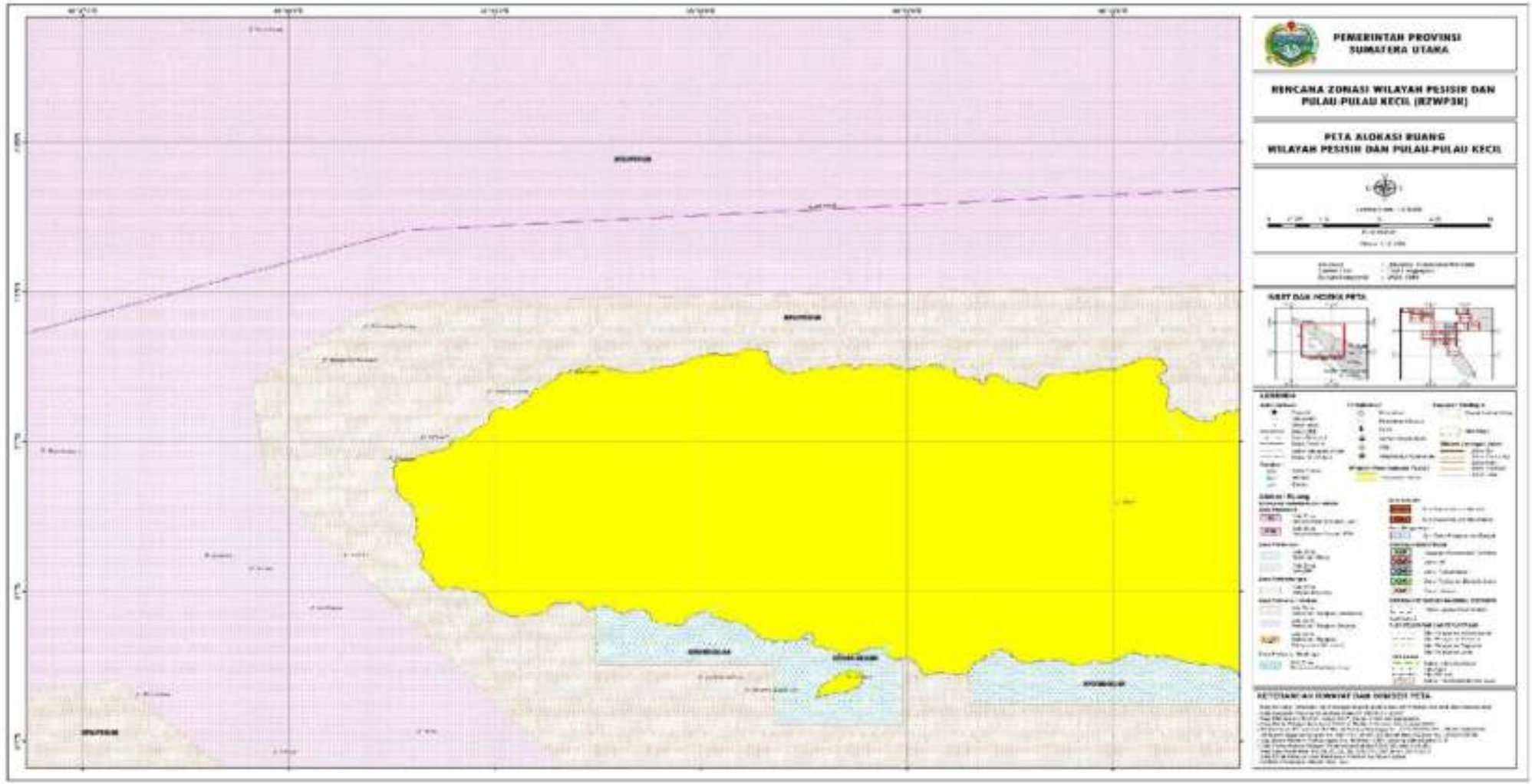

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-08 KABUPATEN MANDAILING NATAL

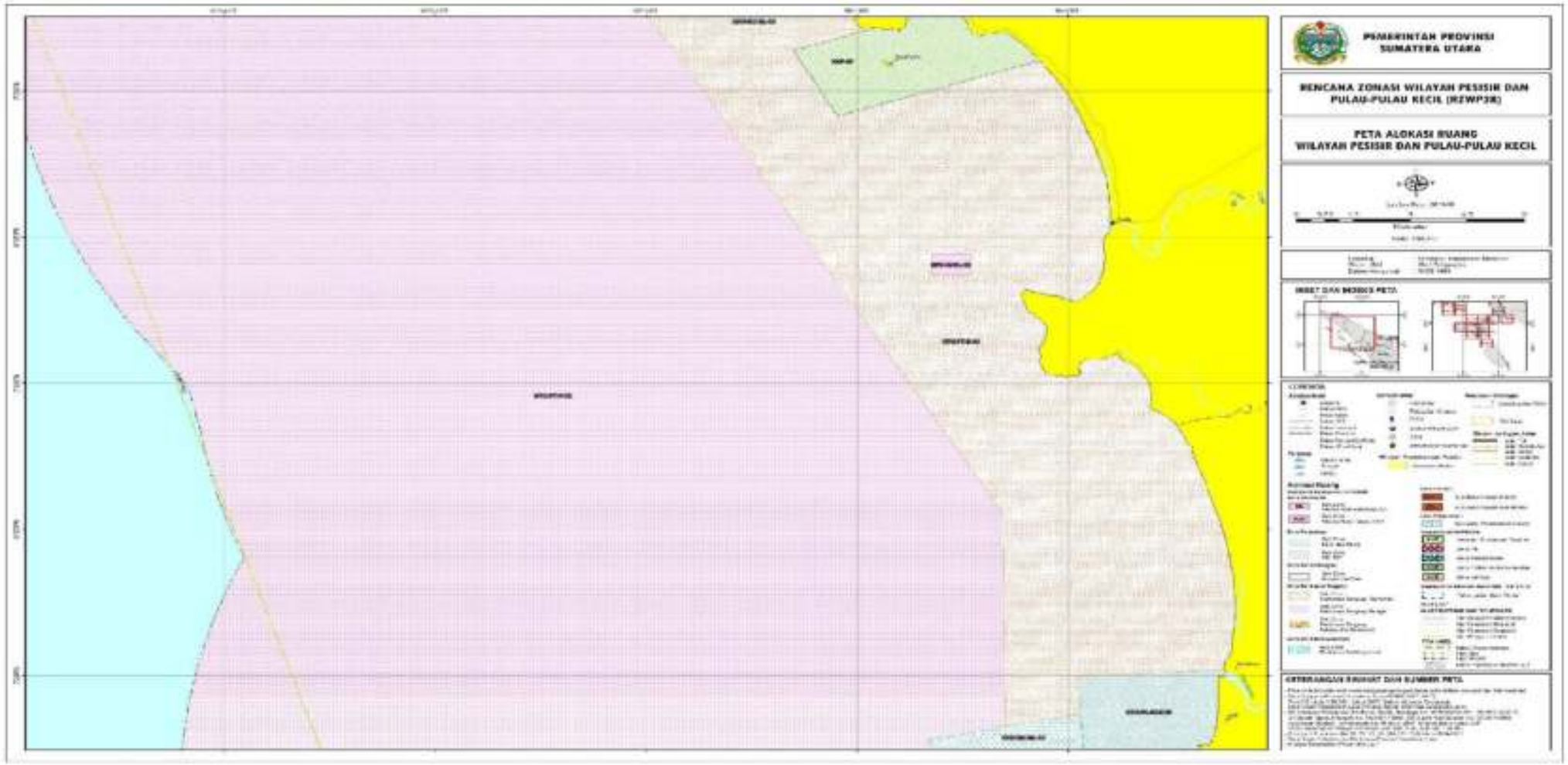

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0616-09 KABUPATEN NIAS SELATAN

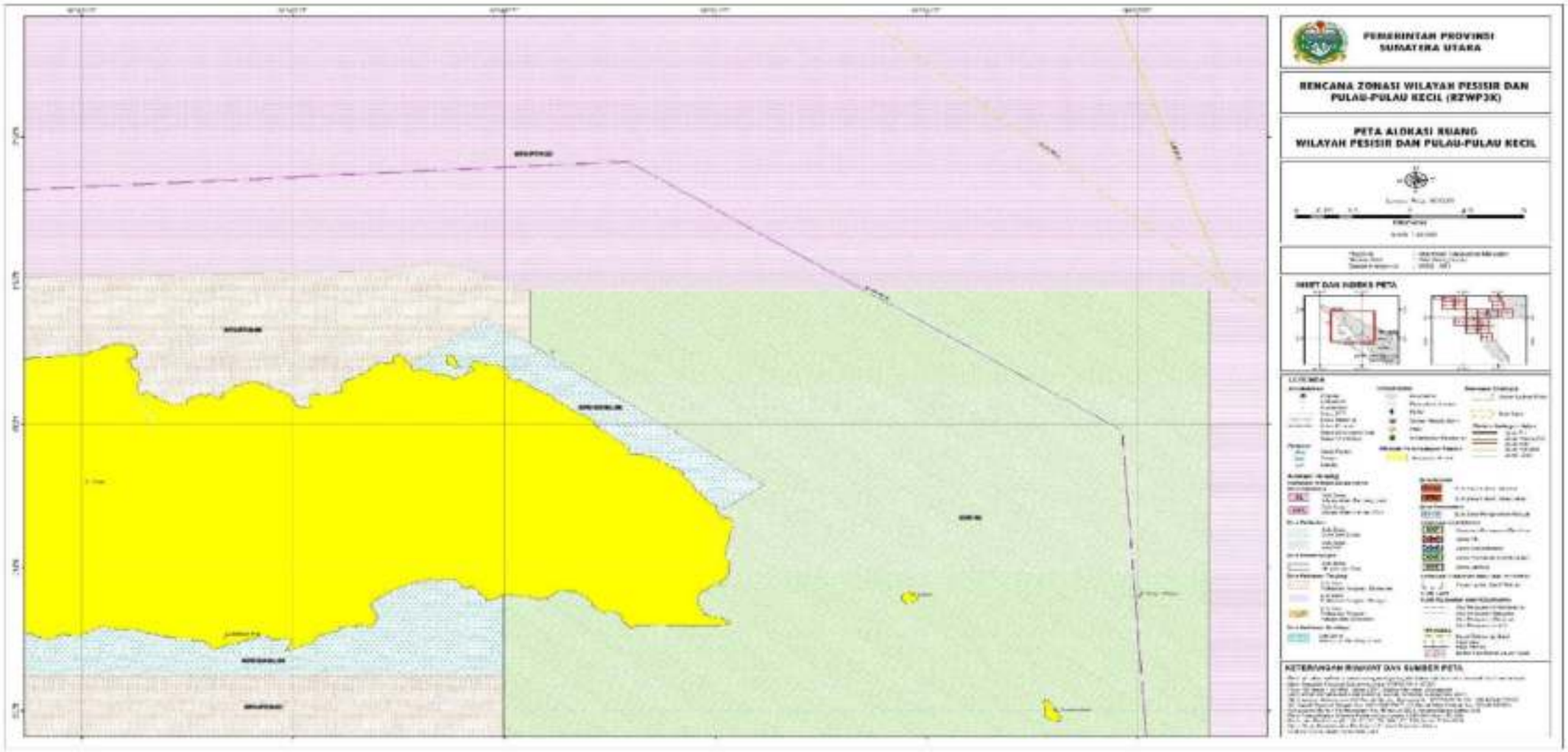

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K PROVINSI SUMATERA UTARA SKALA 1 : 50.000
LEMBAR PETA 0716-01 KABUPATEN MANDAILING NATAL

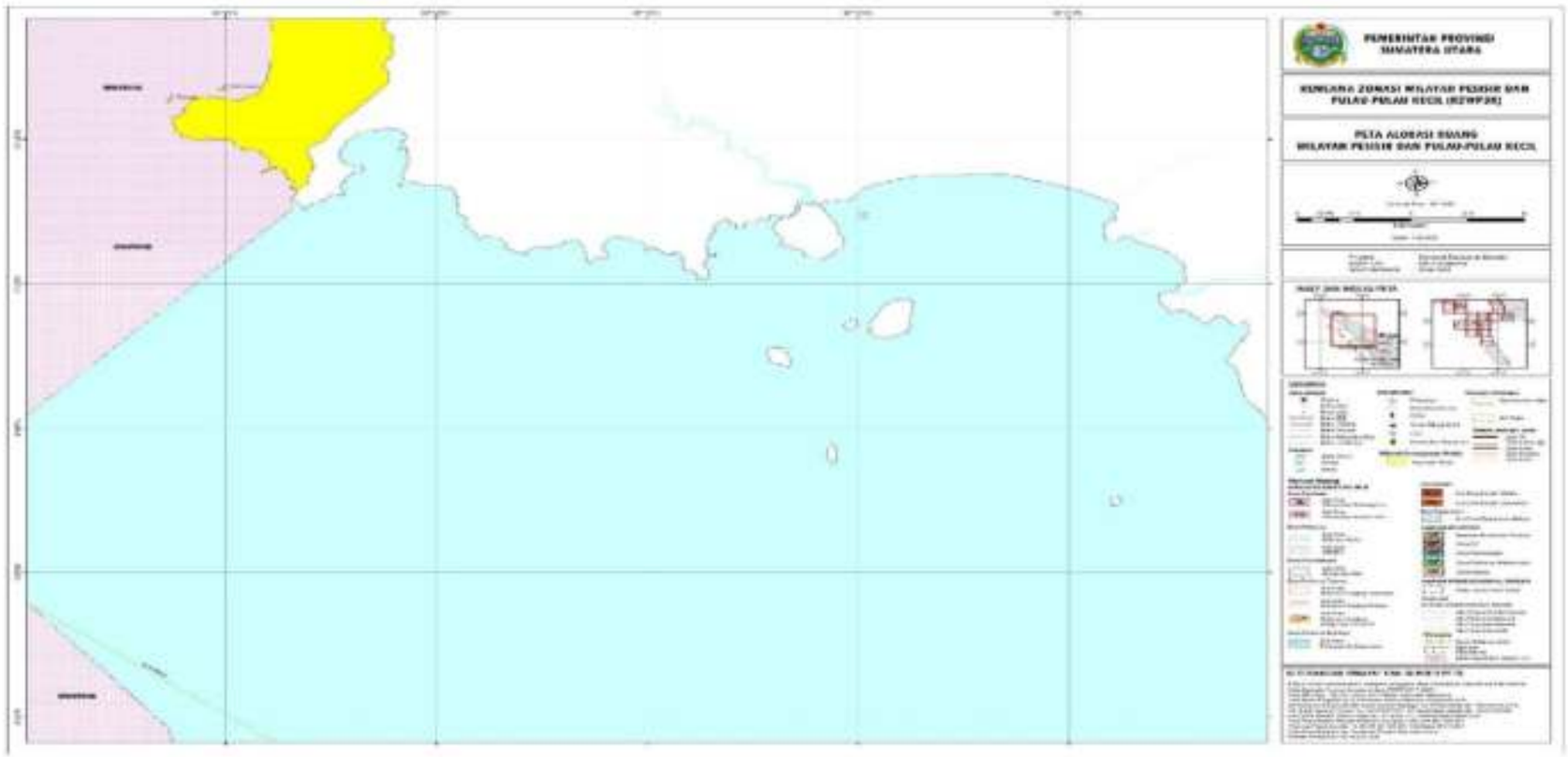

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 18 MARET 2019

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		Bujur	Lintang		SKALA	
ZONA PARIWISATA (KPU-W)				15.410,71	250 K	50 K
PARIWISATA ALAM BENTANG LAUT (KPU-W-BL)				5.233,57		
KPU-W-BL-01	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. PINANG SORI	098° 43' 35.01" E	01° 28' 33.16" N	140,95	1205	0617-05
		098° 43' 35.01" E	01° 29' 11.19" N			
		098° 44' 14.07" E	01° 29' 11.19" N			
		098° 44' 14.07" E	01° 28' 33.16" N			
KPU-W-BL-02	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. NATAL	099° 04' 36.21" E	00° 32' 14.38" N	78,06	1204	0616-08
		099° 04' 03.66" E	00° 32' 14.38" N			
		099° 04' 03.66" E	00° 32' 39.65" N			
		099° 04' 36.21" E	00° 32' 39.65" N			
		099° 04' 36.21" E	00° 32' 14.38" N			
KPU-W-BL-03	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA	097° 10' 32.78" E	01° 25' 09.27" N	6,94	1202	0517-01
		097° 10' 32.79" E	01° 25' 01.41" N			
		097° 10' 21.98" E	01° 25' 01.40" N			
		097° 10' 21.98" E	01° 25' 09.26" N			
		097° 10' 32.78" E	01° 25' 09.27" N			
KPU-W-BL-04	KAB. NIAS UTARA, KEC. AFULU	097° 14' 16.61" E	01° 14' 59.92" N	2,45		0517-02
		097° 14' 13.77" E	01° 14' 57.96" N			
		097° 14' 16.61" E	01° 14' 59.92" N			
		097° 14' 06.29" E	01° 15' 07.88" N			
		097° 14' 10.27" E	01° 15' 18.29" N			
		097° 14' 17.70" E	01° 15' 09.08" N			
		097° 14' 09.28" E	01° 15' 17.66" N			
		097° 14' 10.27" E	01° 15' 18.29" N			
KPU-W-BL-05	KAB. NIAS, KEC. BAWOLATO	097° 56' 00.83" E	01° 05' 20.22" N	1.039,55		0617-07
		097° 56' 00.89" E	01° 04' 04.60" N			
		097° 53' 30.81" E	01° 04' 04.60" N			
		097° 53' 30.81" E	01° 05' 19.32" N			
		097° 56' 00.83" E	01° 05' 20.22" N			
KPU-W-BL-06	KAB. NIAS BARAT, KEC. SIROMBU, MANDREHEH BARAT	097° 17' 48.79" E	00° 52' 32.02" N	988,39		0516-01
		097° 17' 48.79" E	00° 51' 26.92" N			
		097° 16' 40.26" E	00° 51' 26.92" N			
		097° 16' 41.16" E	00° 52' 32.02" N			
		097° 17' 48.79" E	00° 52' 32.02" N			
		097° 17' 37.82" E	00° 54' 01.79" N			
		097° 16' 29.29" E	00° 53' 15.20" N			
		097° 15' 22.87" E	00° 54' 47.74" N			
		097° 16' 26.55" E	00° 55' 33.62" N			
KPU-W-BL-07	KAB. NIAS SELATAN, KEC. LOLOWAU	097° 32' 38.47" E	00° 51' 37.95" N	20,92		0616-01
		097° 32' 51.96" E	00° 51' 47.30" N			
		097° 33' 01.45" E	00° 51' 33.89" N			
		097° 32' 46.03" E	00° 51' 25.16" N			
KPU-W-BL-08		098° 23' 33.05" E	00° 15' 05.45" S	828,31		0615-02
		098° 23' 53.61" E	00° 17' 26.96" S			
		098° 22' 44.40" E	00° 17' 34.50" S			
		098° 22' 23.91" E	00° 15' 11.11" S			
		098° 23' 33.05" E	00° 15' 05.45" S			

KPU-W-BL-09	KAB. NIAS SELATAN, KEC. HIBALA	098° 30' 24.78" E	00° 35' 09.75" S	2.128,02	1203	0615-05
		098° 32' 49.04" E	00° 37' 34.35" S			
		098° 30' 46.37" E	00° 39' 16.45" S			
		098° 28' 17.40" E	00° 36' 43.79" S			
		098° 30' 24.78" E	00° 35' 09.75" S			
		098° 31' 40.49" E	00° 29' 32.62" S			
		098° 31' 40.49" E	00° 30' 13.10" S			
		098° 30' 51.23" E	00° 30' 13.10" S			
		098° 30' 51.23" E	00° 29' 32.62" S			
		098° 31' 40.49" E	00° 29' 32.62" S			
PARIWISATA ALAM PANTAI P3K (KPU-W-P3K)				**10.177,14**		
KPU-W-P3K-01	KAB. LANGKAT, KEC. PANGKALAN SUSU	098° 15' 19.28" E	04° 17' 17.89" N	472,95	1206	0619-01, 0619-02
		098° 14' 53.97" E	04° 14' 17.16" N			
		098° 15' 09.03" E	04° 12' 25.01" N			
		098° 15' 25.00" E	04° 12' 14.30" N			
		098° 14' 50.05" E	04° 11' 07.84" N			
		098° 14' 41.28" E	04° 11' 12.73" N			
		098° 15' 15.79" E	04° 17' 20.09" N			
		098° 15' 19.28" E	04° 17' 17.89" N			
KPU-W-P3K-02	KAB. DELI SERDANG, KEC. PANTAI LABU	098° 56' 46.59" E	03° 40' 45.82" N	211,74		0619-04, 0719-01
		098° 56' 37.91" E	03° 40' 33.06" N			
		098° 52' 29.56" E	03° 41' 13.73" N			
		098° 52' 30.40" E	03° 41' 18.18" N			
		098° 54' 10.89" E	03° 40' 55.66" N			
		098° 56' 09.96" E	03° 40' 50.52" N			
		098° 56' 46.59" E	03° 40' 45.82" N			
KPU-W-P3K-03	KAB. DELI SERDANG, KEC. PERCUT SEI TUAN	098° 47' 49.59" E	03° 43' 23.96" N	25,05		0619-04
		098° 47' 33.09" E	03° 43' 17.89" N			
		098° 47' 31.12" E	03° 43' 17.47" N			
		098° 47' 24.64" E	03° 43' 37.13" N			
		098° 47' 26.33" E	03° 43' 41.50" N			
		098° 47' 51.42" E	03° 43' 29.75" N			
		098° 47' 49.59" E	03° 43' 23.96" N			
KPU-W-P3K-04	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PANTAI CERMIN, PERBAUNGAN	099° 07' 01.62" E	03° 34' 24.36" N	342,87		0719-01
		099° 02' 03.61" E	03° 37' 30.86" N			
		099° 02' 10.10" E	03° 37' 49.29" N			
		099° 04' 00.66" E	03° 36' 52.38" N			
		099° 07' 07.29" E	03° 34' 33.86" N			
		099° 07' 01.62" E	03° 34' 24.36" N			
KPU-W-P3K-05	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PANTAI CERMIN	099° 00' 07.51" E	03° 38' 51.10" N	44,17		
		099° 00' 02.88" E	03° 38' 42.35" N			
		098° 59' 18.30" E	03° 39' 11.22" N			
		098° 59' 18.99" E	03° 39' 14.52" N			
		099° 00' 07.51" E	03° 38' 51.10" N			
KPU-W-P3K-06	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PANTAI LABU, PANTAI CERMIN	098° 57' 30.05" E	03° 40' 40.24" N	181,93		
		098° 58' 37.29" E	03° 39' 34.71" N			
		098° 58' 40.96" E	03° 39' 32.93" N			
		098° 58' 44.51" E	03° 39' 21.04" N			
		098° 57' 30.05" E	03° 40' 40.24" N			
		098° 56' 37.91" E	03° 40' 33.06" N			
		098° 56' 46.59" E	03° 40' 45.82" N			
KPU-W-P3K-07	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. TELUK MENGKUDU, TANJUNG BERINGIN	099° 13' 53.61" E	03° 30' 42.21" N	337,85		0719-01, 0719-02
		099° 07' 35.80" E	03° 33' 59.26" N			
		099° 07' 37.63" E	03° 34' 05.83" N			
		099° 09' 45.50" E	03° 33' 31.95" N			
		099° 10' 37.46" E	03° 33' 08.93" N			
		099° 13' 59.66" E	03° 30' 51.87" N			
		099° 13' 53.61" E	03° 30' 42.21" N			

KPU-W-P3K-08	KAB. BATUBARA, KEC. MEDANG BERAS	099° 24' 49.95" E	03° 23' 12.94" N	365,52		0719-02
		099° 18' 56.03" E	03° 26' 18.67" N			
		099° 18' 57.73" E	03° 26' 20.52" N			
		099° 20' 12.15" E	03° 25' 29.79" N			
		099° 20' 56.60" E	03° 25' 07.44" N			
		099° 21' 05.85" E	03° 24' 51.71" N			
		099° 22' 10.04" E	03° 24' 08.26" N			
		099° 24' 51.36" E	03° 23' 20.84" N			
		099° 24' 49.95" E	03° 23' 12.94" N			
KPU-W-P3K-09	KAB. BATUBARA, KEC. LIMA PULUH, TALAWI, TANJUNG TIRAM	099° 35' 21.16" E	03° 14' 00.34" N	439,07	1208	0719-04
		099° 35' 25.48" E	03° 14' 04.03" N			
		099° 35' 34.20" E	03° 14' 09.70" N			
		099° 36' 43.63" E	03° 13' 37.77" N			
		099° 36' 41.36" E	03° 13' 31.11" N			
		099° 35' 18.64" E	03° 13' 45.92" N			
		099° 35' 06.10" E	03° 13' 51.26" N			
		099° 31' 11.35" E	03° 16' 44.42" N			
		099° 31' 23.57" E	03° 16' 48.65" N			
		099° 32' 58.62" E	03° 14' 48.99" N			
		099° 35' 02.05" E	03° 14' 01.10" N			
KPU-W-P3K-10	KAB. BATUBARA, KEC. TANJUNG TIRAM	099° 44' 29.30" E	03° 10' 36.90" N	401,61		
		099° 44' 19.16" E	03° 10' 23.65" N			
		099° 39' 03.70" E	03° 12' 53.88" N			
		099° 39' 09.14" E	03° 13' 10.01" N			
		099° 42' 22.49" E	03° 12' 04.74" N			
		099° 44' 29.30" E	03° 10' 36.90" N			
KPU-W-P3K-11	KAB. LABUHANBATU, KEC. PANAI HILIR	100° 14' 58.76" E	02° 38' 10.47" N	741,13	1207	0718-03
		100° 14' 31.28" E	02° 38' 07.10" N			
		100° 13' 26.50" E	02° 41' 06.03" N			
		100° 14' 02.22" E	02° 41' 07.79" N			
		100° 14' 58.76" E	02° 38' 10.47" N			
KPU-W-P3K-12	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. BARUS	098° 24' 15.13" E	02° 00' 27.22" N	136,86	1205	0816-04
		098° 23' 58.87" E	01° 59' 43.44" N			
		098° 23' 24.07" E	01° 59' 56.07" N			
		098° 23' 39.22" E	02° 00' 25.64" N			
KPU-W-P3K-13	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. SORKAM, KOLANG	098° 36' 59.99" E	01° 49' 35.98" N	371,52		0617-03, 0617-04
		098° 36' 32.92" E	01° 49' 18.51" N			
		098° 35' 12.10" E	01° 50' 52.04" N			
		098° 35' 32.80" E	01° 51' 07.39" N			
		098° 36' 59.99" E	01° 49' 35.98" N			
KPU-W-P3K-14	KAB. NIAS UTARA, KEC. AFULU	097° 15' 19.50" E	01° 12' 01.62" N	2.375,57	1202	0517-02
		097° 13' 05.58" E	01° 12' 01.26" N			
		097° 13' 00.44" E	01° 13' 02.08" N			
		097° 14' 26.12" E	01° 15' 04.47" N			
		097° 14' 29.20" E	01° 15' 38.85" N			
KPU-W-P3K-15	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA	097° 10' 41.02" E	01° 24' 11.84" N	54,34		0517-01
		097° 10' 42.86" E	01° 24' 21.58" N			
		097° 11' 17.23" E	01° 24' 22.40" N			
		097° 10' 43.91" E	01° 23' 43.69" N			
		097° 10' 41.02" E	01° 24' 11.84" N			
KPU-W-P3K-16	KAB. NIAS UTARA, KEC. TUHEMBERUA	097° 27' 59.87" E	01° 28' 42.27" N	592,82		0517-03
		097° 27' 26.97" E	01° 28' 28.40" N			
		097° 26' 12.75" E	01° 29' 38.39" N			
		097° 26' 38.99" E	01° 30' 00.95" N			
		097° 28' 03.91" E	01° 29' 07.48" N			
		097° 27' 59.87" E	01° 28' 42.27" N			

KPU-W-P3K-17	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA, AFULU	097° 11' 41.11" E	01° 17' 36.37" N	492,74		0517-02, 0517-01
		097° 10' 10.14" E	01° 20' 09.02" N			
		097° 08' 04.50" E	01° 22' 49.39" N			
KPU-W-P3K-18	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA	097° 09' 24.51" E	01° 25' 15.03" N	8,57		0517-01
		097° 09' 15.47" E	01° 25' 18.14" N			
		097° 09' 24.61" E	01° 25' 15.42" N			
		097° 09' 24.51" E	01° 25' 15.03" N			
		097° 08' 58.44" E	01° 25' 23.21" N			
		097° 09' 14.75" E	01° 25' 18.36" N			
		097° 08' 58.44" E	01° 25' 23.21" N			
		097° 08' 51.30" E	01° 25' 34.54" N			
		097° 08' 56.99" E	01° 25' 24.63" N			
		097° 08' 49.62" E	01° 25' 30.90" N			
		097° 08' 46.10" E	01° 25' 34.53" N			
		097° 08' 42.50" E	01° 25' 38.95" N			
		097° 08' 51.30" E	01° 25' 34.54" N			
KPU-W-P3K-19	KAB. NIAS UTARA, KEC. SAWO	097° 24' 04.79" E	01° 30' 00.16" N	13,81		0517-03
		097° 23' 38.41" E	01° 30' 05.09" N			
		097° 23' 43.55" E	01° 30' 00.57" N			
		097° 24' 04.79" E	01° 30' 00.16" N			
KPU-W-P3K-20	KAB. NIAS UTARA, KEC. TUHEMBERUA	097° 26' 58.71" E	01° 28' 17.97" N	41,19		
		097° 26' 59.15" E	01° 28' 22.81" N			
		097° 27' 31.19" E	01° 28' 18.70" N			
		097° 28' 00.31" E	01° 28' 26.24" N			
KPU-W-P3K-21	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA	097° 13' 31.51" E	01° 24' 54.16" N	4,36	1202	0517-01
		097° 13' 28.28" E	01° 24' 54.16" N			
		097° 13' 28.31" E	01° 25' 00.48" N			
		097° 13' 44.57" E	01° 25' 02.69" N			
		097° 13' 44.26" E	01° 24' 54.16" N			
		097° 13' 44.57" E	01° 25' 02.69" N			
		097° 13' 28.33" E	01° 25' 03.70" N			
		097° 13' 28.38" E	01° 25' 13.20" N			
		097° 13' 34.82" E	01° 25' 13.08" N			
KPU-W-P3K-22		097° 12' 55.49" E	01° 25' 11.00" N	6,71		
		097° 13' 15.06" E	01° 25' 15.27" N			
		097° 13' 14.22" E	01° 25' 07.48" N			
		097° 12' 55.57" E	01° 25' 08.19" N			
		097° 12' 55.49" E	01° 25' 11.00" N			
KPU-W-P3K-23	KAB. NIAS UTARA, KEC. TUHEMBERUA	097° 29' 16.29" E	01° 28' 27.03" N	95,01		0517-03
		097° 29' 25.49" E	01° 28' 28.08" N			
		097° 29' 47.55" E	01° 27' 21.69" N			
		097° 29' 52.05" E	01° 27' 01.99" N			
		097° 30' 08.32" E	01° 26' 52.57" N			
		097° 30' 23.31" E	01° 26' 53.00" N			
		097° 30' 23.78" E	01° 26' 48.50" N			
KPU-W-P3K-24	KAB. GUNUNG SITOLI, KEC. GUNUNG SITOLI UTARA	097° 32' 47.35" E	01° 23' 01.74" N	168,33		0617-01
		097° 32' 31.53" E	01° 24' 28.75" N			
		097° 32' 52.63" E	01° 24' 26.02" N			
		097° 32' 49.95" E	01° 23' 35.70" N			
		097° 33' 02.80" E	01° 23' 09.46" N			
		097° 32' 47.35" E	01° 23' 01.74" N			
KPU-W-P3K-25	KAB. NIAS, KEC. IDANOGAWO	097° 50' 17.68" E	01° 05' 21.17" N	34,59		0617-07
		097° 50' 08.91" E	01° 05' 12.00" N			
		097° 49' 56.99" E	01° 05' 43.97" N			
		097° 50' 06.61" E	01° 05' 46.94" N			
		097° 50' 17.68" E	01° 05' 21.17" N			

KPU-W-P3K-26	KAB. NIAS BARAT, KEC. SIROMBU	097° 27' 27.66" E	00° 56' 35.46" N	1.064,22		0616-01, 0516-01
		097° 25' 47.08" E	00° 54' 35.34" N			
		097° 24' 37.63" E	00° 56' 17.17" N			
		097° 24' 49.91" E	00° 56' 56.33" N			
		097° 24' 53.14" E	00° 56' 50.39" N			
		097° 25' 07.19" E	00° 56' 56.73" N			
		097° 25' 04.86" E	00° 57' 00.16" N			
		097° 27' 27.66" E	00° 56' 35.46" N			
KPU-W-P3K-27	KAB. NIAS SELATAN, KEC. FANAYAMA	097° 44' 35.56" E	00° 33' 15.44" N	681,19	1201	0616-02
		097° 43' 30.13" E	00° 33' 08.08" N			
		097° 42' 40.60" E	00° 33' 41.06" N			
		097° 44' 35.56" E	00° 33' 15.44" N			
KPU-W-P3K-28	KAB. NIAS SELATAN, KEC. HIBALA	098° 23' 59.67" E	00° 08' 46.55" S	217,57	1203	0615-02
		098° 23' 35.83" E	00° 08' 58.55" S			
		098° 22' 36.41" E	00° 07' 47.35" S			
		098° 23' 10.29" E	00° 07' 30.23" S			
		098° 23' 59.67" E	00° 08' 46.55" S			
KPU-W-P3K-29		098° 22' 54.08" E	00° 21' 14.68" S	49,43		0615-03
		098° 22' 38.74" E	00° 21' 10.79" S			
		098° 22' 55.23" E	00° 20' 36.28" S			
		098° 23' 02.56" E	00° 20' 39.58" S			
KPU-W-P3K-30		098° 29' 30.56" E	00° 33' 17.63" S	204,42		0615-05
		098° 29' 15.10" E	00° 33' 06.15" S			
		098° 29' 30.56" E	00° 33' 17.63" S			
		098° 25' 37.60" E	00° 33' 05.86" S			
		098° 25' 23.27" E	00° 32' 42.62" S			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		Bujur	Lintang		SKALA	
ZONA PELABUHAN (KPU-PL)				69.419,35	250 K	50 K
PELABUHAN DLK (KPU-PL-DLK)				67.981,83		
KPU-PL-DLK-01	KAB. LANGKAT, KEC. PANGKALAN SUSU	098° 16' 19.41" E	04° 08' 32.51" N	1.376,67	1206	0619-02
		098° 17' 24.44" E	04° 06' 54.46" N			
		098° 17' 13.30" E	04° 06' 41.03" N			
		098° 12' 11.33" E	04° 06' 41.28" N			
		098° 11' 33.57" E	04° 06' 55.39" N			
		098° 12' 10.22" E	04° 07' 48.60" N			
		098° 13' 59.73" E	04° 08' 44.63" N			
		098° 16' 19.41" E	04° 08' 32.51" N			
KPU-PL-DLK-02	KAB. DELI SERDANG, KOTA MEDAN, KEC. LABUHAN DELI, HAMPARAN PERAK, KOTA MEDAN	098° 47' 03.86" E	03° 54' 11.00" N	9.754,18		0619-04
		098° 46' 35.66" E	03° 51' 27.54" N			
		098° 46' 31.27" E	03° 51' 02.13" N			
		098° 46' 21.54" E	03° 50' 05.75" N			
		098° 46' 11.55" E	03° 49' 07.85" N			
		098° 44' 26.25" E	03° 48' 07.97" N			
		098° 43' 03.31" E	03° 47' 23.80" N			
		098° 40' 38.16" E	03° 54' 14.26" N			
		098° 40' 46.78" E	03° 54' 14.16" N			
KPU-PL-DLK-03	KAB. BATUBARA, KEC. SEI SUKA, MEDANG DERAS, LIMA PULUH	099° 37' 49.58" E	03° 22' 59.79" N	31.968,03	1206, 1208	0719-02, 0719-04
		099° 35' 30.11" E	03° 20' 04.38" N			
		099° 33' 28.96" E	03° 17' 32.01" N			
		099° 31' 11.35" E	03° 16' 44.42" N			
		099° 25' 04.40" E	03° 22' 59.12" N			
		099° 25' 05.67" E	03° 28' 30.31" N			
		099° 31' 50.81" E	03° 28' 30.31" N			
		099° 35' 08.03" E	03° 25' 28.62" N			
KPU-PL-DLK-04	KAB. LABUHANBATU UTARA, KEC. KUALUH LEIDONG	099° 58' 39.73" E	02° 44' 57.27" N	77,29	1207	0718-02
		099° 59' 02.81" E	02° 45' 18.36" N			
		099° 59' 17.88" E	02° 45' 02.00" N			
		099° 58' 54.52" E	02° 44' 41.25" N			
		099° 58' 39.73" E	02° 44' 57.27" N			
KPU-PL-DLK-05	KOTA SIBOLGA, KEC. SIBOLGA	098° 49' 12.22" E	01° 39' 41.53" N	6.789,63	1205	0617-03, 0617-04
		098° 45' 56.60" E	01° 40' 34.52" N			
		098° 43' 12.09" E	01° 43' 01.30" N			
		098° 43' 11.94" E	01° 43' 09.93" N			
		098° 44' 19.37" E	01° 43' 57.83" N			
		098° 43' 02.14" E	01° 45' 13.34" N			
		098° 41' 57.54" E	01° 46' 18.35" N			
		098° 42' 25.62" E	01° 47' 08.07" N			
		098° 45' 39.95" E	01° 45' 55.62" N			
		098° 46' 25.74" E	01° 44' 33.25" N			
		098° 47' 48.87" E	01° 43' 29.10" N			
		098° 47' 37.58" E	01° 43' 07.55" N			
		098° 47' 01.98" E	01° 43' 13.71" N			
		098° 47' 04.43" E	01° 42' 35.03" N			
		098° 47' 15.08" E	01° 41' 25.39" N			
		098° 47' 44.13" E	01° 41' 04.01" N			
		098° 48' 36.26" E	01° 41' 27.22" N			
		098° 49' 32.08" E	01° 40' 39.41" N			
		098° 49' 12.22" E	01° 39' 41.53" N			

KPU-PL-DLK-06	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. BATAHAN	099° 06' 31.95" E	00° 20' 47.34" N	1.710,59	1204	0616-08
		099° 05' 24.79" E	00° 21' 39.98" N			
		099° 06' 13.07" E	00° 22' 24.85" N			
		099° 06' 10.49" E	00° 23' 13.46" N			
		099° 06' 07.54" E	00° 23' 59.68" N			
		099° 08' 12.60" E	00° 24' 07.55" N			
		099° 06' 31.95" E	00° 20' 47.34" N			
KPU-PL-DLK-07	KAB. GUNUNG SITOLI, KEC. GUNUNG SITOLI, GUNUNG SITOLI SELATAN, GUNUNG SITOLI IDANOI	097° 40' 21.44" E	01° 17' 47.80" N	13.230,51	1202	0617-01
		097° 40' 44.78" E	01° 17' 25.04" N			
		097° 44' 44.38" E	01° 13' 29.15" N			
		097° 42' 55.91" E	01° 10' 25.35" N			
		097° 34' 08.43" E	01° 21' 38.38" N			
		097° 35' 30.96" E	01° 22' 36.90" N			
		097° 40' 21.44" E	01° 17' 47.80" N			
KPU-PL-DLK-08	KAB. NIAS, KEC. GIDO	097° 45' 35.17" E	01° 09' 33.70" N	2.920,75		0617-07
		097° 42' 55.91" E	01° 10' 25.35" N			
		097° 44' 44.38" E	01° 13' 29.15" N			
		097° 47' 09.72" E	01° 11' 20.82" N			
		097° 45' 35.17" E	01° 09' 33.70" N			
KPU-PL-DLK-09	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU TIMUR	098° 38' 31.14" E	00° 04' 48.82" N	42,08	1203	0616-06
		098° 38' 28.55" E	00° 04' 32.15" N			
		098° 37' 59.17" E	00° 04' 33.80" N			
KPU-PL-DLK-10	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU	098° 17' 33.38" E	00° 02' 48.81" S	112,10		0615-02
		098° 17' 37.98" E	00° 02' 51.44" S			
		098° 17' 34.57" E	00° 02' 58.12" S			
		098° 17' 23.12" E	00° 03' 20.02" S			
		098° 17' 19.21" E	00° 03' 27.67" S			
		098° 17' 03.92" E	00° 03' 20.50" S			
		098° 17' 02.16" E	00° 02' 46.88" S			
		098° 17' 00.65" E	00° 02' 43.18" S			
		098° 17' 12.27" E	00° 02' 37.19" S			
		098° 17' 33.38" E	00° 02' 48.81" S			
PELABUHAN DLK (KPU-PL-WKO)				**1.437,53**		
KPU-PL-WKO-01	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. TELUK MENGKUDU	099° 07' 24.68" E	03° 34' 05.90" N	2,11	1206	0719-01
		099° 07' 22.95" E	03° 34' 11.16" N			
		099° 07' 26.40" E	03° 34' 09.44" N			
		099° 07' 24.68" E	03° 34' 05.90" N			
KPU-PL-WKO-02	KAB. BATUBARA, KEC. TANJUNG TIRAM	099° 35' 18.64" E	03° 13' 45.92" N	12,41	1208	0719-04
		099° 35' 06.10" E	03° 13' 51.26" N			
		099° 35' 18.64" E	03° 13' 45.92" N			
KPU-PL-WKO-03	KAB. ASAHAN, KEC. TANJUNG BALAI	099° 53' 27.48" E	03° 02' 20.14" N	974,06		0718-01
		099° 50' 13.39" E	03° 03' 23.23" N			
		099° 53' 23.59" E	03° 03' 23.58" N			
		099° 53' 27.48" E	03° 02' 20.14" N			
KPU-PL-WKO-04	KOTA MEDAN, KEC. MEDAN BELAWAN	098° 42' 28.62" E	03° 46' 29.21" N	2,03	1206	0619-04
		098° 42' 33.92" E	03° 46' 33.82" N			
		098° 42' 36.24" E	03° 46' 31.51" N			
		098° 42' 30.69" E	03° 46' 27.13" N			
		098° 42' 28.62" E	03° 46' 29.21" N			
KPU-PL-WKO-05	KAB. NIAS BARAT, KEC. SIROMBU	097° 25' 04.86" E	00° 57' 00.16" N	9,23	1202	0616-01, 0516-01
		097° 25' 07.19" E	00° 56' 56.73" N			
		097° 24' 53.14" E	00° 56' 50.39" N			
		097° 24' 49.91" E	00° 56' 56.33" N			
		097° 25' 04.86" E	00° 57' 00.16" N			
KPU-PL-WKO-06	KAB. NIAS SELATAN, KEC. TELUK DALAM	097° 50' 15.39" E	00° 33' 34.89" N	307,17	1201	0616-04
		097° 50' 17.05" E	00° 33' 34.41" N			
		097° 50' 01.60" E	00° 32' 41.39" N			
		097° 49' 40.60" E	00° 32' 45.24" N			
		097° 50' 15.39" E	00° 33' 34.89" N			
KPU-PL-WKO-07	KAB. NIAS SELATAN, KEC. TOMA	097° 53' 27.39" E	00° 37' 07.53" N	130,53		0616-03, 0616-04
		097° 53' 43.94" E	00° 36' 58.23" N			
		097° 53' 06.86" E	00° 35' 55.58" N			
		097° 52' 47.97" E	00° 36' 07.92" N			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		Bujur	Lintang		SKALA	
ZONA PERIKANAN TANGKAP (KPU-PT)				3.850.948,90	250 K	50 K
PERIKANAN TANGKAP DEMERSAL (KPU-PT-D)				331.506,15		
KPU-PT-D-01	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. MANDUAMAS, SIRANDORUNG, ANDAM DEWI, BARUS UTARA, BARUS	098° 07' 18.68" E	02° 09' 51.03" N	13.359,56	1205	0816-04
		098° 07' 36.66" E	02° 10' 11.91" N			
		098° 23' 01.50" E	02° 00' 43.58" N			
		098° 22' 45.09" E	02° 00' 24.27" N			
		098° 23' 24.07" E	01° 59' 56.07" N			
		098° 23' 58.87" E	01° 59' 43.44" N			
		098° 21' 20.72" E	01° 57' 26.45" N			
		098° 17' 38.38" E	02° 00' 51.00" N			
		098° 15' 31.09" E	02° 01' 25.42" N			
		098° 14' 45.01" E	02° 03' 00.18" N			
		098° 12' 36.24" E	02° 04' 30.88" N			
		098° 09' 54.41" E	02° 05' 18.70" N			
		098° 07' 05.21" E	02° 08' 37.32" N			
KPU-PT-D-02	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. MANDUAMAS, SIRANDORUNG	098° 07' 13.47" E	01° 39' 29.46" N	72.612,82	1205, 1202	0816-04, 0617-09
		098° 06' 59.70" E	01° 39' 23.67" N			
		097° 54' 03.73" E	01° 46' 24.81" N			
		098° 00' 59.53" E	01° 58' 45.05" N			
		098° 14' 23.88" E	01° 51' 28.61" N			
		098° 07' 13.47" E	01° 39' 29.46" N			
		098° 02' 02.78" E	01° 51' 02.54" N			
		098° 01' 19.56" E	01° 51' 01.01" N			
		098° 01' 23.69" E	01° 50' 23.07" N			
		098° 02' 07.26" E	01° 50' 25.51" N			
		098° 02' 02.78" E	01° 51' 02.54" N			
KPU-PT-D-03	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. BARUS	098° 23' 39.22" E	02° 00' 25.64" N	114,48	1205	0816-04
		098° 23' 24.07" E	01° 59' 56.07" N			
		098° 22' 45.09" E	02° 00' 24.27" N			
		098° 23' 01.50" E	02° 00' 43.58" N			
		098° 23' 39.22" E	02° 00' 25.64" N			
KPU-PT-D-04	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. NATAL, BATAHAN, MUARA BATANG GADIS	098° 55' 23.31" E	00° 52' 31.21" N	31.050,52	1204	0617-05, 0616-07, 0616-08
		099° 00' 09.11" E	00° 46' 42.31" N			
		099° 01' 28.20" E	00° 37' 28.52" N			
		099° 02' 55.38" E	00° 37' 53.57" N			
		099° 02' 04.79" E	00° 36' 50.89" N			
		099° 02' 42.82" E	00° 35' 30.20" N			
		099° 05' 35.31" E	00° 36' 38.18" N			
		099° 08' 12.60" E	00° 24' 07.55" N			
		099° 06' 07.54" E	00° 23' 59.68" N			
		099° 06' 10.49" E	00° 23' 13.46" N			
		099° 05' 06.19" E	00° 22' 57.72" N			
		099° 05' 03.71" E	00° 27' 20.50" N			
		098° 58' 23.31" E	00° 40' 18.42" N			
		098° 56' 51.27" E	00° 49' 04.09" N			
		098° 54' 17.26" E	00° 52' 52.39" N			
		098° 54' 49.35" E	00° 59' 37.76" N			
		098° 55' 55.63" E	00° 56' 29.19" N			
		099° 04' 36.21" E	00° 32' 14.38" N			
		099° 04' 36.21" E	00° 32' 39.65" N			
		099° 04' 03.66" E	00° 32' 39.65" N			
		099° 04' 03.66" E	00° 32' 14.38" N			
		099° 04' 36.21" E	00° 32' 14.38" N			

KPU-PT-D-05	KAB. NIAS BARAT, KEC. SIROMBU, MADREHE BARAT	097° 21' 52.80" E	00° 54' 50.78" N	9.233,22	1202	0516-01
		097° 13' 40.53" E	00° 54' 27.72" N			
		097° 18' 18.07" E	00° 57' 50.73" N			
		097° 21' 52.80" E	00° 54' 50.78" N			
		097° 16' 26.55" E	00° 55' 33.62" N			
		097° 15' 22.87" E	00° 54' 47.74" N			
		097° 16' 29.29" E	00° 53' 15.20" N			
		097° 17' 37.82" E	00° 54' 01.79" N			
		097° 17' 48.79" E	00° 52' 32.02" N			
		097° 16' 41.16" E	00° 52' 32.02" N			
		097° 16' 40.26" E	00° 51' 26.92" N			
		097° 17' 48.79" E	00° 51' 26.92" N			
		097° 17' 48.79" E	00° 52' 32.02" N			
KPU-PT-D-06	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU, PULAU-PULAU BATU TIMUR, HIBALA	098° 48' 21.76" E	00° 11' 48.83" N	205.135,55	1204, 1203	0616-09, 0616-06, 0616-05, 0615-06
		098° 48' 21.76" E	00° 10' 40.57" N			
		098° 47' 45.20" E	00° 11' 13.06" N			
		098° 46' 40.75" E	00° 10' 17.07" N			
		098° 34' 28.01" E	00° 05' 41.96" N			
		098° 34' 28.02" E	00° 04' 32.59" N			
		098° 37' 03.28" E	00° 04' 32.59" N			
		098° 37' 03.28" E	00° 03' 20.85" N			
		098° 38' 55.71" E	00° 03' 20.85" N			
		098° 38' 55.71" E	00° 04' 40.25" N			
		098° 39' 54.48" E	00° 04' 23.77" N			
		098° 39' 54.07" E	00° 03' 44.95" N			
		098° 47' 59.12" E	00° 03' 44.95" N			
		098° 47' 58.07" E	00° 00' 22.38" N			
		098° 44' 41.60" E	00° 01' 12.99" S			
		098° 41' 27.97" E	00° 02' 22.19" S			
		098° 41' 41.80" E	00° 09' 51.26" S			
		098° 35' 12.31" E	00° 20' 54.78" S			
		098° 33' 29.58" E	00° 26' 00.70" S			
		098° 31' 25.42" E	00° 34' 50.65" S			
		098° 34' 16.61" E	00° 37' 55.94" S			
		098° 29' 59.79" E	00° 40' 35.33" S			
		098° 21' 39.05" E	00° 37' 38.62" S			
		098° 14' 48.22" E	00° 32' 32.67" S			
		098° 16' 43.82" E	00° 25' 17.53" S			
		098° 19' 43.61" E	00° 16' 44.84" S			
		098° 15' 31.18" E	00° 09' 04.71" S			
		098° 22' 08.38" E	00° 08' 58.66" S			
		098° 22' 44.79" E	00° 08' 34.04" S			
		098° 22' 06.70" E	00° 06' 33.34" S			
		098° 23' 10.29" E	00° 07' 30.23" S			
		098° 22' 36.41" E	00° 07' 47.35" S			
		098° 23' 35.83" E	00° 08' 58.55" S			
		098° 23' 59.67" E	00° 08' 46.55" S			
		098° 32' 10.42" E	00° 21' 23.85" S			
		098° 31' 59.24" E	00° 21' 23.90" S			
		098° 31' 59.25" E	00° 22' 59.11" S			
		098° 32' 52.04" E	00° 22' 59.11" S			
		098° 34' 23.39" E	00° 16' 53.69" S			
		098° 35' 16.67" E	00° 16' 07.22" S			
		098° 29' 52.82" E	00° 11' 15.06" S			
		098° 29' 44.85" E	00° 11' 19.69" S			

		098° 26' 55.12" E	00° 04' 31.35" S			
		098° 26' 55.12" E	00° 03' 29.47" S			
		098° 26' 33.53" E	00° 03' 29.40" S			
		098° 25' 01.48" E	00° 00' 46.46" S			
		098° 25' 13.36" E	00° 00' 46.46" S			
		098° 25' 13.36" E	00° 00' 34.05" N			
		098° 20' 50.22" E	00° 00' 34.05" N			
		098° 20' 56.20" E	00° 00' 16.95" N			
		098° 19' 17.03" E	00° 01' 55.23" S			
		098° 19' 10.34" E	00° 02' 58.85" S			
		098° 18' 55.48" E	00° 03' 18.33" S			
		098° 18' 55.55" E	00° 03' 19.51" S			
		098° 18' 55.41" E	00° 03' 20.10" S			
		098° 17' 37.37" E	00° 03' 20.03" S			
		098° 17' 34.57" E	00° 02' 58.12" S			
		098° 17' 37.98" E	00° 02' 51.44" S			
		098° 17' 33.38" E	00° 02' 48.81" S			
		098° 16' 42.52" E	00° 03' 49.51" N			
		098° 19' 11.54" E	00° 04' 01.17" N			
		098° 20' 23.43" E	00° 05' 53.19" N			
		098° 22' 47.23" E	00° 04' 02.89" N			
		098° 23' 04.35" E	00° 02' 05.70" N			
		098° 24' 04.27" E	00° 01' 48.47" N			
		098° 25' 00.76" E	00° 03' 52.55" N			
		098° 27' 29.69" E	00° 04' 11.51" N			
		098° 29' 45.79" E	00° 01' 39.85" N			
		098° 34' 58.30" E	00° 01' 14.72" N			
		098° 29' 40.65" E	00° 08' 12.80" N			
		098° 29' 26.95" E	00° 10' 09.99" N			
		098° 31' 30.91" E	00° 11' 48.59" N			
		098° 47' 06.65" E	00° 12' 22.72" N			
		098° 48' 21.76" E	00° 11' 48.83" N			
		098° 37' 34.71" E	00° 02' 15.40" N			
		098° 37' 05.80" E	00° 02' 15.40" N			
		098° 37' 05.80" E	00° 01' 53.56" N			
		098° 37' 34.71" E	00° 01' 53.56" N			
		098° 37' 34.71" E	00° 02' 15.40" N			
		098° 38' 52.02" E	00° 01' 19.29" N			
		098° 38' 10.48" E	00° 01' 19.29" N			
		098° 38' 10.48" E	00° 00' 48.24" N			
		098° 38' 52.02" E	00° 00' 48.24" N			
		098° 38' 52.02" E	00° 01' 19.29" N			
		098° 36' 49.53" E	00° 00' 53.60" N			
		098° 36' 16.12" E	00° 00' 53.60" N			
		098° 36' 16.12" E	00° 00' 31.54" N			
		098° 36' 49.53" E	00° 00' 31.54" N			
		098° 36' 49.53" E	00° 00' 53.60" N			
		098° 39' 01.02" E	00° 00' 32.27" S			
		098° 37' 28.93" E	00° 00' 32.27" S			
		098° 37' 28.93" E	00° 00' 56.68" S			
		098° 39' 01.02" E	00° 00' 56.68" S			
		098° 39' 01.02" E	00° 00' 32.27" S			
		098° 27' 19.53" E	00° 00' 54.85" S			
		098° 26' 45.06" E	00° 00' 54.85" S			
		098° 26' 45.06" E	00° 01' 27.61" S			

		098° 27' 19.53" E	00° 01' 27.61" S			
		098° 27' 19.53" E	00° 00' 54.85" S			
		098° 30' 42.08" E	00° 01' 37.29" S			
		098° 28' 57.49" E	00° 01' 37.29" S			
		098° 28' 57.49" E	00° 04' 19.19" S			
		098° 30' 42.08" E	00° 04' 19.19" S			
		098° 30' 42.08" E	00° 01' 37.29" S			
		098° 33' 20.38" E	00° 01' 42.43" S			
		098° 31' 14.97" E	00° 01' 42.43" S			
		098° 31' 14.97" E	00° 04' 50.29" S			
		098° 33' 20.38" E	00° 04' 50.29" S			
		098° 33' 20.38" E	00° 01' 42.43" S			
		098° 28' 07.93" E	00° 03' 46.38" S			
		098° 27' 30.88" E	00° 03' 46.38" S			
		098° 27' 30.88" E	00° 04' 03.94" S			
		098° 28' 07.93" E	00° 04' 03.94" S			
		098° 28' 07.93" E	00° 03' 46.38" S			
		098° 26' 17.22" E	00° 02' 13.23" S			
		098° 25' 55.80" E	00° 02' 13.23" S			
		098° 25' 55.80" E	00° 02' 33.36" S			
		098° 26' 17.22" E	00° 02' 33.36" S			
		098° 26' 17.22" E	00° 02' 13.23" S			
		098° 31' 16.19" E	00° 22' 54.73" S			
		098° 29' 18.97" E	00° 17' 58.11" S			
		098° 29' 44.18" E	00° 17' 40.90" S			
		098° 29' 33.71" E	00° 17' 27.72" S			
		098° 29' 12.39" E	00° 17' 02.83" S			
		098° 28' 35.96" E	00° 17' 20.94" S			
		098° 25' 24.55" E	00° 15' 50.55" S			
		098° 25' 25.49" E	00° 15' 52.47" S			
		098° 25' 04.03" E	00° 16' 09.27" S			
		098° 26' 02.10" E	00° 17' 53.61" S			
		098° 26' 30.09" E	00° 17' 41.05" S			
		098° 23' 02.56" E	00° 20' 39.58" S			
		098° 22' 55.23" E	00° 20' 36.28" S			
		098° 22' 38.74" E	00° 21' 10.79" S			
		098° 22' 54.08" E	00° 21' 14.68" S			
		098° 21' 20.94" E	00° 28' 32.38" S			
		098° 20' 52.86" E	00° 28' 11.96" S			
		098° 19' 10.41" E	00° 30' 10.86" S			
		098° 19' 16.12" E	00° 30' 29.44" S			
		098° 20' 38.26" E	00° 32' 22.39" S			
		098° 20' 18.69" E	00° 32' 48.02" S			
		098° 24' 38.66" E	00° 36' 00.70" S			
		098° 24' 51.10" E	00° 35' 46.41" S			
		098° 25' 23.27" E	00° 32' 42.62" S			
		098° 25' 37.60" E	00° 33' 05.86" S			
		098° 26' 48.54" E	00° 32' 30.17" S			
		098° 27' 01.89" E	00° 32' 44.56" S			
		098° 26' 32.75" E	00° 33' 10.84" S			
		098° 27' 59.70" E	00° 34' 39.93" S			
		098° 28' 47.91" E	00° 33' 54.68" S			
		098° 30' 23.08" E	00° 28' 55.30" S			
		098° 31' 23.79" E	00° 29' 12.28" S			
		098° 31' 23.79" E	00° 27' 58.61" S			

		098° 30' 21.44" E	00° 27' 58.61" S			
		098° 30' 46.80" E	00° 24' 31.13" S			
		098° 31' 41.56" E	00° 22' 54.73" S			
		098° 31' 16.19" E	00° 22' 54.73" S			
		098° 31' 19.50" E	00° 27' 13.00" S			
		098° 30' 31.32" E	00° 27' 12.38" S			
		098° 30' 31.32" E	00° 27' 52.61" S			
		098° 31' 19.50" E	00° 27' 52.61" S			
		098° 31' 19.50" E	00° 27' 13.00" S			
		098° 31' 40.49" E	00° 29' 32.62" S			
		098° 30' 51.23" E	00° 29' 32.62" S			
		098° 30' 51.23" E	00° 30' 13.10" S			
		098° 31' 40.49" E	00° 30' 13.10" S			
		098° 31' 40.49" E	00° 29' 32.62" S			
		098° 30' 24.78" E	00° 35' 09.75" S			
		098° 28' 17.40" E	00° 36' 43.79" S			
		098° 30' 46.37" E	00° 39' 16.45" S			
		098° 32' 49.04" E	00° 37' 34.35" S			
		098° 30' 24.78" E	00° 35' 09.75" S			
		098° 23' 33.05" E	00° 15' 05.45" S			
		098° 22' 23.91" E	00° 15' 11.11" S			
		098° 22' 44.40" E	00° 17' 34.50" S			
		098° 23' 53.61" E	00° 17' 26.96" S			
		098° 23' 33.05" E	00° 15' 05.45" S			
PERIKANAN TANGKAP PELAGIS (KPU-PT-P)				**3.200.105,81**		
KPU-PT-P-01	KAB. LANGKAT, KEC. BRANDAN BARAT, BABALAN, GEBANG, TANJUNG PURA, SECANGGANG	098° 49' 35.88" E	04° 02' 25.61" N	67.118,62	1206	0619-01, 0619-02, 0619-03
		098° 41' 46.54" E	03° 55' 59.93" N			
		098° 28' 21.06" E	04° 09' 10.27" N			
		098° 34' 50.93" E	04° 12' 38.12" N			
		098° 39' 36.02" E	04° 10' 15.79" N			
		098° 43' 05.75" E	04° 06' 17.03" N			
		098° 49' 35.88" E	04° 02' 25.61" N			
		098° 28' 32.59" E	04° 15' 32.45" N			
		098° 31' 13.43" E	04° 13' 56.70" N			
		098° 34' 11.52" E	04° 12' 54.18" N			
		098° 27' 53.76" E	04° 09' 32.11" N			
		098° 24' 33.83" E	04° 12' 32.55" N			
		098° 24' 10.55" E	04° 12' 55.24" N			
		098° 22' 45.40" E	04° 14' 19.28" N			
		098° 20' 25.73" E	04° 16' 48.71" N			
KPU-PT-P-02	KAB. DELI SERDANG, KEC. HAMPARAN PERAK, PERCUT SEI TUAN, PANTAI LABU	099° 04' 18.66" E	03° 50' 30.63" N	1.675,37		0719-01
		099° 02' 58.47" E	03° 48' 46.90" N			
		099° 01' 54.28" E	03° 50' 07.34" N			
		099° 02' 10.95" E	03° 50' 24.98" N			
		099° 03' 30.59" E	03° 51' 01.64" N			
		099° 04' 18.66" E	03° 50' 30.63" N			
		099° 01' 52.75" E	03° 50' 52.27" N			
		099° 02' 30.52" E	03° 51' 33.37" N			
		099° 02' 55.23" E	03° 51' 21.19" N			
		099° 01' 00.76" E	03° 50' 44.30" N			
		099° 00' 22.38" E	03° 51' 10.81" N			
		098° 59' 25.47" E	03° 52' 31.53" N			
		099° 01' 59.11" E	03° 51' 47.21" N			

KPU-PT-P-03	KAB. DELI SERDANG, KEC. LABUHAN DELI, HAMPARAN PERAK	098° 53' 48.78" E	03° 54' 23.53" N	21.223,35		0619-03, 0619-04
		098° 52' 36.46" E	03° 53' 32.05" N			
		098° 52' 08.04" E	03° 55' 05.32" N			
		098° 52' 24.81" E	03° 55' 53.61" N			
		098° 52' 39.09" E	03° 57' 58.95" N			
		098° 50' 49.29" E	03° 52' 15.77" N			
		098° 47' 03.86" E	03° 54' 11.00" N			
		098° 41' 46.54" E	03° 55' 59.93" N			
		098° 49' 35.88" E	04° 02' 25.61" N			
		098° 52' 12.90" E	03° 58' 49.12" N			
		098° 51' 52.89" E	03° 56' 00.12" N			
		098° 51' 34.76" E	03° 55' 05.38" N			
		098° 52' 08.59" E	03° 53' 12.21" N			
KPU-PT-P-04	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PANTAI CERMIN, PERBAUNGAN, TELUK MENGKUDU, TANJUNG BERINGIN, BANDAR KHALIPAH	099° 17' 13.07" E	03° 38' 46.59" N	49.850,21		0719-01, 0719-02
		099° 20' 28.76" E	03° 37' 53.07" N			
		099° 26' 17.27" E	03° 36' 19.12" N			
		099° 22' 23.26" E	03° 31' 00.31" N			
		099° 21' 18.19" E	03° 31' 24.20" N			
		099° 21' 21.17" E	03° 32' 26.17" N			
		099° 10' 16.35" E	03° 38' 01.68" N			
		099° 10' 15.20" E	03° 38' 02.25" N			
		099° 10' 15.13" E	03° 38' 02.17" N			
		099° 07' 56.30" E	03° 39' 12.25" N			
		099° 07' 45.93" E	03° 40' 56.89" N			
		099° 11' 02.90" E	03° 40' 24.81" N			
		099° 17' 13.07" E	03° 38' 46.59" N			
		099° 25' 58.29" E	03° 36' 57.96" N			
		099° 17' 21.54" E	03° 39' 18.03" N			
		099° 11' 09.88" E	03° 40' 56.62" N			
		099° 07' 50.13" E	03° 41' 29.20" N			
		099° 06' 58.35" E	03° 45' 21.19" N			
		099° 02' 58.47" E	03° 48' 46.90" N			
		099° 04' 18.66" E	03° 50' 30.63" N			
		099° 08' 20.90" E	03° 48' 05.36" N			
		099° 13' 02.26" E	03° 44' 59.47" N			
KPU-PT-P-05	KAB. BATUBARA, KEC. MEDANG BERAS, SEI SUKA, LIMA PULUH, TALAWI, TANJUNG TIRAM	099° 54' 21.39" E	03° 23' 30.49" N	119.357,04	1206, 1208	0719-02, 0719-04, 0718-01
		099° 48' 39.19" E	03° 26' 55.10" N			
		099° 48' 17.38" E	03° 27' 49.69" N			
		099° 54' 45.28" E	03° 24' 01.70" N			
		099° 47' 39.39" E	03° 28' 50.79" N			
		099° 41' 28.21" E	03° 32' 40.72" N			
		099° 36' 58.55" E	03° 33' 51.66" N			
		099° 37' 27.18" E	03° 34' 19.03" N			
		099° 37' 52.87" E	03° 34' 41.19" N			
		099° 40' 10.03" E	03° 33' 54.05" N			
		099° 47' 15.03" E	03° 29' 39.63" N			
		099° 35' 01.49" E	03° 31' 18.11" N			
		099° 36' 33.55" E	03° 33' 25.09" N			
		099° 41' 13.12" E	03° 32' 11.79" N			
		099° 47' 41.81" E	03° 28' 11.26" N			
		099° 48' 19.31" E	03° 26' 29.09" N			
		099° 54' 01.49" E	03° 23' 04.49" N			
		099° 47' 39.78" E	03° 14' 45.76" N			
		099° 44' 29.35" E	03° 16' 45.08" N			
		099° 40' 39.43" E	03° 18' 44.84" N			

		099° 35' 30.11" E	03° 20' 04.38" N			
		099° 37' 49.58" E	03° 22' 59.79" N			
		099° 36' 27.69" E	03° 27' 18.57" N			
		099° 35' 19.20" E	03° 30' 16.12" N			
		099° 34' 03.76" E	03° 30' 57.52" N			
		099° 25' 20.61" E	03° 29' 36.80" N			
		099° 22' 23.26" E	03° 31' 00.31" N			
		099° 26' 17.27" E	03° 36' 19.12" N			
		099° 27' 17.63" E	03° 36' 02.85" N			
		099° 30' 01.81" E	03° 34' 08.80" N			
		099° 44' 50.64" E	03° 25' 58.99" N			
		099° 44' 50.64" E	03° 24' 33.33" N			
		099° 46' 12.88" E	03° 24' 33.33" N			
		099° 46' 12.88" E	03° 25' 58.99" N			
		099° 44' 50.64" E	03° 25' 58.99" N			
		099° 41' 22.99" E	03° 19' 37.85" N			
		099° 44' 35.73" E	03° 18' 23.97" N			
		099° 45' 46.40" E	03° 21' 18.51" N			
		099° 42' 32.84" E	03° 22' 43.06" N			
		099° 41' 22.99" E	03° 19' 37.85" N			
		099° 55' 05.20" E	03° 24' 27.73" N			
		099° 48' 13.88" E	03° 28' 29.79" N			
		099° 47' 53.22" E	03° 29' 41.76" N			
		099° 40' 24.85" E	03° 34' 23.06" N			
		099° 38' 23.53" E	03° 35' 05.08" N			
		099° 45' 42.98" E	03° 37' 25.17" N			
		099° 50' 38.02" E	03° 36' 17.00" N			
KPU-PT-P-06	KAB. ASAHAN, KEC. SILAU LAUT, TANJUNG BALAI, SEI KEPAYANG TIMUR, SEI KEPAYANG	099° 56' 32.44" E	03° 14' 42.40" N	44.105,48	1208	0719-04, 0718-01
		099° 57' 12.84" E	03° 13' 47.49" N			
		100° 00' 40.75" E	03° 11' 58.20" N			
		100° 03' 29.12" E	03° 08' 58.54" N			
		100° 07' 23.49" E	03° 06' 31.34" N			
		100° 05' 26.39" E	02° 57' 48.56" N			
		100° 03' 03.49" E	03° 02' 33.22" N			
		099° 57' 48.60" E	03° 07' 26.12" N			
		100° 00' 27.73" E	03° 11' 26.48" N			
		099° 53' 14.99" E	03° 16' 10.00" N			
		099° 51' 26.99" E	03° 12' 23.39" N			
		099° 47' 39.78" E	03° 14' 45.76" N			
		099° 54' 01.49" E	03° 23' 04.49" N			
		099° 56' 53.40" E	03° 21' 23.19" N			
		099° 55' 05.32" E	03° 17' 17.32" N			
		099° 57' 03.38" E	03° 21' 55.05" N			
		099° 54' 21.39" E	03° 23' 30.49" N			
		099° 54' 45.28" E	03° 24' 01.70" N			
		099° 57' 13.66" E	03° 22' 35.00" N			
		099° 57' 20.72" E	03° 23' 08.67" N			
		099° 55' 05.20" E	03° 24' 27.73" N			
		099° 57' 22.37" E	03° 27' 23.94" N			
		099° 57' 27.30" E	03° 23' 51.29" N			
KPU-PT-P-07	KAB. ASAHAN, KEC. TANJUNG BALAI	099° 57' 48.60" E	03° 07' 26.12" N	13.109,78		0718-01
		099° 53' 58.52" E	03° 10' 54.68" N			
		099° 51' 26.99" E	03° 12' 23.39" N			
		099° 53' 14.99" E	03° 16' 10.00" N			
		100° 00' 27.73" E	03° 11' 26.48" N			
		099° 57' 48.60" E	03° 07' 26.12" N			

KPU-PT-P-08	KAB. LABUHANBATU UTARA, KEC. KUALUH HILIR, KUALUH LEIDONG	100° 12' 28.09" E	02° 54' 45.43" N	13.816,18	1208, 1207	0718-02
		100° 09' 57.58" E	02° 51' 58.95" N			
		100° 07' 09.09" E	02° 54' 23.96" N			
		100° 05' 26.39" E	02° 57' 48.56" N			
		100° 10' 14.04" E	03° 02' 43.11" N			
		100° 11' 26.74" E	02° 59' 01.97" N			
		100° 11' 32.21" E	02° 54' 46.74" N			
		100° 12' 28.09" E	02° 54' 45.43" N			
KPU-PT-P-09	KAB. LABUHANBATU, KEC. PANAI HILIR	100° 24' 23.72" E	02° 34' 48.91" N	58.965,61	1207	
		100° 17' 38.02" E	02° 40' 42.28" N			
		100° 09' 57.58" E	02° 51' 58.95" N			
		100° 12' 28.09" E	02° 54' 45.43" N			
		100° 17' 18.46" E	02° 53' 40.67" N			
		100° 21' 01.37" E	02° 51' 28.28" N			
		100° 24' 18.74" E	02° 44' 49.72" N			
		100° 28' 48.51" E	02° 40' 21.41" N			
		100° 30' 00.14" E	02° 38' 26.31" N			
		100° 24' 23.72" E	02° 34' 48.91" N			
KPU-PT-P-10	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. MANDUAMAS, SIRANDORUNG, ANDAM DEWI, BARUS UTARA, BARUS, SOSORGADONG, SORKAM BARAT, SORKAM, KOLANG, TAPIAN NAULI, BADIRI, PINANG SORI	098° 28' 26.47" E	01° 45' 19.01" N	514.054,27	1205, 1204, 1202	0816-04, 0617-03, 0617-02, 0617-04, 0617-05
		098° 31' 48.13" E	01° 44' 01.14" N			
		098° 25' 00.46" E	01° 44' 01.75" N			
		098° 25' 00.60" E	01° 36' 06.09" N			
		098° 27' 19.39" E	01° 31' 32.10" N			
		098° 42' 34.07" E	01° 31' 36.97" N			
		098° 43' 35.01" E	01° 29' 11.19" N			
		098° 43' 35.01" E	01° 28' 33.16" N			
		098° 45' 25.67" E	01° 24' 45.14" N			
		098° 35' 41.74" E	01° 21' 28.69" N			
		098° 29' 36.93" E	01° 22' 15.99" N			
		098° 22' 36.18" E	01° 26' 05.56" N			
		098° 19' 04.43" E	01° 19' 45.71" N			
		098° 13' 28.16" E	01° 16' 44.59" N			
		097° 59' 33.39" E	01° 17' 19.31" N			
		097° 54' 50.05" E	01° 29' 26.31" N			
		098° 05' 52.24" E	01° 38' 20.03" N			
		098° 21' 08.71" E	01° 44' 43.69" N			
		098° 28' 26.47" E	01° 45' 19.01" N			
		098° 07' 18.68" E	02° 09' 51.03" N			
		098° 07' 05.21" E	02° 08' 37.32" N			
		098° 09' 54.41" E	02° 05' 18.70" N			
		098° 12' 36.24" E	02° 04' 30.88" N			
		098° 14' 45.01" E	02° 03' 00.18" N			
		098° 15' 31.09" E	02° 01' 25.42" N			
		098° 17' 38.38" E	02° 00' 51.00" N			
		098° 21' 20.72" E	01° 57' 26.45" N			
		098° 23' 58.87" E	01° 59' 43.44" N			
		098° 24' 15.13" E	02° 00' 27.22" N			
		098° 33' 44.50" E	01° 52' 34.82" N			
		098° 31' 50.25" E	01° 51' 39.83" N			
		098° 32' 03.27" E	01° 51' 16.49" N			
		098° 33' 31.74" E	01° 49' 44.76" N			
		098° 35' 12.10" E	01° 50' 52.04" N			
		098° 36' 32.92" E	01° 49' 18.51" N			
		098° 36' 59.99" E	01° 49' 35.98" N			

		098° 41' 11.31" E	01° 44' 00.32" N			
		098° 33' 17.54" E	01° 44' 01.00" N			
		098° 28' 31.15" E	01° 45' 51.65" N			
		098° 21' 01.70" E	01° 45' 15.68" N			
		098° 07' 13.47" E	01° 39' 29.46" N			
		098° 14' 23.88" E	01° 51' 28.61" N			
		098° 00' 59.53" E	01° 58' 45.05" N			
		097° 54' 03.73" E	01° 46' 24.81" N			
		098° 06' 59.70" E	01° 39' 23.67" N			
		098° 05' 35.06" E	01° 38' 47.68" N			
		097° 55' 01.16" E	01° 30' 18.48" N			
		097° 56' 00.60" E	01° 32' 55.99" N			
		098° 02' 08.15" E	01° 38' 36.58" N			
		097° 55' 56.24" E	01° 39' 59.60" N			
		097° 50' 13.97" E	01° 46' 33.97" N			
		097° 50' 26.20" E	01° 55' 25.88" N			
		097° 55' 29.48" E	02° 01' 14.10" N			
		098° 00' 30.15" E	02° 01' 04.04" N			
		098° 04' 21.64" E	02° 09' 05.19" N			
		098° 06' 04.20" E	02° 09' 39.89" N			
		098° 07' 18.68" E	02° 09' 51.03" N			
KPU-PT-P-11	KAB. TAPANULI SELATAN, KEC. MUARA BATANG TORU	098° 48' 36.99" E	01° 17' 05.93" N	26.642,83	1205, 1204	0617-05, 0617-05
		098° 37' 12.10" E	01° 18' 25.29" N			
		098° 45' 25.67" E	01° 24' 45.14" N			
KPU-PT-P-12	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. MUARA BATANG GADIS, NATAL, BATAHAN	098° 54' 49.35" E	00° 59' 37.76" N	222.185,10	1204	0617-05, 0617-05, 0616-07, 0616-08, 0716-01,
		098° 54' 17.26" E	00° 52' 52.39" N			
		098° 56' 51.27" E	00° 49' 04.09" N			
		098° 58' 23.31" E	00° 40' 18.42" N			
		099° 05' 03.71" E	00° 27' 20.50" N			
		099° 05' 06.19" E	00° 22' 57.72" N			
		099° 04' 00.50" E	00° 22' 41.65" N			
		099° 05' 05.60" E	00° 18' 08.39" N			
		099° 09' 20.56" E	00° 18' 49.78" N			
		099° 09' 55.61" E	00° 13' 44.89" N			
		098° 54' 15.84" E	00° 26' 24.39" N			
		098° 53' 21.04" E	00° 30' 08.41" N			
		098° 51' 29.05" E	00° 33' 54.13" N			
		098° 50' 37.15" E	00° 38' 51.91" N			
		098° 49' 03.43" E	00° 42' 08.11" N			
		098° 42' 09.45" E	00° 51' 55.84" N			
		098° 43' 58.50" E	00° 59' 48.27" N			
		098° 42' 59.13" E	01° 04' 09.32" N			
		098° 40' 45.76" E	01° 07' 13.14" N			
		098° 37' 40.60" E	01° 12' 12.65" N			
		098° 48' 36.99" E	01° 17' 05.93" N			
KPU-PT-P-13	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA, LAHEWA TIMUR, LOTU, SAWO, TUHEMBERUA,SITOLU ORI	097° 41' 51.43" E	01° 32' 40.19" N	278.010,48	1202	0517-03, 0517-02, 0517-01
		097° 32' 38.03" E	01° 25' 15.17" N			
		097° 32' 22.78" E	01° 25' 27.14" N			
		097° 31' 13.85" E	01° 25' 42.34" N			
		097° 30' 39.46" E	01° 26' 54.91" N			
		097° 32' 49.07" E	01° 29' 24.41" N			
		097° 31' 46.71" E	01° 30' 42.53" N			
		097° 29' 15.17" E	01° 28' 55.69" N			
		097° 28' 31.21" E	01° 29' 00.52" N			
		097° 27' 59.87" E	01° 28' 42.27" N			

		097° 28' 03.91" E	01° 29' 07.48" N			
		097° 26' 38.99" E	01° 30' 00.95" N			
		097° 27' 08.60" E	01° 30' 26.40" N			
		097° 27' 08.60" E	01° 33' 04.31" N			
		097° 24' 04.43" E	01° 33' 04.31" N			
		097° 24' 04.79" E	01° 30' 00.16" N			
		097° 23' 43.55" E	01° 30' 00.57" N			
		097° 23' 38.41" E	01° 30' 05.09" N			
		097° 22' 37.51" E	01° 33' 54.59" N			
		097° 18' 40.37" E	01° 33' 54.59" N			
		097° 18' 40.37" E	01° 30' 19.55" N			
		097° 20' 31.92" E	01° 29' 20.28" N			
		097° 19' 42.27" E	01° 28' 45.32" N			
		097° 17' 18.36" E	01° 27' 09.38" N			
		097° 16' 59.52" E	01° 26' 21.41" N			
		097° 16' 39.90" E	01° 26' 03.71" N			
		097° 16' 40.05" E	01° 29' 06.74" N			
		097° 11' 32.25" E	01° 29' 06.74" N			
		097° 11' 32.79" E	01° 25' 09.65" N			
		097° 11' 22.84" E	01° 25' 09.51" N			
		097° 10' 30.41" E	01° 25' 24.25" N			
		097° 10' 38.48" E	01° 25' 31.62" N			
		097° 10' 38.48" E	01° 26' 29.75" N			
		097° 09' 02.83" E	01° 27' 43.40" N			
		097° 03' 59.01" E	01° 27' 43.40" N			
		097° 02' 16.54" E	01° 26' 29.75" N			
		097° 02' 16.54" E	01° 22' 27.36" N			
		097° 05' 58.57" E	01° 19' 57.27" N			
		097° 08' 04.70" E	01° 19' 57.27" N			
		097° 07' 54.38" E	01° 16' 15.43" N			
		097° 06' 53.68" E	01° 17' 16.14" N			
		097° 05' 00.60" E	01° 18' 38.37" N			
		097° 02' 16.14" E	01° 19' 14.35" N			
		096° 53' 33.11" E	01° 17' 50.70" N			
		096° 52' 19.72" E	01° 20' 17.57" N			
		096° 52' 26.04" E	01° 29' 23.17" N			
		096° 57' 41.19" E	01° 35' 23.37" N			
		097° 04' 34.83" E	01° 37' 25.63" N			
		097° 08' 03.01" E	01° 39' 11.85" N			
		097° 11' 06.42" E	01° 39' 51.28" N			
		097° 14' 19.70" E	01° 42' 48.81" N			
		097° 16' 13.37" E	01° 48' 42.88" N			
		097° 33' 30.03" E	01° 52' 27.75" N			
		097° 38' 45.22" E	01° 45' 05.06" N			
		097° 38' 04.16" E	01° 36' 59.06" N			
		097° 41' 51.43" E	01° 32' 40.19" N			
		097° 28' 10.40" E	01° 42' 11.24" N			
		097° 28' 10.40" E	01° 43' 23.35" N			
		097° 25' 20.97" E	01° 43' 22.21" N			
		097° 25' 20.91" E	01° 40' 38.01" N			
		097° 26' 23.17" E	01° 40' 38.77" N			
		097° 26' 17.77" E	01° 40' 25.88" N			
		097° 27' 38.29" E	01° 39' 48.19" N			
		097° 28' 19.41" E	01° 40' 35.30" N			
		097° 28' 50.25" E	01° 41' 01.00" N			
		097° 28' 27.98" E	01° 41' 53.25" N			
		097° 28' 10.40" E	01° 42' 11.24" N			

KPU-PT-P-14	KAB. NIAS UTARA, KEC. ALASA, AFULU, TUGALA OYO	097° 15' 19.50" E	01° 12' 01.62" N	48.873,51		0516-01, 0517-02
		097° 17' 22.85" E	01° 08' 33.98" N			
		097° 19' 04.28" E	01° 09' 35.36" N			
		097° 19' 41.08" E	01° 08' 46.00" N			
		097° 17' 29.71" E	01° 07' 04.42" N			
		097° 18' 06.56" E	01° 05' 57.51" N			
		097° 20' 24.17" E	01° 07' 28.79" N			
		097° 20' 38.25" E	01° 07' 11.00" N			
		097° 20' 23.50" E	01° 06' 58.10" N			
		097° 21' 50.23" E	01° 04' 24.98" N			
		097° 22' 16.08" E	01° 04' 31.67" N			
		097° 22' 21.83" E	01° 04' 13.33" N			
		097° 04' 20.89" E	00° 51' 43.23" N			
		097° 04' 01.48" E	00° 55' 02.77" N			
		097° 04' 58.79" E	00° 59' 26.19" N			
		097° 11' 56.91" E	01° 03' 44.07" N			
		097° 13' 14.01" E	01° 07' 19.94" N			
		097° 09' 48.34" E	01° 14' 21.47" N			
		097° 12' 43.25" E	01° 13' 31.50" N			
		097° 13' 52.92" E	01° 15' 18.17" N			
		097° 14' 29.20" E	01° 15' 38.85" N			
		097° 14' 26.12" E	01° 15' 04.47" N			
		097° 13' 00.44" E	01° 13' 02.08" N			
		097° 13' 05.58" E	01° 12' 01.26" N			
		097° 15' 19.50" E	01° 12' 01.62" N			
		097° 14' 16.61" E	01° 14' 59.92" N			
		097° 14' 17.70" E	01° 15' 09.08" N			
		097° 14' 10.27" E	01° 15' 18.29" N			
		097° 14' 09.28" E	01° 15' 17.66" N			
		097° 14' 06.29" E	01° 15' 07.88" N			
		097° 14' 13.77" E	01° 14' 57.96" N			
		097° 14' 16.61" E	01° 14' 59.92" N			
KPU-PT-P-15	KAB. GUNUNG SITOLI, KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN, GUNUNGSITOLI IDANOI	097° 49' 22.13" E	01° 21' 19.76" N	12.580,33		0617-07
		097° 44' 44.38" E	01° 13' 29.15" N			
		097° 40' 44.78" E	01° 17' 25.04" N			
		097° 47' 48.06" E	01° 23' 26.23" N			
KPU-PT-P-16	KAB. GUNUNG SITOLI, KEC. GUNUNG SITOLI, GUNUNG SITOLI UTARA	097° 47' 30.28" E	01° 23' 53.75" N	39.292,81		0517-03, 0517-01
		097° 40' 21.44" E	01° 17' 47.80" N			
		097° 35' 30.96" E	01° 22' 36.90" N			
		097° 34' 08.43" E	01° 21' 38.38" N			
		097° 33' 43.76" E	01° 22' 05.11" N			
		097° 33' 56.63" E	01° 22' 12.50" N			
		097° 33' 44.38" E	01° 22' 42.46" N			
		097° 33' 30.39" E	01° 22' 34.33" N			
		097° 32' 47.35" E	01° 23' 01.74" N			
		097° 33' 02.80" E	01° 23' 09.46" N			
		097° 32' 49.95" E	01° 23' 35.70" N			
		097° 32' 52.63" E	01° 24' 26.02" N			
		097° 32' 31.53" E	01° 24' 28.75" N			
		097° 32' 27.16" E	01° 25' 06.43" N			
		097° 32' 38.03" E	01° 25' 15.17" N			
		097° 41' 51.43" E	01° 32' 40.19" N			
		097° 44' 02.70" E	01° 28' 44.19" N			
		097° 47' 30.28" E	01° 23' 53.75" N			

KPU-PT-P-17	KAB. NIAS, KEC. GIDO, IDANOGAWO, BAWOLATO	098° 11' 43.94" E	00° 48' 41.23" N	159.986,94	1204, 1202	0617-07
		097° 57' 21.24" E	00° 52' 12.79" N			
		097° 54' 08.22" E	00° 53' 00.12" N			
		097° 50' 56.45" E	01° 04' 21.26" N			
		097° 53' 18.11" E	01° 05' 57.52" N			
		097° 50' 05.87" E	01° 10' 13.75" N			
		097° 48' 14.53" E	01° 08' 50.95" N			
		097° 45' 35.17" E	01° 09' 33.70" N			
		097° 47' 09.72" E	01° 11' 20.82" N			
		097° 44' 44.38" E	01° 13' 29.15" N			
		097° 49' 22.13" E	01° 21' 19.76" N			
		097° 53' 45.81" E	01° 19' 38.64" N			
		097° 57' 15.08" E	01° 16' 51.24" N			
		098° 03' 29.50" E	01° 14' 04.72" N			
		098° 05' 36.95" E	01° 11' 45.93" N			
		098° 09' 13.12" E	01° 07' 35.17" N			
		098° 10' 36.73" E	01° 02' 02.26" N			
		098° 13' 12.23" E	00° 54' 40.59" N			
		098° 11' 43.94" E	00° 48' 41.23" N			
		098° 00' 20.13" E	01° 03' 26.31" N			
		097° 55' 56.65" E	01° 02' 05.75" N			
		097° 57' 07.35" E	00° 59' 04.36" N			
		098° 01' 30.29" E	01° 00' 32.44" N			
		098° 00' 20.13" E	01° 03' 26.31" N			
		097° 56' 00.83" E	01° 05' 20.22" N			
		097° 53' 30.81" E	01° 05' 19.32" N			
		097° 53' 30.81" E	01° 04' 04.60" N			
		097° 56' 00.89" E	01° 04' 04.60" N			
		097° 56' 00.83" E	01° 05' 20.22" N			
KPU-PT-P-18	KAB. NIAS BARAT, KEC. SIROMBU, MANDREHE BARAT, MOROO	097° 24' 37.63" E	00° 56' 17.17" N	94.187,74	1201, 1202	0616-01, 0516-01, 0517-02
		097° 25' 47.08" E	00° 54' 35.34" N			
		097° 27' 27.66" E	00° 56' 35.46" N			
		097° 29' 23.73" E	00° 49' 41.86" N			
		097° 22' 32.08" E	00° 55' 28.35" N			
		097° 21' 52.80" E	00° 54' 50.78" N			
		097° 18' 18.07" E	00° 57' 50.73" N			
		097° 13' 40.53" E	00° 54' 27.72" N			
		097° 17' 12.08" E	00° 50' 22.33" N			
		097° 16' 08.29" E	00° 49' 21.32" N			
		097° 23' 06.05" E	00° 42' 37.33" N			
		097° 17' 44.76" E	00° 37' 09.90" N			
		097° 13' 15.07" E	00° 39' 33.14" N			
		097° 11' 20.74" E	00° 41' 16.72" N			
		097° 06' 35.22" E	00° 45' 58.38" N			
		097° 05' 17.73" E	00° 49' 06.49" N			
		097° 04' 20.89" E	00° 51' 43.23" N			
		097° 22' 21.83" E	01° 04' 13.33" N			
		097° 24' 37.63" E	00° 56' 17.17" N			
KPU-PT-P-19	KAB. NIAS SELATAN, KEC. LAHUSA, TOMA, TELUK DALAM, FANAYAMA, MANIMOLO, AMANDRAYA, LALOWAU, SIROMBU	097° 42' 40.60" E	00° 33' 41.06" N	273.122,55	1204, 1201, 1202	0616-03, 0616-04, 0616-01, 0516-01
		097° 43' 30.13" E	00° 33' 08.08" N			
		097° 44' 35.56" E	00° 33' 15.44" N			
		097° 49' 40.60" E	00° 32' 45.24" N			
		097° 50' 01.60" E	00° 32' 41.39" N			
		097° 50' 17.05" E	00° 33' 34.41" N			

KPU-PT-P-19	KAB. NIAS SELATAN, KEC. LAHUSA, TOMA, TELUK DALAM, FANAYAMA, MANIMOLO, AMANDRAYA, LALOWAU, SIROMBU	097° 50' 15.39" E	00° 33' 34.89" N	273.122,55	1204, 1201, 1202	0616-03, 0616-04, 0616-01, 0516-01
		097° 52' 47.97" E	00° 36' 07.92" N			
		097° 53' 06.86" E	00° 35' 55.58" N			
		097° 53' 43.94" E	00° 36' 58.23" N			
		097° 53' 27.39" E	00° 37' 07.53" N			
		097° 54' 03.28" E	00° 37' 34.58" N			
		097° 57' 17.14" E	00° 37' 33.65" N			
		097° 57' 21.24" E	00° 52' 12.79" N			
		098° 11' 43.94" E	00° 48' 41.23" N			
		098° 09' 38.08" E	00° 45' 52.95" N			
		098° 05' 51.49" E	00° 43' 11.53" N			
		098° 06' 02.49" E	00° 37' 49.67" N			
		098° 04' 44.67" E	00° 32' 06.67" N			
		097° 59' 48.53" E	00° 26' 14.87" N			
		097° 55' 13.26" E	00° 21' 59.25" N			
		097° 45' 32.75" E	00° 21' 07.95" N			
		097° 35' 08.19" E	00° 24' 03.57" N			
		097° 31' 11.68" E	00° 28' 13.30" N			
		097° 27' 54.79" E	00° 38' 27.78" N			
		097° 23' 30.64" E	00° 36' 48.05" N			
		097° 32' 46.03" E	00° 51' 25.16" N			
		097° 33' 01.45" E	00° 51' 33.89" N			
		097° 32' 51.96" E	00° 51' 47.30" N			
		097° 32' 38.47" E	00° 51' 37.95" N			
KPU-PT-P-20	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU, PULAU-PULAU BATU TIMUR, HIBALA	098° 17' 34.57" E	00° 02' 58.12" S	678.077,56	1204, 1203	0616-08, 0716-01, 0616-09, 0616-06
		098° 17' 37.37" E	00° 03' 20.03" S			
		098° 17' 23.12" E	00° 03' 20.02" S			
		098° 17' 34.57" E	00° 02' 58.12" S			
		098° 45' 49.75" E	00° 22' 30.69" N			
		098° 53' 23.84" E	00° 21' 00.56" N			
		099° 09' 55.61" E	00° 13' 44.89" N			
		099° 04' 43.76" E	00° 07' 39.09" N			
		099° 08' 48.48" E	00° 00' 06.35" N			
		099° 03' 50.66" E	00° 07' 07.40" S			
		098° 48' 08.35" E	00° 08' 12.40" S			
		098° 45' 56.29" E	00° 13' 32.52" S			
		098° 46' 16.32" E	00° 23' 23.34" S			
		098° 43' 28.03" E	00° 30' 32.22" S			
		098° 42' 55.46" E	00° 34' 23.93" S			
		098° 43' 06.23" E	00° 40' 03.00" S			
		098° 41' 21.26" E	00° 44' 39.16" S			
		098° 31' 13.71" E	00° 50' 21.97" S			
		098° 26' 56.90" E	00° 49' 42.14" S			
		098° 23' 17.35" E	00° 47' 50.37" S			
		098° 17' 22.53" E	00° 45' 10.35" S			
		098° 15' 47.82" E	00° 43' 42.31" S			
		098° 10' 39.73" E	00° 41' 28.99" S			
		098° 05' 43.79" E	00° 34' 40.32" S			
		098° 06' 04.82" E	00° 26' 59.92" S			
		098° 10' 31.61" E	00° 20' 39.00" S			
		098° 04' 57.04" E	00° 18' 51.98" S			
		098° 01' 16.50" E	00° 15' 35.53" S			
		098° 03' 12.04" E	00° 05' 24.69" S			
		098° 03' 12.04" E	00° 03' 22.62" S			
		098° 01' 00.62" E	00° 05' 40.80" N			

KPU-PT-P-20	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU, PULAU-PULAU BATU TIMUR, HIBALA	098° 04' 55.49" E	00° 12' 25.39" N	678.077,56	1204, 1203	0616-08, 0716-01, 0616-09, 0616-06
		098° 10' 03.38" E	00° 15' 19.40" N			
		098° 17' 42.75" E	00° 15' 16.44" N			
		098° 21' 09.93" E	00° 14' 50.35" N			
		098° 25' 31.27" E	00° 19' 08.79" N			
		098° 28' 50.99" E	00° 21' 17.89" N			
		098° 34' 18.49" E	00° 22' 42.84" N			
		098° 40' 00.14" E	00° 22' 35.38" N			
		098° 29' 40.65" E	00° 08' 12.80" N			
		098° 34' 58.30" E	00° 01' 14.72" N			
		098° 29' 45.79" E	00° 01' 39.85" N			
		098° 27' 29.69" E	00° 04' 11.51" N			
		098° 25' 00.76" E	00° 03' 52.55" N			
		098° 24' 04.27" E	00° 01' 48.47" N			
		098° 23' 04.35" E	00° 02' 05.70" N			
		098° 22' 47.23" E	00° 04' 02.89" N			
		098° 20' 23.43" E	00° 05' 53.19" N			
		098° 19' 11.54" E	00° 04' 01.17" N			
		098° 16' 42.52" E	00° 03' 49.51" N			
		098° 17' 33.38" E	00° 02' 48.81" S			
		098° 17' 12.27" E	00° 02' 37.19" S			
		098° 17' 00.65" E	00° 02' 43.18" S			
		098° 17' 02.16" E	00° 02' 46.88" S			
		098° 15' 51.69" E	00° 03' 19.47" S			
		098° 14' 13.75" E	00° 03' 19.01" S			
		098° 14' 13.15" E	00° 02' 46.10" N			
		098° 15' 11.02" E	00° 04' 08.59" N			
		098° 13' 39.77" E	00° 04' 27.61" N			
		098° 12' 13.04" E	00° 03' 29.79" N			
		098° 03' 28.37" E	00° 05' 30.94" S			
		098° 05' 50.78" E	00° 09' 34.00" S			
		098° 15' 31.18" E	00° 09' 04.71" S			
		098° 19' 43.61" E	00° 16' 44.84" S			
		098° 16' 43.82" E	00° 25' 17.53" S			
		098° 14' 48.22" E	00° 32' 32.67" S			
		098° 21' 39.05" E	00° 37' 38.62" S			
		098° 29' 59.79" E	00° 40' 35.33" S			
		098° 34' 16.61" E	00° 37' 55.94" S			
		098° 31' 25.42" E	00° 34' 50.65" S			
		098° 33' 29.58" E	00° 26' 00.70" S			
		098° 35' 12.31" E	00° 20' 54.78" S			
		098° 41' 41.80" E	00° 09' 51.26" S			
		098° 41' 27.97" E	00° 02' 22.19" S			
		098° 44' 41.60" E	00° 01' 12.99" S			
		098° 47' 58.07" E	00° 00' 22.38" N			
		098° 47' 59.31" E	00° 02' 35.56" S			
		098° 58' 00.64" E	00° 02' 35.56" S			
		098° 58' 00.64" E	00° 11' 48.83" N			
		098° 48' 21.76" E	00° 11' 48.83" N			
		098° 47' 06.65" E	00° 12' 22.72" N			
		098° 31' 30.91" E	00° 11' 48.59" N			
		098° 29' 26.95" E	00° 10' 09.99" N			
		098° 29' 40.65" E	00° 08' 12.80" N			

KPU-PT-P-21	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PULAU BERHALA	099° 30' 01.81" E	03° 34' 08.80" N	170.860,24	1206, 1208	0719-02
		099° 27' 17.63" E	03° 36' 02.85" N			
		099° 25' 58.29" E	03° 36' 57.96" N			
		099° 18' 20.58" E	03° 42' 16.98" N			
		099° 19' 48.32" E	03° 54' 01.80" N			
		099° 25' 53.89" E	04° 02' 27.97" N			
		099° 36' 49.42" E	03° 56' 32.31" N			
		099° 46' 48.96" E	03° 48' 53.86" N			
		099° 40' 22.10" E	03° 39' 48.00" N			
		099° 30' 01.81" E	03° 34' 08.80" N			
		099° 29' 39.93" E	03° 48' 50.14" N			
		099° 27' 28.75" E	03° 46' 09.27" N			
		099° 30' 06.52" E	03° 44' 18.89" N			
		099° 32' 20.43" E	03° 46' 53.91" N			
		099° 29' 39.93" E	03° 48' 50.14" N			
KPU-PT-P-22	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU WUNGA	097° 07' 54.38" E	01° 16' 15.43" N	93.889,64	1202	0516-01, 0517-02
		097° 09' 48.34" E	01° 14' 21.47" N			
		097° 13' 14.01" E	01° 07' 19.94" N			
		097° 11' 56.91" E	01° 03' 44.07" N			
		097° 04' 58.79" E	00° 59' 26.19" N			
		097° 00' 09.39" E	00° 57' 01.91" N			
		096° 53' 32.15" E	01° 08' 45.29" N			
		096° 52' 14.89" E	01° 17' 38.02" N			
		097° 02' 16.14" E	01° 19' 14.35" N			
		097° 05' 00.60" E	01° 18' 38.37" N			
		097° 06' 53.68" E	01° 17' 16.14" N			
		097° 07' 54.38" E	01° 16' 15.43" N			
		097° 06' 41.25" E	01° 16' 39.49" N			
		097° 01' 07.49" E	01° 14' 34.68" N			
		097° 04' 27.62" E	01° 09' 07.20" N			
		097° 10' 22.25" E	01° 11' 15.69" N			
		097° 06' 41.25" E	01° 16' 39.49" N			
KPU-PT-P-23	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU SIMUK	098° 03' 12.04" E	00° 03' 22.62" S	199.120,16	1201	0615-01
		098° 03' 12.04" E	00° 05' 24.69" S			
		098° 01' 16.50" E	00° 15' 35.53" S			
		097° 48' 12.66" E	00° 22' 45.18" S			
		097° 33' 29.35" E	00° 00' 29.46" N			
		097° 52' 26.60" E	00° 08' 23.76" N			
		097° 53' 55.57" E	00° 06' 02.19" S			
		097° 58' 31.16" E	00° 02' 48.80" S			
		097° 55' 03.00" E	00° 00' 29.07" N			
		097° 49' 52.05" E	00° 03' 40.19" S			
		097° 50' 12.02" E	00° 03' 59.97" S			
PERIKANAN TANGKAP PELAGIS DAN DEMERSAL (KPU-PT-PD)				**319.336,94**		
KPU-PT-PD-01	KAB. LANGKAT, KEC. BABALAN, GEBANG, TANJUNG PURA, SECANGGANG	098° 41' 46.54" E	03° 55' 59.93" N	33.027,68	1206	0619-02, 0619-03
		098° 40' 47.61" E	03° 55' 11.50" N			
		098° 35' 41.09" E	03° 56' 24.50" N			
		098° 35' 20.90" E	03° 55' 28.78" N			
		098° 21' 27.93" E	04° 04' 32.23" N			
		098° 22' 39.14" E	04° 05' 45.58" N			
		098° 23' 53.34" E	04° 06' 33.32" N			
		098° 24' 32.11" E	04° 07' 07.22" N			
		098° 28' 21.06" E	04° 09' 10.27" N			
		098° 41' 46.54" E	03° 55' 59.93" N			

KPU-PT-PD-02	KAB. LANGKAT, KEC. BRANDAN BARAT, BABALAN	098° 27' 53.76" E	04° 09' 32.11" N	10.955,95		
		098° 24' 12.27" E	04° 07' 33.05" N			
		098° 23' 33.86" E	04° 06' 59.41" N			
		098° 22' 20.09" E	04° 06' 12.01" N			
		098° 20' 57.34" E	04° 04' 34.74" N			
		098° 18' 00.79" E	04° 06' 05.65" N			
		098° 24' 33.83" E	04° 12' 32.55" N			
		098° 27' 53.76" E	04° 09' 32.11" N			
KPU-PT-PD-03	KAB. LANGKAT, KEC. PANGKALAN SUSU	098° 24' 10.55" E	04° 12' 55.24" N	20.915,31		0619-01, 0619-02
		098° 17' 39.51" E	04° 06' 29.03" N			
		098° 17' 13.30" E	04° 06' 41.03" N			
		098° 17' 24.44" E	04° 06' 54.46" N			
		098° 16' 19.41" E	04° 08' 32.51" N			
		098° 14' 12.65" E	04° 09' 31.25" N			
		098° 14' 06.61" E	04° 09' 44.60" N			
		098° 13' 57.29" E	04° 10' 37.03" N			
		098° 13' 51.91" E	04° 11' 08.27" N			
		098° 14' 41.28" E	04° 11' 12.73" N			
		098° 14' 50.05" E	04° 11' 07.84" N			
		098° 15' 25.00" E	04° 12' 14.30" N			
		098° 15' 09.03" E	04° 12' 25.01" N			
		098° 14' 53.97" E	04° 14' 17.16" N			
		098° 15' 19.28" E	04° 17' 17.89" N			
		098° 20' 25.73" E	04° 16' 48.71" N			
		098° 22' 45.40" E	04° 14' 19.28" N			
		098° 24' 10.55" E	04° 12' 55.24" N			
KPU-PT-PD-04	KAB. DELI SERDANG, KEC. LABUHAN DELI, HAMPARAN PERAK	098° 40' 46.78" E	03° 54' 14.16" N	1.728,47		0619-03, 0619-04
		098° 40' 47.61" E	03° 55' 11.50" N			
		098° 41' 46.54" E	03° 55' 59.93" N			
KPU-PT-PD-05	KAB. DELI SERDANG, KEC. HAMPARAN PERAK, PERCUT SEI TUAN, PANTAI LABU	098° 59' 33.84" E	03° 44' 22.18" N	49.072,06		0619-04, 0719-01
		098° 59' 24.45" E	03° 44' 10.03" N			
		098° 58' 49.26" E	03° 46' 06.80" N			
		098° 59' 10.16" E	03° 48' 00.75" N			
		098° 59' 34.06" E	03° 48' 25.90" N			
		098° 59' 33.84" E	03° 44' 22.18" N			
		098° 59' 57.52" E	03° 44' 52.81" N			
		098° 59' 26.31" E	03° 46' 22.44" N			
		099° 00' 01.94" E	03° 48' 08.52" N			
		099° 01' 54.28" E	03° 50' 07.34" N			
		099° 02' 58.47" E	03° 48' 46.90" N			
		098° 50' 49.29" E	03° 52' 15.77" N			
		098° 52' 08.59" E	03° 53' 12.21" N			
		098° 53' 22.43" E	03° 49' 32.57" N			
		098° 54' 32.30" E	03° 47' 34.84" N			
		098° 58' 01.67" E	03° 42' 22.95" N			
		098° 56' 46.59" E	03° 40' 45.82" N			
		098° 56' 09.96" E	03° 40' 50.52" N			
		098° 54' 10.89" E	03° 40' 55.66" N			
		098° 52' 30.40" E	03° 41' 18.18" N			
		098° 52' 29.56" E	03° 41' 13.73" N			
		098° 47' 49.59" E	03° 43' 23.96" N			
		098° 47' 51.42" E	03° 43' 29.75" N			
		098° 47' 26.33" E	03° 43' 41.50" N			
		098° 47' 24.64" E	03° 43' 37.13" N			
		098° 42' 28.62" E	03° 46' 29.21" N			
		098° 42' 30.69" E	03° 46' 27.13" N			

		098° 42' 36.24" E	03° 46' 31.51" N			
		098° 42' 33.92" E	03° 46' 33.82" N			
		098° 42' 40.34" E	03° 46' 40.71" N			
		098° 43' 00.96" E	03° 46' 40.90" N			
		098° 44' 26.25" E	03° 48' 07.97" N			
		098° 46' 11.55" E	03° 49' 07.85" N			
		098° 46' 21.54" E	03° 50' 05.75" N			
		098° 47' 32.46" E	03° 51' 18.48" N			
		098° 47' 10.41" E	03° 51' 41.56" N			
		098° 46' 46.22" E	03° 51' 17.40" N			
		098° 46' 35.66" E	03° 51' 27.54" N			
		098° 58' 56.88" E	03° 43' 34.37" N			
		098° 57' 22.18" E	03° 47' 01.00" N			
		098° 56' 39.50" E	03° 48' 57.16" N			
		098° 54' 41.82" E	03° 50' 06.94" N			
		098° 54' 53.97" E	03° 52' 27.11" N			
		098° 54' 31.60" E	03° 53' 21.43" N			
		098° 54' 33.38" E	03° 53' 40.86" N			
		098° 59' 25.47" E	03° 52' 31.53" N			
		099° 00' 22.38" E	03° 51' 10.81" N			
		099° 01' 00.76" E	03° 50' 44.30" N			
		098° 58' 39.42" E	03° 48' 12.66" N			
		098° 58' 16.42" E	03° 46' 04.98" N			
		098° 59' 00.49" E	03° 43' 39.04" N			
		098° 58' 20.93" E	03° 42' 51.97" N			
		098° 54' 59.93" E	03° 47' 51.89" N			
		098° 53' 51.39" E	03° 49' 47.35" N			
		098° 52' 36.46" E	03° 53' 32.05" N			
		098° 53' 48.78" E	03° 54' 23.53" N			
		098° 54' 03.33" E	03° 54' 08.43" N			
		098° 53' 59.11" E	03° 53' 16.09" N			
		098° 54' 21.59" E	03° 52' 21.18" N			
		098° 54' 11.45" E	03° 49' 48.75" N			
		098° 56' 14.57" E	03° 48' 34.77" N			
		098° 56' 53.66" E	03° 46' 45.42" N			
KPU-PT-PD-06	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PANTAI CERMIN, PERBAUNGAN, TELUK MENGKUDU, TANJUNG BERINGIN, BANDAR KHALIPAH	099° 01' 15.32" E	03° 38' 35.12" N	45.380,64		0719-01, 0719-02
		099° 01' 07.65" E	03° 38' 21.44" N			
		099° 00' 56.59" E	03° 38' 01.70" N			
		099° 01' 15.32" E	03° 38' 35.12" N			
		099° 21' 16.04" E	03° 30' 39.59" N			
		099° 21' 18.19" E	03° 31' 24.20" N			
		099° 22' 23.26" E	03° 31' 00.31" N			
		099° 18' 57.73" E	03° 26' 20.52" N			
		099° 18' 56.03" E	03° 26' 18.67" N			
		099° 13' 53.61" E	03° 30' 42.21" N			
		099° 13' 59.66" E	03° 30' 51.87" N			
		099° 10' 37.46" E	03° 33' 08.93" N			
		099° 09' 45.50" E	03° 33' 31.95" N			
		099° 07' 37.63" E	03° 34' 05.83" N			
		099° 07' 35.80" E	03° 33' 59.26" N			
		099° 07' 24.68" E	03° 34' 05.90" N			
		099° 07' 26.40" E	03° 34' 09.44" N			
		099° 07' 22.95" E	03° 34' 11.16" N			
		099° 07' 01.62" E	03° 34' 24.36" N			
		099° 07' 07.29" E	03° 34' 33.86" N			

		099° 04' 00.66" E	03° 36' 52.38" N			
		099° 02' 10.10" E	03° 37' 49.29" N			
		099° 02' 01.04" E	03° 38' 54.39" N			
		099° 01' 45.13" E	03° 39' 43.29" N			
		099° 01' 47.11" E	03° 39' 51.44" N			
		099° 02' 06.53" E	03° 40' 07.10" N			
		099° 06' 07.81" E	03° 41' 13.68" N			
		099° 07' 45.93" E	03° 40' 56.89" N			
		099° 07' 56.30" E	03° 39' 12.25" N			
		099° 10' 15.13" E	03° 38' 02.17" N			
		099° 10' 03.07" E	03° 37' 28.64" N			
		098° 59' 25.40" E	03° 40' 37.58" N			
		098° 59' 44.64" E	03° 39' 51.29" N			
		099° 00' 07.34" E	03° 39' 13.84" N			
		099° 00' 12.27" E	03° 39' 00.11" N			
		099° 00' 07.51" E	03° 38' 51.10" N			
		098° 59' 18.99" E	03° 39' 14.52" N			
		098° 58' 40.96" E	03° 39' 32.93" N			
		098° 58' 37.29" E	03° 39' 34.71" N			
		098° 57' 30.05" E	03° 40' 40.24" N			
		098° 56' 46.59" E	03° 40' 45.82" N			
		098° 58' 01.67" E	03° 42' 22.95" N			
		098° 58' 52.78" E	03° 41' 10.64" N			
		098° 59' 36.61" E	03° 41' 50.01" N			
		098° 59' 07.23" E	03° 42' 09.46" N			
		098° 58' 53.43" E	03° 42' 51.82" N			
		098° 58' 58.92" E	03° 43' 03.37" N			
		099° 00' 52.83" E	03° 39' 01.76" N			
		099° 00' 59.73" E	03° 39' 14.84" N			
		099° 00' 59.15" E	03° 39' 23.32" N			
		098° 59' 33.84" E	03° 44' 22.18" N			
		099° 01' 11.37" E	03° 39' 41.68" N			
		099° 01' 03.46" E	03° 39' 09.14" N			
		099° 07' 50.13" E	03° 41' 29.20" N			
		099° 06' 07.05" E	03° 41' 46.67" N			
		099° 01' 51.40" E	03° 40' 36.29" N			
		099° 01' 32.06" E	03° 40' 21.06" N			
		098° 59' 57.52" E	03° 44' 52.81" N			
		099° 02' 58.47" E	03° 48' 46.90" N			
		099° 06' 58.35" E	03° 45' 21.19" N			
KPU-PT-PD-07	KAB. BATUBARA, KEC. MEDANG DERAS, SEI SUKA, LIMA PULUH	099° 25' 04.40" E	03° 22' 59.12" N	20.153,35	1206, 1208	0719-02, 0719-04
		099° 25' 20.61" E	03° 29' 36.80" N			
		099° 34' 03.76" E	03° 30' 57.52" N			
		099° 35' 19.20" E	03° 30' 16.12" N			
		099° 36' 27.69" E	03° 27' 18.57" N			
		099° 35' 08.03" E	03° 25' 28.62" N			
		099° 31' 50.81" E	03° 28' 30.31" N			
		099° 25' 05.67" E	03° 28' 30.31" N			
		099° 24' 49.95" E	03° 23' 12.94" N			
		099° 24' 51.36" E	03° 23' 20.84" N			
		099° 22' 10.04" E	03° 24' 08.26" N			
		099° 21' 05.85" E	03° 24' 51.71" N			
		099° 20' 56.60" E	03° 25' 07.44" N			
		099° 20' 12.15" E	03° 25' 29.79" N			
		099° 18' 57.73" E	03° 26' 20.52" N			
		099° 22' 23.26" E	03° 31' 00.31" N			

KPU-PT-PD-08	KAB. BATUBARA, KEC. TANJUNG TIRAM, TALAWI	099° 40' 39.43" E	03° 18' 44.84" N	19.212,23	1208	0719-04, 0718-01
		099° 44' 29.35" E	03° 16' 45.08" N			
		099° 39' 44.47" E	03° 18' 26.74" N			
		099° 38' 58.45" E	03° 16' 28.30" N			
		099° 46' 11.87" E	03° 12' 50.91" N			
		099° 44' 29.30" E	03° 10' 36.90" N			
		099° 42' 22.49" E	03° 12' 04.74" N			
		099° 39' 09.14" E	03° 13' 10.01" N			
		099° 39' 03.70" E	03° 12' 53.88" N			
		099° 36' 41.36" E	03° 13' 31.11" N			
		099° 36' 43.63" E	03° 13' 37.77" N			
		099° 35' 34.20" E	03° 14' 09.70" N			
		099° 35' 25.48" E	03° 14' 04.03" N			
		099° 35' 02.05" E	03° 14' 01.10" N			
		099° 32' 58.62" E	03° 14' 48.99" N			
		099° 31' 23.57" E	03° 16' 48.65" N			
		099° 33' 28.96" E	03° 17' 32.01" N			
		099° 35' 30.11" E	03° 20' 04.38" N			
		099° 40' 39.43" E	03° 18' 44.84" N			
KPU-PT-PD-09	KAB. ASAHAN, KEC. SILAU LAUT, SEI KEPAYANG	099° 50' 32.31" E	03° 10' 28.64" N	7.388,29		
		099° 48' 14.48" E	03° 05' 39.37" N			
		099° 44' 19.16" E	03° 10' 23.65" N			
		099° 44' 29.30" E	03° 10' 36.90" N			
		099° 46' 11.87" E	03° 12' 50.91" N			
		099° 50' 32.31" E	03° 10' 28.64" N			
KPU-PT-PD-10		100° 05' 26.39" E	02° 57' 48.56" N	28.984,49	1208, 1207	0718-01, 0718-02
		099° 59' 12.70" E	02° 51' 21.32" N			
		099° 53' 51.16" E	03° 01' 27.39" N			
		099° 57' 48.60" E	03° 07' 26.12" N			
		100° 03' 03.49" E	03° 02' 33.22" N			
		100° 05' 26.39" E	02° 57' 48.56" N			
KPU-PT-PD-11	KAB. ASAHAN, KEC. TANJUNG BALAI	099° 57' 48.60" E	03° 07' 26.12" N	16.030,50	1208	0719-04, 0718-01
		099° 53' 51.16" E	03° 01' 27.39" N			
		099° 53' 27.48" E	03° 02' 20.14" N			
		099° 53' 23.59" E	03° 03' 23.58" N			
		099° 50' 13.39" E	03° 03' 23.23" N			
		099° 48' 14.48" E	03° 05' 39.37" N			
		099° 50' 32.31" E	03° 10' 28.64" N			
		099° 52' 45.56" E	03° 09' 05.97" N			
KPU-PT-PD-12	KAB. LABUHANBATU UTARA, KEC. KUALUH HILIR, KUALUH LEIDONG	100° 09' 57.58" E	02° 51' 58.95" N	27.213,24	1208, 1207	0718-01, 0718-02
		100° 03' 05.57" E	02° 44' 23.18" N			
		099° 58' 39.73" E	02° 44' 57.27" N			
		099° 58' 54.52" E	02° 44' 41.25" N			
		099° 59' 17.88" E	02° 45' 02.00" N			
		099° 59' 02.81" E	02° 45' 18.36" N			
		099° 59' 29.47" E	02° 46' 44.65" N			
		100° 00' 01.89" E	02° 46' 41.86" N			
		100° 00' 09.60" E	02° 48' 28.51" N			
		099° 59' 35.88" E	02° 48' 31.30" N			
		099° 59' 12.70" E	02° 51' 21.32" N			
		100° 05' 26.39" E	02° 57' 48.56" N			
		100° 07' 09.09" E	02° 54' 23.96" N			
		100° 09' 57.58" E	02° 51' 58.95" N			

KPU-PT-PD-13	KAB. LABUHANBATU, KEC. PANAI HILIR	100° 24' 23.72" E	02° 34' 48.91" N	38.934,90	1207	0718-02
		100° 19' 20.40" E	02° 32' 49.11" N			
		100° 18' 18.12" E	02° 33' 49.49" N			
		100° 18' 34.99" E	02° 34' 00.60" N			
		100° 18' 06.75" E	02° 34' 25.61" N			
		100° 17' 47.34" E	02° 34' 13.41" N			
		100° 16' 07.27" E	02° 36' 50.98" N			
		100° 16' 24.37" E	02° 37' 19.68" N			
		100° 14' 58.76" E	02° 38' 10.47" N			
		100° 14' 02.22" E	02° 41' 07.79" N			
		100° 13' 26.50" E	02° 41' 06.03" N			
		100° 13' 13.58" E	02° 42' 17.06" N			
		100° 13' 23.65" E	02° 42' 48.42" N			
		100° 10' 41.08" E	02° 43' 06.60" N			
		100° 09' 11.14" E	02° 42' 30.20" N			
		100° 07' 48.07" E	02° 41' 30.08" N			
		100° 03' 05.57" E	02° 44' 23.18" N			
		100° 09' 57.58" E	02° 51' 58.95" N			
		100° 17' 38.02" E	02° 40' 42.28" N			
		100° 24' 23.72" E	02° 34' 48.91" N			
KPU-PT-PD-14		100° 16' 07.27" E	02° 36' 50.98" N	339,84		0718-03
		100° 14' 31.28" E	02° 38' 07.10" N			
		100° 14' 58.76" E	02° 38' 10.47" N			
		100° 16' 24.37" E	02° 37' 19.68" N			
		100° 16' 07.27" E	02° 36' 50.98" N			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		Bujur	Lintang		SKALA	
ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (KPU-BD)				94.208,12	250 K	50 K
PERIKANAN BUDIDAYA LAUT (KPU-BL-BL)				94.208,12		
KPU-BD-BL-01	KAB. LANGKAT, KEC. PANGKALAN SUSU	098° 13' 57.29" E	04° 10' 37.03" N	1.936,96	1206	0619-02
		098° 11' 44.47" E	04° 09' 33.82" N			
		098° 10' 44.10" E	04° 06' 46.02" N			
		098° 11' 09.02" E	04° 06' 38.02" N			
		098° 10' 22.41" E	04° 05' 47.38" N			
		098° 09' 14.23" E	04° 04' 42.87" N			
		098° 09' 13.54" E	04° 05' 00.35" N			
		098° 09' 51.99" E	04° 05' 38.05" N			
		098° 10' 23.65" E	04° 07' 57.33" N			
		098° 10' 40.38" E	04° 08' 41.14" N			
		098° 10' 18.57" E	04° 08' 53.92" N			
		098° 09' 38.81" E	04° 09' 06.28" N			
		098° 09' 40.62" E	04° 09' 15.90" N			
		098° 11' 12.88" E	04° 10' 31.48" N			
		098° 13' 51.91" E	04° 11' 08.27" N			
KPU-BD-BL-02	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. TANJUNG BERINGIN, TELUK MENGKUDU, BANDAR KHALIPAH	099° 21' 18.19" E	03° 31' 24.20" N	4.747,84		0719-01, 0719-02
		099° 21' 16.04" E	03° 30' 39.59" N			
		099° 10' 03.07" E	03° 37' 28.64" N			
		099° 10' 15.13" E	03° 38' 02.17" N			
		099° 10' 15.20" E	03° 38' 02.25" N			
		099° 10' 16.35" E	03° 38' 01.68" N			
		099° 21' 21.17" E	03° 32' 26.17" N			
		099° 21' 18.19" E	03° 31' 24.20" N			
KPU-BD-BL-03	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PANTAI CERMIN	098° 59' 18.99" E	03° 39' 14.52" N	22,32		0719-01
		098° 59' 18.30" E	03° 39' 11.22" N			
		098° 58' 44.51" E	03° 39' 21.04" N			
		098° 58' 40.96" E	03° 39' 32.93" N			
		098° 59' 18.99" E	03° 39' 14.52" N			
KPU-BD-BL-04		099° 02' 10.10" E	03° 37' 49.29" N	80,54		
		099° 01' 24.99" E	03° 37' 45.99" N			
		099° 01' 36.52" E	03° 38' 06.58" N			
		099° 02' 10.10" E	03° 37' 49.29" N			
KPU-BD-BL-05	KAB. BATUBARA, KEC. TANJUNG TIRAM	099° 44' 29.35" E	03° 16' 45.08" N	6.957,87	1208	0719-04, 0718-01
		099° 47' 39.78" E	03° 14' 45.76" N			
		099° 46' 11.87" E	03° 12' 50.91" N			
		099° 38' 58.45" E	03° 16' 28.30" N			
		099° 39' 44.47" E	03° 18' 26.74" N			
		099° 44' 29.35" E	03° 16' 45.08" N			
KPU-BD-BL-06	KAB. ASAHAN, KEC. SILAU LAUT	099° 51' 26.99" E	03° 12' 23.39" N	3.614,64		
		099° 50' 32.31" E	03° 10' 28.64" N			
		099° 46' 11.87" E	03° 12' 50.91" N			
		099° 47' 39.78" E	03° 14' 45.76" N			
		099° 51' 26.99" E	03° 12' 23.39" N			
KPU-BD-BL-07	KAB. ASAHAN, KEC. TANJUNG BALAI	099° 52' 45.56" E	03° 09' 05.97" N	2.026,25		0718-01
		099° 50' 32.31" E	03° 10' 28.64" N			
		099° 51' 26.99" E	03° 12' 23.39" N			
		099° 53' 58.52" E	03° 10' 54.68" N			
KPU-BD-BL-08	KAB. LABUHANBATU UTARA, KEC. KUALUH LEIDONG	099° 59' 29.47" E	02° 46' 44.65" N	314,98	1207	0718-02
		099° 59' 35.88" E	02° 48' 31.30" N			
		100° 00' 09.60" E	02° 48' 28.51" N			
		100° 00' 01.89" E	02° 46' 41.86" N			
		099° 59' 29.47" E	02° 46' 44.65" N			

KPU-BD-BL-09	KAB. LABUHANBATU, KEC. PANAI HILIR	100° 08' 18.61" E	02° 41' 16.72" N	626,15		
		100° 07' 48.07" E	02° 41' 30.08" N			
		100° 09' 11.14" E	02° 42' 30.20" N			
		100° 09' 23.27" E	02° 42' 08.28" N			
		100° 13' 23.65" E	02° 42' 48.42" N			
		100° 13' 13.58" E	02° 42' 17.06" N			
		100° 10' 50.35" E	02° 42' 41.35" N			
		100° 10' 41.08" E	02° 43' 06.60" N			
		100° 13' 23.65" E	02° 42' 48.42" N			
KPU-BD-BL-10	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. MANDUAMAS	098° 02' 02.78" E	01° 51' 02.54" N	149,22	1205	0617-08
		098° 02' 07.26" E	01° 50' 25.51" N			
		098° 01' 23.69" E	01° 50' 23.07" N			
		098° 01' 19.56" E	01° 51' 01.01" N			
		098° 02' 02.78" E	01° 51' 02.54" N			
KPU-BD-BL-11	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. BADIRI, PINANG SORI	098° 46' 54.97" E	01° 25' 53.26" N	4.549,22		0617-04, 0617-05
		098° 45' 25.67" E	01° 24' 45.14" N			
		098° 44' 14.07" E	01° 28' 33.16" N			
		098° 44' 14.07" E	01° 29' 11.19" N			
		098° 43' 35.01" E	01° 29' 11.19" N			
		098° 42' 34.07" E	01° 31' 36.97" N			
		098° 46' 54.97" E	01° 25' 53.26" N			
KPU-BD-BL-12	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. BATAHAN	099° 05' 24.79" E	00° 21' 39.98" N	4.221,80	1204	0616-08, 0716-01
		099° 06' 31.95" E	00° 20' 47.34" N			
		099° 09' 20.56" E	00° 18' 49.78" N			
		099° 05' 05.60" E	00° 18' 08.39" N			
		099° 04' 00.50" E	00° 22' 41.65" N			
		099° 05' 06.19" E	00° 22' 57.72" N			
		099° 06' 10.49" E	00° 23' 13.46" N			
		099° 06' 13.07" E	00° 22' 24.85" N			
KPU-BD-BL-13	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. MUARA BATANG GADIS, NATAL	098° 48' 36.99" E	01° 17' 05.93" N	30.033,61		0617-05, 0617-06, 0616-07, 0616-08
		098° 50' 31.94" E	01° 17' 56.11" N			
		098° 50' 41.36" E	01° 17' 53.74" N			
		098° 50' 46.06" E	01° 17' 31.75" N			
		098° 50' 28.12" E	01° 17' 11.00" N			
		098° 50' 29.09" E	01° 17' 32.44" N			
		098° 50' 23.64" E	01° 17' 27.66" N			
		098° 53' 39.07" E	01° 09' 38.03" N			
		098° 59' 11.04" E	00° 51' 12.96" N			
		098° 58' 12.34" E	00° 50' 50.48" N			
		099° 00' 45.43" E	00° 49' 21.92" N			
		099° 03' 29.57" E	00° 44' 34.36" N			
		099° 03' 55.34" E	00° 39' 31.22" N			
		099° 03' 31.83" E	00° 38' 20.41" N			
		099° 02' 55.38" E	00° 37' 53.57" N			
		099° 01' 28.20" E	00° 37' 28.52" N			
		099° 00' 09.11" E	00° 46' 42.31" N			
		098° 55' 23.31" E	00° 52' 31.21" N			
		098° 55' 55.63" E	00° 56' 29.19" N			
		098° 54' 49.35" E	00° 59' 37.76" N			
KPU-BD-BL-14	KAB. NIAS UTARA, KEC. AFULU	097° 19' 04.28" E	01° 09' 35.36" N	2.205,13	1202	0517-02
		097° 17' 22.85" E	01° 08' 33.98" N			
		097° 15' 19.50" E	01° 12' 01.62" N			
		097° 16' 41.66" E	01° 12' 41.95" N			
		097° 19' 04.28" E	01° 09' 35.36" N			

KPU-BD-BL-15	KAB. NIAS UTARA, KEC. TUGALAOYO	097° 22' 16.08" E	01° 04' 31.67" N	356,88		0516-01, 0517-02
		097° 21' 50.23" E	01° 04' 24.98" N			
		097° 20' 23.50" E	01° 06' 58.10" N			
		097° 20' 38.25" E	01° 07' 11.00" N			
		097° 22' 16.08" E	01° 04' 31.67" N			
KPU-BD-BL-16	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA TIMUR, LOTU	097° 20' 52.05" E	01° 29' 09.59" N	875,43		0517-03, 0517-01
		097° 16' 39.86" E	01° 25' 14.67" N			
		097° 16' 39.90" E	01° 26' 03.71" N			
		097° 16' 59.52" E	01° 26' 21.41" N			
		097° 17' 18.36" E	01° 27' 09.38" N			
		097° 19' 42.27" E	01° 28' 45.32" N			
		097° 20' 31.92" E	01° 29' 20.28" N			
		097° 20' 52.05" E	01° 29' 09.59" N			
KPU-BD-BL-17	KAB. NIAS UTARA, KEC. TUHEMBERUA, SITOLU ORI	097° 32' 38.03" E	01° 25' 15.17" N	3.099,55		0517-03
		097° 32' 27.16" E	01° 25' 06.43" N			
		097° 30' 23.78" E	01° 26' 48.50" N			
		097° 30' 23.31" E	01° 26' 53.00" N			
		097° 30' 08.32" E	01° 26' 52.57" N			
		097° 29' 52.05" E	01° 27' 01.99" N			
		097° 29' 47.55" E	01° 27' 21.69" N			
		097° 29' 25.49" E	01° 28' 28.08" N			
		097° 29' 16.29" E	01° 28' 27.03" N			
		097° 28' 00.31" E	01° 28' 26.24" N			
		097° 27' 31.19" E	01° 28' 18.70" N			
		097° 26' 59.15" E	01° 28' 22.81" N			
		097° 26' 58.71" E	01° 28' 17.97" N			
		097° 26' 00.03" E	01° 29' 27.44" N			
		097° 26' 12.75" E	01° 29' 38.39" N			
		097° 27' 26.97" E	01° 28' 28.40" N			
		097° 27' 59.87" E	01° 28' 42.27" N			
		097° 28' 31.21" E	01° 29' 00.52" N			
		097° 29' 15.17" E	01° 28' 55.69" N			
		097° 31' 46.71" E	01° 30' 42.53" N			
		097° 32' 49.07" E	01° 29' 24.41" N			
		097° 30' 39.46" E	01° 26' 54.91" N			
		097° 31' 13.85" E	01° 25' 42.34" N			
		097° 32' 22.78" E	01° 25' 27.14" N			
		097° 32' 38.03" E	01° 25' 15.17" N			
KPU-BD-BL-18	KAB. NIAS UTARA, KEC. SAWO	097° 26' 23.17" E	01° 40' 38.77" N	565,44		
		097° 28' 10.40" E	01° 40' 40.07" N			
		097° 28' 10.40" E	01° 42' 11.24" N			
		097° 28' 27.98" E	01° 41' 53.25" N			
		097° 28' 50.25" E	01° 41' 01.00" N			
		097° 28' 19.41" E	01° 40' 35.30" N			
		097° 27' 38.29" E	01° 39' 48.19" N			
		097° 26' 17.77" E	01° 40' 25.88" N			
		097° 26' 23.17" E	01° 40' 38.77" N			
KPU-BD-BL-19	KAB. NIAS UTARA, KEC. AFULU, LAHEWA	097° 13' 52.92" E	01° 15' 18.17" N	9.139,95		0517-02, 0517-01
		097° 12' 43.25" E	01° 13' 31.50" N			
		097° 09' 48.34" E	01° 14' 21.47" N			
		097° 07' 54.38" E	01° 16' 15.43" N			
		097° 08' 04.70" E	01° 19' 57.27" N			
		097° 08' 04.50" E	01° 22' 49.39" N			
		097° 10' 10.14" E	01° 20' 09.02" N			
		097° 11' 41.11" E	01° 17' 36.37" N			

KPU-BD-BL-20	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA	097° 11' 22.84" E	01° 25' 09.51" N	306,61		0517-01
		097° 10' 42.86" E	01° 24' 21.58" N			
		097° 10' 41.02" E	01° 24' 11.84" N			
		097° 09' 48.51" E	01° 24' 46.01" N			
		097° 10' 30.41" E	01° 25' 24.25" N			
		097° 11' 22.84" E	01° 25' 09.51" N			
		097° 10' 32.78" E	01° 25' 09.27" N			
		097° 10' 21.98" E	01° 25' 09.26" N			
		097° 10' 21.98" E	01° 25' 01.40" N			
		097° 10' 32.79" E	01° 25' 01.41" N			
		097° 10' 32.78" E	01° 25' 09.27" N			
KPU-BD-BL-21	KAB. NIAS SELATAN, KEC. HIBALA	098° 19' 16.12" E	00° 30' 29.44" S	1.281,88	1203	0615-03
		098° 19' 10.41" E	00° 30' 10.86" S			
		098° 20' 52.86" E	00° 28' 11.96" S			
		098° 21' 20.94" E	00° 28' 32.38" S			
KPU-BD-BL-22		098° 24' 51.10" E	00° 35' 46.41" S	1.618,73		
		098° 24' 38.66" E	00° 36' 00.70" S			
		098° 20' 18.69" E	00° 32' 48.02" S			
		098° 20' 38.26" E	00° 32' 22.39" S			
		098° 24' 51.10" E	00° 35' 46.41" S			
KPU-BD-BL-23	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU, PULAU-PULAU BATU TIMUR, HIBALA	098° 29' 44.18" E	00° 17' 40.90" S	188,96		0615-04
		098° 29' 18.97" E	00° 17' 58.11" S			
		098° 28' 35.96" E	00° 17' 20.94" S			
		098° 29' 12.39" E	00° 17' 02.83" S			
KPU-BD-BL-24	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU TIMUR	098° 39' 01.02" E	00° 00' 32.27" S	5.931,57		0616-09, 0616-06, 0616-05
		098° 39' 01.02" E	00° 00' 56.68" S			
		098° 37' 28.93" E	00° 00' 56.68" S			
		098° 37' 28.93" E	00° 00' 32.27" S			
		098° 39' 01.02" E	00° 00' 32.27" S			
		098° 25' 13.36" E	00° 00' 34.05" N			
		098° 25' 13.36" E	00° 00' 46.46" S			
		098° 25' 01.48" E	00° 00' 46.46" S			
		098° 20' 56.20" E	00° 00' 16.95" N			
		098° 20' 50.22" E	00° 00' 34.05" N			
		098° 25' 13.36" E	00° 00' 34.05" N			
		098° 36' 49.53" E	00° 00' 53.60" N			
		098° 36' 49.53" E	00° 00' 31.54" N			
		098° 36' 16.12" E	00° 00' 31.54" N			
		098° 36' 16.12" E	00° 00' 53.60" N			
		098° 36' 49.53" E	00° 00' 53.60" N			
		098° 38' 52.02" E	00° 01' 19.29" N			
		098° 38' 52.02" E	00° 00' 48.24" N			
		098° 38' 10.48" E	00° 00' 48.24" N			
		098° 38' 10.48" E	00° 01' 19.29" N			
		098° 38' 52.02" E	00° 01' 19.29" N			
		098° 37' 34.71" E	00° 02' 15.40" N			
		098° 37' 34.71" E	00° 01' 53.56" N			
		098° 37' 05.80" E	00° 01' 53.56" N			
		098° 37' 05.80" E	00° 02' 15.40" N			
		098° 37' 34.71" E	00° 02' 15.40" N			
		098° 37' 59.17" E	00° 04' 33.80" N			
		098° 38' 28.55" E	00° 04' 32.15" N			
		098° 38' 31.14" E	00° 04' 48.82" N			
		098° 38' 55.71" E	00° 04' 40.25" N			
		098° 38' 55.71" E	00° 03' 20.85" N			

		098° 37' 03.28" E	00° 03' 20.85" N			
		098° 37' 03.28" E	00° 04' 32.59" N			
		098° 34' 28.02" E	00° 04' 32.59" N			
		098° 34' 28.01" E	00° 05' 41.96" N			
		098° 47' 59.12" E	00° 05' 26.39" N			
		098° 47' 59.12" E	00° 03' 44.95" N			
		098° 39' 54.07" E	00° 03' 44.95" N			
		098° 39' 54.48" E	00° 04' 23.77" N			
KPU-BD-BL-25	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU, PULAU-PULAU BATU TIMUR, HIBALA	098° 26' 30.09" E	00° 17' 41.05" S	384,33		0615-04
		098° 26' 02.10" E	00° 17' 53.61" S			
		098° 25' 04.03" E	00° 16' 09.27" S			
		098° 25' 25.49" E	00° 15' 52.47" S			
		098° 26' 30.09" E	00° 17' 41.05" S			
KPU-BD-BL-26	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU TIMUR	098° 48' 21.76" E	00° 10' 40.57" N	1.330,24	1204	0616-09
		098° 51' 40.77" E	00° 07' 43.72" N			
		098° 51' 04.34" E	00° 07' 11.39" N			
		098° 46' 40.75" E	00° 10' 17.07" N			
		098° 47' 45.20" E	00° 11' 13.06" N			
		098° 48' 21.76" E	00° 10' 40.57" N			
KPU-BD-BL-27	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU, PULAU-PULAU BATU TIMUR, HIBALA	098° 34' 23.39" E	00° 16' 53.69" S	2.227,97	1203	0615-04
		098° 29' 44.85" E	00° 11' 19.69" S			
		098° 29' 52.82" E	00° 11' 15.06" S			
		098° 35' 16.67" E	00° 16' 07.22" S			
		098° 34' 23.39" E	00° 16' 53.69" S			
KPU-BD-BL-28		098° 28' 07.93" E	00° 03' 46.38" S	3.173,04		
		098° 28' 07.93" E	00° 04' 03.94" S			
		098° 27' 30.88" E	00° 04' 03.94" S			
		098° 27' 30.88" E	00° 03' 46.38" S			
		098° 28' 07.93" E	00° 03' 46.38" S			
		098° 26' 55.12" E	00° 03' 29.47" S			
		098° 26' 55.12" E	00° 04' 31.35" S			
		098° 26' 33.53" E	00° 03' 29.40" S			
		098° 26' 55.12" E	00° 03' 29.47" S			
		098° 26' 17.22" E	00° 02' 13.23" S			
		098° 26' 17.22" E	00° 02' 33.36" S			
		098° 25' 55.80" E	00° 02' 33.36" S			
		098° 25' 55.80" E	00° 02' 13.23" S			
		098° 26' 17.22" E	00° 02' 13.23" S			
		098° 33' 20.38" E	00° 01' 42.43" S			
		098° 33' 20.38" E	00° 04' 50.29" S			
		098° 31' 14.97" E	00° 04' 50.29" S			
		098° 31' 14.97" E	00° 01' 42.43" S			
		098° 33' 20.38" E	00° 01' 42.43" S			
		098° 30' 42.08" E	00° 01' 37.29" S			
		098° 30' 42.08" E	00° 04' 19.19" S			
		098° 28' 57.49" E	00° 04' 19.19" S			
		098° 28' 57.49" E	00° 01' 37.29" S			
		098° 30' 42.08" E	00° 01' 37.29" S			
		098° 27' 19.53" E	00° 00' 54.85" S			
		098° 27' 19.53" E	00° 01' 27.61" S			
		098° 26' 45.06" E	00° 01' 27.61" S			
		098° 26' 45.06" E	00° 00' 54.85" S			
		098° 27' 19.53" E	00° 00' 54.85" S			

KPU-BD-BL-29	KAB. NIAS SELATAN, KEC. HIBALA	098° 29' 15.50" E	00° 34' 09.93" S	1.091,16		0615-05
		098° 28' 47.91" E	00° 33' 54.68" S			
		098° 29' 15.10" E	00° 33' 06.15" S			
		098° 29' 15.50" E	00° 34' 09.93" S			
		098° 27' 59.70" E	00° 34' 39.93" S			
		098° 26' 32.75" E	00° 33' 10.84" S			
		098° 27' 01.89" E	00° 32' 44.56" S			
KPU-BD-BL-30		098° 30' 21.44" E	00° 27' 58.61" S	522,93		
		098° 31' 23.79" E	00° 27' 58.61" S			
		098° 31' 23.79" E	00° 29' 12.28" S			
		098° 30' 23.08" E	00° 28' 55.30" S			
		098° 30' 23.95" E	00° 28' 53.42" S			
		098° 30' 23.93" E	00° 28' 52.19" S			
		098° 31' 19.50" E	00° 27' 13.00" S			
		098° 31' 19.50" E	00° 27' 52.61" S			
		098° 30' 31.32" E	00° 27' 52.61" S			
		098° 30' 31.32" E	00° 27' 12.38" S			
		098° 31' 19.50" E	00° 27' 13.00" S			
KPU-BD-BL-31		098° 31' 16.19" E	00° 22' 54.73" S	348,12		
		098° 31' 41.56" E	00° 22' 54.73" S			
		098° 30' 46.80" E	00° 24' 31.13" S			
KPU-BD-BL-32		098° 32' 52.04" E	00° 22' 59.11" S	278,79		
		098° 31' 59.25" E	00° 22' 59.11" S			
		098° 31' 59.24" E	00° 21' 23.90" S			
		098° 32' 10.42" E	00° 21' 23.85" S			
		098° 32' 12.03" E	00° 21' 32.60" S			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM		Bujur	Lintang		SKALA	
ZONA PERGARAMAN (KPU-GR)				**193,39**		
PERGARAMAN RAKYAT (KPU-GR-R)				**193,39**		
KPU-GR	KAB. LABUHANBATU, KEC. PANAI HILIR	100° 10' 50.35" E	02° 42' 41.35" N	193,39	1207	0718-02
		100° 09' 23.27" E	02° 42' 08.28" N			
		100° 09' 11.14" E	02° 42' 30.20" N			
		100° 10' 41.08" E	02° 43' 06.60" N			
		100° 10' 50.35" E	02° 42' 41.35" N			
ZONA INDUSTRI (KPU-ID)				**782,20**		
INDUSTRI MANUFAKTUR (KPU-ID-MF)				**87,66**		
KPU-ID-MF	KAB. LABUHANBATU, KEC. PANAI HILIR	100° 18' 18.12" E	02° 33' 49.49" N	87,66	1207	0718-03
		100° 17' 47.34" E	02° 34' 13.41" N			
		100° 18' 06.75" E	02° 34' 25.61" N			
		100° 18' 34.99" E	02° 34' 00.60" N			
		100° 18' 18.12" E	02° 33' 49.49" N			
INDUSTRI MARITIM (KPU-ID-MR)				**694,54**		
KPU-ID-MR-01	KAB. BATUBARA, KEC. LIMA PULUH	099° 46' 12.88" E	03° 25' 58.99" N	653,79	1208	0719-04
		099° 46' 12.88" E	03° 24' 33.33" N			
		099° 44' 50.64" E	03° 24' 33.33" N			
		099° 44' 50.64" E	03° 25' 58.99" N			
		099° 46' 12.88" E	03° 25' 58.99" N			
KPU-ID-MR-02	KAB. GUNUNG SITOLI, KEC. GUNUNG SITOLI UTARA	097° 33' 43.76" E	01° 22' 05.11" N	40,75	1202	0617-01
		097° 33' 30.39" E	01° 22' 34.33" N			
		097° 33' 44.38" E	01° 22' 42.46" N			
		097° 33' 56.63" E	01° 22' 12.50" N			
		097° 33' 43.76" E	01° 22' 05.11" N			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN		Bujur	Lintang		SKALA	
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP)				299.880,87	250 K	50 K
KONSERVASI PERAIRAN (KKP)				171.882,27		
KKP-01	KAB. LANGKAT, KEC. SECANGGANG	98°40' 47.612"	3°55' 11.503"	1870,48	1206	0619-03, 0619-04
		98°40' 46.782"	3°54' 14.161"			
		98°40' 41.876"	3°54' 14.202"			
		98°35' 23.903"	3°55' 27.227"			
		98°35' 41.096"	3°56' 24.505"			
		98°40' 47.612"	3°55' 11.503"			
KKP-02	KAB. SERDANG BEDAGAI, KEC. PULAU BERHALA	99°29' 39.934"	3°48' 50.147"	3762,62		0719-02
		99°32' 20.437"	3°46' 53.919"			
		99°30' 6.530"	3°44' 18.895"			
		99°27' 28.757"	3°46' 9.279"			
		99°29' 39.934"	3°48' 50.147"			
KKP-03	KAB. BATUBARA, KEC. TANJUNG TIRAM	99°44' 35.731"	3°18' 23.978"	3802,42	1208	0719-04
		99°41' 22.994"	3°19' 37.860"			
		99°42' 32.843"	3°22' 43.065"			
		99°45' 46.401"	3°21' 18.511"			
KKP-04	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. SORKAM, SORKAM BARAT	98°35' 32.805"	1°51' 7.397"	1830,64	1205	0617-03
		98°33' 31.745"	1°49' 44.768"			
		98°31' 50.252"	1°51' 39.831"			
		98°33' 44.503"	1°52' 34.827"			
		98°33' 44.586"	1°52' 34.508"			
		98°34' 3.235"	1°52' 21.585"			
		98°34' 8.180"	1°52' 19.848"			
		98°34' 56.305"	1°51' 46.673"			
		98°35' 32.805"	1°51' 7.397"			
KKP-06	KAB. TAPANULI SELATAN, KEC. MUARA BATANG TORU	98°50' 31.943"	1°17' 56.114"	7697,33	1205, 1204	0617-05
		98°48' 36.991"	1°17' 5.939"			
		98°45' 25.671"	1°24' 45.148"			
		98°46' 54.979"	1°25' 53.267"			
		98°50' 31.943"	1°17' 56.114"			
KKP-07	KAB. MANDAILING NATAL, KEC. NATAL	99°5' 35.312"	0°36' 38.188"	1415,23	1204	0616-08
		99°2' 42.829"	0°35' 30.202"			
		99°2' 4.796"	0°36' 50.894"			
		99°3' 14.703"	0°37' 18.091"			
		99°3' 14.707"	0°37' 18.091"			
		99°5' 35.312"	0°36' 38.188"			
KKP-08	KAB. NIAS UTARA, KEC. ALASA	97°20' 24.174"	1°7' 28.791"	1292,36	1202	0517-02
		97°18' 6.560"	1°5' 57.516"			
		97°17' 29.711"	1°7' 4.428"			
		97°19' 41.540"	1°8' 44.593"			
		97°20' 24.174"	1°7' 28.791"			
KKP-15	KAB. NIAS, KEC. GIDO, IDANOGAWO	97°50' 56.454"	1°4' 21.262"	4529,65		0617-07
		97°48' 16.032"	1°8' 49.765"			
		97°50' 5.874"	1°10' 13.755"			
		97°53' 18.120"	1°5' 57.524"			
		97°50' 56.454"	1°4' 21.262"			
KKP-16	KAB. NIAS, KEC. BAWOLATO	98°0' 20.132"	1°3' 26.313"	4985,61		
		98°1' 30.296"	1°0' 32.444"			
		97°57' 7.352"	0°59' 4.367"			
		97°55' 56.659"	1°2' 5.755"			
		98°0' 20.132"	1°3' 26.313"			

KKP-17	KAB. NIAS SELATAN, KEC. LAHUSA, TOMA	97°57' 21.243"	0°52' 12.799"	18096,64	1201, 1202	0616-03, 0616-04
		97°57' 17.149"	0°37' 33.659"			
		97°53' 59.266"	0°37' 47.890"			
		97°54' 8.230"	0°53' 0.128"			
		97°57' 21.243"	0°52' 12.799"			
KKP-18	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU TIMUR	98°47' 59.128"	0°5' 26.395"	44300,78	1204, 1203	0616-09
		98°51' 2.171"	0°7' 9.491"			
		98°51' 40.775"	0°7' 43.729"			
		98°48' 21.767"	0°10' 40.575"			
		98°48' 21.767"	0°11' 48.831"			
		98°58' 0.649"	0°11' 48.831"			
		98°58' 0.649"	-0° 2' 35.569"			
		98°47' 59.312"	-0° 2' 35.569"			
KKP-20	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU	98°15' 51.698"	-0° 3' 19.477"	42757,53	1203	0616-05, 0615-01, 0615-02
		98°15' 51.698"	-0° 3' 19.889"			
		98°16' 33.462"	-0° 4' 37.061"			
		98°16' 57.353"	-0° 5' 33.253"			
		98°17' 9.166"	-0° 5' 33.458"			
		98°17' 23.341"	-0° 4' 36.708"			
		98°17' 2.769"	-0° 3' 20.267"			
		98°17' 19.220"	-0° 3' 27.670"			
		98°17' 23.122"	-0° 3' 20.026"			
		98°17' 37.371"	-0° 3' 20.038"			
		98°18' 55.417"	-0° 3' 20.102"			
		98°19' 9.410"	-0° 3' 1.893"			
		98°19' 10.347"	-0° 2' 58.856"			
		98°19' 19.734"	-0° 1' 55.366"			
		98°21' 42.912"	-0° 3' 51.407"			
		98°22' 5.029"	-0° 6' 32.335"			
		98°22' 5.114"	-0° 6' 32.421"			
		98°22' 44.794"	-0° 8' 34.041"			
		98°22' 8.388"	-0° 8' 58.668"			
		98°5' 50.786"	-0° 9' 34.003"			
		98°3' 28.376"	-0° 5' 30.942"			
		98°7' 17.518"	-0° 1' 17.172"			
		98°12' 13.047"	0°3' 29.791"			
		98°12' 56.264"	0°3' 58.603"			
		98°13' 39.778"	0°4' 27.612"			
		98°15' 11.025"	0°4' 8.591"			
		98°14' 13.150"	0°2' 46.104"			
		98°14' 13.752"	-0° 3' 19.020"			
		98°15' 51.698"	-0° 3' 19.477"			
		98°19' 14.689"	-0° 7' 34.347"			
		98°19' 34.922"	-0° 7' 58.906"			
		98°19' 34.944"	-0° 8' 44.977"			
		98°20' 59.533"	-0° 8' 44.977"			
		98°20' 59.472"	-0° 7' 34.347"			
		98°20' 59.472"	-0° 5' 59.777"			
		98°21' 10.558"	-0° 5' 31.956"			
		98°18' 18.112"	-0° 4' 30.928"			
		98°17' 33.681"	-0° 4' 57.279"			
		98°17' 33.681"	-0° 5' 39.219"			
		98°17' 33.681"	-0° 7' 0.425"			
		98°17' 33.672"	-0° 7' 34.347"			
		98°19' 14.689"	-0° 7' 34.347"			

KKP-21	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU SIMUK	97°53' 55.579"	-0° 6' 2.197"	8197,41	1201	0615-01
		97°50' 12.026"	-0° 3' 59.976"			
		97°49' 52.059"	-0° 3' 40.198"			
		97°55' 3.007"	0°0' 29.074"			
		97°58' 31.162"	-0° 2' 48.802"			
		97°53' 55.579"	-0° 6' 2.197"			
KKP-22	KAB. NIAS BARAT, KEC. SIROMBU	97°29' 23.733"	0°49' 41.866"	27343,57	1201, 1202	0616-01, 0516-01
		97°23' 6.054"	0°42' 37.335"			
		97°16' 8.290"	0°49' 21.326"			
		97°22' 32.084"	0°55' 28.351"			
		97°29' 23.733"	0°49' 41.866"			
ZONA INTI (KKP-ZI)				**2.361,88**		
KKP-ZI-01	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. KOLANG	98°35' 33.791"	1°38' 27.927"	1517,11	1205	0617-04
		98°33' 12.465"	1°40' 37.096"			
		98°33' 12.451"	1°41' 33.267"			
		98°35' 33.791"	1°41' 33.267"			
		98°35' 33.791"	1°38' 27.927"			
KKP-ZI-02	KAB. NIAS UTARA, KEC. GOSONG IDENENASI	97°6' 51.829"	1°26' 5.453"	48,11	1202	0517-01
		97°6' 26.053"	1°25' 49.094"			
		97°6' 18.371"	1°26' 4.585"			
		97°6' 43.279"	1°26' 19.824"			
		97°6' 51.829"	1°26' 5.453"			
KKP-ZI-03	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU BAOHI DAN LAHEWA	97°10' 32.282"	1°26' 9.143"	54,64		
		97°10' 38.489"	1°26' 2.119"			
		97°10' 35.544"	1°25' 45.228"			
		97°10' 22.082"	1°25' 16.842"			
		97°10' 8.368"	1°25' 8.814"			
		97°10' 5.635"	1°25' 18.822"			
		97°10' 5.975"	1°25' 19.325"			
		97°10' 25.859"	1°26' 2.858"			
		97°10' 32.282"	1°26' 9.143"			
KKP-ZI-04	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU SANAU	97°14' 55.565"	1°27' 34.414"	34,63		
		97°14' 56.324"	1°27' 29.192"			
		97°14' 49.110"	1°27' 27.281"			
		97°14' 41.269"	1°27' 28.793"			
		97°14' 37.115"	1°27' 15.732"			
		97°14' 28.813"	1°27' 9.510"			
		97°14' 19.032"	1°27' 6.124"			
		97°14' 13.816"	1°27' 13.376"			
KKP-ZI-05	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU LAFAU	97°12' 49.410"	1°25' 16.273"	14,49		
		97°12' 42.030"	1°25' 12.792"			
		97°12' 38.552"	1°25' 19.747"			
		97°12' 38.887"	1°25' 29.064"			
		97°12' 44.161"	1°25' 36.019"			
		97°12' 49.560"	1°25' 31.832"			
		97°12' 49.410"	1°25' 16.273"			
KKP-ZI-06	KAB. NIAS UTARA, KEC. GOSONG ZAOTAMARU	97°20' 9.643"	1°31' 46.431"	158,67		0517-03, 0517-01
		97°19' 45.469"	1°32' 6.050"			
		97°20' 4.762"	1°32' 25.134"			
		97°20' 24.292"	1°32' 38.162"			
		97°20' 51.378"	1°32' 48.217"			
		97°20' 55.510"	1°32' 27.325"			
KKP-ZI-07	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU SARANGBAUNG	97°27' 10.960"	1°42' 50.967"	293,42		0517-03
		97°26' 59.393"	1°42' 20.842"			
		97°26' 19.560"	1°42' 17.554"			
		97°25' 49.332"	1°42' 33.923"			
		97°26' 7.303"	1°43' 17.454"			
		97°27' 10.960"	1°42' 50.967"			

KKP-ZI-08	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU	98°19' 54.596"	-0° 5' 26.962"	240,81	1203	0615-02
		98°19' 54.767"	-0° 5' 34.330"			
		98°19' 19.148"	-0° 6' 46.778"			
		98°19' 16.144"	-0° 6' 46.764"			
		98°19' 16.129"	-0° 6' 46.686"			
		98°18' 6.902"	-0° 5' 53.370"			
		98°18' 5.434"	-0° 5' 53.370"			
		98°18' 5.434"	-0° 5' 18.448"			
		98°19' 21.594"	-0° 5' 18.448"			
		98°19' 54.596"	-0° 5' 26.962"			
ZONA LAINNYA (KKP-ZL)				**174,76**		
KKP-ZL-01	KAB. NIAS UTARA, KEC. TEFAO	97°15' 50.839"	1°25' 16.824"	88,77	1202	0517-01
		97°15' 54.374"	1°25' 13.084"			
		97°15' 59.749"	1°25' 4.631"			
		97°15' 56.768"	1°25' 1.403"			
		97°14' 29.671"	1°24' 37.528"			
		97°14' 29.619"	1°24' 37.553"			
		97°14' 29.522"	1°24' 37.868"			
		97°14' 28.608"	1°24' 47.135"			
		97°14' 47.792"	1°24' 49.471"			
		97°15' 1.134"	1°24' 55.976"			
		97°15' 9.475"	1°24' 56.477"			
		97°15' 19.649"	1°25' 2.813"			
		97°15' 24.152"	1°25' 10.319"			
		97°15' 33.160"	1°25' 18.826"			
		97°15' 42.667"	1°25' 19.826"			
		97°15' 50.839"	1°25' 16.824"			
KKP-ZL-02	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU SANAU	97°15' 22.831"	1°27' 36.954"	6,44		
		97°15' 18.378"	1°27' 34.621"			
		97°15' 15.242"	1°27' 33.858"			
		97°15' 12.355"	1°27' 34.070"			
		97°15' 8.201"	1°27' 35.978"			
		97°15' 4.410"	1°27' 34.488"			
		97°15' 3.759"	1°27' 36.694"			
		97°15' 37.108"	1°27' 51.177"			
		97°15' 37.274"	1°27' 51.124"			
		97°15' 37.422"	1°27' 47.092"			
		97°15' 28.008"	1°27' 40.900"			
		97°15' 22.831"	1°27' 36.954"			
KKP-ZL-03	KAB. NIAS UTARA, KEC. TELUK BANGKUANG	97°24' 34.945"	1°30' 8.292"	79,55		0517-03
		97°24' 12.550"	1°30' 7.607"			
		97°24' 12.550"	1°30' 38.117"			
		97°24' 38.905"	1°30' 38.710"			
		97°24' 34.945"	1°30' 8.292"			
ZONA PEMANFAATAN (KKP-ZP)				**73.963,95**		
		98°41' 14.729"	1°44' 0.405"			
		98°43' 11.940"	1°43' 9.933"			
		98°43' 12.094"	1°43' 1.306"			
		98°45' 56.605"	1°40' 34.527"			
		98°49' 3.217"	1°39' 40.625"			
		98°49' 12.223"	1°39' 41.532"			
		98°43' 56.304"	1°31' 37.867"			
		98°27' 19.397"	1°31' 32.107"			

KKP-ZP-01	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. TAPIAN NAULI, BADIRI, KOLANG	98°25' 0.609"	1°36' 6.093"	73314,66	1205	0617-04
		98°25' 0.469"	1°44' 1.755"			
		98°35' 33.791"	1°38' 27.927"			
		98°35' 33.791"	1°41' 33.267"			
		98°33' 12.451"	1°41' 33.267"			
		98°33' 12.465"	1°40' 37.096"			
		98°33' 7.096"	1°40' 40.493"			
		98°33' 7.097"	1°41' 46.116"			
		98°29' 21.806"	1°41' 45.120"			
		98°35' 33.791"	1°38' 27.927"			
		98°37' 20.867"	1°35' 12.078"			
		98°30' 30.981"	1°35' 12.078"			
		98°30' 30.981"	1°33' 5.514"			
		98°37' 20.010"	1°33' 5.514"			
		98°37' 20.867"	1°35' 12.078"			
KKP-ZP-02	KAB. NIAS UTARA, KEC. HILIGAWOLO UTARA	97°5' 36.208"	1°25' 30.356"	125,55	1202	0517-01
		97°5' 36.156"	1°25' 30.359"			
		97°5' 36.150"	1°25' 42.316"			
		97°5' 52.814"	1°25' 39.846"			
		97°6' 47.912"	1°25' 48.353"			
		97°7' 22.674"	1°26' 4.625"			
		97°7' 26.616"	1°25' 54.660"			
KKP-ZP-03	KAB. NIAS UTARA, KEC. HILIGAWOLO BARAT	97°4' 31.499"	1°23' 15.984"	317,07		
		97°4' 4.836"	1°22' 52.903"			
		97°2' 57.916"	1°24' 31.849"			
		97°3' 28.516"	1°24' 53.345"			
		97°3' 30.350"	1°24' 52.103"			
KKP-ZP-04	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU MAUSE	97°6' 24.832"	1°21' 9.319"	26,05		
		97°6' 28.976"	1°21' 5.238"			
		97°6' 17.892"	1°20' 54.377"			
		97°6' 1.040"	1°20' 57.368"			
		97°5' 56.051"	1°21' 6.901"			
		97°6' 3.589"	1°21' 10.008"			
		97°6' 4.478"	1°21' 10.132"			
KKP-ZP-05	KAB. NIAS UTARA, KEC. GOSONG GILO	97°13' 28.978"	1°25' 39.839"	32,74		
		97°13' 15.607"	1°25' 39.148"			
		97°13' 7.849"	1°25' 47.060"			
		97°13' 12.994"	1°25' 57.673"			
		97°13' 27.440"	1°25' 57.209"			
		97°13' 31.976"	1°25' 49.447"			
		97°13' 28.978"	1°25' 39.839"			
KKP-ZP-06	KAB. NIAS UTARA, KEC. SIHENEASI	97°14' 0.000"	1°24' 49.003"	40,3		
		97°14' 5.392"	1°24' 45.662"			
		97°14' 4.033"	1°24' 40.903"			
		97°13' 10.465"	1°24' 19.672"			
		97°13' 7.651"	1°24' 30.168"			
		97°13' 24.010"	1°24' 35.899"			
		97°13' 38.460"	1°24' 47.484"			
		97°13' 46.448"	1°24' 49.903"			
		97°13' 53.512"	1°24' 50.598"			
		97°14' 0.000"	1°24' 49.003"			
KKP-ZP-07	KAB. NIAS UTARA, KEC. TELUK BANGKUANG	97°26' 4.657"	1°30' 22.298"	107,58		0517-03
		97°25' 49.837"	1°30' 9.521"			
		97°25' 15.494"	1°31' 6.555"			
		97°25' 28.398"	1°31' 17.382"			
		97°26' 4.657"	1°30' 22.298"			

ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN (KKP-ZPB)				51.498,01		
KKP-ZPB-01	KAB. TAPANULI TENGAH, KEC. KOLANG	98°33' 7.096"	1°40' 40.493"	3182,61	1205	0617-02
		98°29' 21.827"	1°41' 45.093"			
		98°29' 21.806"	1°41' 45.120"			
		98°33' 7.097"	1°41' 46.116"			
		98°33' 7.096"	1°40' 40.493"			
KKP-ZPB-02		98°37' 20.867"	1°35' 12.078"	4543,49		0617-04
		98°37' 20.010"	1°33' 5.514"			
		98°30' 30.981"	1°33' 5.514"			
		98°30' 30.981"	1°35' 12.078"			
		98°37' 20.867"	1°35' 12.078"			
KKP-ZPB-03	KAB. NIAS UTARA, KEC. PULAU WUNGA	97°6' 41.254"	1°16' 39.495"	12716,65	1202	0517-02
		97°10' 22.259"	1°11' 15.698"			
		97°4' 27.624"	1°9' 7.207"			
		97°1' 7.497"	1°14' 34.687"			
		97°6' 41.254"	1°16' 39.495"			
KKP-ZPB-04	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA	97°10' 38.489"	1°26' 29.759"	12501,71		0517-02, 0517-01
		97°10' 38.489"	1°26' 2.228"			
		97°10' 38.489"	1°26' 2.119"			
		97°10' 32.282"	1°26' 9.143"			
		97°10' 25.859"	1°26' 2.858"			
		97°10' 5.649"	1°25' 19.253"			
		97°10' 5.975"	1°25' 19.325"			
		97°10' 5.635"	1°25' 18.822"			
		97°10' 8.368"	1°25' 8.814"			
		97°10' 22.082"	1°25' 16.842"			
		97°10' 35.544"	1°25' 45.228"			
		97°10' 38.489"	1°26' 2.119"			
		97°10' 38.489"	1°25' 50.061"			
		97°10' 38.489"	1°25' 31.621"			
		97°10' 30.414"	1°25' 24.252"			
		97°10' 15.565"	1°25' 10.700"			
		97°9' 48.512"	1°24' 46.011"			
		97°7' 26.616"	1°25' 54.660"			
		97°7' 22.674"	1°26' 4.625"			
		97°6' 47.912"	1°25' 48.353"			
		97°5' 52.814"	1°25' 39.846"			
		97°5' 36.150"	1°25' 42.316"			
		97°5' 36.156"	1°25' 30.359"			
		97°3' 30.350"	1°24' 52.103"			
		97°3' 28.516"	1°24' 53.345"			
		97°2' 57.916"	1°24' 31.849"			
		97°4' 4.836"	1°22' 52.903"			
		97°4' 31.499"	1°23' 15.984"			
		97°8' 2.577"	1°22' 50.789"			
		97°8' 3.297"	1°22' 50.426"			
		97°8' 4.510"	1°22' 49.392"			
		97°8' 4.700"	1°19' 57.272"			
		97°5' 58.575"	1°19' 57.272"			

		97°2' 16.546"	1°22' 27.370"			
		97°2' 16.546"	1°26' 29.759"			
		97°3' 59.017"	1°27' 43.408"			
		97°4' 53.901"	1°27' 43.408"			
		97°9' 2.830"	1°27' 43.408"			
		97°10' 38.489"	1°26' 29.759"			
		97°6' 18.371"	1°26' 4.585"			
		97°6' 26.053"	1°25' 49.094"			
		97°6' 51.829"	1°26' 5.453"			
		97°6' 43.279"	1°26' 19.824"			
		97°6' 18.371"	1°26' 4.585"			
		97°6' 1.040"	1°20' 57.368"			
		97°6' 17.892"	1°20' 54.377"			
		97°6' 28.976"	1°21' 5.238"			
		97°6' 24.832"	1°21' 9.319"			
		97°6' 4.478"	1°21' 10.132"			
		97°6' 3.589"	1°21' 10.008"			
		97°5' 56.051"	1°21' 6.901"			
		97°6' 1.040"	1°20' 57.368"			
		97°16' 39.903"	1°26' 3.710"			
		97°16' 39.863"	1°25' 14.674"			
		97°15' 56.768"	1°25' 1.403"			
		97°15' 59.749"	1°25' 4.631"			
		97°15' 54.374"	1°25' 13.084"			
		97°15' 50.839"	1°25' 16.824"			
		97°15' 42.667"	1°25' 19.826"			
		97°15' 33.160"	1°25' 18.826"			
		97°15' 24.152"	1°25' 10.319"			
		97°15' 19.649"	1°25' 2.813"			
		97°15' 9.475"	1°24' 56.477"			
		97°15' 1.134"	1°24' 55.976"			
		97°14' 47.792"	1°24' 49.471"			
		97°14' 28.608"	1°24' 47.135"			
		97°14' 29.522"	1°24' 37.868"			
		97°14' 29.619"	1°24' 37.553"			
		97°14' 4.033"	1°24' 40.903"			
		97°14' 5.392"	1°24' 45.662"			
		97°14' 0.000"	1°24' 49.003"			
		97°13' 53.512"	1°24' 50.598"			
		97°13' 46.448"	1°24' 49.903"			
		97°13' 38.460"	1°24' 47.484"			
		97°13' 24.010"	1°24' 35.899"			
		97°13' 7.651"	1°24' 30.168"			
		97°13' 10.465"	1°24' 19.672"			
		97°11' 32.792"	1°25' 9.654"			
		97°11' 32.254"	1°29' 6.744"			
		97°16' 40.051"	1°29' 6.744"			
		97°16' 39.903"	1°26' 3.710"			
		97°14' 13.816"	1°27' 13.376"			
		97°14' 19.032"	1°27' 6.124"			
		97°14' 28.813"	1°27' 9.510"			
		97°14' 37.115"	1°27' 15.732"			
		97°14' 41.269"	1°27' 28.793"			
		97°14' 49.110"	1°27' 27.281"			
		97°14' 56.324"	1°27' 29.192"			

KKP-ZPB-05	KAB. NIAS UTARA, KEC. LAHEWA, LAHEWA TIMUR	97°14' 55.565"	1°27' 34.414"	7367,52		0517-01
		97°15' 3.759"	1°27' 36.694"			
		97°15' 4.410"	1°27' 34.488"			
		97°15' 8.201"	1°27' 35.978"			
		97°15' 12.355"	1°27' 34.070"			
		97°15' 15.242"	1°27' 33.858"			
		97°15' 18.378"	1°27' 34.621"			
		97°15' 22.831"	1°27' 36.954"			
		97°15' 28.008"	1°27' 40.900"			
		97°15' 37.422"	1°27' 47.092"			
		97°15' 37.274"	1°27' 51.124"			
		97°15' 37.108"	1°27' 51.177"			
		97°13' 7.849"	1°25' 47.060"			
		97°13' 15.607"	1°25' 39.148"			
		97°13' 28.978"	1°25' 39.839"			
		97°13' 31.976"	1°25' 49.447"			
		97°13' 27.440"	1°25' 57.209"			
		97°13' 12.994"	1°25' 57.673"			
		97°13' 7.849"	1°25' 47.060"			
		97°12' 55.494"	1°25' 11.003"			
		97°12' 55.570"	1°25' 8.190"			
		97°13' 14.224"	1°25' 7.481"			
		97°13' 14.755"	1°25' 11.791"			
		97°13' 15.429"	1°25' 15.437"			
		97°13' 15.435"	1°25' 15.439"			
		97°12' 44.161"	1°25' 36.019"			
		97°12' 38.887"	1°25' 29.064"			
		97°12' 38.552"	1°25' 19.747"			
		97°12' 42.030"	1°25' 12.792"			
		97°12' 49.410"	1°25' 16.273"			
		97°12' 55.466"	1°25' 11.020"			
		97°12' 55.494"	1°25' 11.003"			
		97°13' 34.821"	1°25' 13.083"			
		97°13' 28.389"	1°25' 13.209"			
		97°13' 28.335"	1°25' 3.709"			
		97°13' 28.309"	1°25' 3.671"			
		97°13' 28.010"	1°25' 3.179"			
		97°13' 27.645"	1°25' 2.344"			
		97°13' 27.688"	1°25' 1.423"			
		97°13' 28.317"	1°25' 0.486"			
		97°13' 28.282"	1°24' 54.165"			
		97°13' 31.510"	1°24' 54.165"			
		97°13' 31.457"	1°24' 54.120"			
		97°13' 28.545"	1°24' 51.786"			
		97°13' 28.267"	1°24' 47.888"			
		97°13' 30.579"	1°24' 46.154"			
		97°13' 32.293"	1°24' 49.666"			
		97°13' 32.892"	1°24' 51.486"			
		97°13' 34.563"	1°24' 53.628"			
		97°13' 35.698"	1°24' 54.013"			
		97°13' 40.647"	1°24' 54.165"			
		97°13' 44.268"	1°24' 54.165"			
		97°13' 44.713"	1°25' 2.965"			
		97°13' 46.341"	1°25' 6.520"			
		97°13' 47.519"	1°25' 10.845"			

		97°13' 45.677"	1°25' 13.372"			
		97°13' 44.820"	1°25' 14.165"			
		97°13' 39.916"	1°25' 15.535"			
		97°13' 34.927"	1°25' 13.158"			
		97°13' 34.821"	1°25' 13.083"			
KKP-ZPB-06	KAB. NIAS UTARA, KEC. SAWO	97°22' 37.882"	1°31' 21.125"	3940		0517-03, 0517-01
		97°20' 55.510"	1°32' 27.325"			
		97°20' 51.378"	1°32' 48.217"			
		97°20' 24.292"	1°32' 38.162"			
		97°20' 4.762"	1°32' 25.134"			
		97°19' 45.469"	1°32' 6.050"			
		97°20' 9.643"	1°31' 46.431"			
		97°20' 52.434"	1°29' 10.623"			
		97°20' 52.053"	1°29' 9.594"			
		97°18' 40.375"	1°30' 19.560"			
		97°18' 40.375"	1°33' 54.596"			
		97°22' 37.518"	1°33' 54.596"			
		97°22' 37.882"	1°31' 21.125"			
KKP-ZPB-07		97°25' 58.751"	1°29' 26.234"	2849,2		0517-03
		97°25' 58.730"	1°29' 26.399"			
		97°25' 49.837"	1°30' 9.521"			
		97°26' 4.657"	1°30' 22.298"			
		97°25' 28.398"	1°31' 17.382"			
		97°25' 15.494"	1°31' 6.555"			
		97°24' 38.905"	1°30' 38.710"			
		97°24' 12.550"	1°30' 38.117"			
		97°24' 12.550"	1°30' 7.607"			
		97°24' 34.945"	1°30' 8.292"			
		97°24' 23.504"	1°30' 0.407"			
		97°24' 4.791"	1°30' 0.162"			
		97°24' 4.438"	1°33' 4.320"			
		97°27' 8.602"	1°33' 4.320"			
		97°27' 8.602"	1°30' 26.408"			
KKP-ZPB-08		97°28' 10.406"	1°40' 40.078"	2473,22		
		97°25' 20.911"	1°40' 38.012"			
		97°25' 20.975"	1°43' 22.213"			
		97°28' 10.406"	1°43' 23.358"			
		97°26' 59.563"	1°42' 20.755"			
		97°26' 59.393"	1°42' 20.842"			
		97°27' 10.960"	1°42' 50.967"			
		97°26' 7.303"	1°43' 17.454"			
		97°25' 49.332"	1°42' 33.923"			
		97°26' 19.560"	1°42' 17.554"			
KKP-ZPB-09	KAB. NIAS SELATAN, KEC. PULAU-PULAU BATU	98°21' 10.503"	-0° 5' 31.934"	1923,61	1203	0615-02
		98°21' 10.558"	-0° 5' 31.956"			
		98°20' 59.472"	-0° 5' 59.777"			
		98°20' 59.472"	-0° 7' 34.347"			
		98°20' 59.533"	-0° 8' 44.977"			
		98°19' 34.944"	-0° 8' 44.977"			
		98°19' 34.922"	-0° 7' 58.906"			
		98°19' 34.944"	-0° 7' 58.921"			
		98°19' 54.767"	-0° 5' 34.330"			
		98°19' 54.596"	-0° 5' 26.962"			
		98°19' 21.594"	-0° 5' 18.448"			
		98°18' 5.434"	-0° 5' 18.448"			
		98°18' 5.434"	-0° 5' 53.370"			
		98°18' 6.902"	-0° 5' 53.370"			
		98°19' 16.144"	-0° 6' 46.764"			
		98°19' 19.148"	-0° 6' 46.778"			
		98°19' 14.689"	-0° 7' 34.347"			
		98°17' 33.672"	-0° 7' 34.347"			
		98°17' 33.681"	-0° 7' 0.425"			
		98°17' 33.681"	-0° 5' 39.219"			
		98°17' 33.681"	-0° 4' 57.279"			
		98°18' 18.112"	-0° 4' 30.928"			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN ALUR		**Bujur**	**Lintang**		**SKALA**	
ZONA ALUR (KPU-APK)				**40.395,22**	**250 K**	**50 K**
ALUR GAS DAN MINYAK (KPU-APK-GM)				**5.103,30**		
AL-APK-GM-01	KAB. LANGKAT, KEC. PANGKALAN SUSU	098° 24' 33.83" E	04° 12' 32.55" N	1.742,50	1206	0619-02
		098° 18' 00.79" E	04° 06' 05.65" N			
		098° 17' 39.51" E	04° 06' 29.03" N			
		098° 24' 10.55" E	04° 12' 55.24" N			
		098° 24' 33.83" E	04° 12' 32.55" N			
AL-APK-GM-02	KAB. LANGKAT, KEC. TANGKAHAN	098° 34' 50.93" E	04° 12' 38.12" N	2.906,56		0619-02, 0619-03
		098° 28' 21.06" E	04° 09' 10.27" N			
		098° 24' 32.11" E	04° 07' 07.22" N			
		098° 23' 53.34" E	04° 06' 33.32" N			
		098° 22' 39.14" E	04° 05' 45.58" N			
		098° 21' 27.93" E	04° 04' 32.23" N			
		098° 20' 57.34" E	04° 04' 34.74" N			
		098° 22' 20.09" E	04° 06' 12.01" N			
		098° 23' 33.86" E	04° 06' 59.41" N			
		098° 24' 12.27" E	04° 07' 33.05" N			
		098° 27' 53.76" E	04° 09' 32.11" N			
		098° 34' 11.52" E	04° 12' 54.18" N			
		098° 34' 50.93" E	04° 12' 38.12" N			
AL-APK-GM-03	KOTA MEDAN, KEC. MEDAN BELAWAN	098° 43' 00.96" E	03° 46' 40.90" N	439,43		0619-04
		098° 42' 40.34" E	03° 46' 40.71" N			
		098° 43' 03.31" E	03° 47' 23.80" N			
		098° 44' 26.25" E	03° 48' 07.97" N			
		098° 43' 00.96" E	03° 46' 40.90" N			
		098° 46' 21.54" E	03° 50' 05.75" N			
		098° 46' 31.27" E	03° 51' 02.13" N			
		098° 46' 46.22" E	03° 51' 17.40" N			
		098° 47' 10.41" E	03° 51' 41.56" N			
		098° 47' 32.46" E	03° 51' 18.48" N			
AL-APK-GM-04	KAB. DELI SERDANG, KEC. HAMPARAN PERAK	098° 46' 46.22" E	03° 51' 17.40" N	14,81		
		098° 46' 31.27" E	03° 51' 02.13" N			
		098° 46' 35.66" E	03° 51' 27.54" N			
		098° 46' 46.22" E	03° 51' 17.40" N			
ALUR KABEL TELEKOMUNIKASI (KPU-APK-KT)				**35.291,92**		
AL-APK-KT-01	KAB. SERDANG BEDAGAI, KAB. DELI SERDANG, KEC. PANTAI CERMIN, PERBAUNGAN, TELUK MENGKUDU, TANJUNG BERINGIN, BANDAR KHALIPAH, LABUHAN DELI	099° 00' 34.18" E	03° 39' 00.45" N	3.999,41	1206	0619-04, 0719-01
		099° 00' 25.94" E	03° 38' 38.74" N			
		099° 00' 02.88" E	03° 38' 42.35" N			
		099° 00' 07.51" E	03° 38' 51.10" N			
		099° 00' 12.27" E	03° 39' 00.11" N			
		099° 00' 07.34" E	03° 39' 13.84" N			
		098° 59' 44.64" E	03° 39' 51.29" N			
		098° 59' 25.40" E	03° 40' 37.58" N			
		098° 58' 52.78" E	03° 41' 10.64" N			
		098° 58' 01.67" E	03° 42' 22.95" N			
		098° 54' 32.30" E	03° 47' 34.84" N			
		098° 53' 22.43" E	03° 49' 32.57" N			
		098° 52' 08.59" E	03° 53' 12.21" N			
		098° 51' 34.76" E	03° 55' 05.38" N			
		098° 51' 52.89" E	03° 56' 00.12" N			
		098° 52' 12.90" E	03° 58' 49.12" N			
		098° 52' 39.09" E	03° 57' 58.95" N			
		098° 52' 24.81" E	03° 55' 53.61" N			

		098° 52' 08.04" E	03° 55' 05.32" N			
		098° 52' 36.46" E	03° 53' 32.05" N			
		098° 53' 51.39" E	03° 49' 47.35" N			
		098° 54' 59.93" E	03° 47' 51.89" N			
		098° 58' 20.93" E	03° 42' 51.97" N			
		098° 58' 50.69" E	03° 41' 59.45" N			
		098° 59' 49.13" E	03° 40' 58.06" N			
		099° 00' 30.58" E	03° 39' 26.82" N			
		099° 00' 34.18" E	03° 39' 00.45" N			
AL-APK-KT-02		099° 00' 41.32" E	03° 38' 39.85" N	2.868,43		
		099° 00' 28.55" E	03° 38' 24.53" N			
		099° 00' 20.35" E	03° 38' 28.77" N			
		099° 00' 25.94" E	03° 38' 38.74" N			
		099° 00' 34.18" E	03° 39' 00.45" N			
		099° 00' 30.58" E	03° 39' 26.82" N			
		098° 59' 49.13" E	03° 40' 58.06" N			
		098° 58' 50.69" E	03° 41' 59.45" N			
		098° 58' 20.93" E	03° 42' 51.97" N			
		098° 56' 53.66" E	03° 46' 45.42" N			
		098° 56' 14.57" E	03° 48' 34.77" N			
		098° 54' 11.45" E	03° 49' 48.75" N			
		098° 54' 21.59" E	03° 52' 21.18" N			
		098° 53' 59.11" E	03° 53' 16.09" N			
		098° 54' 03.33" E	03° 54' 08.43" N			
		098° 54' 33.38" E	03° 53' 40.86" N			
		098° 54' 31.60" E	03° 53' 21.43" N			
		098° 54' 53.97" E	03° 52' 27.11" N			
		098° 54' 41.82" E	03° 50' 06.94" N			
		098° 56' 39.50" E	03° 48' 57.16" N			
		098° 57' 22.18" E	03° 47' 01.00" N			
		098° 58' 56.88" E	03° 43' 34.37" N			
		098° 58' 58.92" E	03° 43' 03.37" N			
		098° 58' 53.43" E	03° 42' 51.82" N			
		098° 59' 07.23" E	03° 42' 09.46" N			
		098° 59' 36.61" E	03° 41' 50.01" N			
		099° 00' 02.51" E	03° 41' 08.67" N			
		099° 00' 41.11" E	03° 39' 33.88" N			
		099° 00' 46.47" E	03° 39' 02.09" N			
		099° 00' 41.32" E	03° 38' 39.85" N			
AL-APK-KT-03		099° 02' 30.52" E	03° 51' 33.37" N	5.098,42		0719-01
		099° 01' 52.75" E	03° 50' 52.27" N			
		099° 02' 55.23" E	03° 51' 21.19" N			
		099° 03' 30.59" E	03° 51' 01.64" N			
		099° 02' 10.95" E	03° 50' 24.98" N			
		099° 01' 54.28" E	03° 50' 07.34" N			
		099° 00' 01.94" E	03° 48' 08.52" N			
		098° 59' 26.31" E	03° 46' 22.44" N			
		098° 59' 57.52" E	03° 44' 52.81" N			
		099° 01' 32.06" E	03° 40' 21.06" N			
		099° 01' 15.32" E	03° 38' 35.12" N			
		099° 00' 28.55" E	03° 38' 24.53" N			
		099° 00' 41.32" E	03° 38' 39.85" N			
		099° 00' 46.47" E	03° 39' 02.09" N			
		099° 00' 41.11" E	03° 39' 33.88" N			

		099° 00' 02.51" E	03° 41' 08.67" N			
		098° 59' 36.61" E	03° 41' 50.01" N			
		098° 59' 00.49" E	03° 43' 39.04" N			
		098° 58' 16.42" E	03° 46' 04.98" N			
		098° 58' 39.42" E	03° 48' 12.66" N			
		099° 01' 00.76" E	03° 50' 44.30" N			
		099° 01' 59.11" E	03° 51' 47.21" N			
		099° 02' 30.52" E	03° 51' 33.37" N			
		099° 00' 52.83" E	03° 39' 01.76" N			
		099° 01' 03.46" E	03° 39' 09.14" N			
		099° 01' 11.37" E	03° 39' 41.68" N			
		098° 59' 33.84" E	03° 44' 22.18" N			
		098° 59' 34.06" E	03° 48' 25.90" N			
		098° 59' 10.16" E	03° 48' 00.75" N			
		098° 58' 49.26" E	03° 46' 06.80" N			
		098° 59' 24.45" E	03° 44' 10.03" N			
		099° 00' 59.15" E	03° 39' 23.32" N			
		099° 00' 59.73" E	03° 39' 14.84" N			
AL-APK-KT-04	KAB. SERDANG BEDAGAI, KAB. BATUBARA, KEC. PANTAI CERMIN, PERBAUNGAN, TELUK MENGKUDU, TANJUNG BERINGIN, BANDAR KHALIPAH, MEDANG BERAS, SEI SUKA, LIMA PULUH, TALAWI, TANJUNG TIRAM	099° 48' 13.88" E	03° 28' 29.79" N	13.763,35	1206, 1208	0719-01, 0719-04
		099° 55' 05.20" E	03° 24' 27.73" N			
		099° 57' 20.72" E	03° 23' 08.67" N			
		099° 57' 13.66" E	03° 22' 35.00" N			
		099° 54' 45.28" E	03° 24' 01.70" N			
		099° 48' 17.38" E	03° 27' 49.69" N			
		099° 48' 39.19" E	03° 26' 55.10" N			
		099° 54' 21.39" E	03° 23' 30.49" N			
		099° 57' 03.38" E	03° 21' 55.05" N			
		099° 56' 53.40" E	03° 21' 23.19" N			
		099° 48' 19.31" E	03° 26' 29.09" N			
		099° 47' 41.81" E	03° 28' 11.26" N			
		099° 41' 13.12" E	03° 32' 11.79" N			
		099° 36' 33.55" E	03° 33' 25.09" N			
		099° 36' 58.55" E	03° 33' 51.66" N			
		099° 41' 28.21" E	03° 32' 40.72" N			
		099° 47' 39.39" E	03° 28' 50.79" N			
		099° 47' 15.03" E	03° 29' 39.63" N			
		099° 40' 10.03" E	03° 33' 54.05" N			
		099° 37' 52.87" E	03° 34' 41.19" N			
		099° 38' 23.53" E	03° 35' 05.08" N			
		099° 40' 24.85" E	03° 34' 23.06" N			
		099° 47' 53.22" E	03° 29' 41.76" N			
		099° 11' 09.88" E	03° 40' 56.62" N			
		099° 17' 21.54" E	03° 39' 18.03" N			
		099° 25' 58.29" E	03° 36' 57.96" N			
		099° 27' 17.63" E	03° 36' 02.85" N			
		099° 26' 17.27" E	03° 36' 19.12" N			
		099° 20' 28.76" E	03° 37' 53.07" N			
		099° 17' 13.07" E	03° 38' 46.59" N			
		099° 11' 02.90" E	03° 40' 24.81" N			
		099° 07' 45.93" E	03° 40' 56.89" N			
		099° 06' 07.81" E	03° 41' 13.68" N			

		099° 02' 06.53" E	03° 40' 07.10" N			
		099° 01' 47.11" E	03° 39' 51.44" N			
		099° 01' 45.13" E	03° 39' 43.29" N			
		099° 02' 01.04" E	03° 38' 54.39" N			
		099° 01' 36.52" E	03° 38' 06.58" N			
		099° 01' 24.99" E	03° 37' 45.99" N			
		099° 00' 56.59" E	03° 38' 01.70" N			
		099° 01' 07.65" E	03° 38' 21.44" N			
		099° 01' 32.06" E	03° 40' 21.06" N			
		099° 01' 51.40" E	03° 40' 36.29" N			
		099° 06' 07.05" E	03° 41' 46.67" N			
		099° 07' 50.13" E	03° 41' 29.20" N			
AL-APK-KT-05	KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. GUNUNG SITOLI, KEC. PANDAN, GUNUNGSITOLI	097° 47' 48.06" E	01° 23' 26.23" N	9.562,31	1205, 1202	0617-03, 0617-09, 0617-02, 0517-01
		097° 40' 44.78" E	01° 17' 25.04" N			
		097° 40' 21.44" E	01° 17' 47.80" N			
		097° 47' 30.28" E	01° 23' 53.75" N			
		097° 47' 48.06" E	01° 23' 26.23" N			
		098° 33' 17.54" E	01° 44' 01.00" N			
		098° 31' 48.13" E	01° 44' 01.14" N			
		098° 28' 26.47" E	01° 45' 19.01" N			
		098° 21' 08.71" E	01° 44' 43.69" N			
		098° 05' 52.24" E	01° 38' 20.03" N			
		097° 54' 50.05" E	01° 29' 26.31" N			
		097° 55' 01.16" E	01° 30' 18.48" N			
		098° 05' 35.06" E	01° 38' 47.68" N			
		098° 06' 59.70" E	01° 39' 23.67" N			
		098° 07' 13.47" E	01° 39' 29.46" N			
		098° 21' 01.70" E	01° 45' 15.68" N			
		098° 28' 31.15" E	01° 45' 51.65" N			

KODE	LOKASI	Koordinat		LUAS (Ha)	NLP	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU		Bujur	Lintang		SKALA	
KSNT (KSNT)				491.080,71	250 K	50 K
KSNT-01	KAB. SERDANG BERDAGAI, PULAU BERHALA	04° 02' 27.97" N	099° 25' 53.89" E	174.661,95	1206	
		03° 56' 09.28" N	099° 37' 21.07" E			
		03° 48' 53.86" N	099° 46' 48.96" E			
		03° 39' 25.67" N	099° 40' 07.45" E			
		03° 35' 38.81" N	099° 35' 57.73" E			
		03° 34' 08.80" N	099° 30' 01.81" E			
		03° 42' 15.49" N	099° 18' 21.18" E			
		03° 48' 35.08" N	099° 17' 35.34" E			
		03° 52' 35.20" N	099° 18' 53.83" E			
KSNT-02	KAB. NIAS SELATAN, PULAU SIMUK	00° 06' 46.16" N	097° 44' 15.49" E	209.349,62	1204, 1203	0615-01
		00° 08' 15.81" N	097° 48' 06.33" E			
		00° 08' 23.41" N	097° 52' 21.72" E			
		00° 07' 59.37" N	097° 56' 31.69" E			
		00° 05' 39.14" N	098° 01' 00.29" E			
		00° 01' 00.77" N	098° 02' 01.37" E			
		00° 03' 22.62" S	098° 03' 12.04" E			
		00° 15' 45.84" S	098° 01' 03.18" E			
		00° 22' 45.18" S	097° 48' 12.66" E			
		00° 11' 11.54" S	097° 40' 31.32" E			
		00° 00' 29.46" N	097° 33' 29.35" E			
		00° 06' 46.16" N	097° 44' 15.49" E			
KSNT-03	KAB. NIAS UTARA, PULAU WUNGA	01° 09' 03.71" N	096° 53' 26.25" E	107.069,14	1202	0517-02
		01° 17' 38.02" N	096° 52' 14.89" E			
		01° 19' 14.35" N	097° 02' 16.14" E			
		01° 18' 38.37" N	097° 05' 00.60" E			
		01° 14' 21.39" N	097° 09' 48.42" E			
		01° 07' 19.94" N	097° 13' 14.01" E			
		01° 05' 06.31" N	097° 12' 53.45" E			
		01° 03' 44.07" N	097° 11' 56.91" E			
		00° 59' 26.19" N	097° 04' 58.79" E			
		00° 57' 01.91" N	097° 00' 09.39" E			

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 18 MARET 2019

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	**Rencana Penatagunaan Sumberdaya WP3K Provinsi Sumatera Utara**																							
1.1.	**Kabijakan Penatagunaan Sumberdaya WP3K Provinsi Sumatera Utara**																							
1.	Penyusunan dan Penetapan Regulasi (Perda/Pergub) tentang Penatagunaan Sumberdaya WP3K	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
2.	Koordinasi Lintas Sektoral yang Intensif Dalam Rangka Penatagunaan Sumberdaya WP3K	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
3.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan WP3K	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
4.	Penyusunan Rencana Aksi WP3K	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
5.	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan ruang WP3K	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
1.2.	**Penataan Kelembagaan dan Fasilitasi Pengembangan Sektor Perikanan**																							
1.	Penataan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Prov, DKP Kab./Kota																				
2.	Pembangunan Sistem Informasi Pemasaran Produk Perikanan	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
3.	Fasilitasi Promosi Produk Perikanan	Prov. Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Prov, DKP Kab./Kota																				
4.	Fasilitasi Aksesibilitas dan/atau Bantuan Permodalan Kepada Nelayan/Pembudidaya	Prov. Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Prov, DKP Kab./Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.3.	**Pembangunan dan Pengembangan Kawasasan Perikanan Terpadu Berbasis Minapolitan**																							
1.	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu (KPT)	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	DKP Prov, DKP Kab./Kota DKP Kab./Kota																				
2.	Fasilitasi dan Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu (KPT)	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Prov. DKP Kab./Kota																				
3.	Pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan KPT	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Prov.DKP Kab./Kota																				
2	**Rencana Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum**																							
2.1	**Zona Perikanan Budidaya**																							
2.1.1	**Sub Zona Perikanan Budidaya Laut (budidaya : KJA (Kerapu, Kakap), Teripang, Kepiting, Kerang, Rumput Laut**																							
1	Penyusunan Masterplan Budidaya Laut	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP																				
2	Penataan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Laut Berbasis Minapolitan	1. Asahan, 2. Labuhanbatu Utara, 3. Serdang Bedagai, 4. Deli Serdang, 5. Batubara, 6. Langkat, 7. Sibolga, 8. Madina, 9. Tapteng, 10. Tapsel, 11. Nias Utara, 12. Nias Selatan, 13. Nias Barat	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
3	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
4	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Budidaya Laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
5	Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Perikanan dan Pendamping Perikanan Budidaya Laut		APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Monitoring secara berkala lingkungan budidaya laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota LSM	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota, LSM																				
7	Intensifikasi budidaya laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
8	Ekstensifikasi lahan budidaya laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
9	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perbenihan untuk Budidaya Laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
10	Pengembangan industri pengolahan ikan hasil budidaya laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
11	Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
2.1.2	**Sub Zona Perikanan Budidaya Air Payau/Pantai (budidaya : Tambak (Bandeng, Udang)**																							
1	Penyusunan Masterplan Budidaya Air Payau/Pantai	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP																				
2	Penataan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Pantai Berbasis Minapolitan	Kab./Kota yang memiliki Tambak Eksisting, dan Potensi Perluasan	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
3	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya Air Payau/Pantai;		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
4	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Budidaya Air Payau/Pantai		APBN, APBD Prov,	KKP, DKP Provinsi,																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			APBD Kab./Kota Swasta	DKP Kab./Kota																				
5	Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Perikanan dan Pendamping Perikanan Budidaya Air Payau/Pantai		APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
6	Monitoring secara berkala lingkungan budidaya Air Payau/Pantai		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota LSM	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota, LSM																				
7	Revitalisasi Tambak Rakyat		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
8	Intensifikasi budidaya Air Payau/Pantai		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
9	Ekstensifikasi lahan budidaya Air Payau/Pantai		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
10	Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perbenihan untuk Budidaya Air Payau/Pantai		APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
2.1.3	**Sub Zona Produksi Garam**																							
1	Penyusunan Masterplan Produksi Garam	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP																				
2	Penataan dan Pengembangan Usaha Produksi Garam	Labuhan Batu	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				
3	Peningkatan sarana dan prasarana Produksi Garam	Labuhan Batu,	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Produksi Garam	Labuhan Batu,	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				
5	Monitoring secara berkala lingkungan Produksi Garam	Labuhan Batu,	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				
6	Intensifikasi Usaha Produksi Garam	Labuhan Batu,	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				
7	Ekstensifikasi lahan Produksi Garam	Labuhan Batu,	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				
8	Pengembangan Produksi Garam Beryodium	Labuhan Batu,	APBN, APBD Prov., APBD L.Batu	KKP, DKP Provinsi, DKP L.Batu																				
2.2	**Zona Perikanan Tangkap**																							
1	Penyusunan Masterplan perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
2	Pengembangan SDM Nelayan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
3	Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Perikanan dan Pendamping Perikanan Tangkap	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
4	Pembangunan dan pengembangan PPI Ke PPP dan PPS	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
5	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
7	Inventarisasi dan pemetaan alat penangkapan ikan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
8	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
9	Bantuan Armada Perikanan Tangkap untuk Meningkatkan Jangkauan *Fishing Ground*	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
10	Pendaftaran dan penandaan kapal dan kartu nelayan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
11	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
12	Penataan alur dan proses tata niaga hasil tangkapan perikanan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP Kab./Kota																				
13	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
14	Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Tradisional	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15	Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Modern (Tuna, Kepiting, Udang, dll.)	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
16	Pembinaan UPI untuk kelayakan kualitas pengolahan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
17	Pelatihan pengolahan pasa panen yang beroirientasi global (berkualitas dan berdaya saing)	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
18	Peningkatan pengawasan mutu dan keragaman produk hasil perikanan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
19	Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
20	Pembentukan dan optimalisasi peran Pokmaswas	17 Kab./Kota	APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
21	Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota Swasta	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
22	Sosialisasi peraturan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota	KKP, DKP Provinsi, DKP 17 Kab./Kota																				
2.3	**Zona Pelabuhan**																							
1.	Pembangunan Pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	Dishub Prov.																				
2.	Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	DKP Provinsi																				
3.	Peningkatan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	Dishub Prov.																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Revitalisasi sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	Dishub Prov.																				
5	Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	Dishub Prov.																				
6	Penyusunan Peraturan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	Dishub Prov.																				
7	Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional	Prov. Sumatera Utara	APBN dan/atau APBD Prov.	Dishub Prov.																				
8	Pembangunan Pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Lokal	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	Dishub Kab./Kota																				
9	Peningkatan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Lokal	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	Dishub Kab./Kota																				
10	Revitalisasi sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Lokal	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	Dishub Kab./Kota																				
11	Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Lokal	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	Dishub Kab./Kota																				
12	Penyusunan Peraturan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Lokal	17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota	Dishub Kab./Kota																				
13	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.	Provinsi Sumatera Utara dan 17 Kab./Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota, Swasta, LSM	Dishub Prov., Dishub Kab./Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.4	**Zona Pariwisata Pantai, Bawah Laut dan Pulau-Pulau Kecil**																							
1.	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pariwisata Pantai, Bawah Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	Disbudpar Prov, DKP Prov.																				
2	Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Terpadu	1. Nias Selatan, 2. Gunung Sitoli, 3. Nias Barat, 4. Nias Utara, 5. Nias, 6. Tapanuli Tengah, 7. Mandailing Natal, 8. Labuhan Batu, 9. Serdang Bedagai, 10. Deli Serdang 11. Langkat 12. Batubara	APBN, APBD Prov. APBD 12 Kab./Kota Swasta	Disbudpar Prov, DKP Prov, DKP 12 Kab./Kota, Disbudpar 12 Kab./Kota																				
3	Pengembangan Dayatarik dan Destinasi Wisata Pantai		APBD 12 Kab./Kota Swasta	Disbudpar 12 Kab./Kota, Swasta																				
4	Pengembangan Atraksi Wisata Pantai		APBD 12 Kab./Kota Swasta	Disbudpar 12 Kab./Kota, Swasta																				
5	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Wisata Pantai		APBN, APBD Prov. APBD 12 Kab./Kota Swasta	Disbudpar Prov, DKP Prov, Kab./Kota, Disbudpar 10 Kab./Kota																				
6	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Wisata Pantai		APBN, APBD Prov. APBD 10 Kab./Kota Swasta	Dis BM & BK (PU) Prov., Dishub Prov. Dis PU 10 Kab./Kota, Dishub 10 Kab./Kota																				
7	Pengembangan Dayatarik dan Destinasi Wisata Bawah Laut	1. Tapanuli Tengah, 2. Mandailing Natal 3. Nias Selatan 4. Nias Barat 5. Nias 6. Nias Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab./Kota Swasta	Disbudpar Kab./Kota, Swasta																				
8	Pengembangan Dayatarik dan Destinasi Wisata Pulau-Pulau Kecil	1. Tapanuli Tengah, 2. Mandailing Natal 3. Nias Selatan 4. Nias Barat 5. Nias	APBD Provinsi, APBD Kab./Kota Swasta	Disbudpar Prov/Kab./Kota, Swasta																				
9	Pengembangan Atraksi Wisata Pulau-Pulau Kecil		APBD Provinsi, APBD Kab./Kota	Disbudpar Kab./Kota,																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		6. Nias Utara	Swasta	Swsta																				
10	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Wisata Pulau-Pulau Kecil		APBN, APBD Prov. APBD Kab./Kota Swasta	Disbudpar Prov, DKP Prov, DKP Kab./Kota,Disbudpa Kab./Kota																				
11	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Wisata Pulau-Pulau Kecil		APBN, APBD Prov. APBD Kab./Kota Swasta	Dishub Prov. Dishub Kab./Kota																				
12	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Pantai, Bawah Laut dan Pulau-pulau Kecil	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	Disbudpar Prov, DKP Prov,																				
13	Peningkatan Kemampuan SDM Kepariwisataan Pantai, Bawah Laut dan Pulau-pulau Kecil	1. Nias Selatan, 2. Gunung Sitoli, 3. Nias Barat, 4. Nias Utara, 5. Nias, 6. Tapanuli Tengah, 7. Mandailing Natal, 8. Labuhan Batu, 9. Serdang Bedagai, 10. Deli Serdang 11. Langkat 12. Batubara	APBN, APBD Prov. APBD 12 Kab./Kota Swasta	Disbudpar Prov, DKP Prov, DKP 12 Kab./Kota, Disbudpar 12 Kab./Kota																				
3	**Konservasi**																							
3.1	**Penatagunaan Kawasan Konservasi**																							
1	Penyusunan Peraturan Penatagunaan Kawasan Konservasi WP3K Provinsi Sumatera Utara	Prov. Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
2	Penyusunan Riveiw Kawasan Konservasi Perairan WP3K Provinsi Sumatera Utara	1. Serdang bedagai 2. Nias Selatan 3. Tapteng	APBD Prov	DKP Prov																				
3	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan WP3K Provinsi Sumatera Utara	1. Serdang bedagai 2. Nias Selatan 3. Tapteng	APBN APBD Prov.	KKP DKP Prov.																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Penyusunan kajian kawasan konservasi perairan WP3K Provinsi Sumatera Utara	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Tapsel 4. Batubara 5. Madina 6. Nias Selatan 7. Nias Utara 8. Nias 9. Nias Barat	APBN, APBD Prov., APBD 9 Kab./Kota LSM	KKP, DKP Prov. DKP 9 Kab./Kota																				
5	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan WP3K Provinsi Sumatera Utara	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Tapsel 4. Batubara 5. Madina 6. Nias Selatan 7. Nias Utara 8. Nias 9. Nias Barat	APBN APBD Prov.	KKP DKP Prov.																				
6	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan WP3K Provinsi Sumatera Utara	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Tapsel 4. Batubara 5. Madina 6. Nias Selatan 7. Nias Utara 8. Nias 9. Nias Barat	APBN APBD Prov	KKP DKP Prov																				
7	Sosialisasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan nasional dan Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi																				
8	Penataan tanda batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan nasional dan Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Pengelolaan kelembagaan kawasan Konservasi Perairan WP3K Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov	KKP DKP Prov																				
10	Penyusunan kajian kawasan konservasi jenis ikan WP3K Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov	KKP DKP Prov																				
11	Penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi jenis ikan WP3K Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov	KKP DKP Prov																				
12	Sosialisasi konservasi jenis ikan WP3K Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov	KKP DKP Prov																				
3.2	**Pengelolaan Kawasan Konservasi : Sub Zona Inti**																							
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Inti	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Serdang Bedagai 4. Tapsel 5. Batubara 6. Tapteng 7. Madina 8. Nias Selatan 9. Nias Utara 10. Nias 11. Nias Barat	APBN, APBD Prov., LSM	KKP, DKP Prov.																				
2	Monitoring Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Inti		APBN, APBD Prov., LSM	KKP, DKP Prov.																				
3.3	**Pengelolaan Kawasan Konservasi : Sub Zona Pemanfaatan**																							
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Pemanfaatan	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Serdang Bedagai 4. Tapsel 5. Batubara 6. Tapteng 7. Madina 8. Nias Selatan 9. Nias Utara 10. Nias 11. Nias Barat	APBN, APBD Prov.LSM	KKP, DKP Prov.																				
2	Monitoring Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Pemanfaatan		APBN, APBD Prov.LSM	KKP, DKP Prov.																				
3	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Pemanfaatan untuk Pariwisata, serta Penelitian dan Pendidikan		APBN, APBD Prov.LSM	KKP, DKP Prov.																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3.4	**Pengelolaan Kawasan Konservasi : Sub Zona Perikanan Berkelanjutan**																							
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Perikanan Berkelanjutan	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Serdang Bedagai 4. Tapsel 5. Batubara 6. Tapteng 7. Madina 8. Nias Selatan 9. Nias Utara 10. Nias 11. Nias Barat	APBN, APBD Prov.LSM	KKP, DKP Prov.																				
2	Monitoring Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Perikanan Berkelanjutan		APBN, APBD Prov.LSM	KKP, DKP Prov.																				
3	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sub Zona Pemanfaatan untuk Pariwisata, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Penelitian dan Pendidikan		APBN, APBD Prov.LSM	KKP, DKP Prov.																				
3.5	**Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (Terumbu karang dan mangrove) di luar kawasan konservasi**																							
1	Revitalisasi ekosistem mangrove yang telah beralih fungsi ke lahan perkebunan kelapa sawit,	17 Kab/ Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota LSM, Swasta	KKP, DKP Prov, Dishut prov, DisLH Prov, DKP Kab./Kota, LSM, Swasta																				
2	Penanaman mangrove di wilayah-wilayah yang telah mengalami kerusakan	17 Kab/ Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota LSM, Swasta	KKP, DKP Prov, Dishut prov, DisLH Prov, DKP Kab./Kota, LSM, Swasta																				
3.	Monitoring kerusakan ekosistem mangrove di Provinsi Sumatera Utara	17 Kab/ Kota	APBN, APBD Prov., APBD Kab./Kota LSM, Swasta	KKP, DKP Prov, Dishut prov, DisLH Prov, DKP Kab./Kota, LSM, Swasta																				
4.	Transplantasi terumbu karang wilayah-wilayah yang telah mengalami kerusakan	1. Serdang Bedagai 2. Batubara 3. Sibolga 4. Tapteng 5. Tapsel 6. Madina 7. Nias	APBN, APBD Prov., LSM, Swasta	KKP, DKP Prov. LSM, Swasta																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		8. Nias Utara 9. Nias Selatan 10. Nias Barat																						
5.	Monitoring ekosistem terumbu karang	1. Serdang Bedagai 2. Batubara 3. Sibolga 4. Tapteng 5. Tapsel 6. Madina 7. Nias 8. Nias Utara 9. Nias Selatan 10. Nias Barat	APBN, APBD Prov., LSM, Swasta	KKP, DKP Prov. LSM, Swasta																				
3.6.	**Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengelola Kawasan Konservasi**																							
1	Pemberdayaan Masyarakat di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan daerah	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi																				
2	Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan mata pencaharian alternatif	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi																				
3	Pengembangan Mata pencaharian Alternatif Berbasis Sumberdaya Lokal Dalam Mendukung Pengelolaan Ekosistem	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi, Disbudpar, DisLH																				
4	Pengembangan SDM Berbasis Lingkungan di Pulau-pulau kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi, Disbudpar, DisLH																				
5	Sosialisasi Masyarakat Pesisir tentang Mitigasi Bencana	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, Swasta, LSM	DKP Provinsi, Disbudpar, DisLH, BPBD																				
6	Sosialisasi regulasi tentang konservasi dan rehabilitasi	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, LSM	DKP Provinsi																				
7	Bimtek Pemanfaatan data penginderaan jarak jauh dan SIG untuk pemetaan sumberdaya pulau-pulau kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov	DKP Provinsi																				
8	Bimbingan teknis monitoring dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan daerah	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Provinsi																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Penyusunan data base sistem informasi WEB GIS pesisir dan Pulau-pulau kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Provinsi																				
10	Penguatan Kelembagaan Mitra Bahari	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Provinsi																				
11	Peningkatan SDM melalui diversifikasi Pengolahan Rumput Laut	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Provinsi, BPMPTSP																				
3.7.	**Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**																							
1	Revitaliasi Budaya Bahari Masyarakat Pesisir di WP3K	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota LSM	DKP Prov. DKP Kab./Kota Disbudpar Prov Disbudpar Kab/Kota,LSM																				
2	Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumberdaya WP3K	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov.																				
3	Revitalisasi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumberdaya WP3K	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota LSM	DKP Prov. DKP Kab./Kota Disbudpar Prov Disbudpar Kab/Kota LSM																				
4	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota	DKP Prov. DKP Kab./Kota Disbudpar Prov Disbudpar Kab/Kota																				
5	Identifikasi Komunitas Masyarakat Adat, Tradisional, dan Lokal di WP3K	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota	DKP Prov. DKP Kab./Kota Disbudpar Prov Disbudpar Kab/Kota																				
6	Penetapan komunitas masyarakat adat, tradisional, dan lokal di WP3K	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota	DKP Prov. DKP Kab./Kota Disbudpar Prov Disbudpar Kab/Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Identifikasi potensi dan Pemetaan Pulau-pulau kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota	DKP Prov. DKP Kab./Kota																				
8	Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil Dalam Mengelola Ekosistem di Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Adaptasi Dampak Global Warming	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov. APBD Kab./Kota	DKP Prov. DKP Kab./Kota Disbudpar Prov Disbudpar Kab/Kota																				
9	Identifikasi nama Pulau dan Pendataan jumlah pulau-pulau kecil	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov.	DKP Prov, Biro Pemerintahan Umum																				
4	**Alur Laut**																							
4.1	**Alur Pelayaran**																							
1	Penetapan sistem alur pelayaran	Prov. Sumatera Utara	APBN, APBD Prov.	Dishub Prov																				
2	Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov.	Dishub Prov																				
3	Peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, LSM	Dishub, Polair																				
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran;	1. Labuhanbatu 2. Langkat 3. Deli Serdang 4. Serdang Bedagai 5. Batubara 6. Asahan 7. Medan 8. Labuhanbatu Utara 9. Sibolga 10. Tapteng 11. Nias Selatan 12. Nias 13. Gunung Sitoli 14. Nias Barat 15. Nias Utara 16. Madina	APBN, APBD Prov, APBD 16 Kab/Kota, LSM	Dishub Prov, Dishub 16 Kab./Kota																				
5	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran;		APBN, APBD Prov, APBD 16 Kab/Kota, LSM	Dishub Prov, Dishub 16 Kab./Kota																				
6	Pengembangan jalur pelayaran dan armada pelayaran		APBN, APBD Prov, APBD 16 Kab/Kota, LSM	Dishub Prov, Dishub 16 Kab./Kota																				
7	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.		APBN, APBD Prov, APBD 16 Kab/Kota, LSM	Dishub Prov, Dishub 16 Kab./Kota																				
8	Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran serta *invasive* spesies akibat limbah kapal		APBN, APBD Prov, APBD 16 Kab/Kota, LSM	Dishub Prov, Dishub 16 Kab./Kota																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4.2.	**Alur Pipa/Kabel Bawah Laut**																							
1	Sosialisasi zona alur pipa/kabel bawah laut	1. Langkat 2. Serdang Bedagai 3. Deli Serdang 4. Medan 5. Asahan 6. Batubara 7. Sibolga 8. Tapteng	APBD Provinsi	DKP Prov. BPMPSTP Prov																				
2	Penataan perizinan Alur Pipa /kabel bawah laut	1. Langkat 2. Serdang Bedagai 3. Deli Serdang 4. Medan 5. Asahan 6. Batubara 7. Sibolga 8. Tapteng	APBD Provinsi	DKP Prov. BPMPSTP Prov																				
3	Pengawasan, evaluasi dan pengendalian alur pipa/kabel bawah laut	1. Langkat 2. Serdang Bedagai 3. Deli Serdang 4. Medan 5. Asahan 6. Batubara 7. Sibolga 8. Tapteng	APBD Provinsi	DKP Prov. BPMPSTP Prov																				
4.3.	**Alur Biota**																							
1	Kajian identifikasi, alur, pola migrasi, dan tingkah laku jenis – jenis mamalia laut dan biota besar lainnya	Provinsi Sumatera Utara	APBN, APBD Prov, LSM	DKP Prov, DisLH Prov, Balitbang Prov, LIPI, LSM, Perguruan Tinggi, dan Unit Pengelola KKP																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Pelibatan dan peningkatan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai karakteristik mamalia laut dan biota besar lainnya	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov, APBD 17 Kab./Kota LSM	DKP Prov, DisLH Prov, Balitbang Prov, DKP Kab/Kota LIPI, LSM, Perguruan Tinggi, dan Unit Pengelola KKP																				
3	Pengembangan sistem monitoring alur migrasi penyu dan biota besar lainnya	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov LSM	DKP Prov, DisLH Prov, Balitbang Prov, LIPI, LSM, Perguruan Tinggi, dan Unit Pengelola KKP																				
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alur migrasi penyu dan biota besar lainnya	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov APBD 17 Kab./Kota LSM	DKP Prov., DKP 17 Kab./Kota, LSM, dan Unit Pengelola KKP																				
5	Integrasi dan mensinergikan alur penyu dan biota besar lainnya dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata dan pemanfaatan ruang laut lainnya	Provinsi Sumatera Utara	APBN APBD Prov LSM	DKP Prov, DisLH Prov, Balitbang Prov, LIPI, LSM, Perguruan Tinggi, dan Unit Pengelola KKP																				
5.	**Kawasan Strategis**																							
5.1	**Pengembangan dan Pengamanan Kawasan Strategis**																							
1	Pengembangan KSN	Provinsi Sumatera Utara	APBN	KKP dan Instansi Pusat Terkait																				
2	Pengembangan KS Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	APBD Prov	DKP Prov dan Instansi Prov Terkait																				
3	Pengamanan KSNT	Provinsi Sumatera Utara	APBN	TNI AL dan Instansi Pusat Terkait																				

No	Program Utama	Lokasi (Kecamatan/ Kabupaten)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5.2.	**Pengamanan dan Penyelamatan di Laut**																							
1	Pembangunan Pos POLAIR	Provinsi Sumatera Utara	APBN	POLAIR																				
2	Penambahan Personil POLAIR	Provinsi Sumatera Utara	APBN	POLAIR																				
3	Peningkatan Fasilitas Pos POLAIR	Provinsi Sumatera Utara	APBN	POLAIR																				

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003